

FK
FK-2
DIS.E.02/10
MIC
P

DISERTASI

PENGARUH STRUKTUR UANG BEREDAR TERHADAP STRUKTUR EKSPOR DAN STRUKTUR DEVISA SERTA PERTUMBUHAN PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR PERDAGANGAN DI INDONESIA



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

MICHAEL

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

**PENGARUH STRUKTUR UANG BEREDAR
TERHADAP STRUKTUR EKSPOR DAN STRUKTUR DEVISA
SERTA PERTUMBUHAN PENYERAPAN TENAGA KERJA
PADA SEKTOR PERDAGANGAN
DI INDOESIA**

DISERTASI

**Untuk memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Ilmu Ekonomi
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Telah dipertahankan di hadapan
Panitia Ujian Doktor Terbuka
Pada hari : Rabu
Tanggal : 22 November 2006
Pukul 10.⁰⁰ WIB**

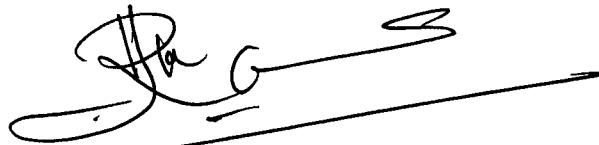
Oleh :

**MICHAEL
NIM. 099913654 D**

**LEMBAR PENGESAHAN
DISERTASI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL, 8 MEI 2008**

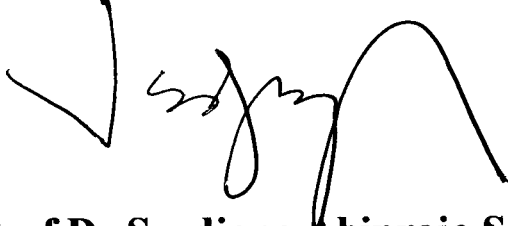
Oleh :

Promotor



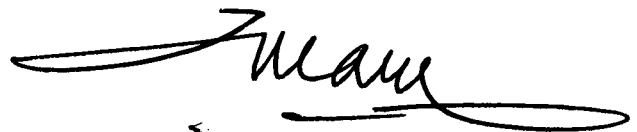
Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, S.E.
NIP. 130 355 369

Ko-Promotor I



Prof. Dr. Soedjono Abipraja, S.E.
NIP. 130445348

Ko-Promotor II



Prof. Dr. H. Imam Syakir, S.E.
NIP. 130675531

Telah Diuji Pada Ujian Tertutup
Tanggal 12 Juli 2006

PANITIA PENGUJI DISERTASI

Ketua : Prof. Dr. H. Effendie, S.E.

Anggota :

1. Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, S.E.
2. Prof. Dr. Soedjono Abipraja, S.E.
3. Prof. Dr. H. Imam Syakir, S.E.
4. Prof. Dr. Sri-Edi Swasono
5. Prof. Dr. H. Murdijanto Purbangkoro, S.E., S.U.
6. Dr. Solimun, Ir., M.S.

**Ditetapkan Dengan Surat Keputusan
Rektor Universitas Airlangga
Nomor : 5135/JO3/2006
Tanggal : 19 Juli 2006**

UCAPAN TERIMA KASIH

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Tuhan atas berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulisan disertasi ini yang merupakan satu dari beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pada Program Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa, untuk menyelesaikan pendidikan program doktor ini sangat banyak pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam memberikan bimbingan, arahan dan dorongan. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, S.E., Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga selaku Promotor. Keluasan ilmu dan wawasan, kesabaran dan kearifan beliau sebagai seorang ilmuan yang telah mengarahkan, membimbing dan mendorong saya untuk senantiasa belajar rendah hati tanpa kehilangan kepercayaan diri.

Prof. Dr. Soedjono Abipraja, S.E., Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga selaku Ko-Promotor I. Di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai teoritis yang memiliki wawasan luas dan kritis, tetapi masih meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan senantiasa mendorong penulis untuk segera menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan studi ini.

Prof. Dr. H. Imam Syakir, S.E., Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga selaku Ko-Promotor II. Meskipun dalam kesibukannya sebagai teoritis yang memiliki pengetahuan luas dan bijaksana, tetapi masih meluangkan waktu untuk mengarahkan dan mendorong penulis agar senantiasa belajar dan selalu bertindak lebih teliti dan hati-hati tidak patah semangat.

Rektor Universitas Airlangga Surabaya **Prof. Dr. H. Fasich, Apt.** dan mantan Rektor Universitas Airlangga Surabaya **Prof. Dr. Med. Puruhito, dr** dan **Prof. H. Soedarto, dr., DTM&H., Ph.D** yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya hingga selesai.

Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, **Prof. Dr. Muhammad Amin, dr.** dan mantan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga **Prof. Dr. H. Soedijono Tirtowidardjo, dr., Prof. Dr. Laba Mahaputera, Drh., M.Sc.** selaku Asisten Direktur I PPS UNAIR dan **Dr. Soenarjo, dr., M.S., M.Sc.** selaku Asisten Direktur II PPS UNAIR beserta seluruh staf pengajar dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan bantuan, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama belajar di Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Airlangga **Prof. Dr. H. Effendie, S.E.**, dan mantan (**Prof. Armijn Rangkuti, S.E.** dan **Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, S.E.**) yang dengan ketulusan, keikhlasan dan kedisiplinan yang tinggi, kearifan dalam mengarahkan

penulis sejak diterima hingga selesai mengikuti pendidikan doktor pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, S.E., selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk pada awal penulis mengikuti pendidikan doktor sampai masa-masa penyelesaian studi.

Prof. Dr. Koento Wibisono Siswomiharjo, Prof Dr. IBM Santika, S.E., Prof Dr. H.M. Harry Susanto, S.U., Prof. Dr. H. Imam Syakir, S.E., Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, S.E., Prof. Dr. H. Sarmanu, drh., M.S., Prof. Kuntoro, dr., MPH., Dr. PH., Prof. Budiman Chr., Drs.Ec., M.A., Ph.D., Prof. Dr. Murdijanto Purbangoro, S.E., SU., Dr. Agus Suman, DEA., Dr. H. Armanu Thoyib, M.Sc., staf pengajar pada program Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, yang telah meletakkan dasar-dasar teoritis yang menjadi bekal saya untuk memasuki jenjang keilmuan yang lebih baik sampai pada akhir proses penyelesaian disertasi ini.

Rektor Universitas Mulawarman **Prof. Dr. H. Arieffien Bratawinata, Ir., M.Agr.** dan mantan **Prof. H. Rachmad Hernadi, Ir., M.Sc.**, serta **Prof. H. Zamruddin Hasyid, Drs., S.U.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, dan mantan (**H. Darminto, Drs., M.S.**, dan **Prof. H. A. Waris, S.E.**) yang telah memberikan izin, kesempatan, mendorong serta membebaskan penulis dari tugas-tugas akademik untuk mengikuti pendidikan doktor di Universitas Airlangga.

Pimpinan Perpustakaan Bank Indonesia Jakarta, Badan Pusat Statistik Jakarta yang telah memberikan data pada saat penulis melakukan penelitian.

Manajemen PT. Badak LNG, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kota Besar Samarinda, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat yang telah membantu penulis dalam pemberian bea pendidikan sehingga meringankan dan memperlancar proses pendidikan yang saya jalani di Universitas Airlangga.

Dr. Solimun, Ir., M.S. dosen luar biasa pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang dengan kemampuan analisis kuantitatifnya telah membantu penulis menyelesaikannya setiap tahapan analisis dalam disertasi ini serta kawan-kawan angkatan tahun 1999/2000 Program Doktor Ilmu Ekonomi yang ikut memberikan sumbangan pemikiran tanpa pamrih guna suksesnya studi.

Kedua orang tua saya tercinta yang penuh dengan tanggungjawabnya telah mendidik, membesarkan, mendo'akan, memberi semangat dan bantuan materiil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan setiap tahap dari proses pendidikan dan cita-cita.

Kakak dan adik-adik yang selalu mendo'akan dan memberikan dorongan, bantuan moril dan materiil serta cinta kasih kepada penulis selama mengikuti pendidikan.

Istriku tercinta Erny Noverita, S.H., secara khusus mendampingi penulis sejak 20 Juli 1986 (dari studi S2 hingga S3) yang senantiasa mendo'akan, memberi dorongan, penuh pengertian, kesabaran, pengorbanan dan kesetiiaannya baik dalam suka maupun duka.

Anakku tersayang semata wayang **Nicholas Putra Prima** yang telah kekurangan kasih sayang dan perhatian selama berpisah dan ditinggal untuk mengikuti pendidikan.

Semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu yang dengan tulus ikhlas telah memberikan bantuan moril dan materiil serta mendo'akan untuk keberhasilan studi ini.

Akhir kata, dari lubuk hati yang paling dalam ini penulis senantiasa mendo'akan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati. Amin.

RINGKASAN

RINGKASAN

Pengaruh Struktur Uang Beredar Terhadap Struktur Ekspor Dan Struktur Devisa Serta Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Perdagangan Di Indonesia

Memasuki pertengahan tahun 1997 perekonomian Indonesia mengalami kondisi yang terburuk di antara krisis-krisis yang pernah dialami sebelumnya. Krisis rupiah yang terjadi disusul dengan krisis moneter dan berubah menjadi krisis ekonomi dengan membawa konsekuensi dan dampak bagi perekonomian Indonesia pada tahun-tahun berikutnya. Oleh sebab itu, diperlukan strategi kebijaksanaan ekonomi makro dan pemikiran yang komprehensif untuk menanggulangi masalah tersebut. Kebijakan moneter dengan instrumen uang beredar merupakan bagian integral dari kebijaksanaan ekonomi makro dijadikan pilihan dalam studi ini.

Tujuan umum studi ini adalah mengkaji secara mendalam dan menyeluruh pengaruh struktur uang beredar terhadap sasaran-sasaran kebijaksanaan moneter, terutama struktur ekspor dan struktur devisa serta pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang diharapkan menghasilkan saran penting dalam rangka memacu perkembangan dan pertumbuhan sasaran kebijaksanaan tersebut.

Studi ini dilakukan berdasarkan dukungan teori kebijaksanaan moneter, perdagangan internasional dan teori kesempatan kerja. Sedangkan analisis data dan pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis jalur (*Path Analysis Model*), yaitu model mengenai struktur hubungan langsung yang membentuk sekaligus menjelaskan kausalitas antara faktor yang terpilih.

Hasil analisis dengan menggunakan *t test* pada *Path Analysis* menunjukkan bahwa struktur uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur ekspor dengan koefisien jalur sebesar 0,725 dan $p\ value = 0,000 < \alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa jika jumlah uang beredar meningkat sebesar Rp 1 milyar, maka akan diikuti oleh peningkatan nilai ekspor sebesar 0,725 juta US \$. Struktur uang beredar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dengan koefisien jalur sebesar -0,831 dan $p\ value = 0,001 < \alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa kenaikan Rp 1 milyar jumlah uang beredar akan diiringi dengan penurunan 0,831 persen pertumbuhan tenaga kerja. Terhadap struktur devisa, struktur uang beredar berpengaruh nonsignifikan dengan koefisien jalur sebesar -0,164 dan $p\ value = 0,001 < \alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa jika jumlah uang beredar meningkat Rp 1 milyar, maka tidak diikuti kenaikan jumlah devisa. Selanjutnya ditemukan pula bahwa struktur ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur devisa dengan koefisien jalur sebesar 0,923 dan $p\ value = 0,000 < \alpha =$

0,05. Hal ini berarti bahwa jika ekspor meningkat sebesar 1 juta US \$, maka akan diikuti oleh peningkatan jumlah devisa sebesar 0,923 juta US \$. Terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, struktur devisa berpengaruh nonsignifikan dengan koefisien jalur sebesar 0,319 dan $p \text{ value} = 0,136 < \alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa kenaikan atau penurunan jumlah devisa tidak berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya struktur ekspor berpengaruh negatif dan nonsignifikan terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan di Indonesia.

Hasil analisis lain dalam studi ini mengindikasikan bahwa kebijaksanaan moneter pengendalian jumlah uang beredar sangat efektif sebagai paket stabilisasi ekonomi Indonesia dalam mempengaruhi perekonomian agregatif karena secara kelembagaan sebenarnya telah dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dengan independensinya menjadikannya sebagai *respectable central bank* mempunyai wewenang yang jelas dan tegas untuk menetapkan sasaran moneter di pasar uang dan bank di dalam negeri seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sejak tanggal 17 Mei tahun 1999 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

Kebijaksanaan moneter yang bersifat aktif atau akomodatif yang terintegrasi dalam kebijaksanaan ekonomi internasional dapat dijadikan pilihan

dalam upaya mendorong peningkatan nilai ekspor dan jumlah devisa serta pertumbuhan penyerapan tenaga kerja.

SUMMARY

The Influence of Circulating Money on the Export Value and the Amount of Foreign Exchange and the Growth of Employment Absorption in the Trading Sectors in Indonesia

In the mid of 1997, the economy of Indonesia was in the worst condition of all other previous economic crisis. The crisis in Indonesian currency was followed by monetary crisis which then turn to be an economic crisis that brought about a consequence and impact on the Indonesian economy in the subsequent years. Therefore, policy strategy on macro economy and comprehensive ideas are needed to overcome these problems. Monetary policy with the circulating money as its instrument which is an integral part of the macro economy policy becomes the choice of this study.

The general objective of this study is to provide a deep and total analysis on the influence of circulating money on the monetary policy targets, especially on the export value and on the amount of foreign exchange as well as on the growth of employment absorption which are expected to bring significant suggestions in the effort to push the development and the growth of policy targets.

This study was conducted based on the supporting theories of monetary policy, international trading, and job opportunity. Whereas, the data analysis and hypothesis testing were conducted by using Path analysis, a model that provides a relationship structure which forms and explains causality among the selected factors.

Based on the t-test of Path Analysis, the results of the analysis reveal that the amount of circulating money has positive and significant influences on the export value with the split coefficient of 0.725 and $p \text{ value} = 0.000 < \alpha = 0.05$. This means that if the amount of circulating money increases up to Rp 1 billion, it will be followed by the increase in the export value as amount of 0.725 million US\$. The amount of circulating money has negative and significant influences on the growth of employment absorption with the split coefficient of -0.831 and $p \text{ value} = 0.001 < \alpha = 0.05$. This means that the increase of Rp 1 billion circulating money will be followed by the decrease of 0.831 % of employment growth. In terms of the amount of foreign exchange, the amount of circulating money has insignificant influence with the coefficient of -0.164 and $p \text{ value} = 0.001 < \alpha = 0.05$. This means that if the amount of circulating money increases up to Rp 1 billion, it will not be followed by the amount of foreign exchange. Furthermore, it is also found that the export value has positive and significant influences on the amount of foreign exchange with the coefficient of 0.923 and $p \text{ value} = 0.000 < \alpha = 0.05$. This means that if the export value increases up to US\$ 1 million, it will be followed by the increase in the amount of foreign exchange as amount of US\$0.923 million. In terms of the growth of employment absorption, it is found that the amount of foreign exchange has insignificant influences with the coefficient of 0.319 and $p \text{ value} = 0.136 > \alpha = 0.05$. This means that the increase or the decrease in the amount of foreign exchange does not have any influence on the increase and decrease in the growth of employment absorption in the trading sectors in Indonesia.

Other findings in this study indicate that the monetary policy control on the amount of circulating money is very effective as the package of Indonesian economy stabilization to influence the aggregative economy. Institutionally, the Bank of Indonesia has implemented this package and with its independency it has become a respectable central bank which has obvious and firm authorities in determining monetary targets in the exchange markets and in the domestic banks as regulated in the Republic of Indonesia Law Number 23/ 1999 concerning the Bank of Indonesia. Since May 17, 1999, this law has become the substitution of the previous Law Number 13/1968 concerning the Central Bank.

Monetary policy which is active or accommodative and integrated with the international economy policies can be a choice in the effort to push the development of export value and the amount of foreign exchange as well as the growth of employment absorption.

ABSTRACT

ABSTRACT

The Influence of Circulating Money Structure on the Export Structure and the Structure of Foreign Exchange and the Growth of Employment Absorption in the Trading Sectors in Indonesia

This study aims at providing a deep and total analysis on the influence of circulating money structure on the export structure and the foreign exchange as well as the growth of employment absorption in the trade, hotel and restaurant sectors in Indonesia. It applies method of Path Analysis, a model that provides a relationship structure which forms and explains causality among the selected factors.

The result of this study reveals that the structure of circulating money has positive and significant influences on the export structure; negative significant influences on the growth of employment absorption; and insignificant influences on the structure of foreign exchange. Furthermore, it is found that the export structure has positive and significant influences on the structure of foreign exchange; the structure of foreign exchange has insignificant influences on the growth of employment absorption; and the export structure has negative and insignificant influences on the growth of employment absorption in the trading sectors in Indonesia.

The general conclusion of the study is that the circulating money is one of the effective instruments to control the effects of monetary policy targets, especially on the development of export and the growth of employment absorption.

Keywords: Circulating money structure, export structure, foreign exchange structure and job opportunity.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
Judul Sampul Dalam.....	i
Prasyarat Gelar.....	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Penetapan Panitia Penguji.....	iv
Ucapan Terima Kasih.....	v
Ringkasan.....	x
Summary.....	xiv
Abstract.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	28
1.3. Tujuan Studi.....	39
1.4. Manfaat Studi.....	30
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	31
2.1. Teori Kebijakan Moneter.....	31
2.1.1. Instrumen Kebijakan Moneter.....	36
2.1.2. Sasaran Kebijakan Moneter.....	39
2.1.3. Efektivitas Kebijakan Moneter.....	41



2.1.4. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter.....	47
2.2. Teori Inflasi Dan Deflasi.....	74
2.3. Hubungan Antara Inflasi Dan Tingkat Bunga.....	83
2.4. Teori Perdagangan Internasional.....	87
2.4.1. Teori Klasik Kemanfaatan Absolut.....	89
2.4.2. <i>The Proportional Factors Theory</i> Dari Eli Heckscher Dan Bertil Ohlin.....	90
2.4.3. <i>Paradox</i> Leontief.....	94
2.4.4. Teori Stolper Dan Samuelson (S-S).....	95
2.4.5. Teori <i>Opportunity Cost</i> Dari G. Herberier.....	95
2.4.6. <i>Current Theory of International Trade</i>	97
2.5. Teori Perdagangan Baru: Prebisch-Singer <i>Thesis</i> Dan Model Model Alternatif Perdagangan Internasional.....	98
2.6. Teori Neraca Pembayaran Internasional.....	100
2.6.1. Neraca Transaksi Berjalan (<i>Balance of Current Account</i>).....	104
2.6.2. Neraca Transaksi Kapital (<i>Balance of Capital Account</i>).....	106
2.6.3. Neraca Rekening Kontan (<i>Balance of Cash Account</i>).....	108
2.7. Kebijakan Moneter Dalam Perdagangan Internasional.....	108
2.8. Teori Basis Dan NonBasis.....	111
2.9. Teori Penentuan Daya Saing.....	113
2.9.1. Teori Keunggulan Absolut.....	113
2.9.2. Teori Keunggulan Komparatif.....	113
2.10. Kebijakan Moneter Dan Teori Kesempatan Kerja.....	114

2.11. Teori <i>Purchasing Power Parity</i> (PPP), REER Dan RER.....	119
2.12. Pendapatan Nasional.....	122
2.13. Penelitian Terdahulu.....	128
2.13.1. Arief (1991).....	128
2.13.2. Cole (1976).....	130
2.13.3. Aghevli (1977).....	131
2.13.4. Nasution (1985).....	132
2.13.5. Gupta Dan Moazzami (1989).....	133
2.13.6. Sugiyanto (1991).....	134
2.13.7. Koot Dan Walker (1979).....	135
2.13.8. Friedman Dan Meiselman (1963).....	137
2.13.9. Bautista (1981).....	137
2.13.10. Suardhini Dan Miranda (1997).....	140
2.13.11. Jung Dan Payton (1985).....	142
2.13.12. Emery (1982).....	142
BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	145
3.1. Kerangka Konseptual.....	145
3.2. Hipotesis.....	148
BAB 4 METODE PENELITIAN.....	150
4.1. Rancangan Penelitian.....	150
4.2. Variabel Penelitian.....	151
4.2.1. Klasifikasi Variabel Penelitian.....	151
4.2.2. Operasionalisasi Variabel Dan Pengukuran.....	152

4.3. Jenis Dan Sumber Data.....	155
4.4. Teknik Pengumpulan Data.....	155
4.5. Metode Analisis.....	156
BAB 5 ANALISIS HASIL STUDI.....	168
5.1. Data Penelitian.....	168
5.1.1. Struktur Dan Perkembangan Uang Beredar Di Indonesia.....	168
5.1.2. Perkembangan Tingkat Bunga Pasar Uang Antar Bank Indonesia.....	172
5.1.3. Struktur Dan Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia Dan Negara-Negara Inter-ASEAN.....	177
5.1.4. Nilai Tambah Ekspor NonMigas Indonesia Dan Negara Inter-ASEAN.....	187
5.1.5. Perkembangan Tingkat Inflasi Di Indonesia.....	187
5.1.6. Struktur Dan Perkembangan Jumlah Devisa Indonesia.....	189
5.1.7. Jumlah Dan Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Perdagangan.....	194
5.1.8. Produk Domestik Bruto.....	197
5.2. Analisis Dan Hasil Studi.....	198
5.2.1. Deskripsi Variabel Penelitian.....	198
5.2.2. Analisis Faktor Konfirmatori.....	203
5.2.3. Analisis Jalur.....	206
BAB 6 PEMBAHASAN.....	212
6.1. Pengaruh Struktur Uang Beredar Terhadap Struktur Ekspor...	212

6.2. Pengaruh Struktur Uang Beredar Terhadap Struktur Devisa....	226
6.3. Pengaruh Struktur Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja.....	229
6.4. Pengaruh Struktur Ekspor Terhadap Struktur Devisa.....	236
6.5. Pengaruh Struktur Devisa Terhadap Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja.....	264
6.6. Pengaruh Struktur Ekspor Terhadap Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja.....	275
BAB 7 PENUTUP.....	280
7.1. Kesimpulan.....	280
7.2. Saran.....	283
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	287
LAMPIRAN.....	298

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Selama PJPT I.....	9
Tabel 1.2 : Pangsa Ekspor Indonesia Ke Sepuluh Negara Tujuan Utama (%) Tahun 1993-1995 Sampai Tahun 2001	18
Tabel 1.3 : Pangsa Ekspor Beberapa Negara Asia (%) Tahun 1969-1979,1980-1985,1986-1990,1991-1993,1994-1997 Dan Tahun 1998.....	19
Tabel 1.4 : Pertumbuhan Ekspor Indonesia (%) Tahun 2000-2002	20
Tabel 2.1 : Mekanisme Moneter Dalam Perdagangan Internasional.....	109
Tabel 5.1 : Struktur Dan Perkembangan Jumlah Uang Beredar Di Indonesia Dari Tahun 1969-2003.....	172
Tabel 5.2 : Perkembangan Tingkat Bunga Pasar Uang Antar Bank Di Indonesia Dari Tahun 1969-2003.....	176
Tabel 5.3 : Struktur Dan Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia Dari Tahun 1969-2003.....	178
Tabel 5.4 : Perkembangan Rata-Rata Nilai Tambah Ekspor Nonmigas Indonesia Menurut 10 Jenis Komoditas Utama Yang Handal Tahun 1999-2003.....	182
Tabel 5.5 : Perkembangan Rata-Rata Nilai Tambah Ekspor Nonmigas Malaysia Menurut 10 Jenis Komoditas Utama Yang Handal Tahun 1999-2003.....	183
Tabel 5.6 : Perkembangan Rata-Rata Nilai Tambah Ekspor Nonmigas Phillipina Menurut 10 Jenis Komoditas Utama Yang Handal Tahun 1999-2003.....	183
Tabel 5.7 : Perkembangan Rata-Rata Nilai Tambah Ekspor Nonmigas Singapura Menurut 10 Jenis Komoditas Utama Yang Handal Tahun 1999-2003.....	184

Tabel 5.8 : Perkembangan Rata-Rata Nilai Tambah Ekspor Nonmigas Phillipina Menurut 10 Jenis Komoditas Utama Yang Handal Tahun 1999-2003.....	184
Tabel 5.9 : Rekapitulasi Perkembangan Rata-Rata Nilai Tambah 10 Jenis Komoditas Dan Nilai Ekspor NonMigas Negara-Negara ASEAN Tahun 1999-2003.....	186
Tabel 5.10 : Perkembangan Tingkat Inflasi Di Indonesia Dari Tahun 1969-2003.....	189
Tabel 5.11 : Struktur Dan Perkembangan Jumlah Devisa Indonesia Dari Tahun 1969-2003.....	192
Tabel 5.12 : Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Perdagangan Di Indonesia Tahun 1969-2003.....	196
Tabel 5.13 : Perkembangan Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha Dari Tahun 1999-2003 (Milyar Rp) Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000.....	197
Tabel 5.14. Rata-Rata Per Tahun Dari Tahun 1969-2003 Setiap Indikator Dari Variabel Jumlah Uang Beredar.....	199
Tabel 5.15 : Rata-Rata Per Tahun Dari Tahun 1969-2003 Setiap Indikator Dari Variabel Nilai Ekspor.....	200
Tabel 5.16 : Rata-Rata Per Tahun Dari Tahun 1969-2003 Setiap Indikator Dari Variabel Cadangan Devisa.....	201
Tabel 5.17 : Rata-Rata Per Tahun Dari Tahun 1969-2003 Setiap Indikator Dari Variabel Penyerapan Tenaga Tenaga Kerja Pada Sektor Perdagangan.....	203
Tabel 5.18 : <i>Loading Factor</i> Indikator Dari Variabel Struktur Uang Beredar.....	204
Tabel 5.19 : <i>Loading Factor</i> Indikator Dari Variabel Struktur Ekspor.....	205
Tabel 5.20 : <i>Loading Factor</i> Indikator Dari Variabel Jumlah Devisa.....	206
Tabel 5.21 : Hasil Pengujian Asumsi Linieritas.....	207
Tabel 5.22 : Hasil Pengujian Hipotesis.....	208

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Kurve Ekspansi Moneter Dengan Kurve IS Relatif Datar Dan Curam	41
Gambar 2.2 : Efektivitas Ekspansi Dan Kontraksi Moneter Dan Penurunan Kurva LM	42
Gambar 2.3 : <i>Possible Adjustment Paths of Rate of Change in Nominal Income</i>	45
Gambar 2.4 : Kurve Permintaan Uang Untuk Transaksi	54
Gambar 2.5 : Kurve Permintaan Uang, Bond, Uang Dan <i>Bond</i> Berdasarkan Tingkat Bunga <i>Indifferent</i> Dan <i>Different</i>	56
Gambar 2.6 : Kurve Permintaan Uang Dengan Tingkat Bunga Kritis...	58
Gambar 2.7 : Kurve Permintaan Uang Untuk Spekulasi.....	60
Gambar 2.8 : <i>Liquidity Trap Curve</i>	61
Gambar 2.9 : Kurve Permintaan Uang Untuk Transaksi Dan Spekulasi Pada <i>Liquidity Trap</i>	63
Gambar 2.10: Kurve Biaya Transaksi	64
Gambar 2.11: Kurve Keseimbangan Antara Tingkat Bunga Dan Dana Investasi.....	86
Gambar 2.13 : Diagram Mekanisme Moneter <i>Monetarist</i> Dalam Perdagangan Internasional.....	110
Gambar 2.14 : Kurve Phillips Hubungan Antara Inflasi Dan Pengangguran.... 122	
Gambar 3.1 : Kerangka Proses Berpikir.....	116
Gambar 3.2 : Kerangka Konseptual.....	145
Gambar 5.1 : Diagram Jalur Hasil Pengujian Hipotesis.....	209

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Hasil Analisis Deskriptif.....	298
Lampiran 2. Hasil Analisis Faktor Konfirmatori.....	301
Lampiran 3. Hasil Pengujian Asumsi Linieritas.....	304
Lampiran 4. Hasil Analisis Jalur.....	307

BAB 1

PENDAHULUAN

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Struktur uang beredar sebagai *monetary aggregate* merupakan salah satu sasaran menengah kebijaksanaan moneter yang sangat penting dari kebijaksanaan ekonomi makro, karena bertambah atau berkurangnya jumlah uang beredar di masyarakat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan akhir kebijaksanaan moneter, terutama dalam rangka mencapai stabilitas ekonomi dan rehabilitasi ekonomi di dalam negeri.

Sebelum Rencana Pembangunan Lima Tahun I (REPELITA I) dimulai, pemerintah Republik Indonesia sebenarnya telah melakukan kebijaksanaan pemulihan stabilitas ekonomi serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri. Sasaran dari kebijaksanaan tersebut terutama adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah dan menghidupkan kembali kegiatan produksi di berbagai sektor, termasuk ekspor yang sempat mengalami stagnasi pada masa orde lama.

Pada saat Pembangunan Lima Tahun I (PELITA I) dimulai, pemerintah Republik Indonesia menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) secara bertahap dengan target-target yang jelas, sehingga tujuan jangka panjang pembangunan ekonomi Indonesia yang dicanangkan pada masa orde baru, yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat tercapai.

Dampak Rencana Pembangunan Lima Tahun I (REPELITA I) dan repelita-repelita berikutnya terlihat pada indikator makro ekonomi Indonesia.



Proses pembangunan ekonomi di Indonesia berjalan sangat cepat dengan laju pertumbuhan cukup tinggi rata-rata 6 persen – 7 persen per tahun (Lembaga Penelitian IBII, 2001), jauh lebih baik daripada selama orde lama dan juga relatif lebih tinggi dari laju rata-rata pertumbuhan ekonomi kelompok LDCs. Kondisi pembangunan ekonomi di Indonesia mengalami proses yang spektakuler pada tingkat makro (agregat), indikator-indikator ekonomi makro yang dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia, tiga di antaranya yang umum digunakan adalah pendapatan nasional per kapita, laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja per tahun.

Pada tahun 1968 pendapatan nasional per kapita masih sangat rendah, hanya sekitar 60 US\$, dan naik menjadi 70 US\$ pada tahun 1969 (Bank Indonesia, 1970/1971). Meskipun ini masih jauh lebih rendah dibandingkan pendapatan nasional dari negara-negara berkembang (LDCs) lain pada saat itu, namun dua puluh tahun kemudian, yaitu pada tahun 1989 pendapatan per kapita Indonesia naik menjadi 500 US\$, dan pada tahun 1994 meningkat secara drastis menjadi 900 US\$ dengan laju pertumbuhan rata-rata 4,4 persen dalam periode 1965-1989 dan 5,3 persen dalam periode 1980-1989 (Lembaga Penelitian IBII, 2001). Angka pertumbuhan ini mengalami kenaikan tajam pada tahun 1990-an, yaitu mencapai 7,48 persen tahun 1994 dan 8,07 persen pada tahun 1995. Tingkat pertumbuhan ini ternyata telah melampaui target pertumbuhan rata-rata Pembangunan Lima Tahun VI (PELITA VI), yaitu 7,1 persen (Lembaga Penelitian IBII, 2004).

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia selama periode 1960-1966 yang hanya tumbuh rata-rata per tahun 1,90 persen dibandingkan rata-rata di atas 6 persen selama periode 1966-1978. Secara sektoral laju pertumbuhan *output* di sektor industri meningkat drastis dibandingkan sebelumnya. Dalam periode 1968-1973 sektor tersebut mengalami laju pertumbuhan rata-rata per tahun 13 persen dibandingkan hanya 1,9 persen selama periode 1960-1966 (Lembaga Penelitian IBII, 2002a).

Perhitungan yang dilakukan Anwar pada tahun 1987 memperlihatkan persentase Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang berasal dari sektor industri pengolahan, terutama yang berasal dari industri manufaktur meningkat setiap tahun, dari 8 persen (atas dasar harga berlaku) atau 7,6 persen (atas dasar harga konstan) pada tahun 1960 menjadi 12 persen lebih (atas dasar harga berlaku) atau 15 persen lebih (atas dasar harga konstan) pada tahun 1983 (Tambunan, 2001b: 23).

Thomas, Panglaykim dan Arndt selanjutnya menegaskan bahwa “terlampauinya target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat itu disebabkan karena proses industrialisasi dalam skala besar sehingga terjadi *trickle down effect* di dalam negeri” (Tambunan, 2001b: 21).

Memasuki awal tahun pertama dimulainya PELITA I (1969) penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan dalam arti luas (perdagangan besar, eceran, hotel dan restoran) berjumlah 4.619.116 tenaga kerja. Meskipun memperlihatkan perkembangan yang masih rendah dibandingkan jumlah angkatan kerja pada tahun yang sama, namun dalam kurun waktu sepuluh tahun berikutnya (1979)

penyerapan tenaga kerja pada sektor ini memperlihatkan peningkatan yang sangat tajam yaitu sebesar 65,85 persen atau berjumlah 2.395.098 tenaga kerja dengan pertumbuhan rata-rata 6,6 persen per tahun. Demikian pula dalam perkembangan berikutnya, yaitu pada akhir tahun 2003 jumlah penyerapan tenaga kerja pada sektor ini meningkat tajam mencapai jumlah 16.845.995 tenaga kerja, meskipun terjadi penurunan penyerapan dibanding satu tahun sebelumnya (2002), namun penurunan ini masih relatif kecil yaitu hanya 5,33 persen (DepnakerTrans RI, 2005 [data diolah]).

Jika dicermati secara teliti ternyata bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia pada Pembangunan Lima Tahun I (PELITA I) yang lalu tidak saja disebabkan karena kemampuan dalam menyusun rencana, strategi dan implementasi kebijaksanaan ekonomi, tetapi juga disebabkan karena penerimaan ekspor yang sangat besar dari minyak, terutama pada periode krisis atau *oil boom* pertama tahun 1973-1974.

Berdasarkan kondisi yang diuraikan di atas, tidak ada yang meragukan bahwa perekonomian Indonesia telah tumbuh dengan cepat, meskipun mengalami masa resesi pada awal sampai pertengahan tahun 1980, dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 2,5 persen per tahun, ekonomi Indonesia telah tumbuh rata-rata di atas 5 persen setelah tahun 1987 sampai dengan tahun 1994 yang lalu (Lembaga Penelitian IBII, 2001). Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cepat ini, di samping ditunjang oleh perkembangan ekspor komoditas nonmigas juga ditopang oleh perkembangan ekspor migas.

Penelitian yang dilakukan oleh *Institute for Management Development* (IMD) dalam Hamid dan Anto (1997) memprediksi bahwa:

“Dalam perkembangan berikutnya, kinerja ekonomi internasional Indonesia mengalami penurunan. Posisi ekonomi internasional Indonesia berada pada strata bawah, bahkan di bawah beberapa negara tetangga dekat, yaitu dengan menempatkan Indonesia pada peringkat 33 pada tahun 1995, dan kemudian turun menjadi 41 pada tahun 1996 dalam daya saing secara keseluruhan. Peringkat daya saing Indonesia ini tampak tertinggal jauh dibandingkan dengan beberapa negara Asia lainnya, bahkan dengan sesama anggota ASEAN.”

Bertitik tolak dari penelitian tersebut, upaya pemerintah untuk memperbaiki kinerja perdagangan internasional Indonesia dalam rangka mempertahankan nilai ekspor dan jumlah devisa Indonesia yang lebih tinggi, dilakukan dengan cara memproteksi perdagangan luar negeri dari berbagai hambatan, baik hambatan internal maupun hambatan eksternal dengan berbagai kebijaksanaan makro ekonomi.

Menurut Iswardono (1994), hambatan internal yang sering mengganggu kinerja ekonomi di Indonesia secara internasional dalam pelaksanaan kebijaksanaan moneter di Indonesia meliputi:

“Tingkat monetisasi yang rendah, jasa perbankan dalam negeri yang belum luas, teknologi perbankan yang belum canggih, pasar uang dalam negeri yang belum berkembang, piranti moneter yang belum efektif dan sistem devisa yang bebas. Sedangkan hambatan eksternal meliputi perkembangan ekonomi dunia yang tidak menentu, nilai tukar mata uang yang tidak menentu dan harga komoditas ekspor yang rendah”.

Pada putaran Kennedy ketika pemotongan-pemotongan tarif diberlakukan sejak tahun 1967, hambatan-hambatan perdagangan bukan tarif justru muncul sebagai masalah utama dalam perdagangan internasional. Sejak awal tahun 1970-

an, hambatan-hambatan perdagangan bukan tarif bahkan tampak semakin menguat. Seperti yang telah diperkirakan sebelumnya, sehingga Robert Mundell dan J. Marcus Fleming menegaskan bahwa:

“Kebijaksanaan moneter merupakan instrumen yang paling utama dari manajemen permintaan terhadap perdagangan internasional karena memiliki dampak atas neraca internal atau neraca pembayaran dan neraca eksternal atau permintaan agregat” (Lindert dan Kindleberger, 1995: 160 dan 518).

Kebijaksanaan moneter dan kebijaksanaan ekonomi pada umumnya selalu dikaitkan dengan cara menggunakan atau menampilkan instrumen kebijaksanaan yang pasti agar dicapai suatu target atau sasaran tertentu, baik sasaran antara maupun target akhir suatu kebijaksanaan. Ada 2 (dua) persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu: **Pertama**, perubahan dalam instrumen kebijaksanaan harus mempunyai pengaruh yang dapat diramalkan secara sempurna pada tujuannya. **Kedua**, pengaruh dari variabel yang lain pada tujuan yang ditetapkan dapat diperkirakan secara tepat pada setiap waktu.

Pada umumnya kebijaksanaan yang diimplementasikan untuk suatu tujuan memerlukan tenggang waktu (*time lag*). Pada saat kebijaksanaan akan diimplementasikan pada suatu masalah (*recognition lag*), dan setelah diputuskan menggunakan suatu alat kebijaksanaan dalam implementasinya juga memerlukan waktu (*implementation lag*) serta dampak setelah kebijaksanaan tersebut diimplementasikan juga memerlukan tenggang waktu (*impact lag*). Dengan memusatkan perhatian pada dampak yang mungkin terjadi, otorita moneter dapat melakukan kebijaksanaan ekspansi maupun kontraksi moneter jika diperlukan.

Pembangunan Lima Tahun I (PELITA I) yang dilaksanakan sejak 1 April 1969 hingga akhir Pembangunan Lima Tahun V (PELITA V) Maret 1994 yang lalu, jika dicermati maka terdapat empat kelompok kebijaksanaan utama yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. **Pertama**, kelompok kebijaksanaan ekonomi makro, yang mencakup kebijaksanaan anggaran berimbang dengan mengkaitkan bantuan luar negeri, kebijaksanaan moneter, kebijaksanaan perdagangan luar negeri dan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. **Kedua**, perombakan struktur ekonomi dari pola ekonomi penghasil bahan mentah menjadi ekonomi industri penghasil bahan jadi. **Ketiga**, kebijaksanaan kependudukan dengan mengkaitkan harapan hidup. **Keempat**, kebijaksanaan stabilitas politik untuk menjamin pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan berbagai pengalaman masa lalu sejak mulai dilaksanakan Pembangunan Lima Tahun I (PELITA I) hingga berakhir pada Pembangunan Lima Tahun VI (PELITA VI) dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJPT II), jika dicermati kembali secara teliti maka ditemukan banyak faktor yang menunjang perkembangan maupun penghalang laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam melaksanakan Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT I), negara menjadi investor utama, baik dalam proyek-proyek infrastruktur maupun dalam program ekonomi lainnya seperti program sosial-ekonomi dan program Inpres. Keadaan tersebut dipastikan tetap masih mempunyai kelemahan karena pemerintah memainkan peranan yang dominan sehingga partisipasi dan kemampuan swadaya masyarakat menjadi lemah dan pemerintah lebih berpihak

kepada modal asing dan golongan masyarakat yang bermodal kuat. Proyek dan program tersebut dapat terlaksana karena ditunjang oleh Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) No. 1 Tahun 1967 dan kemudahan masuknya modal asing dengan peranan IGGI (*Inter Government Group on Indonesia*) dari kelompok negara-negara kapitalis, di antaranya Jepang, Perancis, Amerika yang diketuai oleh Belanda. Kelompok ini berperan untuk menjamin kredit internasional dapat mengalir secara teratur. IGGI ini kemudian diganti oleh CGI (*Consultative Group on Indonesia*).

Dengan adanya bantuan dan kebijaksanaan tersebut pembangunan ekonomi Indonesia berkembang dari negara berkembang berpendapatan rendah menjadi negara berkembang berpendapatan menengah. Sebagai gambaran, dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT I) pertumbuhan ekonomi Indonesia per tahun relatif cukup tinggi mencapai rata-rata sekitar 6,6 persen seperti tertera dalam Tabel 1.1 pada halaman 9.

Berdasarkan tabel tersebut dan jika dirinci per Pelita, maka terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada Pelita I, yaitu mencapai 8,5 persen dan jauh lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama PJPT I.

Pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut diiringi dengan keberhasilan pengendalian tingkat pertumbuhan penduduk ke tingkat yang relatif rendah. Hal ini mempunyai arti bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan penduduk dari berbagai strata masyarakat.

Tabel 1.1
PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA
SELAMA PJPT I

Pelita / Periode	Pertumbuhan (%)
I. 1970 – 1974	8,5
II. 1975 – 1979	7,2
III. 1980 – 1984	6,0
IV. 1985 – 1989	4,5
V. 1990 – 1994	6,9
Rata-rata Pertumbuhan	6,6

Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia (BPS 1975, 1980, 1985, 1990, 1995 [data diolah])

Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu sejak tahun 1991 struktur perekonomian Indonesia telah bergeser dari dominasi sektor pertanian ke sektor industri pengolahan. Transformasi ini mengindikasikan kecenderungan mengecilnya peranan sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2000 peranan sektor pertanian 17,23 persen menurun di tahun 2001 menjadi 16,67 persen dan meningkat di tahun 2002 sebesar 17,09 persen, kemudian tahun 2003 kembali menurun menjadi 16,58 persen (Laporan Perekonomian Indonesia, BPS, 2004 [data diolah]).

Pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) yang berasal dari sektor industri pengolahan didominasi oleh sub-sektor industri bukan migas, khususnya industri makanan, minuman dan tembakau. Dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sub-sektor industri nonmigas, industri makanan, minuman dan tembakau memiliki andil terbesar yaitu sebesar 11,38 persen pada tahun 2003,

sedang sub-sektor di luar industri tersebut masing-masing kontribusinya kurang dari 4,00 persen.

Dalam periode pasca Pembangunan Lima Tahun VI (PELITA VI), pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2003 yang ditunjukkan oleh Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan tahun 1993 tampak ada sedikit peningkatan yaitu sebesar 4,10 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 3,69 persen. Gambaran ini memperlihatkan ekonomi Indonesia masih belum bergairah akibat dampak dari keadaan krisis secara menyeluruh. Walaupun terjadi pertumbuhan yang lamban namun jauh lebih baik bila dibandingkan masa puncak krisis pada tahun 1998 dan tahun 1999. Meskipun demikian, secara sektoral seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2003.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tanpa migas pada tahun 2003 meningkat yaitu 4,60 persen dari 4,09 persen pada tahun 2002. Pertumbuhan sebesar 4,60 persen pada tahun 2003 tersebut, lebih tinggi dari Produk Domestik Bruto (PDB) secara total. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya sektor-sektor di luar migas dalam perekonomian nasional. Persentase ini akan lebih besar lagi jika migas ikut diperhitungkan di dalamnya. Dengan demikian sehingga cukup beralasan jika kebijaksanaan ekonomi Indonesia dewasa ini tetap lebih diarahkan pada sektor riil, yaitu pada sektor perdagangan internasional.

Memasuki tahun kedua PELITA I, yaitu tahun 1970 sektor perdagangan Indonesia (dalam arti luas) menyumbang Rp 35.394,9 milyar terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan harga konstan tahun 2000 dan ini terus mengalami peningkatan secara drastis sepanjang tahun hingga

akhir tahun 2003, yaitu mencapai Rp 256.299,5 milyar. Peningkatan ini terjadi seiring dengan peningkatan total Pendapatan Domestik Bruto di semua lapangan usaha dalam kurun waktu tersebut.

Dalam PELITA V (1990-1994) terlihat pula bahwa, sektor perdagangan Indonesia mengalami peningkatan sehingga sektor ini mampu menduduki urutan kedua terbesar sumbangannya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia setelah industri pengolahan. Hal ini berarti bahwa sektor perdagangan (perdagangan, hotel dan restoran) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam memacu percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga dapat dipastikan akan membawa dampak positif terhadap berbagai bidang ekonomi, termasuk di bidang ketenagakerjaan (penyerapan tenaga kerja) pada sektor tersebut.

Dalam setiap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah Indonesia selalu melakukan tindakan revisi atas asumsi-asumsi yang digunakan. Dengan demikian tampak bahwa secara umum indikator ekonomi makro pada tahun 2003 sedikit lebih baik daripada asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2001 dengan prospek pertumbuhan ekonomi 3,5 persen (tahun 2001), 5 persen (proyeksi dilakukan pada bulan September tahun 2001 untuk ramalan tahun 2002), dan 4 persen (proyeksi dilakukan pada bulan Oktober tahun 2001 untuk ramalan tahun 2002) (Lembaga Penelitian Ekonomi-IBII [Makro Ekonomi Indonesia], 2002b:23). Setahun berikutnya (tahun 2003), Pertumbuhan Produk

Domestik Bruto (PDB) Indonesia mengalami peningkatan mencapai 4,5 persen (Lembaga Penelitian Ekonomi-IBII [Makro Ekonomi Indonesia], 2004: 151).

Sebagai satu negara dari beberapa negara di Asia Pasifik, Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, kecuali pada saat terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998. Berdasarkan laporan Bank Dunia, beberapa negara ASEAN memperlihatkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN secara keseluruhan mencapai 4,4 persen pada tahun 2002, meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 3,2 persen.

Malaysia yang merupakan negara serumpun dan memiliki geografis yang sama dengan Indonesia pada tahun 2002 mengalami pertumbuhan ekonomi sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia, yaitu sebesar 4,1 persen. Perekonomian Philipina tumbuh sebesar 4,4 persen, Thailand 5,3 persen, Kamboja 5,5 persen, Myanmar 5,0 persen, Laos PDR 5,9 persen dan Vietnam memiliki pertumbuhan yang paling tinggi di antara negara ASEAN lainnya, yaitu sebesar 7,0 persen. Sementara Singapura dan Brunei yang mempunyai pendapatan per kapita tertinggi di kawasan ASEAN justru pertumbuhannya terendah, yaitu masing-masing-masing 2,3 persen dan 3,2 persen.

Berdasarkan laporan triwulan III, 26 Juli 2001, Nomura *Research Institute* (NRI) memberikan proyeksi untuk perekonomian Indonesia dengan *economic growth* 3,8 persen (tahun 2001) dan 5,2 persen (tahun 2002) (*Asean Economic Outlook, July 2001*). Di samping itu, berdasarkan laporan BPS tahun 2004, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita penduduk Indonesia tahun 2000 sebesar

Rp 6.145.000, tahun 2001 sebesar Rp 7.026.000 dan tahun 2002 sebesar Rp 7.597.000, kemudian untuk tahun 2003 sebesar Rp 8.304.000, berarti ada kenaikan sekitar 9,31 persen terhadap tahun sebelumnya. Demikian halnya Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita penduduk Indonesia pada tahun 2000 sebesar Rp 5.697.000, tahun 2001 sebesar Rp 6.733.000, tahun 2002 sebesar Rp 7.340.000 dan tahun 2003 sebesar Rp 7.934.000 atau naik sekitar 8,09 persen dari satu tahun sebelumnya.

Kenaikan pendapatan per kapita tersebut, di samping tidak terlepas dari pengaruh meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB) juga dimungkinkan dari meningkatnya pembangunan industri manufaktur pada Produk Domestik Bruto (PDB) yang membawa Indonesia ke jenjang negara industri, berkat penerapan landasan fundamental kebijaksanaan ekonomi makro yang kuat. Pada tahun 1970 Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berdasarkan harga konstan mencapai Rp 77.806,00 milyar, 8,61 persen di antaranya atau Rp 6.701,00 milyar disumbang sektor industri pengolahan dan angka ini terus meningkat hingga tahun 1990. Sumbangan sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun tersebut mencapai Rp 55.725,20 milyar atau sebesar 20,49 persen dan pada tahun tersebut pula Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai Rp 271.968,10 milyar.

Dalam proses pembangunan sebelumnya, yaitu pada tahun 1991 sektor industri pengolahan telah berperan sebagai *leading sector* dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di samping dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik, industri pengolahan nonmigas juga memiliki pangsa pasar internasional

yang baik dalam komposisi ekspor total Indonesia. Peningkatan ekspor riil merupakan cerminan bergairahnya aktivitas perdagangan luar negeri Indonesia yang pada gilirannya dapat meningkatkan devisa dan kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan Indonesia mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2003 yang lalu, yaitu 3,50 persen dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3,43 persen. Hanya pada puncak krisis tahun 1998 pertumbuhan sektor ini memang negatif, akan tetapi sejak tahun 1999 yang merupakan awal keluar dari krisis, sektor ini pertumbuhannya selalu positif. Hal ini tampak pada industri nonmigas pada tahun 2000 tumbuh 7,02 persen. Pada tahun-tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2001, 2002 dan 2003 sektor tersebut tetap mengalami pertumbuhan masing-masing 3,95 persen, 3,68 persen dan 3,83 persen.

Meskipun perekonomian Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang positif, terutama pasca krisis multi dimensi yang lalu, namun perekonomian Indonesia dewasa ini masih menghadapi berbagai masalah berat. Oleh sebab itu, diperlukan strategi kebijaksanaan ekonomi makro dan pemikiran yang komprehensif dari berbagai pihak untuk menanggulangi masalah tersebut.

Berdasarkan sifatnya, masalah perekonomian makro Indonesia dapat dibagi dalam dua bagian besar, yaitu masalah struktural dan masalah siklikal. Masalah yang pertama bersifat fundamental. Oleh karena itu penyelesaiannya memerlukan waktu yang panjang. Masalah yang kedua bersifat jangka pendek, terutama timbul akibat pengaruh faktor-faktor eksternal yang kedalaman

pengaruhnya tergantung kepada kelemahan-kelemahan struktural di dalam negeri. Kelesuan ekonomi secara siklikal dapat ditangani dengan kebijaksanaan ekonomi makro (Laporan Tahunan Bank Indonesia, 1986:31).

Strategi kebijaksanaan moneter Indonesia merupakan satu di antara kebijaksanaan ekonomi makro, yang dalam implementasinya dilakukan Bank Sentral (Bank Indonesia) melalui pengendalian jumlah uang beredar sejalan dengan sasaran pertumbuhan ekonomi dan pengendalian tingkat inflasi serta tingkat bunga yang wajar, sehingga dapat menggairahkan minat masyarakat untuk menabung dan berinvestasi. Di samping itu Bank Indonesia dengan kebijaksanaannya dapat melakukan penentuan likuiditas wajib minimum (*reserve requirement*), operasi pasar terbuka (*open market operation*), fasilitas diskonto (*discount rate*), dan regulasi kredit (*credit regulation*), dan pengendalian nilai tukar valuta asing atau kurs devisa yang realistis dan dinamis serta pengelolaan pinjaman luar negeri dalam batas kemampuan membayar kembali pada saat jatuh tempo, mendorong kegiatan ekspor yang pada gilirannya dapat meningkatkan jumlah devisa serta pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan dalam arti luas.

Perkembangan menunjukkan bahwa hingga tahun 1996 kondisi perekonomian Indonesia menunjukkan perubahan yang mendasar. Tingkat pertumbuhan ekonomi masih berada pada angka 7 persen, tidak terlalu jauh berbeda dengan tahun 1994 dan tahun 1995. Di samping itu, tingkat inflasi Indonesia pada tahun tersebut juga tidak terlalu jauh berbeda dengan yang terjadi pada tahun sebelumnya, yaitu tetap bertahan pada satu digit yang berarti berada di

bawah 10 persen, yang menurut Priyono Tjiptoherijanto (1997: 26): “hal ini disebabkan karena adanya konsistensi dan sikap kehati-hatian pemerintah Indonesia dalam mengelola perekonomian makro maupun perekonomian mikro”.

Memasuki pertengahan tahun 1997 perekonomian Indonesia mengalami kondisi yang terburuk dalam perekonomian orde baru di antara krisis-krisis sebelumnya yang pernah dialami Indonesia sejak zaman orde lama. Krisis rupiah yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 yang kemudian disusul dengan krisis moneter dan sejak akhir tahun 1997 telah berubah menjadi krisis ekonomi dengan membawa konsekuensi dan dampak bagi perekonomian Indonesia pada tahun-tahun berikutnya.

Pada zaman orde lama (1945 - 1965 / 66) khususnya pada tahun-tahun pertama setelah Indonesia merdeka, perekonomian Indonesia sangat buruk sekali. Ekonomi nasional mengalami stagflasi yang disebabkan oleh berbagai faktor. Tingkat inflasi sangat tinggi pernah mencapai lebih dari 500 persen menjelang akhir zaman orde lama.

Dalam struktur perekonomian berikutnya, pengendalian inflasi merupakan satu dari beberapa *issue* yang sangat penting dalam kebijaksanaan makro ekonomi Indonesia, sehingga Binhadi (1995:103) menyatakan bahwa:

“Inflasi dapat dikendalikan melalui keseimbangan pertumbuhan penawaran dan permintaan uang. Kuantitas permintaan terhadap uang berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi. Bank Sentral dapat mempengaruhi penawaran uang melalui beberapa instrumen kebijaksanaan moneter”.

Pada awal dimulainya Pelita I yakni tahun 1969, pemerintah Indonesia terlebih dahulu memusatkan perhatian sepenuhnya pada usaha-usaha pencapaian

stabilitas moneter. Dalam usaha menanggulangi inflasi, pemerintah menerapkan kebijaksanaan moneter dan fiskal ortodoks dan ternyata sangat berhasil. Pada pertengahan tahun 1966, tingkat inflasi telah mencapai 500 persen. *Hyperinflation* ini disebabkan oleh jumlah uang beredar di masyarakat (M_1) yang terlalu banyak terutama untuk membiayai defisit anggaran belanja pemerintah. Pada tahun 1969 laju inflasi turun drastis hingga mencapai 21 persen dengan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 10,9 persen.

Memasuki tahun pasca krisis, laju inflasi Indonesia sebesar 2,01 persen pada tahun 1999 dan masih lebih kecil dibanding laju inflasi rata-rata negara ASEAN sebesar 8,1 persen, 9,35 persen pada tahun 2000 jauh lebih tinggi dibanding laju inflasi rata-rata negara ASEAN sebesar 2,3 persen. Pada tahun 2001 laju inflasi Indonesia telah mencapai 12,55 persen jauh lebih tinggi dari laju inflasi rata-rata negara ASEAN hanya sebesar 4,6 persen dan 10,03 persen pada tahun 2002 jauh lebih tinggi dari laju inflasi rata-rata negara ASEAN hanya 4,1 persen dan turun menjadi 5,06 persen pada tahun 2003 berada di atas lebih sedikit dari laju inflasi rata-rata negara ASEAN yang hanya 3,1 persen. Dari gambaran perbandingan tersebut menunjukkan bahwa negara-negara industri di kawasan ASEAN secara umum telah mampu mengendalikan laju inflasi pada *level* rendah. Negara Singapura pada tahun 2003 merupakan negara yang memiliki laju inflasi terkecil dibanding negara-negara ASEAN lainnya, yaitu sebesar 0,4 persen.

Laju inflasi di Indonesia yang relatif tinggi tersebut akibat dampak dari krisis ekonomi yang bermula dari krisis nilai tukar yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 dan berlangsung cukup lama sehingga mengganggu sendi-sendi

perekonomian nasional. Dengan demikian pengendalian inflasi ini sangat perlu dilakukan karena dampak krisis ini sangat berat dan telah berpengaruh banyak pada menurunnya kesejahteraan sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal yang nyata terlihat bahwa menjelang awal tahun 1998 perekonomian Indonesia mengalami kontraksi yang sangat rendah, yaitu sebesar -13,7 persen. Hampir semua sektor mengalami pertumbuhan negatif. Demikian pula persentase ekspor Indonesia ke beberapa negara tujuan utama juga ikut menurun sebagai akibat dari banyaknya perusahaan-perusahaan yang mengurangi bahkan menghentikan produksinya. Walaupun masih ada sektor yang belum bisa berproduksi, namun pangsa ekspor Indonesia terus selalu diupayakan untuk ditingkatkan sehingga sejak tahun 2000 secara perlahan-lahan memperlihatkan kenaikan yang signifikan seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2
PANGSA EKSPOR INDONESIA KE SEPULUH NEGARA
TUJUAN UTAMA TAHUN 1993-1995 SAMPAI TAHUN 2001
(DALAM %)

No	Negara	1993-1995	1996-1998	1999-2000	2001*)
01.	Jepang	28,2	22,6	22,3	24,1
02.	Amerika Serikat	14,2	13,8	13,9	13,7
03.	Singapura	9,3	10,4	10,3	9,5
04.	Belanda	3,2	3,3	3,1	2,6
05.	Hongkong	3,1	3,5	2,6	2,4
06.	Jerman	3,1	2,9	2,4	2,4
07.	Australia	2,0	2,8	2,7	2,6
08.	Inggris	2,6	2,3	2,4	2,4
09.	Malaysia	1,9	2,6	3	3
10.	Italia	1,7	1,6	1,3	1

Sumber : Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia (BPS: 2001[data diolah]).

*) sampai dengan April

Mengacu pada Tabel 1.2, terlihat bahwa ekspor Indonesia masih terkonsentrasi pada pasar tujuan ekspor tertentu. Jepang masih tetap merupakan

negara tujuan utama ekspor Indonesia, namun perkembangan dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Pada periode 1993-1995, Jepang menyerap 28,2 persen produk Indonesia. Kemudian sampai bulan April tahun 2001, peranan pasar Jepang 24,1 persen. Posisi kedua setelah Jepang adalah Amerika Serikat (AS) yang mampu menyerap rata-rata 13,7 persen produk ekspor Indonesia per tahun.

Dibanding dengan pangsa ekspor beberapa negara Asia ke dunia, peranan ekspor Indonesia sangat kecil bahkan tidak sampai 1 persen. Untuk lebih jelasnya pangsa ekspor Indonesia rentang tahun 1969-1979, 1980-1985, 1986-1990, 1991-1993, 1994-1997 dan tahun 1998 dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
PANGSA EKSPOR BEBERAPA NEGARA ASIA
TAHUN 1969- 1979,1980-1985, 1986-1990, 1991-1993, 1994-1997
DAN TAHUN 1998 (DALAM %)

Negara	1969- 1979	1980- 1985	1986- 1990	1991- 1993	1994- 1997	1998
China	0,86	1,26	1,69	2,25	2,97	3,37
Hongkong	0,86	1,31	2,18	3,21	3,43	3,20
Korea	0,61	1,30	1,97	2,10	2,39	2,40
Malaysia	0,55	0,74	0,78	1,11	1,43	1,35
Indonesia	0,70	1,19	0,73	0,91	0,93	0,90
India	0,58	0,49	0,49	0,53	0,61	0,60

Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri (BPS: 1999 [data diolah]).

Secara khusus pertumbuhan ekspor Indonesia dari tahun 2000-2002 dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4
PERTUMBUHAN EKSPOR INDONESIA TAHUN 2000- 2002
(DALAM %)

	2000	2001	2002							
	Jan-Des	Jan-Agt	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
Ekspor										
Total	27,47	-2,65	-5,66	-2,42	10,43	-7,82	0,70	-0,96	0,91	4,38
Migas	46,29	-0,05	9,36	-16,74	21,68	-21,16	4,94	-3,39	-1,44	-13,62
Non Migas	22,85	-3,40	-10,37	3,06	6,95	-3,13	-0,51	-0,23	1,60	9,49

Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia (BPS: 2002 [data diolah]).

Berdasarkan Tabel 1.4, ekspor total Indonesia pada tahun 2000 tumbuh sebesar 27,47 persen. Meskipun peran ekspor nonmigas masih dominan (83,18 persen) terhadap ekspor total, namun pertumbuhannya hanya setengah dari pertumbuhan ekspor migas yang besarnya 22,85 persen. Sementara itu sampai bulan Agustus 2001 ekspor total Indonesia mengalami penurunan 2,65 persen dan pada waktu yang bersamaan ekspor nonmigas juga mengalami penurunan sebesar 3,40 persen. Kemudian pada bulan yang sama tahun 2002 ekspor nonmigas Indonesia justru mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 9,49 persen atau dua kali lebih besar dari pertumbuhan ekspor total (4,38 persen) pada periode yang sama. Pada saat yang sama pertumbuhan ekspor migas Indonesia justru mengalami penurunan drastis sebesar 13,62 persen.

Memasuki triwulan II-2001, ekspor nonmigas Indonesia masih tumbuh positif mencapai nilai US\$ 13,4 miliar dan hingga tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar 5,18 persen. Masih positifnya pertumbuhan ekspor nonmigas tersebut di antaranya didorong oleh terdepresiasi nilai tukar rupiah terhadap US\$ dan ada kemungkinan didorong oleh permintaan importir luar negeri agar

pesanan eksportnya dapat direalisasikan pada triwulan itu, sehubungan dengan tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi pada triwulan yang akan datang.

Pertumbuhan ekspor nonmigas yang positif tersebut tidak terlepas dari besarnya peran ekspor manufaktur yang mengalami pertumbuhan sebesar 31,6 persen setelah pada tahun sebelumnya hanya tumbuh sebesar 2 persen. Sementara itu sampai akhir tahun 2002 terjadi pula perubahan komposisi komoditas yang merupakan penyumbang ekspor manufaktur terbesar Indonesia. Kayu lapis tidak lagi memberikan kontribusi terbesar kepada total ekspor produk manufaktur, padahal kayu lapis memiliki kandungan impor yang paling rendah. Dari sini terlihat jelas bahwa ekspor Indonesia sangat rentan terhadap pasar dunia karena sedikitnya produk unggulan yang memiliki daya saing tinggi.

Berdasarkan data Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sampai bulan Juni tahun 2002 ada 10 komoditas yang masuk dalam produk unggulan ekspor nonmigas Indonesia. Kesepuluh produk unggulan tersebut adalah garmen, barang elektronik, tekstil, kayu lapis, peralatan kantor, alat listrik, *pulp* dan kertas, alas kaki, pupuk dan furnitur.

Dalam triwulan II-2001 terjadi depresiasi nilai tukar rupiah dan turut pula mendorong tekanan inflasi pada komoditas yang dapat diperdagangkan secara internasional (kelompok *traded*). Peningkatan harga kelompok *traded* pada triwulan II-2001 tercatat sebesar 3,13 persen atau lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,58 persen. Penyumbang terbesar inflasi kelompok *traded* satu di antaranya adalah barang elektronik. Tingginya laju

inflasi ini terutama disebabkan oleh dua hal pokok, yaitu meningkatnya harga barang-barang impor karena melemahnya nilai tukar rupiah (*imported inflation*) serta kelangkaan pasokan (*supply shortage*) yang menyebabkan *panic buying* dan terganggunya distribusi barang-barang pokok khususnya setelah terjadinya ketidakstabilan sosial politik dalam bentuk kerusuhan-kerusuhan sosial di dalam negeri.

Pemerintah Indonesia saat ini sangat menyadari kondisi yang sangat buruk yang melanda ekonomi Indonesia ini dan berupaya mencari solusi dan strategi untuk menanggulangnya. Kebijakan moneter merupakan satu dari beberapa bagian integral dari kebijakan makro ekonomi yang dapat ditujukan untuk mempengaruhi struktur ekonomi di berbagai sektor. Kebijakan ini dianggap sangat penting dan efektif karena dapat dikendalikan oleh otorita moneter (Bank Indonesia) secara langsung pada setiap waktu. Bank Indonesia melalui penyusunan Program Moneter dapat memperkirakan permintaan uang yang sesuai dengan kebutuhan riil perekonomian.

Kelompok Keynesian memandang bahwa permasalahan dalam suatu perekonomian pada dasarnya sangat kompleks, sehingga kebijakan moneter yang dilaksanakan secara aktif melalui ekspansi atau kontraksi moneter (penambahan atau pengurangan jumlah uang beredar) berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi riil dalam jangka pendek. Sedangkan kelompok Moneteris berpendapat bahwa perubahan dalam indikator moneter (jumlah uang beredar) dapat mempengaruhi permintaan agregat serta perilaku penawaran agregat, dan pengaruh jumlah uang beredar terhadap permintaan agregat adalah stabil (Warjiyo dan Solikin, 2003: 26-27).

Selanjutnya secara teoritis kelompok Moneteris menyatakan bahwa:

“Pengaruh kebijakan moneter terhadap *Gross National Product* (GNP) dapat melalui jalur langsung. Selanjutnya

melalui mekanisme transmisi moneter, perubahan stok uang yang beredar akan dapat mempengaruhi pasar uang dalam bentuk perubahan tingkat bunga, harga, investasi, dan selanjutnya melalui proses koefisien pelipat uang (*money multiplier coefficient*) akan dapat mempengaruhi pendapatan nasional” (Nopirin, 2000: 55).

Mengikuti pendapat kelompok Keynesian dan kelompok monetaris tersebut, implikasinya adalah bahwa kebijaksanaan moneter dapat diperlonggar atau diperketat melalui penambahan atau pengurangan jumlah uang beredar. Penambahan atau pengurangan jumlah uang beredar memiliki keterkaitan langsung dengan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara.

Penambahan jumlah uang beredar di masyarakat akan berpengaruh langsung terhadap penurunan tingkat bunga. Implikasinya adalah penurunan tingkat bunga akan mendorong investasi di sektor riil, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kenaikan investasi akan mendorong kenaikan kapasitas produksi yang pada gilirannya mendorong pula kenaikan ekspor. Kenaikan dalam ekspor akibat kenaikan investasi berpengaruh terhadap penerimaan devisa dan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja.

Selanjutnya, di sisi lain kenaikan atau penambahan jumlah uang beredar akan berpengaruh terhadap lonjakan inflasi. Kenaikan dalam inflasi dipastikan akan diikuti oleh penurunan daya beli (*purchasing power*) masyarakat, terutama terhadap barang-barang impor. Inflasi sebenarnya adalah insentif ekonomi yang cukup penting dalam mendorong kegiatan ekspor. Bila ini yang terjadi, maka dipastikan akan terjadi penghematan devisa dan surplus dalam neraca perdagangan.



Pengendalian jumlah uang beredar pada hakikatnya dapat diarahkan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi ke arah pertumbuhan yang dinamis. Meskipun banyak faktor lain ikut mempengaruhi kegiatan ekonomi, namun banyak pula dari faktor itu di luar kendali pemerintah. Oleh sebab itu, implementasi kebijaksanaan moneter dengan penargetan besaran moneter akan sangat efektif dalam mencapai sasaran kebijaksanaan moneter bila dilandasi pengetahuan yang sempurna dan estimasi yang teliti, terutama pada saat kondisi perekonomian mengalami ketidakpastian.

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dengan independensinya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tanggal 17 Mei 1999 Tentang Bank Indonesia pengganti Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral adalah lembaga yang berwenang mengambil langkah kebijaksanaan moneter melalui pengendalian jumlah uang beredar (penambahan dan pengurangan jumlah uang beredar), di antaranya melalui politik diskonto (*discount rate*), cadangan minimum (*reserve requirement*), operasi pasar terbuka (*open market operation*) sebagai instrumen utama ataupun regulasi kredit (*credit regulation*) yang dipakai untuk mempengaruhi target operasional (dana bank dan uang inti), target antara (tingkat bunga dan jumlah uang beredar) dan target akhir (pertumbuhan ekonomi, keseimbangan neraca pembayaran, kesempatan kerja dan stabilitas harga).

Dalam periode pembangunan jangka panjang tahap II, yaitu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 tersebut peredaran uang riil terus meningkat secara cepat sampai tahun 1997, dengan perkembangan rata-rata 441.314 milyar

rupiah sehingga mendorong laju inflasi di Indonesia mencapai dua digit. Meskipun di satu sisi pertambahan jumlah uang yang beredar dapat mendorong peningkatan laju inflasi dan menurunkan tingkat bunga, namun di sisi lain dapat menaikkan pendapatan nasional.

Memasuki tahun 2000, 2001 dan 2002 jumlah uang yang beredar di Indonesia mengalami fluktuasi karena dipengaruhi oleh kebijaksanaan moneter yang cenderung ketat yang ditandai oleh meningkatnya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan direspon dengan naiknya tingkat bunga deposito, sehingga pertumbuhan uang beredar mengalami perlambatan. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menyerap kelebihan likuiditas dan mengatasi kecenderungan meningkatnya tingkat inflasi serta depresiasi rupiah.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memulihkan perekonomian Indonesia pasca krisis moneter yang lalu. Sejalan dengan beratnya tekanan depresiasi nilai tukar dan meningkatnya tekanan harga-harga, sampai triwulan IV-2002 Bank Indonesia masih menempuh kebijaksanaan moneter yang ketat untuk menyerap kelebihan likuiditas. Upaya penyerapan likuiditas dimaksud ditempuh dengan kombinasi penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) melalui lelang, intervensi rupiah, dan sterilisasi valas. Sasaran dari langkah-langkah tersebut adalah untuk menurunkan secara bertahap uang primer atau uang inti (*base money*) yang relatif masih tinggi. Dalam perkembangannya, selama triwulan II-2002 posisi uang primer cenderung berada di atas target indikatif. Posisi *test date* uang primer mencapai Rp 125,133 triliun pada minggu III bulan Juni 2002. Seiring pula dengan pertumbuhan uang primer tersebut, pertumbuhan ekspor

Indonesia cenderung mengalami peningkatan, meskipun tidak setinggi pertumbuhan tahun sebelumnya.

Pada tahun 1980-an, Indonesia sebenarnya sudah mengubah haluan dalam strategi ekspor, sehingga pada tahun 1970-an Indonesia telah dapat menikmati penghasilan devisa dari sektor minyak bumi dan gas alam sebagai sumber devisa utama. Kebijakan dalam sektor di luar minyak (nonmigas) dan gas bumi pada waktu itu lebih dipusatkan pada peningkatan produksi dan substitusi impor. Hal tersebut berubah ketika harga minyak bumi dan gas alam mengalami kemerosotan yang besar sejak tahun 1980.

Dalam rangka mempertahankan dan sekaligus meningkatkan ekspor serta laju pertumbuhan perekonomian Indonesia, maka kemerosotan hasil devisa dari sektor migas tersebut diimbangi dengan peningkatan ekspor nonmigas karena ketergantungan terhadap ekspor migas sebagai sektor andalan tunggal dalam perdagangan luar negeri Indonesia ternyata kurang menguntungkan untuk jangka waktu yang panjang. Di samping itu, migas merupakan sumberdaya ekonomi yang tidak dapat diperbarui (*non-renewable resources*). Sehingga tahun 1980-an merupakan awal dari upaya Indonesia ke arah pengembangan ekspor nonmigas, di samping tetap mempertahankan ekspor migas sebagai sumber penting penerimaan devisa.

Upaya peningkatan kinerja ekspor masa yang akan datang merupakan tantangan besar yang dihadapi perekonomian Indonesia saat ini. Oleh sebab itu, diperlukan adanya instrumen kebijakan yang tepat serta implementasi pelaksanaan kebijakan yang efektif karena selain untuk memenuhi

meningkatnya permintaan pasar internasional terhadap komoditas dari Indonesia (migas dan non- migas), terutama dari negara-negara di kawasan Amerika dan Asia serta negara-negara ASEAN, juga disebabkan oleh adanya kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan devisa sebagai sumber terpenting untuk membiayai pembangunan dan peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan di dalam negeri.

Mengikuti pendapat kelompok Keynesian dan *monetarist* bahwa instrumen kebijaksanaan moneter uang beredar dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi di sektor riil di samping pengaruhnya terhadap tingkat bunga dan inflasi, yang menurut Warjiyo dan Solikin (2003: 27): “implikasi kebijaksanaan moneter dapat dipergunakan sebagai salah satu instrumen kebijaksanaan untuk secara aktif mempengaruhi peningkatan dan penurunan kegiatan ekonomi di sektor riil.”

Dalam studi ini instrumen kebijaksanaan moneter uang beredar dijadikan pilihan dan dikaitkan secara langsung terhadap sasaran antara kebijaksanaan moneter (ekspor, devisa dan penyerapan tenaga kerja). Terpilihnya uang beredar ini karena diperkirakan akan memberikan *policy error* (penyimpangan dari target) paling kecil bahkan tidak ada sama sekali terhadap sasaran kebijaksanaan moneter, meskipun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Robert Dekle dan Mahmood Pradhan dari IMF dalam Ikhsan dkk., (1977) menunjukkan fungsi permintaan uang di Indonesia cenderung tidak stabil.

Grenville (2000) dengan tegas menyatakan bahwa “jika pilihan instrumen difokuskan pada instrumen kebijaksanaan moneter, maka sekaligus juga

merupakan strategi evaluasi dan pemulihan terhadap krisis ekonomi yang sedang terjadi”.

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang studi tersebut, maka dipandang perlu serta mendesak dilakukan studi yang berusaha mengkaji secara mendalam dan menyeluruh Pengaruh Struktur Uang Beredar Terhadap Struktur Ekspor Dan Struktur Devisa Serta Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Perdagangan Di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul studi, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah struktur uang beredar berpengaruh signifikan terhadap struktur ekspor Indonesia?
2. Apakah struktur uang beredar berpengaruh signifikan terhadap struktur devisa Indonesia?
3. Apakah struktur uang beredar berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan?
4. Apakah struktur ekspor berpengaruh signifikan terhadap struktur devisa Indonesia?
5. Apakah struktur devisa berpengaruh signifikan terhadap struktur pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan?
6. Apakah struktur ekspor berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan tenaga kerja pada sektor perdagangan di Indonesia?

1.3. Tujuan Studi

Berdasarkan uraian latar belakang dan beberapa masalah yang telah dirumuskan tersebut, maka disusun beberapa tujuan studi sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai studi ini adalah untuk mengkaji secara mendalam dan menyeluruh pengaruh struktur uang beredar terhadap struktur ekspor dan struktur devisa serta pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan di Indonesia.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus, studi ini di arahkan untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut:

- 1. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh struktur uang beredar terhadap struktur ekspor Indonesia.**
- 2. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh struktur uang beredar terhadap struktur devisa Indonesia.**
- 3. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh struktur uang beredar terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan di Indonesia.**
- 4. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh struktur ekspor terhadap struktur devisa Indonesia.**
- 5. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh struktur devisa terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan di Indonesia.**

6. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh struktur ekspor terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan di Indonesia.

1.4. Manfaat Studi

Studi ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat untuk:

1. Merekomendasikan temuan baru model empirik kebijaksanaan moneter pengendalian jumlah uang beredar dalam rangka menetapkan kebijaksanaan peningkatan nilai ekspor dan jumlah devisa serta peningkatan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan di Indonesia.
2. Merekomendasikan implikasi jumlah uang beredar dan temuan baru terhadap pengembangan teori kebijaksanaan moneter, teori perdagangan internasional serta teori kesempatan kerja.
3. Masukan dan acuan ilmiah bagi peneliti berikutnya, terutama yang tertarik untuk mengkaji secara komprehensif serta mengembangkan lebih lanjut hasil studi ini.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini dilakukan berdasarkan dukungan beberapa teori yang relevan dengan masalah dan pokok bahasan, seperti: teori kebijaksanaan moneter, teori inflasi dan deflasi, teori basis dan nonbasis, teori perdagangan internasional dan teori kesempatan kerja serta pendapatan nasional seperti yang diuraikan pada sub bab berikut ini.

2.1. Teori Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter secara umum didefinisikan sebagai tindakan pemerintah (atau bank sentral) untuk mempengaruhi situasi makro yang dilaksanakan melalui pasar uang. Secara lebih khusus kebijakan moneter didefinisikan sebagai tindakan makro pemerintah (atau bank sentral) dengan cara mempengaruhi proses penciptaan uang (Boediono, 2001: 96).

Kebijakan moneter menurut UU No. 23 Tahun 1999 Bab I Ps. 1: 10 Tentang Independensi Bank Sentral didefinisikan sebagai berikut:

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga.

Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan pemerintah mengenai jumlah uang beredar (*money supply*) dan tingkat bunga (*interest rate*) yang bersifat baik ekspansif (*expansionary*) maupun kontraktif (*contractionary*) atau yang dikenal sebagai *open market policy* (OMP) atau kebijakan pasar terbuka (Hady, 2000b: 115).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa:

Kebijaksanaan moneter merupakan satu dari beberapa alternatif pilihan kebijaksanaan ekonomi makro di bidang moneter yang mempunyai tujuan mempengaruhi kegiatan ekonomi dalam perekonomian agregat seperti peningkatan *Gross Domestic Product* (GPD), pengendalian inflasi, tingkat bunga dan menjaga keseimbangan Neraca Pembayaran Internasional serta peningkatan cadangan devisa dalam perdagangan internasional (Sicat dan Arndt, 1991 : 254).

Dalam perekonomian tertutup, yaitu pada saat perekonomian suatu negara tidak berinteraksi dengan perekonomian negara lain, maka formulasi dan implementasi kebijaksanaan moneter dilakukan dengan lebih sederhana. Namun demikian, di era globalisasi ini tidak terdapat suatu negara yang memiliki sistem perekonomian tertutup. Dengan semakin besarnya keterkaitan antarnegara, maka semakin terbuka perekonomian suatu negara yang bersangkutan.

Interaksi ekonomi antarnegara merupakan satu dari beberapa aspek yang tidak terpisahkan dari perekonomian terbuka. Dengan terbukanya suatu perekonomian antarnegara berdampak pada peningkatan transaksi perdagangan antarnegara yang bersangkutan. Keterbukaan ekonomi suatu negara akan membawa konsekuensi pada perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan makro ekonomi, termasuk kebijaksanaan moneter.

Semakin besar transaksi perdagangan dan keuangan internasional yang dilakukan oleh suatu negara, maka semakin besar *foreign capital flows* 'aliran dana luar negeri'. Aliran dana luar negeri tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Dalam hal jika terjadi *capital flows* 'aliran dana luar negeri masuk', maka akan terjadi pertambahan jumlah uang beredar. Sebaliknya, dalam hal jika terjadi *capital outflows* "aliran dana luar negeri keluar", maka akan terjadi pengurangan jumlah uang beredar. Dengan

demikian, kebijaksanaan moneter perlu diarahkan agar jumlah uang beredar sesuai dengan kebutuhan perekonomian (Warjiyo dan Solikin, 2003:9).

Kebijaksanaan moneter dalam implementasinya dilaksanakan melalui proses penambahan atau pengurangan penawaran uang (jumlah uang beredar) seperti penambahan M_1 , M_2 , M_3 , B atau L dan kombinasi antaranya, yang secara umum disebut pelaksanaan kebijaksanaan moneter ekspansif dan kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif atau disebut juga *easy money policy* dengan cara menambah jumlah uang beredar (*money supply*) dan menurunkan tingkat bunga (*interest rate*). Sedangkan kebijaksanaan yang bersifat kontraktif atau *tight money policy* dilakukan dengan cara mengurangi jumlah uang beredar (*money supply*) dan menaikkan tingkat bunga (*interest rate*).

Studi ini berfokus pada kebijaksanaan moneter (struktur uang beredar yang lebih luas, M_3 [M_1 ditambah uang kuasi, Q_m]) sebagai target operasional untuk mempengaruhi target antara (struktur ekspor, struktur devisa, dan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja).

Lipsey (1995:198-200) menyatakan bahwa:

“Jumlah uang beredar adalah total stok uang dalam perekonomian pada suatu saat tertentu. Definisi jumlah uang beredar (*money supply* atau *supply for money*) yang sempit dinamakan M_1 ditambah tabungan dan simpanan berjangka lain yang jangkanya lebih pendek, termasuk rekening pasar uang dan pinjaman antar bank. M_3 adalah M_2 ditambah dengan beberapa komponen, yang paling penting adalah sertifikat deposito (*Certificate of deposit = CD*). B adalah ‘uang inti’ atau ‘uang primer’ (*primary money = uang kartal + bank reserves*). Sedangkan L di sini adalah likuiditas total (*total liquidity*) mencakup semua alat-alat ‘likuid’ yang ada di masyarakat termasuk obligasi pemerintah dan swasta jangka pendek, wesel perusahaan (*commercial papers*), cek mundur, aksep banker (*banker's acceptances*) dan simpanan deposito di luar negeri.”

Ekonom klasik condong mengartikan uang beredar sebagai *currency*, karena uang inilah yang benar-benar merupakan daya beli yang langsung bisa digunakan (dibelanjakan) dan langsung mempengaruhi harga barang-barang. Yang termasuk dalam pengertian *currency* ini sebagai uang beredar tidak semua uang kertas dan uang logam, tetapi hanya uang kertas dan uang logam yang ada di tangan masyarakat umum.

Sasaran kebijaksanaan moneter dicapai melalui pengaturan jumlah uang beredar (*M*). Salah satu komponen jumlah uang beredar adalah uang giral (*demand deposit*). Uang giral dapat terjadi melalui dua acara:

Pertama, apabila seseorang memasukkan uang kas ke bank dalam bentuk giro. **Kedua**, apabila seseorang memperoleh pinjaman dari bank tidak diterima kas tetapi dalam bentuk giro. Deposito yang timbul dengan cara kedua sifatnya lebih inflatoir dari pada cara pertama. Sebab cara pertama hanyalah pengalihan bentuk saja dari uang kas ke uang giral. Bank sentral dapat mengatur uang giral ini melalui penetapan cadangan minimum (Nopirin, 2000: 34).

Dalam perekonomian makro kebijaksanaan moneter dapat dibagi menjadi dua berdasarkan arah perubahan nilai variabel target yang menjadi tujuan kebijaksanaan, yaitu: (1) Kebijakan ekspansi yang mempunyai tujuan untuk memperbesar kegiatan ekonomi dalam perekonomian, dan (2) Kebijakan kontraksi yang mempunyai tujuan untuk menurunkan kegiatan ekonomi dalam perekonomian (Reksoprayitno, 2000: 48).

Kebijakan ekspansi pada umumnya diambil pada masa-masa perekonomian menghadapi banyak pengangguran dan kapasitas produksi nasional belum dalam pemanfaatan penuh. Sebaliknya kebijakan kontraksi pada

umumnya dilakukan pada masa-masa perekonomian dalam keadaan *over employment*, yaitu keadaan di mana permintaan agregatif melampaui besarnya kapasitas produksi nasional. Keadaan ini pada umumnya ditandai oleh tingkat inflasi yang tinggi. Di samping itu kebijaksanaan kontraksi pada umumnya juga dipakai dalam keadaan di mana perekonomian mengalami defisit neraca pembayaran secara terus menerus. Kebijakan ekspansi pada umumnya dapat diharapkan memperoleh hasil berupa meningkatnya pendapatan nasional dan menurunnya tingkat pengangguran. Sebaliknya kebijaksanaan kontraksi pada umumnya diharapkan dapat menurunkan tingkat inflasi dan memperkecil defisit neraca pembayaran luar negeri.

Dalam upaya mencapai suatu tujuan yang ditetapkan dalam suatu kebijaksanaan moneter diperlukan alat yang biasa disebut *policy instruments* atau disebut instrumen kebijaksanaan. Selanjutnya, variabel yang dipakai sebagai instrumen kebijaksanaan itu disebut *policy instrument variable*, yang biasa juga disingkat *instrument variable*, atau variabel instrumen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijaksanaan moneter meliputi semua tindakan pemerintah yang bertujuan mempengaruhi jalannya perekonomian melalui penambahan atau pengurangan jumlah uang yang beredar, maka dikatakan bahwa *instrument variable* untuk kebijaksanaan moneter adalah M, yaitu jumlah uang beredar, yang biasa juga disebut penawaran uang serta tingkat bunga.

2.1.1. Instrumen Kebijakan Moneter

Ada beberapa instrumen atau alat yang sering digunakan pemerintah dalam melakukan kebijakan moneter (Mangkoesebroto dan Algifari, 1998: 121-123), antara lain:

1. *Open Market Operation* (OMO)

Jika pemerintah ingin mempengaruhi jumlah uang beredar di masyarakat dengan menggunakan instrumen ini adalah dengan memperjual-belikan surat berharga pemerintah (misalnya Sertifikat Bank Indonesia/SBI dan Surat Berharga Pasar Uang/SBPU). Jika pemerintah menghendaki jumlah uang beredar naik, maka otorita moneter (dalam hal ini Bank Sentral) membeli surat berharga pemerintah yang telah dikeluarkan. Dengan demikian maka pemerintah akan memegang lebih banyak surat berharga sedangkan masyarakat mempunyai lebih banyak uang. Sebaliknya, jika pemerintah menghendaki jumlah uang beredar turun, maka pemerintah harus menjual surat berharga.

2. *Reserves Requirement* (RR)

Kebijakan moneter dengan instrumen *Reserves Requirement* (RR) adalah kebijakan (Bank Sentral) yang berkenaan dengan penentuan cadangan minimum bagi bank umum. Cadangan minimum ini adalah bagian (persentase) tertentu yang harus disimpan di Bank Sentral dan simpanan yang diperoleh dari bagian yang ditahan ini tidak boleh dipinjamkan. Dengan menggunakan instrumen ini jika pemerintah menghendaki jumlah uang yang beredar naik, maka cadangan minimum perbankan diturunkan. Cadangan minimum (*Reserves Requirement*, RR) menentukan besarnya jumlah uang yang beredar dengan rumus:

$$M = \frac{H}{RR}$$

yang menyatakan bahwa:

H adalah uang inti

M adalah jumlah uang beredar

RR adalah cadangan minimum

Jadi seandainya pemerintah menetapkan RR sebesar 20 persen dan pemerintah menaikkan H sebesar Rp 2 milyar, berarti jumlah uang beredar secara maksimal akan mengalami kenaikan sebesar Rp 10 milyar. Jika pemerintah menurunkan RR menjadi 10 persen, maka uang beredar akan naik sebesar Rp 20 milyar. Penambahan jumlah uang yang beredar tersebut tergantung dari pelipat uang (*money multiplier*). Dalam bagian di atas dapat diketahui bahwa pelipat uang tidak bergantung semata-mata pada RR, akan tetapi juga bergantung pada kesukaan masyarakat memegang uang tunai (C) dan kelebihan cadangan (ER).

3. *Rediscount Policy* (RP)

Kebijaksanaan moneter dengan instrumen *Rediscount Policy* adalah kebijaksanaan pemerintah mengubah tingkat bunga pinjaman Bank Sentral terhadap Bank Umum. Jika pemerintah menghendaki jumlah uang beredar turun, maka pemerintah (dalam hal ini Bank Sentral) menaikkan tingkat bunga pinjaman. Sebagai akibatnya maka bank umum yang meminjam dari Bank Sentral merasakan kenaikan biaya pinjaman (bunga), sehingga bank umum berusaha untuk memperkecil pinjaman tersebut dengan cara menagih pinjaman bank umum kepada masyarakat yang sudah jatuh tempo. Berarti ada aliran uang dari masyarakat ke bank umum, sehingga uang yang beredar di masyarakat akan

menurun. Sebaliknya, jika pemerintah menghendaki jumlah uang beredar naik, maka Bank Sentral menurunkan tingkat bunga pinjaman.

4. *Selective Credit Control (SCC)*

Kebijaksanaan moneter dengan instrumen *Selective Credit Control (SCC)* adalah kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dengan cara memberi himbauan kepada sektor perbankan (*moral suassion*) dalam hal penyaluran dana ke masyarakat melalui pinjaman (kredit). Jika Pemerintah menginginkan jumlah uang beredar di masyarakat berkurang, maka pemerintah menghimbau kepada sektor perbankan untuk memperketat pemberian kredit, dan sebaliknya. Oleh karena kebijaksanaan ini hanya berupa himbauan, maka sering disebut dengan kebijaksanaan moneter yang kualitatif.

Dalam teori moneter ditegaskan bahwa kebijaksanaan moneter adalah satu di antara beberapa instrumen moneter yang ditujukan untuk memelihara kestabilan ekonomi terutama yang berkaitan dengan berbagai variabel ekonomi agregat (Mansoer dan Soetatwo, 1992:1).

Bank Sentral sebagai lembaga pelaksana kebijaksanaan moneter dapat mempengaruhi penawaran uang dengan dua cara: **Pertama**, mencetak uang baru atau dengan menggalakkan lembaga-lembaga keuangan, terutama bank perdagangan, dan **Kedua**, menciptakan pinjaman yang lebih banyak, misalnya dengan menurunkan suku cadangan ke atas pinjaman-pinjaman yang dibuat lembaga-lembaga keuangan (Sukimo, 2000: 93).

Mankiw (2000: 296) menyatakan bahwa:

“Dalam perekonomian tertutup kenaikan penawaran uang meningkatkan pengeluaran karena menurunkan tingkat bunga dan mendorong investasi. Dalam perekonomian terbuka kecil, tingkat bunga ditetapkan oleh tingkat bunga dunia. Kenaikan dalam penawaran uang menekan tingkat bunga domestik,

modal mengalir ke luar dari perekonomian, karena investor mencari peluang yang lebih menguntungkan di mana saja. Selain itu, karena aliran ke luar modal meningkatkan penawaran mata uang domestik di pasar kurs mata uang asing, kurs relatif mahal terhadap barang-barang luar negeri dan meningkatkan ekspor bersih. Dalam perekonomian terbuka kecil, kebijakan moneter mempengaruhi pendapatan dengan mengubah kurs, bukan tingkat bunga”.

Dengan demikian, tujuan utama sebuah kebijaksanaan moneter hanya akan dapat tercapai bila variabel ekonomi agregat tersebut dapat dikendalikan secara efektif dalam jalannya perekonomian secara keseluruhan, yang menurut kelompok *monetarist* bahwa pertumbuhan yang lambat dan mapan dalam penawaran uang akan menghasilkan *output*, kesempatan kerja (*employment*), dan harga yang stabil (Mankiw, 2000: 363).

Satu dari beberapa komponen agregat tersebut adalah penanaman modal (investasi). Tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi penanaman modal dan bila tingkat bunga rendah lebih banyak penawaran uang dilakukan. Dengan demikian kebijaksanaan moneter pemerintah dapat menambah atau mengurangi penawaran uang. *Ceteris Paribus*, penambahan atau pengurangan ini akan menurunkan atau menaikkan tingkat bunga. Dengan penurunan tingkat bunga tersebut diharapkan penanaman modal (investasi) akan bertambah dan ini akan meningkatkan pengeluaran agregat.

2.1.2. Sasaran Kebijakan Moneter

Sebagai implikasi dari perubahan penawaran uang dan tingkat bunga yang terkendali dalam suatu perekonomian, sasaran akhir jangka pendek yang ingin dicapai kebijaksanaan moneter beberapa di antaranya adalah:

1. Tingkat inflasi yang rendah

Jika yang terjadi justru sebaliknya, maka langkah yang perlu dilakukan yaitu penawaran uang dikurangi untuk menaikkan tingkat bunga. Diharapkan langkah ini akan menurunkan investasi dan seterusnya pengeluaran agregat akan menurun. Hal ini akan mengurangi tekanan inflasi.

2. Tingkat produk domestik bruto yang tinggi

Kebijaksanaan moneter dapat bersumber dari terbentuknya harapan (*expectations*) di masyarakat. Faktor pembentukan harapan ini dalam teori ekonomi makro disebut pendekatan harapan rasional atau *the rational expectation approach*. Dalam jangka pendek fluktuasi produk domestik bruto masih bisa terjadi karena salah menafsirkan informasi sehingga reaksi menjadi kurang rasional, meskipun demikian informasi ini tetap memiliki peranan yang sangat penting sebagai landasan pemikiran untuk jangka waktu yang panjang agar pelaku ekonomi dapat bertindak dan bereaksi secara rasional untuk mempengaruhi produk domestik bruto tersebut ke tingkat yang tinggi.

3. Neraca pembayaran yang seimbang

Neraca pembayaran (*Balance of Payments*) yang surplus atau seimbang lebih diinginkan oleh pemerintah suatu negara yang menganut struktur perekonomian terbuka ketimbang neraca pembayaran yang defisit karena akan mengurangi cadangan devisa yang ada.

4. Tingkat kesempatan kerja yang tinggi

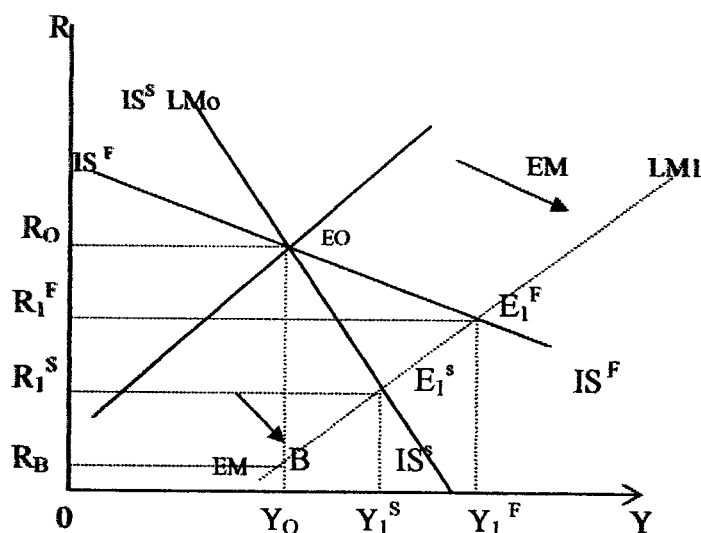
Pengangguran merupakan gejala ekonomi dan diupayakan dikurangi dengan menggunakan perangkat atau instrumen moneter ke arah mempertahankan

tingkat kesempatan kerja yang tinggi atau *full employment* (Boediono, 1996:137 dan 158).

2.1.3. Efektivitas Kebijakan Moneter

Keefektifan (*effectiveness*) kebijakan moneter dapat diukur dari seberapa besar dampak kebijaksanaan tersebut terhadap pendapatan dan tingkat bunga. Secara umum keefektifan itu biasanya dipengaruhi oleh elastisitas investasi terhadap tingkat bunga (*interest elasticity of investment*) atau *slope* kurve IS dan elastisitas permintaan uang terhadap tingkat bunga (*interest of money demand*) atau *slope* kurve LM.

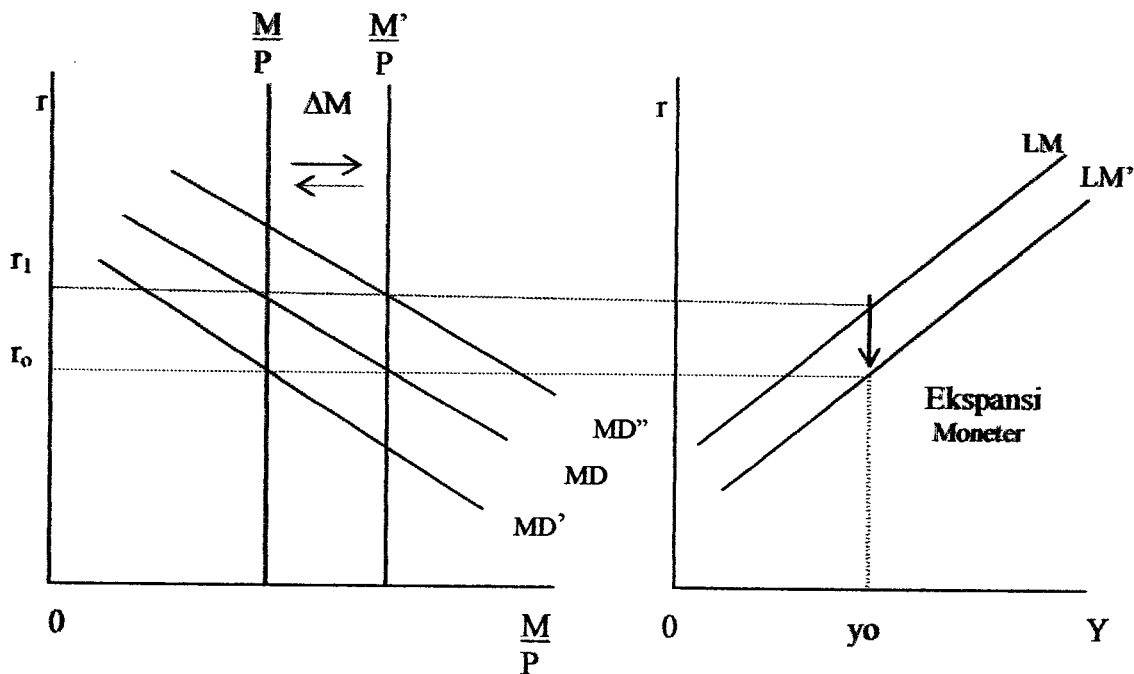
Efektivitas pelaksanaan kebijaksanaan moneter (penambahan dan pengurangan jumlah uang beredar) terhadap tingkat suku bunga dan GDP dapat dianalisis dengan model IS – LM. Analisis terhadap model tersebut dapat diilustrasikan berdasarkan gambar berikut ini.



Gambar 2.1 KURVE EKSPANSI MONETER DENGAN KURVE IS RELATIF DATAR DAN CURAM
Sumber: Mork (1992: 161)

Diasumsikan kurva IS relatif datar (*flat*) dan target GDP adalah Y_0 . Apabila R dijadikan sasaran dan posisi IS telah diketahui, maka R_0 dapat ditentukan sebagai sasaran ekspansi dan kontraksi moneter dan dengan tepat dapat tercapai target GDP (Y_0). Apabila jumlah uang beredar dijadikan sasaran (dengan pengendalian stabil) atau ditambah secara reguler sesuai dengan target yang ditentukan, LMo bergeser ke LM1 sehingga meskipun IS stabil, *Gross Domestic Product* (GDP) bisa diharapkan berfluktuasi antara Y_0 dan Y_1^F . Tetapi bila kurva IS relatif curam (*steep*), *Gross Domestic Product* (GDP) berfluktuasi hanya antara Y^0 dan Y_1^S dengan R_1^S .

Secara sederhana efektivitas ekspansi dan kontraksi moneter serta kurva LM dapat ditentukan sebagai berikut :



Gambar 2.2 EFEKTIVITAS EKSPANSI DAN KONTRAKSI MONETER DAN PENURUNAN KURVA LM
 Sumber: Bradley (1985 : 415)

Menurut Keiser (1975 : 134) bahwa pada tingkat pendapatan rendah, kurva LM elastis sempurna, respek terhadap tingkat bunga (*interest*, R).

Dengan asumsi jumlah uang beredar sama dengan jumlah uang yang diminta ($M = M_D$), maka fungsi persamaan LM :

$$M = k Y + (X - Zi)$$

atau

$$Y = \frac{M - (X - Zi)}{k} \quad (\text{Kohn, 1993 : 68}); \dots \dots \dots (1)$$

di mana :

M adalah jumlah uang beredar

k , X dan Z adalah konstanta

i adalah tingkat bunga

dan fungsi persamaan IS :

$$Y = \frac{1}{\{1 - b(1 - t) + g\}} [a + (c - di) + \bar{G} + (f - hi)] \quad (\text{Kohn, 1993: 680}); \dots \dots (2)$$

di mana :

g adalah Hasrat marginal impor

G adalah Pengeluaran pemerintah

i adalah Tingkat bunga

b adalah Hasrat konsumsi marginal

t adalah Tingkat pajak

a adalah Konsumsi outonomous

c, d, f, h adalah Konstanta bernilai positif

Pengaruh jumlah uang beredar terhadap tingkat bunga dan inflasi serta inflasi terhadap GDP dan neraca pembayaran internasional dapat dianalisis dengan metode kuantitatif. Sedangkan efek dari kontraksi moneter terhadap jumlah uang yang ditawarkan dapat diprediksi dengan memasukkan variabel inflasi estimasi (π^e) ke dalam model fungsi penawaran uang bersama-sama dengan variabel penjelas lainnya yang terpilih.

Model fungsi penawaran uang analog fungsi permintaan uang yang dideterminasi dari hasil spesifikasi model fungsi permintaan uang Friedman dengan memasukkan teori permintaan uang Klasik, Keynes, dan PascaKeynes sehingga akan didapatkan tambahan beberapa variabel penjelas.

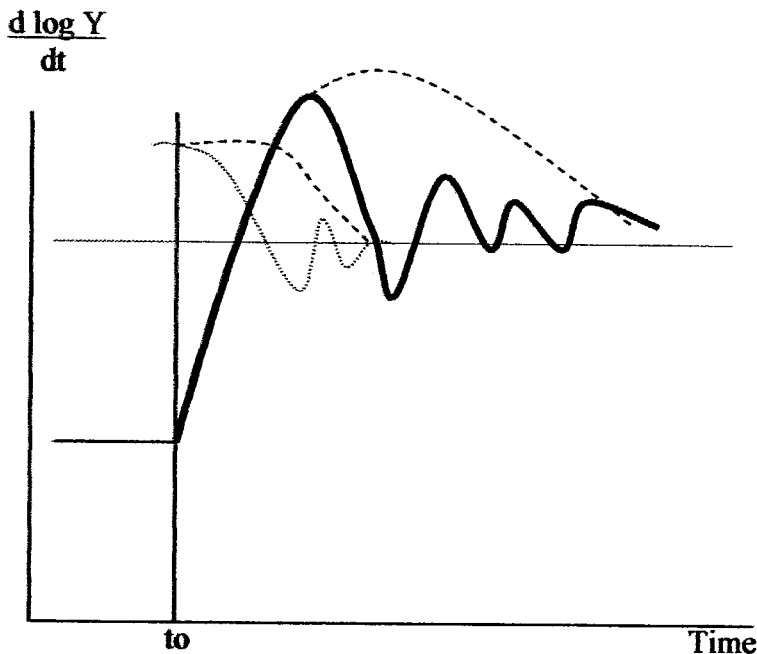
Konsep penawaran uang yang dianalogi dengan fungsi permintaan uang dapat berasal dari pemegang kekayaan penghasilan dan oleh perusahaan bisnis, melalui proses penyesuaian karena dalam jangka pendek ada perubahan pendapatan nominal, harga dan *output* (Friedman, 1974 : 48). Penyesuaian pada gangguan moneter memerlukan tenggang waktu (*time lag*) yang panjang dan mempengaruhi besaran ekonomi. Penyesuaian-penyesuaian dapat diperluas dalam penawaran uang, mekanisme transmisi moneter, inflasi dan *output* riil, dan dapat dideterminasi dengan spesifikasi model ekonometrika.

Model ekonometrika secara konsisten melibatkan hubungan sebab-akibat (*causal*) di antara variabel-variabel yang terukur. Model terbaik bersifat simultan. Model yang dibentuk difokuskan pada tujuan penelitian, batasan dari topik penelitian, hipotesis yang akan diuji, variabel atau besaran-besaran moneter yang akan diprediksi, serta kebijakan yang akan dievaluasi. Perhatian utama diletakkan

pada validitas dan ketersediaan data. Sumber data yang terbaik untuk studi literatur adalah katalog atau indeks dalam publikasi ilmiah. Literatur merupakan sarana penting dalam mencari sumber data tersebut.

Dalam model ekonometrika formula yang sering digunakan adalah himpunan persamaan simultan *distributed lag* karena bersifat stokastik disertai arti masing-masing persamaan dan bentuk penjelasannya berupa mengurai kembali parameter model terpilih, sehingga dalam studi ini hubungan antara jumlah uang beredar terhadap tingkat bunga dan inflasi dapat mengaplikasikan model tersebut.

Gambar 2.3 adalah ringkasan berbagai kemungkinan jalur penyesuaian dari $(d/\text{Log } Y) / (dt)$ yang konsisten dengan teori.



Gambar 2.3 POSSIBLE ADJUSTMENT PATHS OF RATE OF CHANGE IN NOMINAL INCOME

Sumber: Friedman (1974: 53)

Pada gambar tersebut terlihat proses penyesuaian yang mengkaitkan jumlah uang beredar atau jumlah penawaran uang dengan variabel-variabel lain dapat dibentuk dalam suatu sistem. Dengan demikian variabel Y dan $(1/P) (dp/dt)$ dapat memadai sebagai kelengkapan persamaan yang ada.

Biaya memegang uang merupakan fungsi yang amat penting bagi seseorang, sedemikian pentingnya sehingga orang bersedia menanggung biaya memegang uang atau memperoleh penghasilan yang rendah dari rekening giro, sehingga Samuelson dan Nordhaus (2005 : 514) mendefinisikan biaya memegang uang sebagai: "Pengorbanan bunga dan keuntungan yang seharusnya diperoleh bila uang ditanam dalam bentuk aktiva yang memberikan penghasilan atau bunga. Suku bunga adalah penerimaan sebagai imbalan atas uang yang dipinjamkan".

Efek makro ekonomi kebijaksanaan ekspansi dan kontraksi moneter dapat dianalisis secara ilmiah dan intuitif dalam model diagram IS - LM dengan anggapan efek dari pergerakan ekspansi dinyatakan sebagai kenaikan dalam suplai uang (Mork, 1992: 154-155).

Dalam keadaan tersebut ekspansi moneter mempengaruhi produk domestik bruto dan tingkat bunga, demikian pula halnya dengan kontraksi moneter. "Implikasinya bahwa bila permintaan akan uang tidak sensitif atau tidak elastis terhadap tingkat bunga maka kebijaksanaan moneter-lah yang efektif, adalah ciri yang sangat penting dari teori moneter klasik" (Boediono, 1996: 23).

Mengikuti teori moneter Friedman (1974: 42) menyatakan suatu kesatuan elastisitas permintaan terhadap uang respek terhadap pendapatan riil, walaupun

Laidler (1977: 56) agak pesimis bahwa efek kebijaksanaan moneter sulit untuk diramalkan dalam perekonomian suatu negara.

2.1.4. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter

Kebijaksanaan moneter erat kaitannya dengan mekanisme transmisi, yang intinya memperbincangkan gejala moneter di pasar uang yang bisa disebut gejala nominal (*nominal phenomenon*) disalurkan ke sektor riil (*riel sector*), salah satunya variabel sektor riil tersebut adalah perdagangan internasional (ekspor dan impor) (Reksoprayitno, 2000: 131).

Taylor menyatakan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah "*the process through which monetary policy decisions are transmitted into change in real GDP and inflation*" (Warjiyo dan Solikin, 2003:18).

Dalam garis besar masalah mekanisme moneter dapat diuraikan dengan urutan teori sebagai berikut:

1. Mekanisme Transmisi Teori Kuantitas Uang Tradisional

Teori kuantitas uang tradisional sebenarnya menganut *direct transmission mechanism*, atau disebut juga mekanisme transmisi langsung. Sebaliknya teori Keynes, baik yang tradisional maupun yang moderen, mekanisme transmisi yang dipakainya adalah mekanisme transmisi tidak langsung. Bekerjanya mekanisme transmisi langsung menurut teori kuantitas mengasumsikan perekonomian berada dalam keadaan ekuilibrium. Ini berarti bahwa jumlah uang beredar analog dengan jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat pada pendapatan nasional yang terjadi.

Teori permintaan uang klasik bermula dari teori tentang jumlah uang beredar dalam masyarakat. Teori ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa seseorang atau masyarakat menyimpan uang kas, tetapi lebih pada peranan uang dalam perekonomian. Secara sederhana teori permintaan uang klasik dalam bentuk persamaan pertukaran atau *The Equation of Exchange* merupakan pengungkapan *The Quantity Theory of Money* hasil pemikiran seorang pemikir ekonomi Amerika Irving Fisher (1867-1947). Bentuk persamaannya dinyatakan dalam suatu persamaan identitas sebagai berikut:

$$MV = PT ; \dots\dots\dots (1)$$

$$MV + M'V' = PT ; \dots\dots\dots (2)$$

Pada persamaan (1), setiap transaksi selalu ada pembeli dan penjual. Jumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli harus sama dengan jumlah uang yang diterima oleh penjual. Nilai yang dijual sama dengan volume transaksi (T) dikalikan harga rata-rata dari barang tersebut (P). Volume uang yang ada dalam masyarakat (M) dikalikan berapa kali rata-rata uang bertukar dari satu tangan ke tangan yang lain, atau rata-rata “perputaran” uang dalam periode tersebut (V).

Pada persamaan (2) berbeda dengan persamaan (1), pembayaran terbagi dalam dua kategori. M' sebagai volume deposit dan V' sebagai kecepatan peredaran deposit. Meskipun demikian, sebenarnya persamaan di atas merupakan bentuk pendapatan dari persamaan kuantitas dan diubah bentuknya menjadi permintaan uang.

Berdasarkan mekanisme transmisi tersebut, dalam jangka pendek pertumbuhan jumlah uang beredar hanya mempengaruhi perkembangan *output* riil.

Selanjutnya, dalam jangka menengah pertumbuhan jumlah uang beredar akan mendorong kenaikan harga (inflasi), yang pada gilirannya menyebabkan penurunan *output riil* menuju posisi semula. Dalam keseimbangan jangka panjang, pertumbuhan jumlah uang beredar tidak berpengaruh pada perkembangan *output riil*, tetapi mendorong kenaikan laju inflasi secara proporsional. Jalur moneter yang bersifat langsung ini dianggap tidak dapat menjelaskan pengaruh faktor-faktor selain uang terhadap inflasi, seperti suku bunga, nilai tukar, harga asset, kredit, dan ekspektasi.

Dalam perkembangan selanjutnya, selain jalur moneter langsung, mekanisme transmisi pada umumnya juga dapat terjadi melalui lima jalur lainnya, yaitu *direct monetary channel* 'jalur moneter langsung', *interest rate channel* 'jalur suku bunga', *exchange rate channel* 'jalur nilai tukar', *assets price channel* 'jalur harga asset', *credit channel* 'jalur kredit', dan *expectation channel* 'jalur ekspektasi' (Warjiyo dan Solikin, 2003: 19).

Konsep-konsep Fisher dan Snyder mengenai transaksi (T) dan tingkat harga umum (P) diformulasikan kembali ke dalam teori kuantitas, yang diekspresikan dalam bentuk persamaan identitas sebagai berikut:

$$Y = Py ; \dots \dots \dots (3)$$

di mana:

Y adalah pendapatan nasional nominal

P adalah indeks harga, secara implisit estimasi pendapatan nasional dalam harga konstan

y adalah pendapatan nasional dalam harga konstan

Pada pengertian terdahulu M sebagai stok uang, tetapi untuk V berikut ini sebagai jumlah rata-rata dari perkalian per unit waktu stok uang yang digunakan dalam pembuatan transaksi pendapatan (dalam hal ini pembayaran untuk jasa produktif akhir, atau dengan alternatifnya untuk barang-barang dan jasa akhir) dalam keseluruhan transaksi. Dengan demikian persamaan kuantitas tersebut dapat ditulis kembali dalam bentuk persamaan identitas pendapatan sebagai berikut:

$$MV = Py ; \dots\dots\dots (4)$$

atau $MV + M^*V^* = Py ; \dots\dots\dots (5)$

Versi yang dikemukakan oleh A. Marshall dari *Cambridge University* atau terkenal dengan *Cambridge Cash-Balances Approach* diekspresikan dengan notasi yang sama, sehingga formulasi A. Marshall dapat ditulis sebagai berikut ini:

$$M = kPy; \dots\dots\dots (6)$$

di mana pengertian M , P dan y didefinisikan seperti dalam persamaan (3) dan (4), sedangkan k adalah ratio dari stok barang terhadap pendapatan $k = 1/V$.

Daya beli umum (*general purchasing power*) merupakan aspek yang mengutamakan uang dalam pendekatan transaksi. Antara penjualan dan pembelian merupakan aspek yang mengutamakan uang dalam pendekatan *Cash-Balances Approach*.

Para ekonom dari Universitas Cambridge mengadakan berbagai penyederhanaan mengenai permintaan terhadap uang terutama Pigou. Variabel-variabel lain yang mempengaruhi permintaan terhadap uang dianggap konstan

dalam jangka pendek, sehingga teoritis dari Universitas Cambridge tersebut menganggap jumlah kekayaan, volume transaksi dan pendapatan nasional mempunyai hubungan yang proporsional-konstan satu sama lain. Secara matematis formulasi A. Marshall ini sama dengan formulasi Irving Fisher, namun implikasinya berbeda. A. Marshall memandang bahwa individu atau masyarakat selalu menginginkan sebagian (proporsi) tertentu dari pendapatannya (P_y) dalam bentuk uang kas (yang dinyatakan dengan k), sehingga kP_y merupakan keinginan individu atau masyarakat akan uang kas (M_D), yang secara matematis dapat diformulasikan dalam bentuk persamaan identitas sebagai berikut:

$$M_D = kP_y ;$$

atau $M_D = mP_y$;(7) (Bradley, 1985: 450)

di mana M_D adalah permintaan uang kas, dan m adalah rasio konstan permintaan uang terhadap GNP nominal ($m = \frac{M_D}{P_y}$)

Berdasarkan formulasi tersebut, telah didapatkan perilaku permintaan uang menurut teori A. Marshall, yang merupakan awal dari teori permintaan akan uang. Teori ini masih sangat sederhana, terkandung di dalamnya beberapa kelemahan yang kemudian atas dasar kelemahan-kelemahan ini lalu disempurnakan oleh teori-teori moneter berikutnya.

2. Mekanisme Transmisi Teori Keynes Tradisional

J. M. Keynes menekankan permintaan akan uang pada fungsi yang lain, yaitu sebagai *store of value* dan bukan hanya sebagai *means of exchange*. Teori ini kemudian terkenal dengan nama teori *Liquidity Preference*. Meskipun bisa dikatakan bahwa teori uang Keynes adalah teori yang bersumber pada teori

Cambridge, tetapi J.M. Keynes mengemukakan pandangan yang betul-betul berbeda dengan teori moneter tradisi klasik.

Dalam teorinya tentang permintaan akan uang kas, Keynes membedakan antara motif transaksi dan motif berjaga-jaga serta motif spekulasi.

a. Permintaan Uang Untuk Tujuan Transaksi

Individu atau perusahaan memerlukan uang kas untuk membelanjai transaksi. Transaksi ini sering terjadi tidak bersamaan waktunya dengan penerimaan uang. Pengeluaran ini seringkali tidak bisa diperkirakan lebih dahulu, sehingga sangat diperlukan adanya uang kas di tangan. Meskipun seandainya pengeluaran dan penerimaan itu dapat diperkirakan dengan tepat namun uang kas di tangan tetap diperlukan, sebab penerimaan yang diharapkan mungkin tidak jadi diterima, atau pengeluaran untuk transaksi yang sangat penting perlu dilakukan sebelum penerimaan datang, atau mungkin suatu transaksi yang memberikan keuntungan besar sangat menarik untuk dilakukan sebelum penerimaan datang.

Dalam kaitannya dengan menerima pendapat teoritis Cambridge tersebut, J.M. Keynes menegaskan kembali bahwa:

“Permintaan uang dari masyarakat untuk tujuan transaksi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional dan tingkat bunga atau biaya oportunitas dari uang yang dipegang. Semakin tinggi pendapatan nasional semakin besar volume transaksi dan semakin besar pula kebutuhan uang untuk memenuhi tujuan transaksi” (Boediono, 1996: 28).

Berdasarkan teori tersebut jelaslah bahwa permintaan uang dalam suatu masyarakat untuk tujuan transaksi merupakan suatu proporsi tertentu dari volume transaksi, dan volume transaksi tidak merupakan suatu proporsi yang selalu konstan dari tingkat *output* masyarakat atau pendapatan nasional, tetapi

dipengaruhi pula oleh tinggi rendahnya tingkat bunga atau biaya oportunitas dari uang yang dipegang masyarakat.

Kohn (1993 : 594) memformulasikan fungsi permintaan akan uang untuk transaksi dalam bentuk persamaan fungsi neraca asset sebagai berikut:

$$D_T = f(E, -i_{oc}) ; \dots \dots \dots (8)$$

di mana:

D_T adalah permintaan uang untuk transaksi (M_t)

E adalah pengeluaran analog pendapatan riil (Y/p)

i_{oc} adalah biaya oportunitas dari uang yang dipegang.

Berdasarkan persamaan fungsi neraca asset tersebut, dapat diturunkan fungsi permintaan uang dalam bentuk persamaan matematis sebagai berikut:

$$M_D = D_T + D_A = f(E, -i_{oc}) + g(W, -i_{oc})$$

Permintaan uang versi Keynesian diekspresikan dalam formula fungsi sebagai berikut:

$$M_D = kE + (x - z i)$$

di mana:

M_D adalah jumlah uang yang diminta

I adalah tingkat bunga di pasar uang

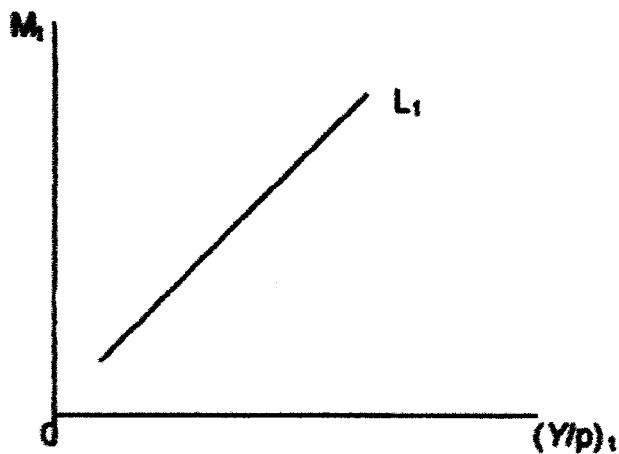
k , x , dan z adalah konstanta

Eksistensi jumlah uang dapat disimbolkan sebagai M . Dengan demikian persamaan jumlah uang diminta sama dengan eksistensi jumlah uang, dan dengan demikian jumlah uang yang diminta dapat diformulasi kembali dalam bentuk persamaan sebagai berikut: $M_D = M$

Seterusnya dengan menggunakan persamaan fungsi permintaan uang versi Keynesian, kondisi keseimbangan jumlah uang juga dapat diformulasi kembali dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$kE + (x - z i) = M$$

Sehingga ketergantungan permintaan uang untuk transaksi terhadap pendapatan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.4 KURVE PERMINTAAN UANG UNTUK TRANSAKSI

Sumber : Sugiyanto (1991: 153)

Permintaan uang untuk transaksi riil pada Gambar 2.4 ditunjukkan dalam bentuk kurve L_1 . Dari gambar tersebut terlihat pula bahwa semakin tinggi pendapatan, maka semakin banyak uang yang dipegang untuk keperluan transaksi (M_1). Hubungan antara permintaan uang untuk transaksi dengan pendapatan riil (Y/p) tidak selalu linier atau tidak selalu berbentuk garis lurus seperti yang terlihat pada $L_1 = f(Y/p)$.

b. Permintaan Uang Untuk Tujuan Berjaga-jaga

Menurut Keynes permintaan akan uang untuk tujuan berjaga-jaga ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama dengan faktor-faktor yang

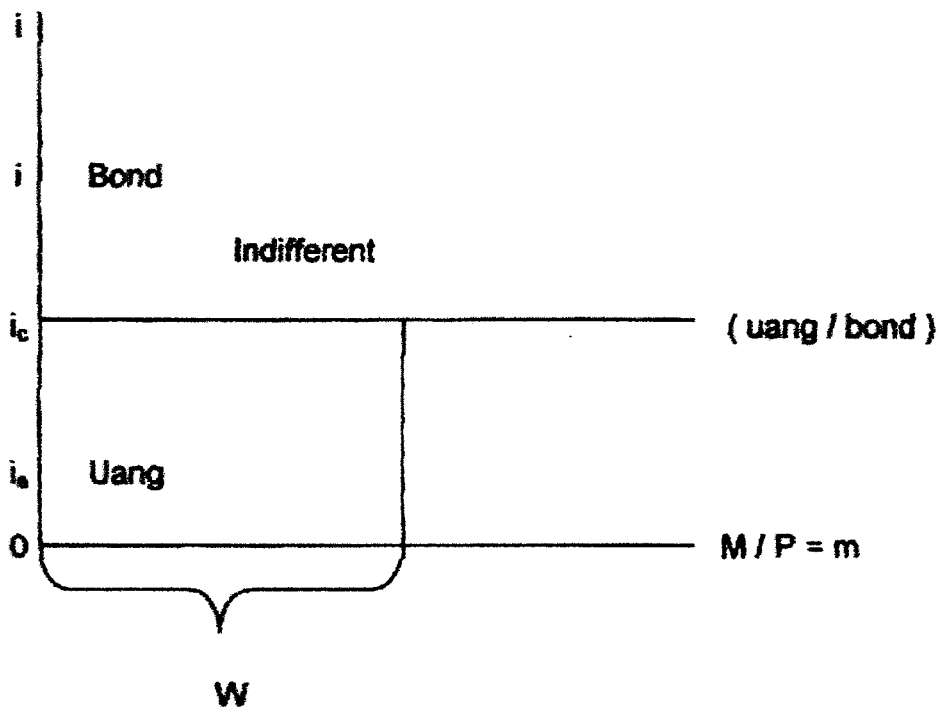
mempengaruhi permintaan akan uang untuk transaksi, yaitu terutama dipengaruhi oleh tingkat pendapatan seseorang atau masyarakat, dan mungkin dipengaruhi pula oleh tingkat bunga meskipun dianggap tidak kuat pengaruhnya.

c. Permintaan Uang Untuk Tujuan Spekulasi

Dalam risalahnya Keynes menyadari bahwa masyarakat menghendaki jumlah uang kas yang lebih dari kebutuhannya untuk menyimpan kekayaannya dalam bentuk aktiva yang paling lancar (uang kas). Uang kas yang disimpan ini memenuhi fungsi uang sebagai alat penimbun kekayaan (*store of value*). Dalam istilah yang lebih moderen sering disebut permintaan uang untuk penimbun kekayaan (*asset demand for money*).

Besarnya permintaan uang untuk tujuan spekulasi menurut Keynes ditentukan oleh perbandingan hasil dari bentuk kekayaan yang lain (*obligasi/bond*). Apabila yang dipegang uang, maka hasil yang diperoleh tidak ada namun memperoleh kemudahan untuk melakukan transaksi. Dengan memegang obligasi, seseorang akan memperoleh bunga. Dengan demikian semakin tinggi tingkat bunga, semakin rendah keinginan masyarakat akan uang kas untuk tujuan motif spekulasi. Alasannya: **Pertama**, apabila tingkat bunga naik, berarti ongkos memegang uang kas (*opportunity cost of holding*) makin besar, maka lebih baik memegang obligasi. Dengan demikian keinginan masyarakat akan uang kas akan semakin kecil.

Gambar 2.5 berikut adalah kurve permintaan uang, *bond*, uang dan *bond* berdasarkan tingkat bunga *indifferent* dan *different* untuk motif spekulasi.



Gambar 2.5 KURVE PERMINTAAN UANG, BOND, UANG DAN BOND BERDASARKAN TINGKAT BUNGA INDIFFERENT DAN DIFFERENT UNTUK MOTIF SPEKULASI

Sumber: Branson (1999: 246)

Berdasarkan gambar tersebut khususnya tentang *bond*, akan didapat persamaan *Total rate of return on bond*, e sebagai berikut:

$$e = i + g = \left\{ i + \left(\frac{i}{j^e} \right) \right\} - 1 \quad (\text{Mangkoesobroto dan Algifari, 1998: 105})$$

misal:

$$e = 0, \text{ maka}$$

$$0 = i + \frac{i}{j^e} - 1$$

$$i + \frac{i}{j^e} = 1$$

$$\frac{ij^e + i}{j^e} = 1$$

$$i(i^e + 1) = i^e$$

Dengan demikian didapatkan *i critic* sebagai berikut:

$$i_c = \frac{i^e}{i^e + 1} ; \dots\dots\dots (9)$$

1. Bila : $i > i^e$, orang akan memilih memegang *bond*

$i < i^e$, orang akan memilih memegang uang.

2. Bila : $e = 0$

$i = i^e$, orang akan memilih memegang *bond* atau uang
(*indifferent*)

3. Bila : $e < 0$

$i < i^e$, orang akan memilih memegang uang.

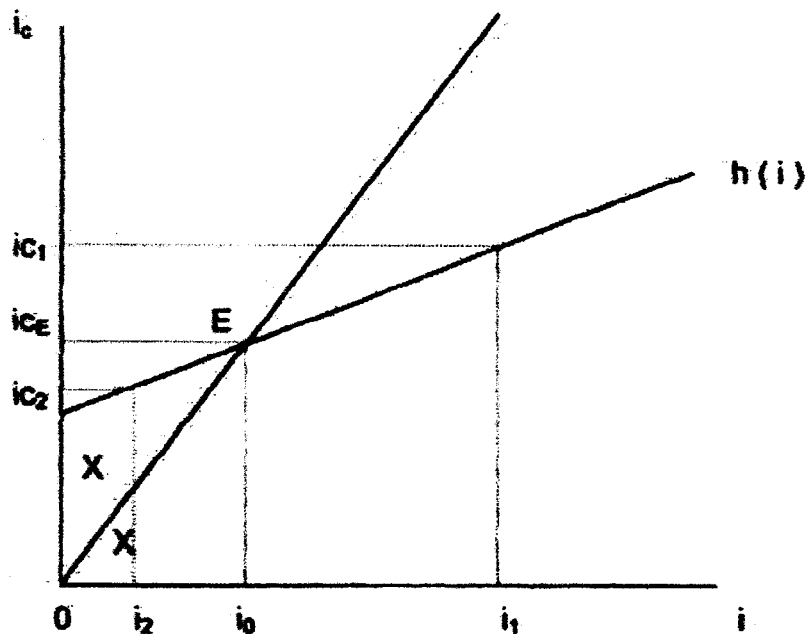
4. Bila : $e > 0$

$i > i^e$, orang akan memilih memegang *bond*

Sebaliknya semakin rendah tingkat bunga, semakin besar keinginan masyarakat untuk menyimpan uang kas. Kedua, hipotesis Keynes menyatakan bahwa masyarakat menganggap akan adanya tingkat bunga normal (berdasar pengalaman), terutama pengalaman tingkat bunga yang baru terjadi. Tingkat bunga normal artinya suatu tingkat bunga yang menyebabkan masing-masing orang bersikap *indifferent* (tidak acuh) apakah ia memegang uang atau obligasi. Selain itu, setiap terjadi perubahan (penyimpangan), tingkat bunga diharapkan akan kembali ke tingkat bunga normal ini. Jadi, apabila tingkat bunga kenyataannya berada di atas tingkat normal, maka masyarakat akan mengharapkan tingkat bunga tidak akan naik lagi, bahkan diperkirakan akan turun atau kembali ke tingkat bunga normal tersebut. Apabila pada suatu saat tingkat bunga berada di atas tingkat bunga normal maka seluruh uang yang dialokasikan

untuk spekulasi akan diwujudkan dalam bentuk obligasi dan pada saat tingkat bunga berada di bawah tingkat bunga normal, yang dipegang adalah uang kas seluruhnya.

Berdasarkan *Total rate of return* tersebut, hubungan antara bunga normal dengan bunga kritis dapat dilihat pada Gambar 2.6 berikut ini.



Gambar 2.6 KURVE PERMINTAAN UANG DENGAN TINGKAT BUNGA KRITIS

Sumber: Branson (1999: 247)

Berbeda dengan analisis kaum klasik, Keynes lebih menekankan analisisnya pada motif spekulasi, yaitu peranan tingkat bunga dalam menentukan permintaan uang untuk spekulasi. Motif dari pemegangan uang terutama bertujuan untuk memperoleh “keuntungan”. Pandangan ini merupakan satu langkah perkembangan teoritis ke arah integrasi teori moneter dengan teori nonmoneter (Johnson, 1962).

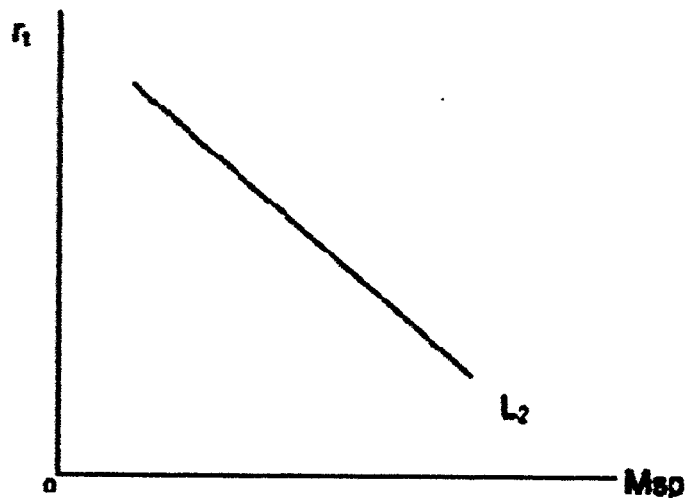
Dalam teori permintaan uang klasik telah ditegaskan oleh Marshall dan Pigou bahwa faktor ketidakpastian masa depan (*uncertainty*) dan faktor harapan (*expectations*) dari pemilik kekayaan bisa mempengaruhi permintaan dari pemilik kekayaan tersebut. Bentuk permintaan uang dari teori Cambridge tidak berbeda banyak dari teori Irving Fisher, dan faktor-faktor ini hanya masuk analisis secara kualitatif. Perumusan permintaan uang untuk motif spekulasi dari Keynes merupakan suatu langkah "formalisasi" dari faktor-faktor ini ke dalam teori moneter.

Keynes tidak membicarakan faktor *uncertainty* dan *expectations* secara umum, seperti teoritis-teoritis dari Universitas Cambridge. Keynes hanya membatasi *uncertainty* dan *expectations* pada satu variabel saja, yaitu tingkat bunga.

Pada garis besarnya teori Keynes membatasi pada keadaan dimana pemilik kekayaan membatasi pada keadaan bisa memilih memegang kekayaannya dalam bentuk uang tunai atau obligasi (*bond*). Uang tunai dianggap tidak memberikan penghasilan, sedang obligasi dianggap memberikan penghasilan berupa sejumlah uang tertentu setiap periode. Dalam teori Keynes, obligasi dapat memberikan penghasilan sejumlah uang setiap periode waktu yang tak terbatas (*perpetuity*). Obligasi semacam ini dalam model Keynes sebagai alternatif memegang kekayaan dalam bentuk uang tunai, hal ini tidak mengurangi validitas teori Keynes untuk kasus dimana obligasi tidak berbentuk *perpetuity*, yaitu hanya memberikan aliran penghasilan sampai tanggal jatuh tempo saja.

Permintaan uang untuk spekulasi merupakan unsur pembaruan dalam teori moneter Keynes. Motif dari pemegangan uang ini adalah terutama bertujuan memperoleh “keuntungan” meskipun faktor ketidakpastian (*uncertainty*) masa depan dan faktor harapan (*expectations*) dapat mempengaruhi permintaan akan uang untuk spekulasi.

Ketergantungan permintaan uang kas untuk spekulasi terhadap tingkat bunga dapat dilihat pada Gambar 2.7 sebagai berikut:

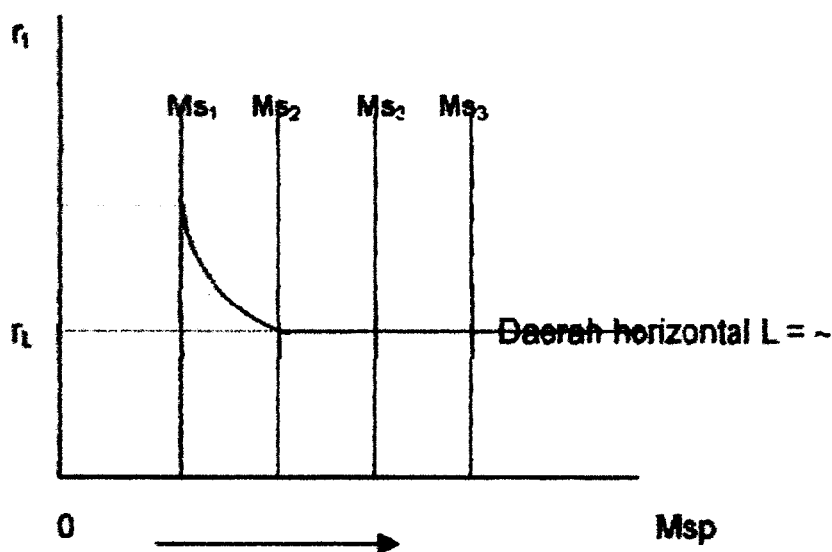


Gambar 2.7 KURVE PERMINTAAN UANG UNTUK SPEKULASI

Sumber: Sugiyanto (1991: 156)

Pada sisi lain Gambar 2.8 menunjukkan adanya hubungan negatif antara tingkat bunga (r) dengan permintaan uang untuk spekulasi (L_2). Gambar tersebut juga memperlihatkan yang oleh Keynes disebut jerat likuiditas (*liquidity trap*) di bagian horizontal dari permintaan uang kas pada tingkat bunga r_L . *Liquidity trap* menggambarkan bahwa pada tingkat bunga yang begitu rendah (menurut ukuran pengalaman-pengalaman masa lalu), elastisitas permintaan uang kas menjadi tak terhingga besarnya (∞). Masyarakat tidak akan memegang surat berharga pada

tingkat bunga ini (r_L) karena masyarakat memperkirakan bahwa dikemudian hari tingkat bunga akan naik sebab tingkat bunga r_L sudah begitu rendah, tidak mungkin turun lagi. Dengan kata lain setiap orang akan mengharap harga surat berharga akan turun dimasa datang sehingga tidak ada seorangpun yang mau membeli surat berharga sekarang, semuanya menghendaki uang kas.



Gambar 2.8 LIQUIDITY TRAP CURVE
Sumber: Patinkin (1974: 130)

Permintaan uang kas ditunjukkan oleh $M_{sp} = m(Y, r, \dots, r_j)$. Fungsi permintaan uang, $L = kY - lr$. r tidak mempengaruhi L , tetapi:

Jika r turun, maka M_s juga turun dan L tetap.

Jika r naik, maka M_s juga naik dan L tetap.

Untuk memperjelas bagaimana unsur 'spekulasi' masuk dalam pemilihan antara memegang uang dan obligasi dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut: $K = R_p; \dots\dots\dots(10)$

di mana : K adalah hasil yang diterima per tahun bila memegang obligasi, R adalah tingkat bunga, dan P adalah harga pasar (atau nilai sekarang) dan obligasi *perpetuity* tersebut. Persamaan (10) bisa juga ditulis sebagai berikut:

$$P = \frac{K}{R}; \dots\dots\dots(11)$$

Karena K adalah konstan, harga pasar obligasi (P) berbanding terbalik dengan tingkat bunga (R). Bila tingkat bunga turun, maka berarti harga pasar obligasi naik; dan sebaliknya bila tingkat bunga naik berarti harga pasar obligasi turun.

Kohn (1993 : 595) memformulasikan permintaan uang untuk spekulasi sebagai berikut:

$$D_A = g(W, -i_{oc}); \dots\dots\dots(12)$$

di mana:

D_A adalah permintaan uang untuk spekulasi

W adalah total kepemilikan asset.

i_{oc} adalah biaya oportunitas dan uang yang dipegang.

Dengan demikian permintaan total akan uang dapat diformulasikan dengan memasukkan persamaan (8) ke persamaan (12), diperoleh:

$$M_D = D_T + D_A = f(E, -i_{oc}) + g(W, -i_{oc}); \dots\dots\dots(13)$$

di mana:

M_D adalah jumlah uang yang diminta

dan mengikuti versi Keynesian permintaan akan uang diformulasikan dalam bentuk persamaan berikut:

$$M_D = kE + (\chi - z_i); \dots\dots\dots(14)$$

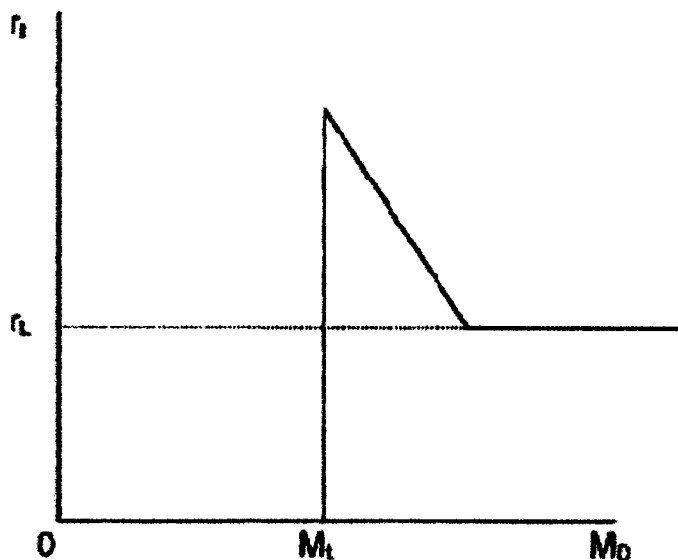
di mana:

i adalah tingkat bunga pasar

k , X dan z adalah konstanta.

Secara matematis, permintaan total akan uang dapat diekspresikan sebagai berikut : $M_t = ky$, untuk tujuan transaksi yang besarnya tergantung dari pendapatan dan $M_s = I(r)W$, untuk tujuan spekulasi, yang besarnya tergantung tingkat bunga (r) dan kekayaan (W) dimasukkan sebagai variabel, sebab permintaan uang untuk spekulasi merupakan bagian kekayaan total.

Permintaan uang total: $(M/P)_d = kY + I(r)W$, merupakan permintaan uang riil. Karena analisis Keynes adalah analisis jangka pendek, maka W dianggap tetap tidak berubah, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut: $(M/P)_d = kY + I(r)$. Dengan demikian dalam persamaan ini Keynes telah memasukkan tingkat bunga sebagai faktor yang mempengaruhi permintaan uang.



Gambar 2.9 KURVE PERMINTAAN UANG UNTUK TRANSAKSI DAN SPEKULASI PADA LIQUIDITY TRAP

Sumber: Sugiyanto (1991: 158)

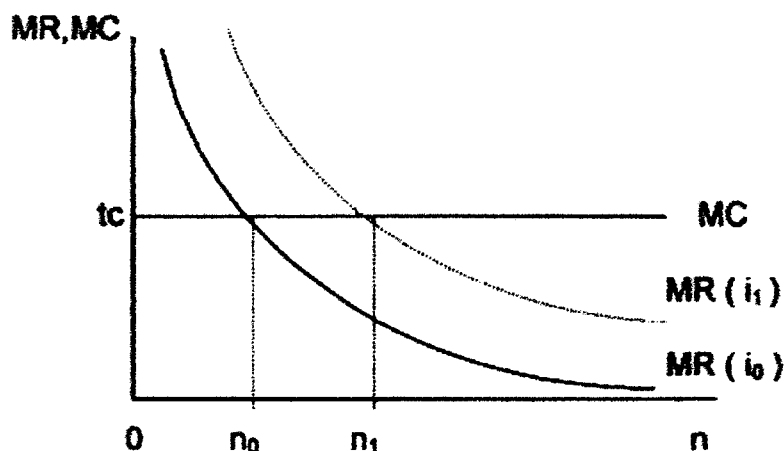
Gambar 2.9 memperlihatkan total permintaan uang terdiri atas permintaan uang untuk transaksi OMT dan permintaan uang untuk spekulasi. Permintaan uang untuk transaksi tidak dipengaruhi tingkat bunga, sedangkan permintaan uang untuk spekulasi berhubungan negatif dengan tingkat bunga.

Dalam gambar tersebut juga memperlihatkan bagian dan fungsi permintaan uang untuk spekulasi yang terjadi pada jerat likuiditas (*liquidity trap*).

3. Mekanisme Transmisi Teori Keynes Moderen

a. Permintaan Uang Untuk Transaksi (Baumol-Tobin)

Perkembangan teori permintaan akan uang untuk tujuan transaksi setelah Keynes terutama sekali berpangkal pada karya dari Profesor William Baumol dari Princeton University dan Profesor James Tobin dari Yale University.



Gambar 2.10 KURVE BIAYA TRANSAKSI

Sumber: Branson (1999: 260)

Baumol (1952) dan Tobin (1958) menampilkan teori biaya transaksi dalam teori permintaan uang. Keduanya beranggapan bahwa setiap transaksi ada biaya, jadi perlu diperhitungkan. Biaya transaksi tersebut dalam bentuk kurve dapat

dilihat pada gambar 2.10. Pada gambar tersebut terlihat pula bahwa biaya transaksi dinyatakan sebagai t_c dan berada sepanjang garis MC. Semakin besar transaksi, semakin kecil MR dan *slope* pada kurve menjadi negatif.

a. Permintaan Uang Untuk Spekulasi (Tobin)

Menurut Tobin (1974) bahwa: "lokus stok uang, M dan tingkat harga, P , kombinasi pendapatan riil, Y dan tingkat bunga, r adalah $M/P = L(Y, r)$ dapat digambarkan secara vertikal jika permintaan terhadap uang ditentukan oleh tingkat bunga.

Untuk memahami karakteristik proposisi kaum moneteris, Tobin menggunakan asumsi berikut:

1. Y hanya dapat dirubah jika M/P dirubah.
2. Dalam hal yang khusus, perubahan lokus IS tidak dapat mengubah Y .
3. Jika V_0 adalah penawaran yang dideterminis, kemudian M/P di determinis dan tingkat harga, P dan pendapatan uang, PY keduanya adalah proporsional terhadap M .
4. Jika Y tidak dideterminasi secara unik oleh persamaan penawaran dari suatu sistem ini dapat dirubah salah satunya oleh perubahan dalam kurva IS, haluannya dari kebijakan atau guncangan variabel eksogenous lainnya, atau oleh perubahan dalam lokus LM.
5. Dalam hal yang khusus, suatu kenaikan dalam stok nominal uang M sebagiannya diserap ke dalam suatu kenaikan dalam Y , sebagian dalam kenaikan P dan sebagiannya lagi pengurangan dalam kecepatan yang perlu untuk menurunkan tingkat suku bunga.

6. Dengan mendeterminasi suplai Y , tingkat harga dan pendapatan uang adalah tidak untuk dihubungkan pada suplai uang nominal M . Semua ini tergantung pada tingkat bunga dan kebijaksanaan moneter.

Jadi pada hakekatnya, perkembangan aspek spekulasi permintaan uang dari teori Keynes terutama sekali berasal dari karya Profesor James Tobin (1958) dari Yale University.

b. Mekanisme Transmisi Teori Kuantitas Moderen

Publikasi Milton Friedman dan Anna Schwartz : *A Monetary History of the United State* (1963: ix) merupakan gambaran kesepadanan dalam pengembangan Ilmu Ekonomi Moneter setelah Boumol dan Tobin. Friedman dan Anna secara konsisten telah membuktikan bahwa ada hubungan antara fluktuasi dalam penawaran uang dan pendapatan nasional pada periode 1867-1960 yang lalu. Publikasi ini juga melihat ada kemunduran dalam penawaran uang antara tahun 1929 dan tahun 1933 terutama sejak menghebatnya depresi besar (*great depression*) tahun 1930-an.

Pada tahun sebelumnya Friedman juga telah menyajikan pendekatan teoritis tentang teori moneter secara umum dalam *The Quantity Theory of Money-A Restatement*. Kemudian Friedman merespon kembali pendekatannya dalam *Theoretical Framework for Monetary Analysis* yang dipublikasikan pada *Journal of Political Economy* awal tahun 1970, dan satu tahun kemudian (1971) Friedman menambahkan masalah lain dalam kertas kerjanya yang sangat ringkas *A monetary theory of nominal income* dengan tambahan *Model of Income*

Determination. Kedua kertas kerja itu kemudian dikombinasi dan dipublikasi kembali pada *National Bureau of Economic Research* (NBER).

Gordon (1974 : ix - xii) dalam kata pengantarnya mengatakan bahwa sajian versi *A Theoretical Framework* Friedman dilakukan dengan mengkombinasi sekaligus memperbandingkan 4 (empat) versi teori kuantitas, masing-masing dari:

- (1) *The Irving Fisher Transaction Version*
- (2) *The income Version*
- (3) *The Cambridge Cash-Balances Approach Version, and*
- (4) *The Friedman Re-Statement Version.*

Teori kuantitas "*The Quantity Theory*" Friedman adalah suatu proposisi tentang efek-efek perubahan jumlah uang pada perekonomian *full employment*, dimana stok kapital, *output* riil dan *employment* yang tersisa tidak berubah. Permintaan uang diperlakukan sebagai bagian dari kapital atau teori kekayaan yang memperhatikan komposisi neraca atau *portfolio* dan *asset* (Patinkin, 1974: 112)

Dalam *Simple Quantity Theory* Friedman menyatakan bahwa dalam jangka pendek, stok kapital dapat dianggap tetap, yang ditunjukkan dalam bentuk formulasi persamaan sebagai berikut:

$$F(Y, r) + g(r) = Y; \dots\dots\dots (15)$$

$$L(Y, r) = \frac{M_0}{P} ; \dots\dots\dots (16)$$

di mana Y adalah pendapatan nasional riil, r adalah tingkat bunga, dan M_0 adalah kuantitas uang yang tetap.

Dengan mendeterminasi variabel Y pada persamaan tersebut melalui hubungan relasi di luar sistem, maka teori kuantitas sederhana dinyatakan dalam bentuk persamaan:

$$Y = Y_0; \dots\dots\dots (17)$$

Persamaan (17) kemudian memasukkan *a sequential solution* dari sistem (15)-(16), sehingga substitusi (17) ke (15) dapat memecahkan $r = r_0$ dan substitusi nilai r_0 ke dalam (16) diperoleh *Classical Quantity Equation* sebagai berikut:

$$M_0 = P I(Y_0, r_0) = \frac{\ell(Y_0, r_0)}{Y_0} Y_0 = \frac{PY_0}{V}; \dots\dots\dots (18)$$

Kemudian Friedman mendeterminasi persamaan (15) dan persamaan (16) dalam suatu sistem jangka panjang melalui penambahan persamaan:

$$P = P_0; \dots\dots\dots (19)$$

Dengan *A-Restatement of the Quantity Theory*, Friedman menyatakan bahwa pada prinsipnya persamaan tersebut merupakan salah satu bentuk kekayaan. Permintaan uang (mirip dengan permintaan akan suatu barang) tergantung pada tiga hal, yaitu: **Pertama**, total kekayaan yang dimiliki, dalam segala macam bentuk kekayaan ini merupakan kendala anggaran (*budget constraint*) seperti pada teori perilaku konsumen; **Kedua**, harga dan keuntungan (*return*) dari masing-masing bentuk kekayaan; dan **Ketiga**, selera dan preferensi pemilik kekayaan.

Analisis Friedman bertitik tolak pada keuntungan marginal dari proses substitusi antar bentuk kekayaan seperti uang, obligasi, saham, surat berharga dan bentuk kekayaan yang lain (baik manusiawi maupun non-manusiawi). Dalam definisinya yang paling luas, kekayaan seseorang adalah seluruh sumber

'pendapatan' atau jasa yang dapat dikonsumsi. Salah satu bentuk kekayaan ini adalah kapasitas produktif dari manusia. Dengan demikian bentuk kekayaan yang pertama yang dapat dimiliki seseorang adalah kapasitas produksi manusia (sumber daya manusia). Hubungan antara seluruh aliran pendapatan (Y) dengan stok kekayaan manusiawi (W) = (Y / r) , dimana r adalah tingkat bunga.

Keuntungan dalam memegang uang berupa kemudahan dalam melakukan transaksi secara riil, besarnya keuntungan memegang uang ini dipengaruhi oleh volume barang yang ditransaksikan. Untuk per unit uang yang dipegang, volume barang yang dapat ditransaksikan ditentukan oleh harga barang, P . Dengan demikian keuntungan memegang uang tergantung pada tingkat harga, P .

Return dari aktiva uang tunai dari waktu ke waktu selain ditentukan oleh P , ditentukan pula oleh persentase perubahan tingkat harga $(dP/dt)/P$ (dimana t adalah variabel waktu, dP / dt adalah perubahan P dari waktu ke waktu). Kalau harga barang-barang turun, maka nilai riil dari uang tunai yang dipegang naik; sebaliknya bila harga naik maka nilai riil dari setiap satuan nominal uang tunai yang dipegang turun. Tapi *return* untuk uang tunai ini ternyata adalah kebalikan dari *return* dari pemegangan aktiva fisik. Bila harga-harga barang naik, maka *return* untuk uang tunai turun, tetapi *return* untuk aktiva fisik naik. Karena nilai dari aktiva fisik naik, berarti ada "*capital gain*" (keuntungan kapital). Sebaliknya akan terjadi bila harga-harga turun *return* untuk aktiva uang tunai naik, *return* untuk aktiva fisik turun. Jadi *return* untuk aktiva uang tunai dan aktiva fisik dipengaruhi oleh $(dP/dt)/P$.

Tingkat *return* untuk aktiva yang dipegang dalam bentuk obligasi adalah (sama dengan konsepsi Keynes) *interest income plus capital gain*. *Interest income* adalah jumlah tetap tertentu yang dicantumkan dalam obligasi sebagai imbalan yang akan diterima oleh pemegang obligasi setiap periode tertentu (setiap bulan atau setiap tahun); dan ini tentunya ditentukan oleh tingkat bunga yang berlaku (r). *Capital gain* adalah keuntungan (atau, kerugian, kalau *capital gain* ini negatif) yang bersumber dari naik turunnya harga pasar dan obligasi.

Friedman menyatakan bahwa besar *capital gain* ini ditentukan dari perubahan tingkat bunga dari waktu ke waktu. Kalau tingkat bunga (r) naik, maka harga obligasi turun, kalau tingkat bunga turun maka harga obligasi naik. Jadi besarnya *capital gain* ditentukan oleh persentase perubahan tingkat bunga dari waktu ke waktu, atau oleh (dr_b / dt) . *Return total* dan pemegang obligasi adalah:

$r_b - \frac{dr_b / dt}{r_b}$ (perhatikan tanda minus pada $\frac{dr_b / dt}{r_b}$, karena kalau perubahan r positif, berarti ada *capital gain* yang negatif; dan sebaliknya bila perubahan r tersebut negatif berarti ada *capital gain* yang positif).

Return untuk saham-saham atau *equities* dianggap oleh Friedman serupa dengan *return* untuk obligasi, hanya saja diasumsikan bahwa *return* (dalam satuan uang atau *in monetary terms*) untuk *equities* dipengaruhi pula oleh perubahan tingkat harga. *Return* untuk *equities*:

$$r_b - \frac{dr_b / dt}{r_b} + \frac{dP / dt}{P}$$

Faktor yang terakhir yang dianggap menentukan permintaan dari seseorang akan uang tunai adalah preferensi dalam memegang berbagai bentuk kekayaan (U). Faktor ini adalah faktor subyektif yang berbeda antara satu orang dengan orang lain. Ada orang yang kecenderungan pribadinya lebih berselera memegang uang tunai daripada aktiva-aktiva lain.

Dari uraian-uraian tersebut, fungsi permintaan uang dapat dituliskan kembali dalam bentuknya yang lebih lengkap sebagai berikut:

$$M = f \left[P, rb - \frac{ldr_b}{r_e dt}, re + \frac{ldp}{P dt} - \frac{ldp}{r_e dt}, \frac{ldp}{P dt}, W, \frac{y}{r}, U \right]; \dots\dots\dots (20)$$

Dengan ungkapan yang sedikit berbeda dengan ungkapan aslinya, Havrilesky and John (1972:174-175) menyebutkan bahwa fungsi permintaan akan uang Friedman dalam *A Re-Statement of the Quantity Theory*-nya sebagai berikut:

$$\frac{Md}{P} = f \left[i_m, i_b, i_c, \frac{1}{P} \frac{dP}{dt}, W, n \right]; \dots\dots\dots (21)$$

di mana:

i_m adalah tingkat pendapatan (*rate of return*) uang

i_b adalah tingkat pendapatan surat obligasi

i_c adalah tingkat pendapatan modal sendiri

P adalah indeks tingkat harga.

Beberapa jumlah aktiva yang akan dipegang dalam bentuk uang tunai (M) ditentukan oleh:

(1). Besarnya kekayaan total yang dimiliki (W); semakin besar W semakin

banyak M yang dibutuhkan atau $\frac{\partial M}{\partial W} > 0$

- (2). Perbandingan antara *return* dari berbagai aktiva yang bisa dipegang. Semakin tinggi tingkat harga (P), semakin besar M nominal yang diminta, karena kebutuhan M riil tertentu, semakin besar kebutuhan M nominal. Semakin tinggi *return* untuk obligasi ($rb - \frac{rb/dt}{rb}$) semakin sedikit M yang diminta, karena *return* untuk obligasi ini merupakan *Opportunity Cost* bagi M (seandainya M yang dipegang sedikit dan lebih banyak obligasi, maka akan mendapatkan penghasilan yang lebih banyak), dan dapat dinyatakan dalam bentuk matematis sebagai berikut:

$$\frac{\partial M}{\partial \left[rb - \frac{rb/dt}{rb} \right]} < 0$$

Demikian pula semakin tinggi *return* untuk saham-saham, semakin kurang menarik bagi orang tersebut untuk memegang M , dan dapat dinyatakan dalam bentuk matematis sebagai berikut:

$$\frac{\partial M}{\partial \left[rb \frac{rb/dt}{rb} + \frac{\partial P / \partial t}{rb} \right]} < 0$$

Semakin besar *return* untuk aktiva-aktiva fisik, semakin menarik aktiva ini untuk dipegang dan semakin kurang menarik uang tunai untuk dipegang, yang dapat dinyatakan dalam bentuk matematis sebagai berikut:

$$\frac{\partial M}{\partial \left[\frac{\partial P / \partial t}{P} \right]} < 0$$

Dari bentuk matematis tersebut dapat pula dinyatakan secara verbal sebagai berikut: semakin besar kenaikan harga yang diharapkan terjadi dimasa depan,

semakin kurang menarik uang tunai untuk dipegang karena ini berarti kerugian berupa menurunnya nilai riil dari kekayaan yang dipegang dalam bentuk uang tunai tersebut. Inilah sebabnya mengapa dalam masa inflasi yang berat orang enggan memegang uang tunai dan lebih suka memegang barang!

- (3). Rasio antara kekayaan manusiawi dan nonmanusiawi (W). Semakin besar W , yaitu semakin besar *human capital relative* terhadap *nonhuman capital*, semakin besar M yang diminta, yang secara matematis ditulis sebagai berikut:

$$\frac{\partial M}{\partial W} > 0$$

- (4) Selera atau tingkat *utility* (U) atau tingkat kepuasan yang dirasakan oleh individu.

2.1.4. Transmisi Kebijakan Moneter Dan Proses Perputaran Uang

Pemahaman mengenai pengertian dan kompleksitas transmisi kebijakan moneter akan lebih jelas apabila ditempatkan pada proses perputaran uang dalam perekonomian. Dalam kaitan ini, transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menunjukkan interaksi antara bank sentral, perbankan dan lembaga keuangan lain, dan pelaku ekonomi di sektor riil melalui dua tahap proses perputaran uang. **Pertama**, interaksi yang terjadi di pasar uang, yaitu interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam berbagai aktivitas transaksi keuangan. **Kedua**, interaksi yang berkaitan dengan fungsi intermediasi, yaitu interaksi antara perbankan dan lembaga keuangan lainnya dengan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi di sektor riil (Warjiyo, 2004: 6-7).

Mekanisme transmisi kebijaksanaan moneter melalui saluran uang (*money channel*) mengacu pada dominasi peranan uang dalam perekonomian, yang pertama kali dijelaskan oleh *The Quantity of Money* dari Fisher. Teori ini pada dasarnya menggambarkan kerangka kerja yang jelas mengenai analisis hubungan langsung yang sistematis antara pertumbuhan uang beredar dan inflasi.

Mekanisme transmisi tersebut merupakan konsekuensi langsung dari proses perputaran uang dalam perekonomian. Bank-bank perlu mengelola likuiditasnya dalam bentuk cadangan dana yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu (*bank reserves*) dari aset dan pendanaan dari simpanan masyarakat dalam bentuk uang beredar (M1, M2 dan M3) dari sisi *liabilities*. Selanjutnya para pelaku ekonomi menyimpan dan menggunakan uang beredar (M1, M2 dan M3) untuk kegiatan ekonominya.

2.2. Teori Inflasi Dan Deflasi

Peristiwa moneter yang sangat penting dan yang banyak dijumpai di hampir semua negara di dunia adalah inflasi, sedangkan deflasi jarang sekali terjadi dalam perekonomian suatu negara. Pengendalian laju inflasi merupakan salah satu bentuk kebijakan ekonomi makro yang sering dikenal dengan stabilitas harga.

Definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga umum untuk menaik secara terus menerus (Boediono, 2001: 155). Inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap barang dan jasa, yang terjadi adalah deflasi (Rahardja dan Manurung, 2001: 231).

Deflasi jarang sekali terjadi dalam perekonomian suatu negara. Pendeflasian biasanya dilakukan untuk memperkirakan kenaikan fisik atau kenaikan “riil” dengan cara mendeflasikan angka-angka nilai untuk banyak macam kegiatan ekonomi yang menunjukkan kenaikan yang cepat sekali karena kenaikan fisik ditambah dengan kenaikan harga dengan memakai indeks harga.

Proses deflasi dan perhitungannya dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{GNPr} = (\text{GNPb} : \text{H}) (100)$$

di mana: GNPr adalah GNP “riil”

GNPb adalah GNP harga yang berlaku

H adalah angka indeks harga

Dalam teori inflasi, ada tiga komponen utama yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu (a) kenaikan harga, (b) bersifat umum dan (c) berlangsung terus-menerus. Kenaikan barang hanya satu kali saja pada suatu saat tertentu dan hanya ‘sementara’ (meskipun dengan persentase yang cukup besar) bukanlah merupakan inflasi. Inflasi dinyatakan sebagai perubahan secara persentase harga-harga (*percentage change in prices*).

Kenaikan harga suatu barang belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik. Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, jika terjadinya hanya sesaat.

Ada beberapa indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengetahui laju inflasi selama satu periode tertentu. Kenaikan harga atau inflasi dapat diukur

dengan menggunakan pendekatan indeks harga. Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi antara lain: (a) Indeks harga konsumen (*consumer price index*), (b) Indeks harga perdagangan besar (*wholesale price index*), dan (c) Indeks harga implisit, *GDP deflator* (Rahardja dan Mandala, 2001: 243-246).

Indeks harga konsumen (*consumer price index*) mengukur biaya atau pengeluaran untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga konsumen untuk keperluan hidup. Indeks perdagangan besar (*wholesale price index*) menitikberatkan pada sejumlah barang pada tingkat perdagangan besar. Ini berarti harga bahan mentah, bahan baku atau setengah jadi masuk dalam perhitungan indeks harga. Sedangkan *GDP deflator* mencakup jumlah barang dan jasa yang masuk dalam perhitungan GNP, jadi lebih banyak jumlahnya dibanding dua indeks sebelumnya. *GNP deflator* diperoleh dengan membagi GNP nominal (atas dasar harga berlaku) dengan GNP riil (atas dasar harga konstan).

Ada tiga cara untuk menggolongkan macam inflasi. **Pertama**, didasarkan atas 'parah' tidaknya inflasi tersebut: (a) Inflasi ringan (di bawah 10 persen setahun). (b) Inflasi sedang (antara 10 – 30 persen setahun). (c) Inflasi berat (antara 30 – 100 persen setahun), dan Hiperinflasi (di atas 100 persen setahun). **Kedua**, adalah atas dasar sebab musabab awal terjadinya inflasi: (a) Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat. Inflasi semacam ini disebut *demand-pull inflation*. Dalam *demand-pull inflation* kenaikan harga barang akhir (*output*) mendahului kenaikan harga barang-barang *input* dan harga-harga faktor produksi (upah dan sebagainya). (b) Inflasi yang timbul karena kenaikan

ongkos produksi. Inflasi ini disebut *cost-push inflation*. Dalam *cost-push inflation* kenaikan harga barang-barang akhir (*output*) mengikuti kenaikan harga-harga barang-barang *input* berupa faktor produksi. **Ketiga**, didasarkan asal terjadinya inflasi: (a) Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*). Inflasi yang berasal dari dalam negeri timbul misalnya karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, panen yang gagal dan sebagainya. (b) Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*). Inflasi yang timbul karena kenaikan harga-harga, yaitu inflasi di luar negeri atau di negara-negara langganan berdagang. Kenaikan harga barang-barang yang diimpor mengakibatkan, (a) secara langsung kenaikan indeks biaya hidup karena sebagian dari barang-barang yang tercakup di dalamnya berasal dari impor, (b) secara tidak langsung menaikkan indeks harga melalui kenaikan ongkos produksi (dan kemudian, harga jual) dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah atau mesin-mesin yang harus diimpor (*cost-push inflation*), (b) secara tidak langsung menimbulkan kenaikan harga di dalam negeri karena ada kemungkinan (tetapi ini tidak harus demikian) kenaikan harga barang-barang impor mengakibatkan kenaikan pengeluaran pemerintah dan atau swasta yang berusaha mengimbangi kenaikan harga impor tersebut (*demand-pull inflation*). 'Penularan' inflasi dari luar negeri ke dalam negeri biasa pula lewat kenaikan harga barang-barang ekspor, dan saluran-salurannya hanya sedikit berbeda dengan penularan lewat kenaikan harga barang-barang impor. (a) bila harga barang-barang ekspor (seperti kopi, teh) naik, maka indeks biaya hidup akan naik pula sebab barang-barang ini langsung masuk dalam daftar barang-barang yang tercakup dalam indeks harga. (b) Bila

harga barang-barang ekspor (seperti kayu, karet, timah dan sebagainya) naik, maka ongkos produksi dari barang-barang yang menggunakan barang-barang tersebut dalam produksinya (perumahan, sepatu, kaleng dan sebagainya) akan naik, dan kemudian harga jualnya akan naik pula (*cost-push inflation*). (c) Kenaikan harga barang-barang ekspor berarti kenaikan penghasilan eksportir (dan juga para produsen barang-barang ekspor tersebut). Kenaikan penghasilan ini kemudian akan dibelanjakan untuk membeli barang-barang (baik dari dalam maupun luar negeri). Bila jumlah barang yang tersedia di pasar tidak bertambah, maka harga-harga barang lain akan naik pula (*demand-pull inflation*).

Penularan inflasi dari luar negeri ke dalam negeri ini lebih mudah terjadi pada negara-negara yang menganut perekonomian terbuka, yaitu yang sektor perdagangan luar negerinya penting (seperti Indonesia, Korea, Taiwan, Singapura, Malaysia dan sebagainya). Namun seberapa jauh penularan tersebut terjadi juga tergantung kepada kebijaksanaan pemerintah yang diambil dalam menetralsir kecenderungan inflasi. Melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan moneter dan perpajakan tertentu pemerintah bisa menetralsir kecenderungan inflasi yang berasal dari luar negeri tersebut.

Ada tiga kelompok teori yang menjelaskan tentang terjadinya inflasi. Ketiga teori tersebut adalah: Teori Kuantitas, Teori Keynes dan Teori Strukturalis.

1. Teori Kuantitas

Teori kuantitas menyoroti proses terjadinya inflasi. Proses terjadinya inflasi dapat dianalisis dari: (a) jumlah uang beredar, dan (b) psikologi (harapan)

masyarakat mengenai kenaikan harga-harga (*expectations*). Inti dari teori ini adalah sebagai berikut:

- (a) Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang beredar (apakah berupa penambahan uang kartal atau penambahan uang giral tidak menjadi soal). Bila jumlah uang tidak ditambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya, apapun sebab musabab awal dari kenaikan harga tersebut.
- (b) Laju inflasi ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang beredar dan oleh psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa mendatang. Ada tiga kemungkinan keadaan. Keadaan yang **pertama** adalah bila masyarakat tidak (atau belum) mengharapkan harga-harga untuk naik pada bulan-bulan mendatang. Dalam hal ini, sebagian besar dari penambahan uang beredar akan diterima oleh masyarakat untuk menambah likuiditasnya (yaitu, memperbesar pos kas dalam buku neraca para anggota masyarakat). Ini berarti bahwa sebagian besar dari kenaikan jumlah uang tersebut tidak dibelanjakan untuk membeli barang. Selanjutnya, ini berarti bahwa tidak akan ada kenaikan permintaan yang berarti akan barang-barang, jadi tidak ada kenaikan harga barang-barang (atau harga-harga mungkin naik sedikit sekali). Keadaan **kedua** adalah di mana masyarakat (atas dasar pengalaman di bulan-bulan sebelumnya) mulai sadar bahwa ada inflasi. Orang-orang mulai mengharapkan kenaikan harga. Penambahan jumlah uang beredar tidak lagi diterima oleh masyarakat untuk menambah pos kas-nya, tetapi akan digunakan untuk membeli barang-barang. Hal ini dilakukan karena orang-orang berusaha untuk menghindari kerugian yang timbul seandainya masyarakat memegang uang kas. Kenaikan harga (inflasi) tidak lain adalah suatu 'pajak' atas saldo kas yang dipegang masyarakat, karena uang makin tidak berharga. Keadaan **ketiga** terjadi pada tahap inflasi yang lebih parah yaitu tahap 'hiperinflasi'. Dalam hal ini orang-orang sudah kehilangan kepercayaannya terhadap nilai mata uang. Keengganan untuk memegang uang kas dan keinginan membelanjakannya untuk membeli barang sebegitu uang kas tersebut diterima di tangan menjadi semakin meluas di kalangan masyarakat. Keadaan ini ditandai oleh makin cepatnya peredaran uang (*velocity of circulation*) yang menaik (Boediono, 2001: 161-162).

2. Teori Keynes

Teori Keynes mengenai inflasi didasarkan atas teori ekonomi makro-nya.

Teori ini menyoroti aspek lain dari proses terjadinya inflasi. Menurut teori ini:

Inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi menurut pandangan ini, tidak lain adalah proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan di mana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (timbulnya apa yang disebut dengan *inflationary gap*). *Inflationary gap* ini timbul karena golongan-golongan masyarakat tersebut berhasil menterjemahkan aspirasi mereka menjadi permintaan yang efektif akan barang-barang. Dengan lain perkataan, mereka berhasil memperoleh dana untuk mengubah aspirasinya menjadi rencana pembelian barang-barang yang didukung dengan dana (Boediono, 2001: 163).

3. Teori Strukturalis

Teori strukturalis adalah teori mengenai proses terjadinya inflasi yang didasarkan atas pengalaman di negara-negara Amerika Latin. Teori ini memberi tekanan pada ketegaran (*inflexibilities*) dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang. Proses terjadinya inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian (yang menurut definisi, faktor-faktor ini hanya bisa berubah secara gradual dalam jangka panjang), sehingga teori ini disebut teori inflasi 'jangka panjang'. Dengan lain perkataan, yang dicari di sini adalah faktor-faktor jangka panjang manakah yang bisa mengakibatkan inflasi (yang berlangsung lama)? Menurut teori ini, ada dua ketegaran utama dalam perekonomian negara-negara sedang berkembang yang bisa menimbulkan inflasi:

Ketegaran yang pertama berupa 'ketidakelastisan' dari penerimaan ekspor, yaitu nilai ekspor yang tumbuh secara lamban dibanding dengan pertumbuhan sektor-sektor lain. Kelambanan ini disebabkan karena (a) harga di pasar dunia dari barang-barang ekspor negara tersebut makin tidak menguntungkan (dibanding dengan harga-harga barang-barang impor yang harus dibayar), atau sering disebut dengan istilah dasar penukaran (*terms of trade*) yang makin memburuk. Sering dianggap bahwa harga barang-barang hasil alam, yang merupakan ekspor dari negara-negara sedang berkembang, dalam jangka panjang naik lebih lambat daripada harga barang-barang industri, yang merupakan impor oleh negara-negara sedang berkembang. (b) *Supply* atau produksi barang-barang ekspor yang tidak responsif terhadap kenaikan harga (*supply* barang-barang ekspor yang tidak elastis). Kelambanan atas pertumbuhan ekspor ini dapat diartikan kelambanan kemampuan untuk mengimpor barang-barang yang dibutuhkan (untuk konsumsi maupun untuk investasi). Akibatnya, negara tersebut (yang berusaha, sesuai dengan rencana pembangunannya, untuk mencapai target pertumbuhan tertentu) terpaksa mengambil kebijaksanaan pembangunan yang menekankan pada penggalakan produksi dalam negeri dari barang-barang yang sebelumnya diimpor (*import-substitution strategy*), meskipun seringkali produksi dalam negeri ini mempunyai ongkos produksi yang lebih tinggi (dan sering pula dengan kualitas yang lebih rendah) daripada barang-barang yang sejenis yang diimpor. Ongkos produksi yang lebih tinggi ini mengakibatkan harga yang lebih tinggi. Dan bila proses substitusi impor ini makin meluas, kenaikan ongkos produksi juga makin luas ke berbagai barang (yang tadinya diimpor), sehingga makin banyak harga barang yang naik. Dengan demikian terjadi inflasi. Ketegaran kedua, berkaitan dengan 'ketidakelastisan' dari *supply* atau produksi bahan makanan di dalam negeri. Dikatakan bahwa produksi bahan makanan dalam negeri tidak tumbuh secepat pertambahan penduduk dan pendapatan per kapita, sehingga harga bahan makanan di dalam negeri cenderung untuk menaik melebihi kenaikan harga barang-barang lain. Akibat selanjutnya adalah timbulnya tuntutan dari para karyawan (di sektor industri) untuk memperoleh kenaikan upah atau gaji. Kenaikan upah berarti kenaikan ongkos produksi, yang berarti pula kenaikan harga dari barang-barang tersebut. Kenaikan harga barang-barang seterusnya mengakibatkan timbulnya tuntutan kenaikan upah lagi. Kenaikan upah

kemudian diikuti oleh kenaikan harga-harga. Dan seterusnya, proses ini akan berhenti dengan sendirinya seandainya harga bahan makanan tidak terus menaik. Tetapi oleh karena faktor struktural tadi, harga bahan makanan akan terus menaik, sehingga proses saling dorong-mendorong atau proses 'spiral' antara harga dan upah tersebut terus selalu mendapat 'umpan' baru dan tidak berhenti (Boediono, 2001: 167-168).

Mengenai teori struktural ini, ada tiga hal yang ditekankan: (1) Teori ini menerangkan proses inflasi jangka panjang di negara-negara yang sedang berkembang, (2) Bahwa jumlah uang beredar bertambah dan secara pasif mengikuti dan menampung kenaikan harga-harga tersebut. Dengan lain perkataan, proses inflasi tersebut bisa berlangsung terus hanya apabila jumlah uang yang beredar juga bertambah terus. Tanpa kenaikan jumlah uang, proses tersebut akan berhenti dengan sendirinya! Di sini, dan juga dalam teori inflasi Keynes, ternyata teori kuantitas tetap berlaku, (3) Tidak jarang faktor-faktor 'struktural' yang dikatakan sebagai sebab-musabab yang paling dasar dari proses inflasi tersebut bukan 100 persen 'struktural'. Sering dijumpai bahwa ketegaran-ketegaran tersebut disebabkan oleh kebijaksanaan harga atau moneter pemerintah sendiri. Sebagai misal, ketidakmampuan produksi bahan makanan dalam negeri untuk tumbuh mungkin sekali disebabkan oleh penekanan harga bahan makanan di dalam negeri sehingga gairah berproduksi petani menurun. Sering pula dijumpai bahwa ketidakmampuan produksi barang-barang ekspor untuk tumbuh disebabkan karena kurs valuta asing ditekan terlalu rendah dengan maksud untuk menekan inflasi. Seringkali pula 'ketidakelastisan' itu disebabkan adanya faktor-faktor struktural, sehingga harga bahan-bahan ekspor betul-betul diterima

produsen rendah, dan kurang cukup untuk menggairahkan produksi di dalam negeri.

Menurut teori kebijaksanaan moneter bahwa besaran jumlah uang beredar menentukan besaran tingkat bunga, sehingga secara tegas Keynes menyatakan bahwa “penambahan jumlah uang beredar akan menurunkan tingkat bunga” (Nopirin, 2000: 91).

Selanjutnya melalui mekanisme transmisi kebijaksanaan moneter:

Pengaruh kebijaksanaan moneter ditransfer melalui perubahan jumlah uang beredar, yang kemudian akan mempengaruhi tingkat bunga. Perubahan tingkat bunga pada gilirannya akan mempengaruhi permintaan agregat melalui pengeluaran investasi dan atau konsumsi (Nopirin, 2000: 79).

2.3. Hubungan Antara Inflasi Dan Tingkat Bunga

Dalam konteks pencapaian tujuan kebijaksanaan moneter, kajian yang lebih mendalam mengenai aspek dimensi utama dari pasar uang dan pasar barang sangat penting dilakukan, terutama yang berkaitan dengan tingkat inflasi dan tingkat bunga. Waluyo (2004:119) mendefinisikan inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga-harga umum secara terus menerus.

Kecenderungan dalam definisi tersebut perlu digaris bawahi bila harga-harga dari sebagian besar barang diatur atau ditentukan oleh pemerintah, maka harga-harga yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik mungkin tidak menunjukkan kenaikan apapun (karena yang dicatat adalah harga-harga ‘resmi’ pemerintah). Tetapi mungkin dalam realita ada kecenderungan bagi harga-harga untuk menaik. Dalam hal ini masalah inflasi sebetulnya ada, tetapi tidak diperkenankan untuk

menunjukkan dirinya. Keadaan seperti ini disebut *suppressed inflation* atau ‘inflasi yang ditutupi’ yang pada suatu waktu akan timbul dan menunjukkan dirinya karena harga-harga resmi makin tidak relevan dalam kenyataan.

Dalam hubungannya dengan pengertian inflasi tersebut, kenaikan satu atau beberapa barang pada suatu saat tertentu dan hanya ‘sementara’ belum tentu menimbulkan inflasi. Pertumbuhan tingkat harga (inflasi) setara dengan besarnya pertumbuhan uang, sehingga secara teoritis ada korelasi positif antara jumlah uang beredar dengan tingkat inflasi dalam suatu perekonomian.

Secara jelas hubungan antara jumlah uang beredar dan inflasi ini dapat diturunkan dari konsepsi mengenai permintaan uang dalam *The Quantity Theory of Money* atau Teori Kuantitas Mengenai Uang sebagai berikut: “Perubahan jumlah uang beredar atau penawaran uang berinteraksi dengan permintaan uang dan selanjutnya menentukan nilai uang (atau tingkat harga)” (Boediono, 1996: 17).

Selanjutnya berdasarkan konsepsi Keynes, bunga didefinisikan sebagai berikut:

‘Harga’ dari penggunaan uang dalam jangka waktu yang ditentukan bersama yang biasanya dinyatakan dalam persentase per satuan waktu dan kadang pula bunga dipandang sebagai ‘sewa’ atas penggunaan uang. Atau bunga adalah harga dari penggunaan uang dalam jangka waktu tertentu yang dibayar atas penggunaan uang tunai karena keinginan tetap likuid (*liquidity preference*) untuk memenuhi tiga motif permintaan uang (untuk transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi) (Boediono, 1996: 2 dan 83).

Tiga motif timbulnya permintaan akan uang menurut konsep Keynes tersebut diberi nama *liquidity preference* (L). Sedangkan mazhab klasik mendefinisikan bunga sebagai berikut:

'Harga' terjadi di 'pasar' dana investasi. Pasar dana investasi adalah penerimaan pendapatan masyarakat pada suatu periode melebihi keperluan kebutuhan konsumsi selama periode tersebut terbentuk dalam tabungan, bersama-sama seluruh jumlah tabungan membentuk suplai atau penawaran akan *loanable funds*. Dalam periode yang sama ada anggota masyarakat yang membutuhkan dana yang memungkinkan diperlukan untuk operasi atau perluasan usaha yang selanjutnya akan membentuk *loanable funds*" (Boediono, 1996:76-77).

Khusus mengenai hubungan antara inflasi dan tingkat bunga dapat diketahui melalui pengertian tingkat bunga nominal dan tingkat bunga riil yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jika A memiliki uang Rp 100 dan tingkat bunga yang berlaku sebesar 8 persen sedangkan tingkat inflasi sebesar 10 persen, maka berarti tahun depan A akan mengalami penurunan daya beli sebesar 2 persen. Tingkat bunga pasar yang berlaku dinamakan tingkat bunga nominal (i) dan didapat hubungan: $i = r + \pi$, di mana r adalah tingkat bunga riil (Herlambang dkk., 2001: 127).

Hubungan seperti yang diuraikan tersebut dikenal sebagai Fisher *Effect* (*one for one relation*) yang menunjukkan 1 persen perubahan inflasi akan menyebabkan 1 persen perubahan tingkat bunga nominal.

Suku bunga merupakan faktor yang sangat penting dalam perekonomian moderen karena menentukan permintaan uang untuk spekulasi atau investasi. Secara singkat sifat hubungan antara tingkat bunga dan tingkat investasi adalah berbalikan atau berlawanan arah, yang berarti:

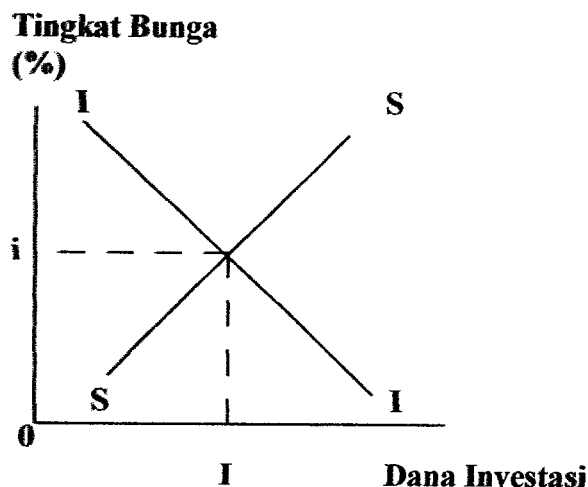
Jika tingkat bunga tinggi, maka tingkat investasi akan menjadi rendah. Sebaliknya penurunan tingkat bunga akan meningkatkan investasi. Perubahan dalam investasi akan menimbulkan perubahan dalam perbelanjaan agregat dan keseimbangan pendapatan nasional (Sukirno, 2000: 131).

Dengan demikian di antara tingkat bunga dan keseimbangan pendapatan nasional terdapat rangkaian hubungan sebagai berikut:

$$\Delta r \rightarrow \Delta I \rightarrow \Delta AE \rightarrow \Delta Y$$

Rangkaian hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: dalam keseimbangan pada tingkat bunga r_0 dan tingkat investasi I_0 perbelanjaan agregat adalah AE_0 . Dengan demikian keseimbangan pendapatan nasional dicapai di E_0 dan pendapatan nasional adalah Y_0 . Penurunan tingkat bunga dari r_0 menjadi r_1 meningkatkan investasi dari I_0 menjadi I_1 . Perubahan ini menyebabkan perbelanjaan agregat meningkat menjadi AE_1 . Keseimbangan perekonomian yang baru dicapai di E_1 dan pendapatan nasional yang baru adalah Y_1 .

Gambar 2.11 berikut adalah kurve keseimbangan antara tingkat bunga dan dana investasi di pasar dana investasi (*loanable funds*) dalam suatu periode tertentu.



Gambar 2.11 KURVE KESEIMBANGAN ANTARA TINGKAT BUNGA DAN DANA INVESTASI

Sumber: Boediono (1996: 77)

Dari gambar tersebut terlihat bahwa kurve penawaran akan dana investasi (S) menaik dan kurve permintaan akan dana investasi (I) menurun. Untuk tabungan (penawaran) yang menaik apabila tingkat bunga naik karena perilaku anggota masyarakat yang sejalan dengan perilaku memaksimumkan kepuasan (*utility*) seperti dalam teori permintaan konsumen.

2.4. Teori Perdagangan Internasional

Dalam kaitannya dengan instrumen kebijaksanaan moneter yang telah diuraikan pada subbab terdahulu dan jika dihubungkan dengan variabel yang akan diprediksi dalam studi ini, maka dapat diberikan batasan definisi sebagai berikut:

Perdagangan internasional didefinisikan sebagai perdagangan antar atau lintas negara, yang mencakup ekspor dan impor, sehingga perdagangan internasional dibagi menjadi dua katagori, yakni perdagangan barang (fisik) dan perdagangan jasa (Tambunan, 2001a: 1).

Perkembangan ekspor tidak hanya pertumbuhan ekspor, tetapi juga perubahan strukturnya. Proses pendalaman struktur tidak seragam antar negara atau kelompok negara, melainkan bervariasi, tergantung pada sejumlah faktor, mulai dari ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi, pola peningkatan pendapatan nasional per kapita, hingga kebijakan pemerintah dalam mendukung perkembangan ekspor.

Bagi banyak negara, perdagangan internasional, khususnya ekspor, mempunyai peranan yang sangat penting sebagai motor penggerak perekonomian suatu negara karena ekspor menghasilkan devisa yang selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai impor dan pembangunan sektor-sektor ekonomi. Dalam konteks perdagangan internasional “Ada korelasi positif antara

pertumbuhan ekspor terhadap peningkatan cadangan devisa” (Tambunan,2001a:2). Dengan demikian: **Pertama**, jika impor lebih besar dari ekspor, maka cadangan devisa akan berkurang. **Kedua**, bila sebagian besar dari impor adalah barang-barang konsumsi, bukan barang-barang modal dan pembantu untuk kebutuhan kegiatan produksi di dalam negeri, maka kenaikan impor tidak banyak berarti bagi pertumbuhan ekspor. Relasi positif antara ekspor dan impor melalui sisi produksi di dalam negeri tidak ada. Bahkan relasi antara kedua variabel tersebut bisa negatif karena impor terlalu besar akan mengakibatkan cadangan devisa habis atau terkuras.

Cadangan devisa didefinisikan sebagai sejumlah valas yang dicadangkan bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia (BI), untuk keperluan pembiayaan dan kewajiban luar negeri negara bersangkutan yang antara lain, meliputi pembiayaan impor dan pembayaran lainnya kepada pihak asing (Tambunan, 2001c:158).

Menurut *International Monetary Fund* (IMF), cadangan devisa adalah “aktiva luar negeri” yang tersedia setiap waktu dan dikuasi oleh otoritas moneter (Bank Sentral) dalam hal ini Bank Indonesia (Tambunan, 2001a:201).

Mengikuti kriteria *International Monetary Fund* (IMF) tersebut, Zetha (2000) menegaskan bahwa cadangan devisa yang diumumkan pemerintah (Bank Indonesia) secara periodik sejak awal tahun 1998 adalah aktiva luar negeri (bruto). Aktiva luar negeri resmi dianggap sebagai cadangan devisa” (Tambunan,2001a: 201).

Dengan demikian, cadangan devisa merupakan satu dari beberapa indikator moneter yang sangat penting yang menunjukkan kuat lemahnya ekonomi suatu negara karena cadangan devisa yang cukup merupakan jaminan bagi tercapainya

stabilitas moneter dan ekonomi makro suatu negara. Seluruh jumlah ekspor, sampai sedemikian jauh telah memberikan sumber penghasilan devisa yang paling penting bagi suatu negara. Besar kecilnya nilai ekspor hanya tergantung pada volume ekspor penjualan di luar negeri saja, tetapi juga pada harga yang dibayar untuk ekspor, baik harga yang dibayar untuk barang maupun jasa.

Teori Perdagangan Internasional dapat membantu menjelaskan arah serta komposisi perdagangan antara beberapa negara serta efeknya terhadap struktur perekonomian suatu negara. Di samping itu, Teori Perdagangan Internasional juga dapat menunjukkan adanya keuntungan yang timbul dari adanya perdagangan internasional (*gains from trade*). Beberapa teori yang menerangkan tentang timbulnya perdagangan internasional pada dasarnya bersumber dari teori-teori sebagai berikut:

2.4.1. Teori Klasik Kemanfaatan Absolut

Teori klasik kemanfaatan absolut (*absolute advantage*: Adam Smith), kemanfaatan relatif (*comparative advantage*: J.S. Mill), dan biaya relatif (*comparative cost*: David Ricardo) mendasarkan pada besaran (variabel) riil bukan moneter terhadap Teori Perdagangan Internasional, sehingga teori ini dikenal dengan nama teori murni (*pure theory*) perdagangan internasional atau lebih dikenal sebagai *labor theory of value*. Murni dalam arti bahwa teori ini memusatkan perhatian hanya pada variabel riil seperti nilai suatu barang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang.

Teori nilai tenaga kerja (*labor theory of value*) sifatnya sangat sederhana sebab menggunakan anggapan bahwa tenaga kerja sifatnya homogen serta

merupakan satu-satunya faktor produksi. Dalam kenyataannya bahwa tenaga kerja itu tidak homogen, faktor produksi tidak hanya satu serta mobilitas tenaga kerja tidak bebas.

Kelemahan teori klasik tentang terjadinya perdagangan internasional terletak pada anggapan bahwa keuntungan dari perdagangan internasional timbul karena adanya *comparative advantage* yang berbeda antara dua negara. Teori nilai tenaga kerja menjelaskan terjadinya perbedaan dalam *comparative advantage* karena adanya perbedaan dalam fungsi produksi antara dua negara atau lebih. “Jika fungsi produksinya sama, maka kebutuhan tenaga kerja juga akan sama nilai produksinya sehingga tidak akan terjadi perdagangan internasional” (Nopirin, 1999:19). Namun lebih jauh teori klasik ini tidak dapat menjelaskan secara tuntas mengapa terdapat perbedaan fungsi produksi antara dua negara.

Bertitik tolak dari studi ini, meskipun studi ini mendasarkan pada besaran (variabel) moneter terhadap teori perdagangan internasional, namun beberapa teori tersebut tidak diuraikan secara rinci di sini, dan sebagai gantinya digunakan pendekatan teori modern perdagangan internasional terpilih seperti yang diuraikan berturut-turut berikut ini.

2.4.2. *The Proportional Factors Theory* Dari Eli Heckscher Dan Bertil Ohlin

Teori paling penting mengenai pola perdagangan antar negara muncul di Swedia. Eli Heckscher memunculkan ide pokoknya melalui sebuah artikel pendek pada tahun 1919. Kemudian, sebuah risalah yang menjelaskan secara menyeluruh

ide pokok itu dikembangkan dan diterbitkan pada tahun 1930-an oleh mahasiswa Heckscher, yaitu Bertil Ohlin.

Teori Heckscher-Ohlin (*H-O Theory*) mengenai pola perdagangan antar negara atau pola perdagangan internasional itu menyatakan bahwa:

“Suatu negara akan mengkhususkan dalam produksi dan ekspor barang-barang yang *input* (atau faktor produksi) utamanya relatif sangat banyak di negara tersebut, dan impor barang yang *input* utamanya tidak dimiliki oleh negara tersebut (jumlahnya terbatas)” (Tambunan, 2001a: 38).

Secara ringkas dapat dikatakan: teori H-O meramalkan bahwa setiap negara akan mengekspor produk-produk yang menggunakan secara intensif faktor-faktor yang tersedia secara berlebihan (dan mengimpor produk-produk yang menggunakan secara intensif faktor-faktor yang tersedia secara langka).

Suatu negara dinyatakan melimpah tenaga kerjanya kalau negara itu memiliki nisbah tenaga kerja yang lebih tinggi dari faktor-faktor lain dibandingkan nisbah yang dimiliki negara lain. Sebuah produk dikatakan padat karya (*labor intensive*) kalau biaya tenaga kerjanya mengambil bagian terbesar dari nilai produk itu secara keseluruhan dibandingkan bagian yang diambilnya dari nilai produk-produk lain (Lindert and Kindleberger, 1995: 36).

Selanjutnya teori Heckscher-Ohlin atau teori H-O menyatakan lebih jelas lagi bahwa:

“Perbedaan *opportunity cost* suatu produk antara negara dengan negara lain dapat terjadi karena adanya perbedaan jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki (*endowment factors*) masing-masing negara. Perbedaan *opportunity cost* tersebut dapat menimbulkan terjadinya perdagangan internasional. Negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut

memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya” (Hady, 2000a, 39).

Dengan demikian konsepsi H-O secara ringkas dapat diuraikan kembali sebagai berikut:

- a. Bahwa perdagangan internasional tidaklah banyak berbeda dan hanya merupakan kelanjutan saja dari perdagangan antar daerah. Perbedaan pokoknya terletak pada masalah jarak. Atas dasar inilah maka Bertil Ohlin melepaskan anggapan (anggapan tersebut berasal dari teori klasik) bahwa dalam perdagangan internasional ongkos transportasi dapat diabaikan.
- b. Bahwa barang yang diperdagangkan antara negara tidaklah didasarkan atas keuntungan alamiah atau keuntungan yang dikembangkan, akan tetapi atas dasar proporsi serta intensitas faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang itu. Jadi, perbedaan harga yang terjadi untuk barang yang sama disebabkan karena perbedaan dalam proporsi serta intensitas faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang tersebut (Rosyadi, 2002: 24-25).

Penyebab fundamental timbulnya perdagangan internasional bukan terletak pada perbedaan ‘selera’ atau pola konsumsi, tetapi pada sisi produksi.. Kemampuan berproduksi secara efisien suatu negara tergantung pada keunggulan komparatif yang dimiliki suatu negara, baik secara mutlak maupun relatif dalam penggunaan teknologi, mesin-mesin serta keahlian dan keterampilan kerja penduduk yang secara rata-rata memang menonjol.

Perdagangan internasional timbul terutama sekali karena suatu negara dapat memproduksi barang tertentu secara lebih efisien daripada negara lain, sehingga ada kecenderungan bagi negara yang efisien untuk mengekspor produknya (Boediono, 2000: 19).

Secara teoritis ada tiga faktor fundamental yang menentukan pola perdagangan internasional sekaligus mempengaruhi keunggulan komparatif suatu negara. Ketiga faktor tersebut adalah:

- a. Tersedianya sarana produksi atau faktor produksi dalam macam atau jumlah yang berbeda antara negara satu dengan negara yang lain (sering disebut sebagai perbedaan dalam *factor endowment*);
- b. Adanya kenyataan bahwa dalam cabang-cabang produksi tertentu negara dapat memproduksi lebih efisien (lebih murah) bila skala produksi semakin besar (yaitu adanya *economies of scale*);
- c. Adanya perbedaan dalam corak dan laju kemajuan teknologi (*technological progress*) (Boediono, 2000: 57-58).

Inti dari model Hechscher-Ohlin (H-O) yang telah diuraikan tersebut adalah bahwa:

Suatu negara cenderung untuk mengekspor barang yang menggunakan lebih banyak faktor relatif melimpah (*abundant factors*) di negara tersebut. Negara yang berpenduduk padat relatif kurang memiliki faktor (*scarce factors*) produksi kapital, cenderung mengekspor barang yang padat karya (sebagai contoh Indonesia). Sedangkan negara-negara yang memiliki banyak faktor produksi kapital mengekspor barang padat kapital (seperti negara Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris) (Boediono, 2000: 64).

2.4.3. *Paradox Leontief*

Wassily Leontief adalah seorang ekonom kelahiran Rusia tahun 1906, menerbitkan satu artikel pada tahun 1953, yang menggambarkan satu upaya penyelidikan empiris terhadap teori H-O dalam analisis *Input-Output Matrix* (I-O-M). Leontief menemukan fakta bahwa struktur perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) negara Amerika Serikat tahun 1947 bertentangan dengan teori Heckscher-Ohlin (*H-O Theory*).

Berdasarkan studi empiris yang dilakukan Wassily Leontief tersebut ternyata bahwa ekspor Amerika Serikat justru terdiri atas barang-barang yang padat karya atau padat tenaga kerja (*labor intensive*). Sebaliknya, impornya terdiri atas barang-barang yang padat modal atau padat kapital (*capital intensive*) (Lindert, 1994: 68).

Berdasarkan penelitian lebih lanjut oleh beberapa ahli ekonomi perdagangan internasional ternyata *Paradox* Leontief tersebut dapat terjadi karena empat sebab utama, yaitu:

- a. Intensitas faktor produksi yang berkebalikan (*factors intensity reversals*);
- b. *Tariff and nontariff barrier*;
- c. Perbedaan dalam *skill* dan *human capital*;
- d. Perbedaan dalam faktor sumberdaya alam (*natural resources*).

Penemuan Leontief tersebut tidaklah sepenuhnya bertentangan dengan teori H-O, karena ekspor negara Amerika Serikat yang padat karya (*labor intensive*) tersebut adalah sangat logis. Negara Amerika Serikat memang memiliki

lebih banyak tenaga kerja terdidik (*skill labor*) dibandingkan negara-negara lain, sehingga eksportnya lebih banyak terdiri atas barang yang padat karya atau tenaga kerja terdidik. Jadi penemuan Leontif tersebut dalam batasan tertentu justru sesuai dan sekaligus menyokong teori H-O.

2.4.4. Teori Stolper Dan Samuelson (*S-S Theory*)

Artikel klasik Wolf Gang Stolper dan Paul Samuelson (1941) yang berjudul *The Protection and Real Wage* menjamin bahwa perdagangan bebas adalah proses penyesuaian dan pengkhususan menuju ke kondisi normal, setelah masa transisi maka akan menguntungkan setiap negara, sehingga teori S-S membuktikan teori H-O itu tidak benar dengan menyatakan bahwa:

“Semakin suatu faktor dikhususkan, atau dikonsentrasikan dalam suatu industri ekspor, semakin besar keuntungan yang akan diperolehnya dari perdagangan. Sebaliknya, semakin faktor itu dikonsentrasikan dalam produksi barang yang akan diimpor, semakin besar kerugian yang akan diperolehnya dari perdagangan itu” (Lindert, 1994: 78).

Asumsi-asumsi yang dikembangkan dalam teori S-S lebih ditujukan untuk menggarisbawahi model H-O dengan menyatakan bahwa: (1) teknologi dapat diwakili oleh fungsi produksi, (b) *constant returns to scale* dan substitusi antar faktor produksi, (c) ada dua barang dan dua faktor produksi yang tersedia dalam jumlah yang tetap, dan (d) persaingan sempurna berlaku umum bagi semua barang dan penyesuaian pasar secara cepat.

2.4.5. Teori *Opportunity Cost* Dari G. Harberier

Opportunity cost digambarkan sebagai *Production Possibility Curve* (PPC) yang menunjukkan kemungkinan kombinasi *output* yang dihasilkan suatu negara dengan sejumlah faktor produksi secara *full employment*. Dalam hal ini, bentuk

PPC akan tergantung pada asumsi tentang *opportunity cost* yang digunakan, yaitu PPC *constant cost* dan PPC *increasing cost*.

Analisis manfaat perdagangan internasional (*gain from trade*) dengan IC dan PPC *increasing cost* dapat dilakukan dengan tiga kemungkinan berikut: (a) PPC *increasing cost* yang sama, dengan IC yang berbeda, (b) PPC *increasing cost* berbeda dengan IC yang sama, dan (c) PPC *increasing cost* dan IC yang berbeda.

Dalam analisis makro ekonomi, peranan perdagangan internasional akan meningkatkan pendapatan nasional ke arah keseimbangan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Peranan ekspor terutama dapat dilihat dari sudut pengaruh kegiatan ekspor pada pengeluaran agregat. Sehingga model makro ekonomi untuk *net exports* dapat diformulasi sebagai berikut:

$$X = g - m Y - n EP/P_w \quad (\text{Hallett and Peter, 1999: 180}).$$

dengan notasi: X adalah *Net exports*

V adalah *Gross domestic product*

E adalah *Nominal exchange rate*

P adalah *Domestic price level*

P_w adalah *Foreign price level*

Teori atau pandangan mengenai perdagangan internasional yang diuraikan tersebut sering pula disebut pandangan dari “*main-stream economics*” dan sebetulnya teori atau pandangan tersebut bersumber dari kaum klasik dan neoklasik, yang tidak lain adalah ilmu ekonomi ‘kaum liberal’.

Jika suatu negara mengimpor lebih banyak sedangkan eksportnya tetap, maka keadaan ini akan menimbulkan defisit dalam neraca pembayaran negara tersebut (kecuali apabila negara tersebut memperoleh pinjaman dari luar

negeri untuk menutup kelebihan impornya). Seandainya pinjaman tidak diperoleh, yang terjadi adalah defisit dalam neraca pembayaran dan jumlah uang yang beredar (emas) di dalam negeri menurun sebesar jumlah defisit neraca pembayaran tersebut. Sesuai dengan teori kuantitas, yang akan terjadi adalah tingkat harga di dalam negeri akan menurun dan tingkat harga di luar negeri akan meningkat (Tambunan, 2001a:120-121).

2.4.6. *Current Theory of International Trade*

Teori perdagangan internasional *Current Theory of International Trade* ini dikenal dengan *International Product Life Cycle Theory* (IPLCT), yaitu satu dari beberapa pendekatan teori yang menjelaskan terjadinya perdagangan internasional (ekspor dan impor) antara negara industri maju dengan negara yang sedang berkembang. Teori ini sebenarnya adalah pengembangan dari *Marketing Theory* R. Vernon. Teori ini membicarakan siklus kehidupan produk/PLC.

Menurut Sak Onkvisit dan John J. Shaw terdapat lima tahapan produksi, yaitu tahap I sampai tahap V memberi gambaran tentang perkembangan suatu produk, sekaligus juga menerangkan tentang terjadi perdagangan internasional.

Adapun tahapan-tahapan produksi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tahapan pertama, sebatas inovasi lokal sehingga tidak ada aktivitas impor dan ekspor, target pasar hanya dalam negeri, pesaing hanya sedikit sehingga biaya produksi menjadi tinggi. **Tahapan kedua**, inovasi munculnya di luar negeri, mulai ada ekspor, target pasar dalam negeri dan negara-negara industri maju, pesaing masih sedikit, biaya produksi mulai menurun karena skala ekonomi. **Tahapan ketiga**, adalah tahapan *maturity*, ekspor stabil, target pasar negara-negara industri maju dan negara-negara yang sedang berkembang, pesaing negara-negara industri maju, biaya produksi stabil. **Tahapan keempat**, imitasi berada di luar negeri, ekspor turun, target pasar negara-negara sedang berkembang, pesaing negara-negara industri maju, biaya produksi menaik karena skala ekonomi menurun. **Tahapan kelima**, merupakan tahapan pembalikan, impor jadi naik,

target pasar dalam negeri, pesaing negara-negara industri maju dan negara-negara sedang berkembang, biaya produksi menaik karena *comparative advantage* (Hady, 2000b: 57).

2.5. Teori Perdagangan Baru: Prebisch-Singer *Thesis* Dan Model Alternatif Perdagangan Internasional

Teori-teori tradisional tentang perdagangan internasional dilandaskan pada sejumlah asumsi implisit maupun eksplisit yang dalam banyak hal ternyata bertentangan dengan kenyataan yang ada dengan hubungan-hubungan ekonomi internasional pada saat ini. Dengan demikian teori yang dimaksud cenderung mendorong ke arah menuju pada serangkaian kesimpulan yang keliru, karena memang sama sekali tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dialami oleh negara-negara berkembang, baik di masa lampau maupun masa kini. Hal ini bukan bermaksud untuk menyangkal adanya berbagai manfaat potensial yang terkandung dalam perdagangan dunia yang bebas.

Jika dicermati lebih lanjut, ternyata perdagangan dunia yang berlangsung selama ini tidak pernah sepenuhnya bebas, melainkan senantiasa terproteksi dan ditentukan oleh kebijakan harga internasional yang tidak kompetitif.

Dalam hubungannya dengan perdagangan internasional antara negara-negara kaya dan negara dunia ke tiga, Prebisch-Singer dalam teori perdagangan barunya menyatakan bahwa:

Dalam jangka panjang terjadi dampak negatif perdagangan internasional negara-negara kaya terhadap negara-negara Dunia Ketiga. Nilai tukar perdagangan negara-negara Dunia Ketiga akan terus menurun sebagai akibat dari rendahnya elastisitas permintaan komoditas primer terhadap perubahan pendapatan (pihak importir) dan harga negara-negara kaya (Todaro dan Stephen, 2003: 17).

Teori perdagangan baru yang dikenal sebagai pemikiran Prebisch-Singer (Prebisch-Singer *thesis*) tersebut sebenarnya teori yang mengeksplorasi dampak-dampak negatif perdagangan internasional terhadap negara-negara berkembang pada dekade 1950-an.

Implikasi dari dari pemikiran Prebisch-Singer (Prebisch-Singer *thesis*) tersebut dalam perdagangan internasional adalah:

Dalam jangka panjang akan berlangsungnya transfer pendapatan dari negara-negara miskin ke negara-negara kaya, hal ini hanya bisa dicegah melalui usaha pengembangan dan perlindungan sektor manufaktur domestik di negara-negara berkembang (agar dapat memiliki industri manufaktur sendiri), melalui proses yang dikenal sebagai strategi industrialisasi substitusi impor (Todaro, 2000: 507).

Dalam perdagangan internasional keunggulan yang dimiliki suatu negara atas negara lain dapat dikelompokkan dalam dua macam, yakni keunggulan yang diwariskan atau sifatnya yang alamiah (*natural advantage*) dan keunggulan yang diciptakan atau yang dikembangkan (*acquired advantage*). Keunggulan alamiah dapat diartikan sama dengan keunggulan komparatif seperti yang dimaksud dalam teori-teori klasik dan teori Heckscher-Ohlin (H-O) tentang perdagangan internasional, sedangkan keunggulan yang harus diciptakan atau dikembangkan adalah keunggulan kompetitif (*competitive advantage*).

Mengikuti model alternatif Porter, keunggulan kompetitif hanya dapat dicapai jika:

Setiap perusahaan atau negara memiliki teknologi, tingkat kewirausahaan yang tinggi, tingkat efisiensi atau produktivitas yang tinggi, kualitas tinggi dari produk yang dibuat, promosi yang luas dan agresif, pelayanan purna jual (*service after sale*) yang baik, tenaga kerja dengan tingkat

keterampilan atau pendidikan, etos kerja, disiplin, komitmen, kreativitas dan motivasi yang tinggi, proses produksi yang mempunyai skala ekonomis, diferensiasi produk, modal dan prasarana serta sarana lainnya yang cukup, jaringan distribusi di dalam terutama di luar negeri yang luas dan diorganisasikan serta dikelola secara profesional, proses produksi dilakukan dengan sistem *just-in-time* (JIT) serta berperannya pemerintah dan perusahaan multinasional dalam perdagangan internasional (Tambunan, 2004: 89 dan 97).

Dalam perkembangan selanjutnya teori Porter diperluas menjadi model berlian ganda yang digeneralisasikan sebagai model alternatif, yang dapat diterapkan pada semua negara, baik negara besar atau negara maju maupun negara kecil atau negara yang sedang berkembang mencakup kegiatan perusahaan multinasional di dalamnya.

2.6. Teori Neraca Pembayaran Internasional

Penerimaan devisa suatu negara dari aktivitas perdagangan luar negeri diikhtisarkan dalam neraca pembayaran (*balance of payments*). Dalam neraca ini pula tergambar neraca perdagangan (*balance of trade*) dengan komponen rekening modal (*capital account*). Dengan demikian neraca pembayaran (*balance of payments*) didefinisikan sebagai berikut:

Neraca pembayaran (daftar) (*balance of payments [table]*) adalah suatu ikhtisar mengenai transaksi-transaksi keuangan atau perdagangan dari suatu negara dengan negara lain, dan di dalamnya tergambar neraca perdagangan (*balance of trade*) yang merupakan suatu situasi dimana ekspor dan nilai impor dari suatu negara mengenai barang-barang riil adalah sama, dengan salah satu komponennya adalah rekening modal (*capital account*) yang merupakan porsi daftar neraca pembayaran (*balance of payment table*) dari suatu negara yang menunjukkan volume investasi swasta asing (*private foreign investment*) dan bantuan pemerintah (*grants*) serta

pinjaman-pinjaman (*loans*) yang mengalir ke dalam dan ke luar dari suatu negara dalam suatu periode, biasanya satu tahun (Todaro, 1983: 290-292).

Selanjutnya, *Balance of Payments* (BOP) atau neraca pembayaran dapat pula didefinisikan sebagai:

Catatan sistematis dari semua transaksi ekonomi internasional (perdagangan, investasi, pinjaman, dan sebagainya) yang terjadi antara penduduk dalam negeri suatu negara dengan penduduk luar negeri selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), yang biasanya dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat (US\$) (Tambunan, 2001c:156).

Balance of Payments (BOP) sangat berguna karena menunjukkan struktur dan komposisi transaksi ekonomi dan posisi keuangan internasional suatu negara. Dengan demikian BOP juga merupakan satu dari beberapa indikator fundamental ekonomi suatu negara di samping variabel-variabel ekonomi makro lainnya seperti laju pertumbuhan *Product Domestic Bruto* (PDB), tingkat pendapatan per kapita, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar mata uang domestik.

Saldo *Balance of Payments* (BOP) terdiri dari tiga saldo penting, yakni saldo transaksi berjalan (*current account*, CA), saldo neraca lalu lintas modal (*capital account*, CA) dan saldo neraca lalu lintas moneter (*monetary account*, MA).

Saldo transaksi berjalan adalah jumlah saldo dari neraca perdagangan, yang mencatat ekspor dan impor barang, neraca jasa, yang mencatat ekspor dan impor jasa dan transaksi sepihak, yakni transaksi keuangan internasional seperti penerimaan hibah, pembayaran royalti, pendapatan bunga deposito, transfer keuntungan bagi investor asing, dan pembayaran bunga cicilan utang luar negeri. *Capital account* adalah neraca yang mencatat arus modal (jangka pendek dan jangka panjang) masuk dan keluar, yang terdiri dari modal pemerintah neto dan lalulintas modal swasta

neto. Modal pemerintah neto adalah selisih antara pinjaman baru yang didapat dari luar negeri dan pelunasan utang pokok dari pinjaman yang didapat pada periode sebelumnya. Lalu lintas modal swasta neto adalah selisih antara dana investasi dan pinjaman swasta dari luar negeri dan pelunasan utang pokok swasta dan dana investasi ke luar negeri. Dana investasi terdiri dari dua macam, yaitu investasi langsung atau jangka panjang (PMA) dan investasi tidak langsung atau investasi jangka pendek (*Portfolio investment*). *Monetary account* adalah neraca yang mencatat perubahan cadangan devisa berdasarkan transaksi arus devisa yang masuk dan keluar suatu negara dalam suatu periode tertentu yang dicatat oleh bank sentral (Tambunan, 2001c: 156-157).

Dalam neraca pembayaran (*Balance of Payments*) suatu negara, perdagangan barang (nilai atau volume barang yang keluar atau yang diekspor dan masuk atau yang diimpor) negara tersebut dicatat dalam neraca jasa.

Jika ekspor lebih besar daripada impor ($X > M$), maka saldo neraca perdagangan atau jasa positif. Sebaliknya, bila impor lebih besar daripada ekspor ($M > X$), maka saldo neraca perdagangan atau jasa negatif. Jika tidak ada transaksi keuangan internasional, yang juga sering disebut neraca transaksi sepihak (*balance of unilateral account*), maka penjumlahan neraca perdagangan dan neraca jasa disebut neraca transaksi berjalan (*balance of current account*), dan saldonya disebut saldo transaksi berjalan (Tambunan, 2001a:2).

Analisis mengenai Teori Neraca Pembayaran (*Balance of Payments Theory*) dimulai dengan dua asumsi sederhana. **Pertama**, tidak ada pergerakan modal. **Kedua**, nilai tukar (kurs) tetap yang dikeluarkan oleh kebijaksanaan bank sentral (Halwani dan Tjiptoherijanto, 1993: 148).

Dalam *Balance of Payments Manual* (BPM) yang diterbitkan oleh IMF (1993), mendefinisikan *Balance of Payments* (BOP) adalah sebagai berikut:

“A statement that systematically, for specific time period, the economic transactions of an economic with the rest of

the world. Transactions for the most part between residents and nonresident, consist of those involving goods, services and income; those involving financial claim on assets and liabilities to, the rest of the world; and those (such gift) classified as transfers, which involve offsetting entries to balance-in an accounting sense—one set transactions” (Hady, 2000b: 59).

Secara umum definisi neraca pembayaran (*Balance of Payments*, BOP) tersebut dapat diartikan sebagai catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk (*resident*) suatu negara dan penduduk luar negeri (*rest of the world*) untuk suatu periode waktu tertentu, biasanya satu tahun.

Pada dasarnya neraca pembayaran internasional terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen tersebut terdiri dari: **Pertama**, adalah neraca perdagangan (*balance of trade*), yang merupakan selisih nilai ekspor dan impor barang. **Kedua**, adalah neraca jasa (*balance of services*) (Halwani dan Tjiptoherijanto, 1993: 142).

Dalam neraca pembayaran internasional yang dicatat hanya transaksi ekonomi internasional saja. Transaksi ini dicatat dalam transaksi debit dan kredit yang dalam sistem akuntansi dikenal sebagai *double-entry bookkeeping*. Transaksi debit adalah transaksi yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penduduk negara lain. Transaksi kredit adalah transaksi yang menimbulkan hak untuk menerima pembayaran kepada penduduk negara lain.

Pada umumnya transaksi ekonomi internasional dikenal sebagai transaksi yang sedang berjalan (*current account*) dan transaksi kapital (*capital account*). Transaksi yang sedang berjalan adalah transaksi yang meliputi barang-barang dan

jasa, sedangkan transaksi kapital adalah transaksi yang menyangkut investasi modal dan emas. Hadiah (*gift*), bantuan (*aid*) dan transaksi satu arah yang lain (*unilateral transfer*) dapat digolongkan ke dalam transaksi yang sedang berjalan atau sebagai transaksi tersendiri, yakni transaksi satu arah.

Pencatatan tentang transaksi ekonomi internasional ditujukan untuk memberikan informasi kepada penguasa pemerintah tentang posisi keuangan dalam hubungan ekonomi dengan negara lain serta membantu dalam pengambilan kebijaksanaan makro ekonomi seperti kebijaksanaan moneter, kebijaksanaan perdagangan internasional dan kebijaksanaan pembayaran internasional.

2.6.1. Neraca Transaksi Berjalan (*Balance of Current Account*)

Dalam neraca pembayaran (*Balance of Payments*) suatu negara, perdagangan barang (nilai atau volume barang yang keluar atau yang diekspor dan masuk atau yang diimpor) negara tersebut dicatat dalam neraca perdagangan (*Balance of Trade*). Dengan demikian neraca perdagangan (*Balance of Trade*), merupakan salah satu komponen penting dari neraca pembayaran (*Balance of Payments*), karena mencatat nilai ekspor dan impor barang yang biasanya dinyatakan dalam dolar Amerika (US\$).

Neraca transaksi yang sedang berjalan (*balance of current account*) merupakan neraca perdagangan dan jasa meliputi ekspor maupun impor barang-barang dan jasa. Ekspor barang meliputi barang-barang yang bersifat fisik. Ekspor jasa seperti penjualan jasa-jasa angkutan, turisme dan asuransi. Dalam transaksi jasa ini termasuk juga pendapatan dari investasi kapital di luar negeri. Ekspor barang dan jasa merupakan transaksi kredit, sebab transaksi ini menimbulkan hak

untuk menerima pembayaran (menyebabkan terjadinya aliran dana masuk). Impor barang meliputi barang-barang konsumsi, bahan mentah untuk industri dan kapital; sedang impor jasa meliputi pembelian jasa-jasa dari penduduk negara lain. Termasuk dalam impor jasa adalah pembayaran pendapatan (bunga, deviden atau keuntungan) dari modal yang ditanam di dalam negeri oleh penduduk negara lain. Impor barang-barang dan jasa merupakan transaksi debet, sebab transaksi ini menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penduduk negara lain (menyebabkan aliran dana keluar negeri). Transaksi yang sedang berjalan mempunyai arti khusus, surplus transaksi yang sedang berjalan menunjukkan bahwa ekspor lebih besar dari impor. Ini berarti bahwa suatu negara mengalami akumulasi kekayaan valuta asing, sehingga mempunyai saldo positif dalam investasi luar negeri. Sebaliknya defisit dalam transaksi yang sedang berjalan berarti impor lebih besar dari ekspor, sehingga terjadi pengurangan investasi di luar negeri. Dengan demikian transaksi yang sedang berjalan sangat erat hubungannya dengan pendapatan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan kembali di sini bahwa transaksi sepihak atau transaksi satu arah adalah transaksi yang tidak menimbulkan hak atau kewajiban secara yuridis bagi si penerima dan juga tidak menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran bagi si pemberi. Termasuk dalam pos ini adalah pemberian hadiah (*gift*) dan bantuan (*aid*). Dengan demikian, saldo transaksi berjalan dapat pula diperjelas kembali sebagai jumlah dari saldo neraca perdagangan, saldo neraca jasa dan transaksi unilateral neto. Jika tidak ada transaksi sepihak, saldo transaksi berjalan suatu negara bisa mengalami defisit

karena salah satu dari tiga kemungkinan berikut ini: **Pertama**, defisit neraca perdagangan lebih besar daripada surplus neraca jasa; **Kedua**, defisit neraca jasa lebih besar daripada surplus neraca perdagangan; atau **Ketiga**, kedua neraca tersebut sama-sama mengalami defisit.

Dalam transaksi neraca berjalan termuat ekspor dan impor barang-barang dan jasa. Di situ dibedakan antara sektor migas dan nonmigas. Transaksi neraca berjalan ditentukan oleh keunggulan komparatif, dasar-tukar, serta kurs valuta yang berlaku, di samping juga biaya transpor. Kesemuanya tercermin dalam harga impor yang harus dibayar serta harga ekspor yang diterima. Dengan demikian, neraca berjalan ini sangat penting untuk menganalisis dampak dari berbagai kebijaksanaan komersial terhadap perdagangan barang dan jasa.

Defisit neraca transaksi berjalan (*balance of current account*) merupakan persoalan penting yang dihadapi suatu negara yang menganut struktur perekonomian makro terbuka. Secara umum ada tiga persoalan pokok yang dapat menimbulkan defisit dalam neraca transaksi berjalan (*balance of current account*) (Widodo, 1990: 92). Ketiga persoalan pokok tersebut adalah:

1. Defisit neraca perdagangan lebih besar dari surplus neraca jasa;
2. Defisit neraca jasa lebih besar dari surplus neraca perdagangan; dan
3. Defisit neraca perdagangan yang disertai oleh defisit neraca jasa.

2.6.2. Neraca Transaksi Kapital (*Balance of Capital Account*)

Neraca transaksi kapital (*Balance of Capital Account*) memperlihatkan seluruh investasi swasta asing dan bantuan-bantuan pemerintah serta pinjaman-pinjaman dari masing-masing negara dan perwakilan-perwakilan donor

multilateral. Rekening kapital ini memungkinkan untuk menganalisis relatif pentingnya arus sumber-sumber finansial internasional dalam rangka usaha memperbesar tabungan dalam negeri.

Transaksi lalu lintas kapital meliputi transaksi investasi fisik jangka panjang dan transaksi investasi fisik jangka pendek dan transaksi utang jangka panjang serta transaksi utang (moneter) jangka pendek, dengan penjelasan sebagai berikut:

Transaksi investasi fisik jangka panjang antarnegara, seperti juga investasi yang dilakukan di dalam negeri, tergantung pada tingkat keuntungan bersih sesudah dikurangi pajak. Investasi internasional dipengaruhi juga oleh iklim dan situasi politik. Sedangkan transaksi pinjaman baik jangka pendek maupun jangka panjang, terutama perpindahan kapital jangka pendek, dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang berlaku. Kapital jangka pendek akan mengalir ke negara di mana tingkat suku bunga lebih tinggi (Wijaya, 1992: 758).

Transaksi lalu lintas kapital jangka pendek dalam perdagangan internasional, meliputi:

- 1 Kredit untuk perdagangan dari negara lain (transaksi kredit) atau kredit perdagangan yang diberikan kepada penduduk negara lain (transaksi debit).
- 2 Deposito bank di luar negeri (transaksi debit) atau deposito bank di dalam negeri milik penduduk negara lain (transaksi kredit).
- 3 Pembelian surat berharga luar negeri jangka pendek (transaksi debit) atau penjualan surat berharga dalam negeri jangka pendek kepada penduduk negara lain (transaksi kredit), sedangkan transaksi kapital jangka panjang, meliputi:
 - 1). Investasi langsung di luar negeri (transaksi debit) atau investasi asing di dalam negeri (transaksi kredit).
 - 2). Pembelian surat-surat berharga berjangka panjang milik penduduk negara lain (transaksi debit), atau pembelian surat-surat berharga jangka panjang dalam negeri oleh penduduk asing (transaksi kredit).
 - 3). Pinjaman jangka panjang yang diberikan kepada penduduk negara lain (transaksi debit) atau pinjaman jangka panjang yang

diterima dari penduduk negara lain (transaksi kredit) (Nopirin, 1999: 758).

Jadi, setiap transaksi kapital yang menyebabkan kenaikan atau penurunan kekayaan suatu negara di luar negeri merupakan aliran kapital keluar atau masuk merupakan transaksi debit atau kredit. Demikian juga setiap transaksi kapital yang menyebabkan kenaikan atau penurunan kekayaan asing di dalam negeri merupakan aliran kapital masuk atau keluar merupakan transaksi debit atau kredit.

2.6.3. Neraca Rekening Kontan (*Balance of Cash Account*)

Neraca rekening kontan (*balance of cash account*) memperlihatkan neraca keuangan (cadangan luar negeri) dan tuntutan-tuntutan jangka pendek yang telah mengubah tanggapan terhadap transaksi-transaksi dalam neraca transaksi berjalan (*balance of current account*) dan neraca transaksi kapital (*balance of capital account*). Jadi rekening kontan (*cash account*) merupakan *balance* atau 'saldo' yang menjadi rendah atau kecil (pengeluaran-penggunaan valuta) atas sejumlah pembayaran transaksi berjalan dan transaksi kapital melebihi jumlah penerimaan.

2.7. Kebijakan Moneter Dalam Perdagangan Internasional

Mekanisme moneter Hume yang dikaitkan dengan perdagangan internasional sebenarnya bukanlah murni mekanisme harga. Sebelum harga naik dan turun, terjadilah penyebabnya, yaitu aliran uang masuk atau keluar negeri.

Jika terjadi surplus neraca pembayaran maka uang akan mengalir masuk ke dalam negeri, sehingga stok uang di dalam negeri bertambah. Jika terjadi defisit maka uang akan mengalir ke luar negeri, sehingga stok uang dalam negeri menurun. Perubahan stok uang ini selanjutnya mengakibatkan perubahan tingkat harga. Namun sebenarnya naik dan turunnya stok uang tidak langsung mempengaruhi tingkat harga, tetapi (sebelum itu) mempengaruhi pengeluaran agregat negara itu. Baru kemudian kenaikan atau penurunan pengeluaran agregat akan mempengaruhi tingkat harga, setelah pengeluaran ini

bertemu dengan penawaran (agregat) di pasar barang (Boediono, 2000: 121).

Tabel 2.1
MEKANISME MONETER DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Neraca Pembayaran	Stok Uang	Tingkat Bunga	Pengeluaran	Pendapatan	Impor
Surplus	Naik	Turun	(+) ΔI	(+) $\Delta Y = \frac{1}{1-b} \Delta I$	(+) $\Delta M = \frac{m}{1-b} \Delta I$
Defisit	Turun	Naik	(-) ΔI	(-) $\Delta Y = \frac{1}{1-b} \Delta I$	(-) $\Delta M = \frac{m}{1-b} \Delta I$

Tabel 2.1. memperlihatkan hubungan antara mekanisme moneter dalam perdagangan internasional (ekspor). AX melalui mekanisme moneter akan meningkatkan impor $\frac{m}{1-b} \Delta I$, sebaliknya akan terjadi apabila timbul defisit atau penurunan ekspor.

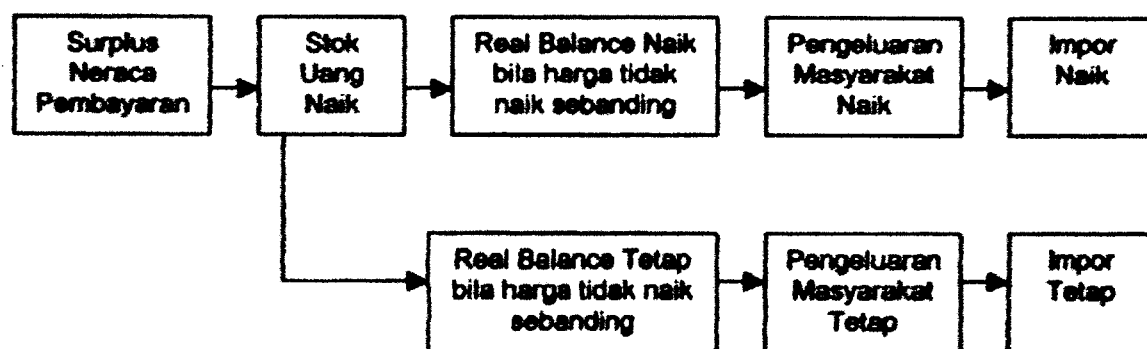
Dalam kaitannya dengan ekspor, mekanisme moneter Hume menyatakan bahwa:

Kenaikan ekspor selain menaikkan pendapatan nasional melalui proses pelipat uang (multiplier), kenaikan ekspor mempunyai konsekuensi terhadap stok uang yang beredar. Surplus neraca pembayaran cenderung meningkatkan stok uang yang beredar di dalam negeri. Penambahan suplai uang ini selanjutnya mempunyai pengaruh di pasar uang berupa penurunan tingkat bunga. Menurunnya tingkat bunga selanjutnya akan merangsang pengeluaran investasi yang kemudian, melalui proses pelipat uang, meningkatkan pendapatan agregat dan pengeluaran agregat (Boediono, 2000: 121).

Mekanisme moneter dalam perdagangan internasional tersebut mengikuti pola pemikiran teori Keynes yang secara khusus menganggap bahwa perubahan stok uang yang beredar mempengaruhi pasar uang dalam bentuk perubahan

tingkat bunga, selanjutnya perubahan dalam pengeluaran investasi dan selanjutnya, melalui proses pelipat uang mempengaruhi pendapatan nasional, dan akhirnya mempengaruhi tingkat impor.

Gambar 2.13 berikut adalah diagram yang menggambarkan konsepsi golongan *monetarist* mengenai hubungan antara mekanisme moneter *monetarist* dalam perdagangan internasional.



**Gambar 2.13 DIAGRAM MEKANISME MONETER MONETARIS
DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

Sumber: Boediono (2000: 125)

Michael Mussa dengan pendekatan moneter yang dikembangkannya berdasarkan konsepsi golongan *monetarist* tersebut, menekankan pada analisis pasar uang dengan penggabungan teori neraca pembayaran dan neraca perdagangan dengan menyatakan bahwa:

“Pengaruh kebijaksanaan moneter atas neraca pembayaran internasional dapat memperluas sediaan uang dan memperburuk neraca pembayaran, terutama pada tahap awalnya. Kalau bank sentral menawarkan pada bank-bank swasta dalam negeri cadangan tambahan yang dapat dipinjamkan (seperti misalnya, dengan membeli surat-surat berharga pemerintah di pasar terbuka), bank-bank itu secara khusus akan menanggapi dengan memberi lebih banyak pinjaman untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Dalam proses demikian itu, persaingan di antara bank untuk memberi pinjaman lebih banyak mungkin akan berakibat menurunnya tingkat suku bunga bank.

Menurunnya tingkat suku bunga bank akan berpengaruh atas neraca pembayaran luar negeri” (Lindert, 1994: 512).

2.8. Teori Basis Dan NonBasis

Teori Basis dan NonBasis (*Base and NonBase Theory*) pada dasarnya adalah Teori Perdagangan Internasional (*comparative advantage*) D. Ricardo dan J.S. Mill yang selanjutnya berkembang menjadi Teori Lokasi Ohlin, Loasch dan Isard, yang kemudian digabung dengan Teori Perkembangan Masyarakat (tradisional versus perkotaan) dari Hoyt.

Kee, Dean dan Leany dalam Zadjuli (1985) menyatakan:

“Dalam perkembangan lebih lanjut, teori-teori tersebut diterapkan menganalisis perdagangan antar daerah di dalam suatu negara dan hanya dikenal adanya dua jenis daerah, yaitu daerah basis dan daerah bukan basis (nonbasis). Yang dimaksud dengan daerah basis adalah daerah yang sudah berswasembada dalam hal memenuhi kebutuhannya sendiri dan di samping itu telah dapat pula mengirim barang, jasa-jasa, modal maupun tenaga ahli ke daerah lain. Sebaliknya daerah yang belum dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan masih mendatangkan barang, jasa-jasa, modal maupun tenaga ahli disebut daerah bukan basis. Sehingga akibatnya terjadi aliran perdagangan satu arah dan daerah basis menuju ke daerah nonbasis. Daerah basis sering disebut juga sebagai daerah surplus dan daerah nonbasis disebut daerah minus, dimana kebutuhan daerah minus tersebut disubsidi oleh pemerintah. Teori tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sektor maupun daerah dimana struktur ekonomi daerah juga dapat diidentifikasi menurut pengelompokan sektornya sebagai sektor basis dan sektor nonbasis. Identifikasi sektor basis dan nonbasis tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan model *location quotient* (LQ Model)”.

Meskipun dalam awal perkembangannya teori basis masih mengandung kelemahan-kelemahan, namun sudah banyak studi empirik yang telah dilakukan dalam usaha memisah-misahkan sektor-sektor basis dan sektor-sektor nonbasis,

seperti studi yang telah dilakukan oleh Pfouts dan Tiebout menyatakan bahwa “analisis basis (*base analysis*) sesungguhnya adalah berkenaan dengan identifikasi ‘pendapatan’ basis. Pendapatan regional akan langsung mengalami kenaikan apabila basis mengalami perluasan” (Richardson, 1977: 14).

Hasil studi tersebut banyak dipergunakan sebagai sarana memperjelas hubungan antara struktur daerah, baik perkotaan, maupun daerah dengan struktur perdagangan yang berbasis ekspor.

Ada 2 (dua) metode yang dapat dipakai untuk membagi daerah-daerah kedalam kategori-kategori basis dan nonbasis: **Pertama**, metode langsung, dan **Kedua**, metode tidak langsung. Metode yang sering digunakan adalah metode pertama atau metode langsung yang terdiri dari dua tipe, cara pendekatan asumsi *ad hoc* dan metode *location quotient*, LQ serta varian-variannya. Metode ini secara *arbiter* menentukan sektor-sektor ke dalam kategori ekspor atau ke dalam kelompok lokal nonbasis.

Teknik LQ paling lazim digunakan dalam studi-studi basis empirik LQ. Kuosien yang lebih besar dari 1 dipergunakan sebagai petunjuk adanya kegiatan perluasan ekspor. Apabila nilai $LQ = 1$ berarti peranan relatif ekspor negara A adalah sama dengan peranan relatif ekspor dunia. Dengan demikian negara A tidak melakukan ekspor maupun impor produk yang sama. Kalau nilai LQ lebih besar dari 1 berarti peranan relatif ekspor negara A lebih besar dibanding pada tingkat dunia, maka negara A dapat mengekspor hasilnya ke negara lain. Sebaliknya negara A akan mengimpor produk dari negara lain jika nilai LQ lebih kecil dari 1 (Tambunan, 2001b: 293-294).

2.9. Teori Penentuan Daya Saing

2.9.1. Teori Keunggulan Absolut (*Absolute Advantage*)

Dalam era sekarang, tingkat daya saing suatu produk (khususnya keandalan suatu produk ekspor) tidak lagi hanya ditentukan oleh perbedaan harga, tetapi juga-bahkan lebih dominan dibandingkan harga-ditentukan oleh aspek-aspek lain, seperti kualitas, penampilan produk, warna, bentuk, pelayanan purna jual (*service after sale*), dan sebagainya.

Teori keunggulan absolut dari A. Smith sering disebut sebagai teori murni perdagangan internasional. Dasar pemikiran teori ini adalah bahwa suatu negara akan melakukan spesialisasi terhadap ekspor suatu jenis produk tertentu, dimana negara tersebut memiliki keunggulan absolut (*absolute advantage*). Suatu negara akan mengekspor suatu jenis barang, jika negara tersebut dapat memproduksinya lebih efisien atau murah dibanding negara lain. Jadi teori ini menekankan bahwa efisiensi dalam penggunaan *input* dalam proses produksi menentukan keunggulan atau tingkat daya saing.

2.9.2. Teori Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*)

Teori keunggulan komparatif dari J.S. Mill dapat dianggap sebagai kritik dan sekaligus usaha penyempurnaan atau perbaikan terhadap teori keunggulan absolut.

J.S. Mill menyatakan bahwa:

“Suatu negara akan mengkhususkan diri pada ekspor barang tertentu bila negara tersebut memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) terbesar. Sedangkan dasar pemikiran D. Ricardo adalah bahwa perdagangan antar dua negara akan terjadi bila masing-masing negara

memiliki biaya relatif yang terkecil untuk jenis barang berbeda. Penekanannya pada perbedaan efisiensi relatif antar negara dalam memproduksi dua (atau lebih) jenis barang yang menjadi dasar perdagangan internasional” (Tambunan, 2001a: 25-26).

Kinerja ekspor tidak hanya diukur dari laju pertumbuhan (nilai atau *volume*), tetapi harus dilihat dari tingkat diversifikasi, baik dalam arti variasi produk (pendalaman struktur) maupun diversifikasi pasar (negara tujuan). Perluasan jenis-jenis komoditas ekspor merupakan target yang sangat penting penentu pertumbuhan ekonomi suatu negara yang mengandalkan perdagangan.

2.10. Kebijakan Moneter Dan Teori Kesempatan Kerja

Tujuan akhir dari kebijaksanaan moneter adalah ‘menstabilkan’ *output* pada tingkat yang mendekati *full employment*. *Full employment* adalah suatu keadaan tidak ada tenaga kerja yang tidak bekerja atau mengalami pengangguran, semua orang yang mau bekerja mendapat pekerjaan (dalam arti ada kesempatan kerja). Di samping ditentukan oleh banyaknya permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja dalam memproduksi barang dan jasa, kesempatan dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja dalam memproduksi barang dan jasa, kesempatan kerja dan pengangguran tergantung dari tingkat upah.

Profesor A.W. Philips telah menyatakan hubungan tersebut dengan penelitiannya yang berjudul *The Relation Between Unemployment and There Are of Change of Money Wages Rates in The United Kingdom (1861-1957)*. Dalam hubungannya dengan kesempatan kerja, Profesor A.W. Philips memperluas lagi penelitiannya yang menyatakan melalui kebijaksanaan moneter kenaikan jumlah uang beredar mengakibatkan terjadinya inflasi. “Kenaikan jumlah uang beredar

yang tampak pada kenaikan harga secara umum atau inflasi, yang selanjutnya melalui inflasi ini menghasilkan hubungan dengan tingkat pengangguran” (Waluyo, 2004:128).

Lipsey mencoba memperluas kurve Philips dengan menggunakan Teori Pasar Tenaga Kerja dengan mengakui bahwa “pasar tenaga kerja cenderung tidak sempurna sehingga pengangguran mempunyai hubungan terbalik dengan kelebihan permintaan akan tenaga kerja” (Nopirin, 2000:37).

Konsisten dengan akhir yang ingin dicapai oleh kebijaksanaan moneter dalam studi ini, yaitu peningkatan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan dalam arti luas (perdagangan besar, eceran, hotel dan rumah makan atau restoran), maka konsep penyerapan tenaga kerja disajikan sebagai berikut:

Penyerapan tenaga kerja adalah menunjukkan persentase jumlah orang yang telah bekerja dalam pasar tenaga kerja; lawannya adalah tingkat pengangguran yang menunjukkan persentase jumlah orang yang ingin bekerja tetapi belum memperoleh pekerjaan (Herlambang dkk., 2001:95).

Ukuran yang menunjukkan sudah dapat disebut bekerja bervariasi antar negara bahkan antar lembaga yang berbeda di dalam suatu negara definisi bekerja juga berbeda. Badan Pusat Statistik mendefinisikan bekerja sebagai berikut:

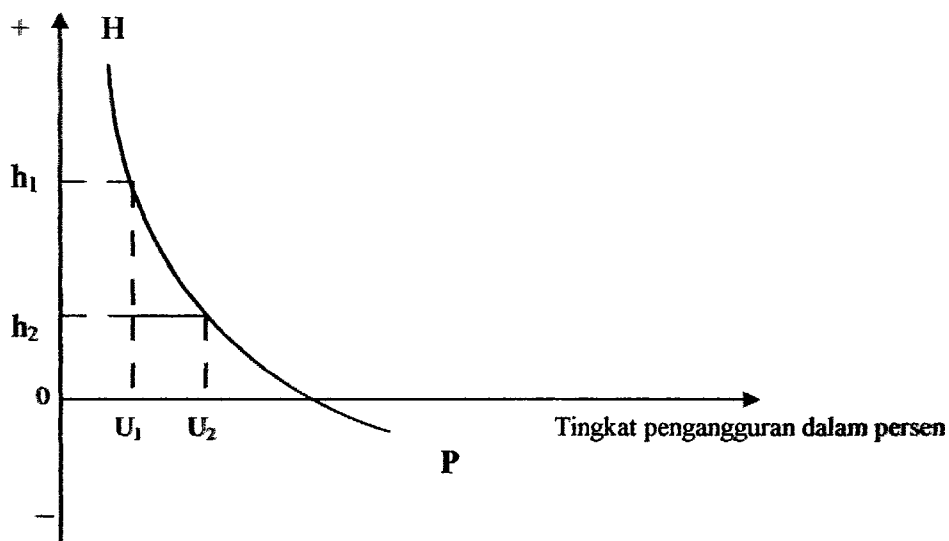
Bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi) (Herlambang dkk, 2001:109)

Menurut teori kaum klasik, secara umum ada hubungan positif antara tingkat *output* dengan kesempatan kerja dalam jangka pendek. Sebab dalam jangka pendek teknologi dianggap konstan, barang modal merupakan *input* tetap.

Jika dianggap ada hubungan yang tetap antara kesempatan kerja (N) dengan tingkat *output* (Y), misalnya $N = \alpha Y$, di mana $\alpha > 0$, maka bertambahnya *output* akan menambah kesempatan kerja ($N_2 > N_1 > N_0$). Karena jumlah tenaga kerja juga dianggap tetap, maka penambahan kesempatan kerja akan mengurangi pengangguran (U), sehingga $U_2 < U_1 < U_0$ (Rahardja dan Mandala, 2001: 263-264).

Studi tentang hubungan antara inflasi dan pengangguran pertama kali dilakukan oleh Profesor A.W. Phillips dengan mengambil kasus di *United Kingdom* periode tahun 1861-1957 yang selanjutnya dikembangkan oleh Samuelson dan Solow. Kedua ahli ini memodifikasi model Lipsey tentang kurve Phillips. Ada hubungan negatif dan *non linier* antara kenaikan inflasi dengan pengangguran (*unemployment*, U).

Persentase perubahan tingkat harga (inflasi)



Gambar 2.14 KURVE PHILLIPS HUBUNGAN ANTARA INFLASI DAN PENGANGGURAN
Sumber: Nanga (2001: 265)

Kurve Phillips dalam Gambar 2.14 merupakan hasil temuan Profesor A.W. Phillips yang diadopsi oleh ekonom Keynesian untuk menjelaskan adanya *trade off* (imbang korban atau harga yang harus dibayar) antara tingkat inflasi dan pengangguran. Kurve tersebut dibuat berdasarkan analisis jangka pendek, sehingga disebut pula kurve Philips jangka pendek (*Short Run Philips's Curve*, disingkat SRPC) berbentuk garis cekung. Kelemahan analisis jangka pendek ini adalah dimensi waktu yang berjangka pendek dan akan berbeda bila menggunakan jangka panjang. Sehingga menurut kaum klasik, dalam jangka panjang perekonomian berada dalam keadaan kesempatan kerja penuh (*full employment*) dan tidak ada *trade off* antara inflasi dan pengangguran karena *output* tidak bertambah. Karena itu pula, kurve Philips jangka panjang (*Long Run Philip's Curve*, disingkat LRPC) berbentuk tegak lurus. Jika ingin mengurangi tingkat pengangguran, maka harga yang harus dibayar adalah dilakukan meningkatkan inflasi.

Untuk menjelaskan hubungan antara inflasi dan pengangguran lebih lanjut, kaum Keynesian mengembangkan kurve Phillips yang kemudian dikenal dengan *Keynesian Expectation-Augmented Phillips Curve* yang ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$\Delta P_t = f(U_{nai} - U_t) + \Delta P_t^e; \dots \dots \dots (Nanga, 2001: 266)$$

di mana ΔP_t adalah tingkat inflasi aktual pada waktu t , ΔP_t^e adalah tingkat inflasi yang diharapkan pada waktu t , U_{nai} adalah tingkat pengangguran pada kesempatan kerja penuh (NAIRU), dan U_t adalah tingkat pengangguran aktual (*actual unemployment rate*).

Dengan menggunakan asumsi *adaptive expectation*: $\Delta P^e_t = \Delta P_{t-1}$, maka kurve Phillips dari Keynesian tersebut dapat ditulis kembali menjadi:

$$\Delta P_t = f(U_{nai} - U_t) + \Delta P^e_{t-1}$$

Jika $U_t < U_{nai}$, maka pertumbuhan upah-uang (*money-wage growth*) yang berkaitan dengan kenaikan permintaan tenaga kerja akan menyebabkan tekanan ke atas (*upward pressure*) terhadap *unit costs*. Dengan *mark-up* atas *unit cost* tertentu, maka tingkat inflasi akan meningkat. Dengan $\Delta P_t > \Delta P_{t-1}$, maka mekanisme *adaptive expectation* akan menyebabkan ΔP^e_t juga meningkat. Adanya ekspektasi tentang inflasi (*inflationary expectation*) yang semakin tinggi akan mendorong pertumbuhan upah-uang ke tingkat yang lebih tinggi (*higher money-wages*). Hal ini terjadi karena pekerja berusaha untuk mempertahankan nilai upah riil, dan ini pada gilirannya akan menyebabkan kenaikan inflasi lebih lanjut. Jadi, jika $U_t < U_{nai}$, maka inflasi akan menjadi lebih cepat dan perekonomian bergeser ke kurve Phillips jangka pendek (*short-run Phillips curve*, disebut SRPC) yang lebih tinggi.

Jika $U_t = U_{nai}$, maka $\Delta P_t = \Delta P_{t-1}$, yang berarti tidak ada perubahan di dalam ΔP^e_t , artinya tingkat inflasi akan stabil. Tingkat inflasi yang stabil ini dinamakan 'inflasi inti' (*core* atau *inertial inflation*). Sebaliknya, jika $U_t > U_{nai}$, maka laju pertumbuhan upah-uang (*money wages*) akan turun, dan hal ini akan menyebabkan tekanan ke bawah (*downward pressure*) atas inflasi untuk mengimbangi sebagian pengaruh ekspektasi tentang inflasi (*inflationary expectations*). Karena inflasi aktual turun, maka ekspektasi tentang inflasi dengan sendirinya juga akan mengalami penyesuaian (*adjusted downward*) dan perekonomian akan bergerak ke kurve Phillips jangka pendek (SRPC) yang lebih

rendah. Sepanjang U_t bisa dipertahankan di atas U_{nai} , maka $\Delta P_t < \Delta P_{t-1}$. Dengan $\Delta P_t < \Delta P_{t-1}$, maka ΔP^e_t akan turun dan laju pertumbuhan upah-uang lebih lanjut akan menjadi lebih lambat. Jadi, jika $U_t > U_{nai}$, maka inflasi akan menjadi lambat dan perekonomian akan bergeser ke kurve Phillips jangka pendek (SRPC) yang lebih rendah. Tingkat inflasi akan stabil jika tingkat pengangguran aktual sama dengan pengangguran alamiah ($U_t = U_{nai}$) dan $\Delta P_t = \Delta P_{t-1}$.

Kaum moneteris menghendaki agar analisis tentang penentuan pendapatan nasional memberi penekanan pada pentingnya peranan jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar merupakan faktor penentu yang utama (*main determinant*) dari tingkat kegiatan ekonomi dan harga-harga dalam suatu perekonomian.

Hubungan antara kebijaksanaan moneter dalam hal ini uang beredar dan kesempatan kerja melalui mekanisme transmisi kebijaksanaan moneter dapat berbentuk hubungan langsung maupun hubungan tidak langsung. Hubungan langsung terjadi dalam jangka pendek (*in the short run*), sedang hubungan tidak langsung terjadi dalam jangka panjang (*in the long run*).

Dalam jangka pendek (*in the short run*), jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat *output* dan kesempatan kerja (*level of output and employment*), sedangkan dalam jangka panjang (*in the long run*) jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat harga atau inflasi (*rate of inflation*) (Nanga, 2001: 50).

2.11. Teori *Purchasing Power Parity*, *Real Exchange Rate* Dan *Real Effective Exchange Rate*

Teori *Purchasing Power Parity* (PPP) atau dikenal dengan *parity index* merupakan konsep paritas daya beli yang awal mulanya diperkenalkan oleh D. Ricardo dan kemudian dikembangkan oleh ahli ekonomi Swedia bernama Gustav

Cassel. Dasar teorinya adalah bahwa perbandingan nilai satu mata uang dengan mata uang lainnya ditentukan oleh daya beli uang tersebut di masing-masing negara (Salvatore, 1997: 124).

Pada dasarnya, teori PPP adalah sebuah metode estimasi jalan pintas atas kurs ekuilibrium ketika suatu negara mengalami ketidakseimbangan neraca pembayaran. Suatu negara sebenarnya memiliki pemahaman atau informasi-informasi yang cukup memadai mengenai bentuk sebenarnya permintaan dan penawaran valuta asing (valas).

Ada dua versi teori PPP yaitu interpretasi absolut dan relatif. Interpretasi absolut PPP merupakan doktrin Lawrence (1977: 63): "*the general level of prices, when converted to a common currency, will be the same in every country*". Sedangkan interpretasi versi PPP relatif menyatakan bahwa perubahan kurs dalam jangka waktu tertentu akan bersifat proporsional atau sebanding besarnya terhadap tingkat harga-harga yang berlaku di kedua negara selama periode yang sama.

Doktrin Laurence tersebut ternyata lebih mengandalkan teori *Relative Purchasing Power Parity Theory* dibanding *Absolute Purchasing Power Parity Theory* karena teori absolut ini tidak bisa diandalkan. Ketidakandalan teori tersebut terletak pada kelemahan-kelemahan sebagai berikut: **Pertama**, terlalu mengutamakan kurs sebagai faktor yang dapat menyeimbangkan barang dan jasa sehingga suatu negara mengalami arus modal keluar yang dapat mengakibatkan defisit neraca pembayaran, padahal kenyataannya tidak demikian, dan **Kedua**, tidak dapat menjelaskan secara tuntas peranan kurs dalam menyeimbangkan arus-

arus perdagangan barang dan jasa, mengingat adanya jenis-jenis barang dan jasa tertentu hampir tidak pernah diperdagangkan antar negara.

Konsep paritas daya beli sebenarnya adalah sebuah konsep yang mengawali munculnya teori kurs valuta asing. Dasar teorinya adalah bahwa perbandingan nilai satu mata uang dengan mata uang lain ditentukan oleh daya beli uang itu sendiri terhadap barang dan jasa di masing-masing negara.

Jadi perbandingan nilai satu mata uang dengan mata uang lain (kurs) ditentukan oleh tingkat harga di masing-masing negara. Namun apabila terjadi perubahan harga yang berbeda di kedua negara, maka kurs tersebut haruslah mengalami perubahan pula. Kurs *Purchasing Power Parity* (PPP) yang didasarkan pada perubahan harga ini sering disebut dengan *Relative Purchasing Power*.

Indeks lain yang sering digunakan untuk mengukur tingkat daya saing ekspor suatu negara adalah *Real exchange rate* (REER) atau nilai tukar efektif riil. Nilai tukar riil adalah nilai tukar nominal dibagi rasio indeks harga di dalam negeri dan di luar negeri (negara mitra dagang). Nilai tukar riil dapat didefinisikan sebagai daya beli relatif dan *output* domestik, yakni harga dan barang luar negeri (impor) yang diukur dalam bentuk barang domestik (ekspor). Secara sederhana, nilai tukar riil dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$v = \frac{VP_{ln}}{P_{dn}}; \dots\dots\dots (Tambunan, 2001b: 205)$$

di mana: v adalah nilai tukar riil

V adalah nilai tukar nominal

P_{ln} adalah indeks harga di luar negeri dalam mata uang asing

P_{dn} adalah indeks harga di dalam negeri dalam mata uang domestik

Jika laju pertumbuhan inflasi di Indonesia lebih pesat di banding di luar negeri, dengan asumsi nilai tukar nominal (V) rupiah terhadap dolar Amerika (US\$) tetap tidak berubah, maka nilai tukar riil (v) rupiah terhadap dolar Amerika (US\$) mengalami penurunan atau nilai rupiah secara riil mengalami apresiasi.

Jika nilai tukar riil ditambah dengan nilai tukar nominal dibagi dua, maka akan diperoleh nilai tukar riil efektif (*Real Effective Exchange Rate*, REER).

2.12. Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional atau produk nasional adalah nilai barang akhir dan jasa akhir yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun tertentu. Hasil yang diperoleh dapat berupa unit yang berbeda, dan untuk menentukan jumlahnya biasanya dinyatakan dalam nilai uang (Sukirno, 2000: 28).

Pendapatan nasional merupakan satu dari beberapa indikator makroekonomi suatu negara. Terjadinya alokasi yang efisien dalam perekonomian secara makro terlihat dari nilai *output* nasional yang dapat dihasilkan pada periode tertentu atau dalam satu tahun. Semakin besar pendapatan nasional suatu negara, semakin baik efisiensi alokasi sumberdaya ekonomi dalam negara tersebut. Dengan demikian, kenaikan besarnya pendapatan nasional dapat dijadikan tolok ukur penting untuk menentukan angka pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) suatu negara.

Dalam menghitung pendapatan nasional berpola pada sirkulasi aliran pendapatan. Atas dasar pola ini, perhitungan pendapatan nasional dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan (*approach*), yaitu: (1) pendekatan pendapatan (*income*

approach), (2) pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*), dan (3) pendekatan produksi (*production approach*) (Waluyo, 2004: 14).

Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan (*income approach*) dilakukan dengan cara menjumlahkan semua pendapatan yang diperoleh dari semua pelaku ekonomi dalam suatu negara pada periode waktu tertentu. Pendapatan tersebut berupa sewa (*rent*), bunga (*interest*), upah (*wages*) dan keuntungan (*profit*).

Dari sisi pendekatan penerimaan (*income approach*), pendapatan nasional syarat keseimbangan dari penerimaan agregat dalam perekonomian tertutup dengan kebijaksanaan fiskal dapat dilihat dari persamaan identitas sebagai berikut:

$$Y = C + S + Tx$$

di mana Y adalah pendapatan nasional

C adalah pengeluaran konsumsi

S adalah adalah tabungan

Tx adalah pajak

Dalam perekonomian terbuka pendapatan nasional digunakan untuk 3 (tiga) tujuan: (1). Untuk konsumsi (termasuk konsumsi barang-barang impor), (2). Untuk ditabung, dan (3). Untuk membayar pajak.

Dalam struktur perekonomian terbuka pembelanjaan agregat dapat diekspresikan dalam bentuk persamaan identiti sebagai berikut $AE = C + I + G + (X - M)$. Dengan demikian syarat keseimbangan dalam struktur perekonomian terbuka akan berlaku keadaan, dimana $Y = C + I + G + (X-M)$ (Sukirno, 2000: 114).

Dalam struktur perekonomian terbuka pendapatan masyarakat tetap digunakan untuk tiga tujuan, yaitu untuk konsumsi (termasuk konsumsi barang impor), untuk ditabung dan untuk membayar pajak. Dengan demikian dalam perekonomian terbuka juga berlaku kesamaan berikut: $Y = C + S + Tx$. Dengan demikian keseimbangan dalam struktur perekonomian terbuka diekspresikan sebagai berikut:

$$C + S + Tx = C + I + G + (X-M) \text{ atau } S + Tx + M = I + G + X$$

Dalam hubungannya dengan pendapatan nasional, T dan G merupakan variabel kebijaksanaan fiskal (*fiscal policy*) yang efektivitasnya dapat diukur dari besarnya dampak variabel tersebut terhadap pendapatan nasional. Dampak kebijaksanaan fiskal terhadap pendapatan nasional dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut: diasumsikan pemerintah menjalankan atau menetapkan suatu kebijaksanaan fiskal yang ekspansif (*expansionary fiscal policy*), yaitu melalui peningkatan pengeluaran pemerintah (G). Dengan adanya kenaikan pengeluaran, maka permintaan agregat (AD) akan naik, yang pada gilirannya akan mendorong kenaikan tingkat bunga dan tingkat pendapatan.

Kebijaksanaan fiskal seperti pengeluaran pemerintah (G) dan atau pajak (T) ditujukan untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dalam perekonomian. Dengan demikian kebijakan ini dapat pula ditujukan untuk mempengaruhi posisi keuangan atau posisi moneter suatu negara dan atau penstabil otomatis dalam menurunkan atau menaikkan defisit anggaran pemerintah suatu negara..

Kebijaksanaan fiskal akan efektif apabila permintaan uang (*demand for money* atau M_d) semakin elastis terhadap

tingkat bunga (*more elastic*). Semakin elastis investasi terhadap tingkat bunga, maka kebijaksanaan fiskal akan semakin efektif (Nanga, 2001: 191).

Perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*), yaitu dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi (rumah tangga, perusahaan [swasta], pemerintah dan luar negeri) pada suatu negara pada periode tertentu. Atau dengan kata lain:

Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menjumlahkan permintaan akhir dari unit-unit ekonomi, yaitu rumah tangga berupa konsumsi (C), perusahaan berupa investasi (I) dan pemerintah disebut pengeluaran pemerintah (G) (Herlambang, dkk., 2001: 18).

Pendekatan tersebut secara ringkas ditulis sebagai berikut:

$$Y = C + I + G \text{ (untuk struktur perekonomian tertutup)}$$

$$Y = C + I + G + (X - M) \text{ (untuk struktur perekonomian terbuka)}$$

X adalah pengeluaran otonom, maka nilainya tetap, sedangkan nilai M semakin meningkat apabila pendapatan nasional bertambah. Oleh sebab itu nilai (X-M) semakin kecil apabila pendapatan nasional meningkat. Seterusnya apabila (X - M) positif berarti $(C + I + G) < Y$, implikasinya adalah negara menghasilkan lebih banyak pendapatan dari yang digunakan sehingga kelebihannya dijual di luar negeri. Sebaliknya, apabila negatif (X - M) berarti negara itu pengeluarannya lebih besar daripada yang dihasilkan.

Jika ekspor lebih besar daripada impor ($X > M$), maka saldo neraca perdagangan atau jasa menjadi positif. Sebaliknya, bila impor lebih besar daripada ekspor ($M > X$), maka saldo neraca perdagangan atau jasa menjadi negatif. Jika tidak ada transaksi keuangan internasional,

yang juga sering disebut transaksi sepihak (*unilateral account*), maka penjumlahan neraca perdagangan dan neraca jasa disebut neraca transaksi berjalan (*current account*), dan saldonya disebut saldo transaksi berjalan (Tambunan, 2001a: 1).

Dengan demikian jelaslah bahwa suatu negara akan bisa memperbaiki neraca perdagangannya apabila dapat meningkatkan produksi nasional lebih besar dari penggunaannya.

Dalam struktur perekonomian terbuka ($X - M$) adalah ekspor neto, NX . Variabel ekonomi agregatif ini merupakan hasil pengurangan nilai total impor (M) terhadap nilai total ekspor (X). Apabila neraca perdagangan dalam keadaan pasif, yaitu nilai impor barang dan jasa lebih besar daripada nilai ekspor barang dan jasa, maka nilai ekspor neto bertanda negatif. Secara matematis ekspor neto ini dalam perkiraan *Gross Domestic Product*, GDP yang disimbolkan Y dapat disajikan kembali dalam bentuk persamaan identitas $Y = C + I + G + NX$ (Herlambang, dkk., 2001: 41).

Perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan produksi (*production approach*) dilakukan berdasarkan atas jumlah nilai dari hasil produksi berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat atau negara pada periode waktu tertentu.

Berdasarkan perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan produksi (*production approach*) atau pendekatan hasil (*output approach*), perhitungannya dilakukan dengan cara menaksir nilai tambah, yaitu pertambahan nilai uang dari sesuatu barang yang diproduksi dalam

perekonomian. Perhitungan ini sering pula dinamakan pendekatan ‘*net output*’ atau ‘*output neto*’.

Secara ringkas nilai tambah yang diciptakan oleh suatu kegiatan ekonomi dapat ditentukan dengan formula berikut: Nilai Tambah, NT = Nilai Penjualan, NP - Nilai Pembelian, NPn.

Jika nilai tambah, NT diperhitungkan tanpa memperhatikan siapa pemilik faktor produksi, maka masuk dalam Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*)” (Rahardja dan Manurung, 2001: 34).

Produk Domestik Bruto, PDB (*Gross Domestic Product, GDP*) adalah *total output* yang dihasilkan oleh suatu perekonomian, yang dalam praktiknya cara perhitungan dilakukan dengan membagi-bagi perekonomian menjadi beberapa sektor produksi (*Industrial Origin*). Jumlah *output* masing-masing sektor merupakan jumlah *output* seluruh perekonomian. Ketidak hati-hatian dalam menggunakan pendekatan ini akan menghasilkan GDP yang *double counting* atau bahkan *multiple counting* dan hanya dapat diatasi dengan cara yang dijumlah adalah hanya nilai tambah, NT (*Value Added*) (Rahardja dan Mandala, 2001: 25-26).

Aktivitas produksi yang baik adalah aktivitas yang menghasilkan nilai tambah, $NT > 0$. Dengan demikian besarnya $GDP = \sum NT$, di mana GDP adalah *Gross Domestic Product* atau Produk Domestik Bruto, PDB dan NT adalah Nilai Tambah (*Value Added*) sektoral atau disebut lapangan usaha (*Industrial Origin*).

Di Indonesia nilai tambah sektoral ini dalam sistem perkiraan produk nasional dengan pendekatan produk lapangan usaha dikelompokkan ke dalam sembilan lapangan usaha, yaitu:

1. Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan
 - 1.1. Tanaman bahan makanan
 - 1.2. Lainnya

2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Listrik, gas dan air bersih
5. Bangunan dan konstruksi
6. Perdagangan, hotel dan restoran
7. Pengangkutan dan telekomunikasi
8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
9. Jasa-jasa lainnya.

2.13. Penelitian Terdahulu

2.13.1. Arief (1991)

Dampak Pelaksanaan Kebijakan Moneter Terhadap Ekonomi Indonesia. Analisis terhadap dampak kebijakan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu: (1) Dampak Kebijaksanaan Moneter terhadap Pertumbuhan Ekonomi; (2) Dampak Kebijaksanaan Moneter Terhadap Posisi Transaksi Berjalan dalam Neraca Pembayaran; dan (3) Dampak Kebijaksanaan Moneter Terhadap Tingkat Inflasi.

Hasil studi yang berkaitan dengan efektivitas kebijaksanaan moneter di Indonesia tersebut, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam memformulasikan tindakan-tindakan moneter selanjutnya di Indonesia.

Dalam menguji sampai seberapa jauh kebijaksanaan moneter telah menimbulkan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, maka dilakukan pengujian terhadap model yang merupakan modifikasi dari model St. Lois di mana efektivitas kebijaksanaan moneter dibandingkan dengan efektivitas kebijaksanaan fiskal dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan ialah data tahunan meliputi periode 1968-1988. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kebijaksanaan moneter ternyata belum mampu tampil sebagai faktor secara statistik penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi

Indonesia selama periode 1968-1988. Jumlah nilai koefisien regresi variabel-variabel moneter yaitu tingkat pertumbuhan *monetary base* tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan *monetary base* tahun sebelumnya yang besarnya 0,0639 ternyata secara statistik tidak signifikan terbukti dari nilai t-statistik yang rendah yaitu 0,1693. Variabel kebijaksanaan fiskal yaitu pertumbuhan pengeluaran pemerintah ternyata merupakan faktor yang dominan dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode yang diteliti. Jumlah koefisien variabel kebijaksanaan fiskal adalah sebesar 0,7167 dengan nilai t-statistik sebesar 1,7872. Variabel ekspor dengan jumlah koefisien sebesar 0,1461 dan nilai t-statistik sebesar 0,8299 ternyata tidak dapat dianggap sebagai faktor penentu pertumbuhan ekonomi.

Seterusnya, dampak positif yang berkesinambungan dari kebijaksanaan moneter terhadap posisi transaksi berjalan dalam neraca pembayaran dianalisis dengan menguji model Miles yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia periode tahun 1970-1984. Hasil analisis menunjukkan bahwa devaluasi yang dilaksanakan dalam periode tahun 1970-1984 (devaluasi sebelum tahun 1978 dan devaluasi tahun 1978 itu sendiri), secara menyeluruh tidak menimbulkan dampak positif terhadap posisi transaksi berjalan dalam neraca pembayaran.

Pada akhirnya, dampak positif kebijaksanaan moneter terhadap tingkat inflasi dianalisis berdasarkan formulasi Granger dengan menggunakan data tahunan yang meliputi periode 1968-1989. *Time-lag* yang digunakan adalah untuk periode 1 tahun dan 2 tahun dan regresi dilakukan untuk M1 dan M2. Hasil pengujian kausalitas menunjukkan terdapat hubungan kausal dua arah antara

pertumbuhan jumlah uang beredar dan tingkat inflasi di Indonesia dalam periode 1968-1989, yang dibuktikan oleh nilai-nilai *F-ratio* yang secara statistik signifikan pada tingkat 5 persen dan 10 persen.

Relevansinya dengan penelitian terdahulu, penelitian ini sama-sama terfokus pada kebijakan moneter (uang beredar) dengan lokus Indonesia. Perbedaannya terletak pada penggunaan model dalam analisis dan variabel sasaran. Secara spesifik penelitian ini mengembangkan analisis jalur (*Path Analysis*) dengan melibatkan struktur ekspor, struktur devisa dan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel dependen.

2.13.2. Cole (1976)

Concept, Cause and Cures of Instability in Less Developed Countries.

Tujuan studinya melihat efektivitas kebijaksanaan moneter di negara sedang berkembang.

Di negara yang sedang berkembang ternyata kebijaksanaan moneter merupakan satu dari beberapa paket kebijaksanaan stabilisasi yang sangat efektif. Efektivitas kebijaksanaan moneter dapat diilustrasikan dalam diagram IS-LM. Dalam situasi bentuk kurva IS-LM yang berbeda akan menghasilkan efektivitas kebijaksanaan moneter yang berbeda pula. Karena fungsi permintaan uang menentukan bentuk kurva LM, maka kegunaan meneliti fungsi permintaan uang dengan sendirinya menjadi jelas.

Dalam kaitannya dengan penelitian terdahulu, penelitian ini sama-sama terfokus pada kebijaksanaan moneter. Lokus penelitian terdahulu pada negara-

negara yang sedang berkembang, sedang penelitian ini terbatas hanya pada perekonomian Indonesia.

2.13.3. Aghevli (1977)

Money, Price and the Balance of Payments:: Indonesia 1968-973.

Studinya terfokus pada model perekonomian tertutup dengan tujuan untuk mengadakan taksiran-taksiran variabel moneter sesuai dengan informasi-informasi yang ada untuk tujuan pengambilan keputusan. Di samping itu model ini memungkinkan untuk menguji konsistensi internal kebijaksanaan moneter, anggaran dan kebijaksanaan neraca perdagangan internasional untuk diaplikasikan dalam perekonomian terbuka.

Dalam studinya, Aghevli menggunakan GNP sebagai variabel skala dan model penyesuaian parsial (*Partial Adjustment Model*, PAM) untuk menentukan permintaan uang riil (M_1/P) sebagai variabel dependen.

Analisis data Indonesia menunjukkan koefisien penyesuaian parsial uang sempit mendekati 1 (yaitu $\lambda = 0,31$) lebih besar daripada koefisien parsial uang luas (yaitu $\lambda = 0,21$). Ini berarti penyesuaian saldo riil akibat kenaikan pendapatan jangka pendek dicerminkan dengan memegang lebih banyak uang sempit daripada uang kuasi (Q_m). Besarnya elastisitas pendapatan jangka panjang untuk uang sempit dan luas masing-masing adalah 2,18 dan 2,29. Studi ini menggunakan data kuartalan untuk hubungan tahunan antara pendapatan nasional, impor, ekspor dan jumlah uang yang ditawarkan (jumlah uang beredar, JUB). Studi ini juga menggunakan permintaan uang nominal disertai harga sebagai satu di antara berbagai variabel independen.

Kesimpulan dari studi ini menyatakan bahwa variasi jumlah uang yang diminta berhubungan negatif dengan tingkat bunga dan inflasi, dan positif terhadap pendapatan. Mekanisme penyesuaian nominal secara statistik lebih dominan dibanding penyesuaian riil. Neraca perdagangan internasional dipertimbangkan sebagai variabel eksogenous.

Berdasarkan uraian dari penelitian terdahulu, relevansinya dengan penelitian ini adalah terletak pada kebijaksanaan moneter, perdagangan internasional dalam struktur perekonomian terbuka dan lokus penelitian sama-sama di Indonesia.

2.13.4. Nasution (1985)

Financial Institutions and Policies in Indonesia. Studinya memfokuskan pada model perekonomian tertutup dan menggunakan data kuartalan dalam analisisnya, model PAM menentukan permintaan uang riil (M_1/P) sebagai variabel dependen. Variabel skala yang berbeda-beda juga dipergunakan dalam studi ini, termasuk kurs dolar Amerika terhadap rupiah dan GNP riil.

Berbagai hasil yang diperoleh dari penelitian Nasution: bahwa koefisien perubahan jumlah uang yang diminta, baik M_1 maupun M_2 , dalam asumsi PAM lebih besar dari nol. Selanjutnya, dari ECM dapat diamati bahwa tanda koefisien pada variabel suku bunga nominal (dr) dan tingkat harga umum (dp) untuk keduanya negatif, namun demikian keduanya memiliki statistik t yang berbeda. Parameter hasil estimasi menunjukkan perilaku seperti yang diharapkan dari dampak perubahan kurs terhadap jumlah uang yang dipegang. Masyarakat

Indonesia mengkonversi rupiah ke dalam US dollar untuk berjaga-jaga (*hedging*) terhadap devaluasi.

Relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah lokus penelitian sama-sama di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu hanya terletak pada struktur perekonomian tertutup serta memasukkan model ECM dan PAM dalam menentukan permintaan uang riil ($M1/P$) dan perubahan kurs, sedang penelitian ini terfokus pada struktur perekonomian terbuka dengan memasukkan struktur uang beredar dalam model yang di taksir yaitu fungsi jumlah uang beredar terhadap nilai ekspor, jumlah devisa dan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja.

2.13.5. Gupta Dan Moazzami (1989)

Demand for Money in Asia. Kedua peneliti ini memfokuskan studinya pada model perekonomian tertutup dan menggunakan konsumsi agregat sebagai variabel skala, menemukan bahwa perkembangan jumlah uang yang diminta searah dengan perkembangan konsumsi agregat. Demikian pula dalam studinya tahun 1990, *Nominal VS Real Adjustment in Demand for Money Function*. Jumlah penduduk Indonesia digunakan sebagai pembagi (*deflator*) dan menggunakan permintaan nominal disertai harga sebagai satu di antara berbagai variabel penjelas, di samping GNP riil per kapita.

Studi menyimpulkan bahwa variasi jumlah uang yang diminta berhubungan negatif dengan tingkat bunga dan inflasi, dan positif terhadap pendapatan. Dalam asumsi PAM, koefisien perubahan jumlah uang yang diminta, baik M_1 maupun M_2 mendekati nol. Selanjutnya, dari ECM dapat diamati bahwa

tanda koefisien pada variabel suku bunga nominal (dr) dan tingkat harga umum (dp) untuk keduanya negatif; namun demikian keduanya memiliki statistik t yang berbeda.

Relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada pelibatan salah satu variabel struktur uang yang diminta analog dengan struktur uang beredar. Perbedaan kedua penelitian hanya terletak pada hasil determinasi dan lokus penelitian. Penelitian terdahulu terletak pada hasil determinasi permintaan uang dengan mengambil lokus di tingkat Asia, sedang penelitian ini membatasi variabel uang beredar dengan lokus hanya pada sektor moneter Indonesia.

2.13.6. Sugiyanto (1991)

Time Series Analysis of Demand for Money in Indonesia from 1960 to 1990. Studi tentang permintaan uang di Indonesia ini dilakukan dengan mempergunakan kerangka model penyesuaian parsial (*Partial Adjustment Model*, PAM) dan model koreksi kesalahan (*Error Correction Model*, ECM). Model perekonomian tertutup dipergunakan sebagai model referensi. Model ini diperkaya dengan indeks harga saham di Jakarta, kurs US dollar terhadap rupiah, dan variabel *dummy* untuk mendeteksi pengaruh berbagai perkembangan lembaga keuangan di Indonesia dan perkembangan pasar dunia terhadap permintaan uang di Indonesia.

Hasil estimasi berdasarkan PAM memiliki karakteristik seperti model permintaan uang secara umum. Variabel-variabel penjelas dalam model ini adalah konsumsi agregat (C), tingkat harga umum (P), suku bunga (r) dan tingkat inflasi

(π). Seluruh variabel penjelas ini mampu menerangkan variasi jumlah uang yang diminta secara nominal, baik dalam arti uang sempit (M_1), uang luas (M_2) maupun uang kuasi (Q_m). Hal ini diperkuat oleh tingginya nilai R^2 dan F statistik.

Penambahan variabel kurs US dollar (S) ke dalam model menaikkan koefisien R^2 yang telah disesuaikan (R^2 -Adj) untuk seluruh model.

Studi menyimpulkan, kenaikan yang terbesar terlihat pada model permintaan uang kuasi (Q_m), dan ini mungkin disebabkan oleh dimasukkannya deposito dalam valuta asing sebagai komponen uang kuasi (Q_m).

Semua hasil penelitian di atas mengindikasikan bahwa apabila akan dilakukan pembuatan model permintaan uang di Indonesia secara makro, dapat memasukkan variabel-variabel relevan yang mencerminkan fluktuasi di pasar dunia dalam konteks perekonomian terbuka.

Berdasarkan uraian hasil penelitian terdahulu dan relevansinya dengan penelitian ini adalah pada penambahan uang kuasi (Q_m) dalam model. Sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan model. Dalam penelitian ini model analisis yang digunakan adalah *Path Analysis* dalam mendeterminasi variabel dependen.

2.13.7. Koot Dan Walker (1979)

A Statistical Analysis of the impact of Monetary Policy on Credit Union Lending. Kedua peneliti memfokuskan penelitiannya pada model regresi distribusi *lag polinomial* dan data kuartalan yang dikeluarkan oleh *Federal Reserve System (Board of Governors of the Federal Reserve System)* dengan sampel tahun data 1956-1977.

Penelitian tersebut ditujukan untuk mendeterminasi kecepatan dan derajat respon cicilan pinjaman nasabah *Credit Union* akibat dari perubahan kebijaksanaan moneter. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah cicilan pinjaman nasabah *Credit Union*, sedang variabel independen adalah kebijaksanaan moneter, M1 (uang kartal dan uang giral).

Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan menggunakan persamaan 6 periode dan 5 periode *lag* diperoleh *standard error minimum*, hanya persamaan periode t-2 dan t-3 tidak signifikan secara statistik ($\alpha = 0,05$).

Estimasi dari persamaan regresi model distribusi *lag polinomial* yang diperoleh dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Model tersebut memberikan suatu representasi statistik yang memadai terhadap *Credit Union* akibat kebijaksanaan moneter.
- b. Perilaku nasabah *Credit Union* telah memberikan reaksi melebihi kecepatan perubahan dalam kebijaksanaan moneter.
- c. Derajat atau kekuatan respon perilaku nasabah pada perubahan dalam kebijaksanaan moneter sangat lemah, dan
- d. Model *lag polinomial* dapat juga diaplikasikan pada cicilan pinjaman nasabah di bank-bank komersial dengan hasil yang serupa.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu kebijaksanaan moneter jumlah uang beredar sama-sama dipilih sebagai variabel independen atau prediktor variabel dependen.

Penelitian terdahulu memilih *Credit Union* sebagai variabel dependen, sedang penelitian ini memasukkan struktur ekspor, struktur devisa dan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel dependen.

2.13.8. Friedman Dan Meiselman (1963)

The Relative Stability of Monetary Velocity and the Investment Multiplier in the United States, 1897-1958. Penelitian ini ditujukan untuk menguji secara empiris berapa dekat hubungan atau korelasi antara sasaran antara suatu implementasi kebijaksanaan dengan sasaran akhir.

Pengujian korelasi antara M1 dan M2 dengan pendapatan nasional data Amerika Serikat, kedua peneliti tersebut menyimpulkan bahwa M2 merupakan sasaran antara yang lebih baik daripada M1.

Ada 3 sasaran akhir yang penting untuk dikaji lebih lanjut, yaitu harga, *output* dan neraca pembayaran. Problema yang mendesak untuk mendapat kajian lebih lanjut bagi suatu negara adalah masalah neraca pembayaran.

Berdasarkan uraian tersebut, terkait satu hal yang sama dengan penelitian ini, yaitu menguji hubungan antara implikasi kebijaksanaan moneter dengan sasaran akhir. Perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada sasaran akhir, yaitu struktur ekspor, struktur devisa dan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja.

2.13.9. Bautista (1981)

Exchange Rate Changes and LDC Export Performance Under Generalized Currency Floating. Tujuan penelitian ini pada dasarnya di arahkan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu apakah perubahan dalam tingkat nilai tukar riil

menimbulkan masalah yang mempengaruhi arus perdagangan? Dan Apakah peningkatan dalam variabilitas nilai tukar jangka pendek menimbulkan anti *trade bias*? * Anti *trade bias* didefinisikan sebagai pengaruh yang buruk terhadap arus perdagangan.

Bautista mengawali studinya dengan pernyataan bahwa sistem *generalized floating* membawa ketidakpastian dalam perdagangan sebagai akibat dan adanya pergerakan mata uang negara utama (*currency realignment*), yang pada gilirannya akan mempengaruhi ekspor.

Menurut Bautista ada dua sumber perubahan nilai tukar efektif dalam sistem *generalized floating* yang diidentifikasi memiliki pengaruh terhadap harga relatif ekspor dan impor, dan pada gilirannya mempengaruhi profitabilitas atau daya saing ekspor di negara berkembang, yaitu:

- a. Pergerakan (*realignment*) mata uang negara utama, negara berkembang tidak memiliki kontrol terhadapnya, mempengaruhi profitabilitas ekspor melalui pengaruhnya terhadap harga domestik ekspor dan impor. Pergerakan ini, bersama-sama dengan kebijakan nilai tukar suatu negara, akan tercermin dalam pergerakan nilai tukar efektif nominal (NEER).
- b. Dengan asumsi hal-hal lain tetap, peningkatan pada nilai tukar efektif riil (REER) akan meningkatkan harga barang ekspor relatif terhadap barang konsumsi dalam negeri, sehingga menyebabkan penawaran ekspor meningkat. Indeks REER ini ditentukan tidak hanya oleh

perubahan harga luar negeri, dan kebijakan nilai tukar domestik tetapi juga oleh faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga umum.

Selanjutnya, Bautista mengatakan bahwa bukan hanya tingkat harga umum, tetapi juga variabilitas dari nilai tukar efektif nominal dan nilai tukar efektif riil bisa mempengaruhi kinerja ekspor negara berkembang. Semakin tinggi ketidakstabilan mata uang negara utama, semakin tinggi ketidakpastian terhadap harga ekspor (dinyatakan dalam mata uang domestik). Sebagai akibatnya, terdapat resiko pertukaran yang tinggi yang harus dihadapi oleh eksportir dalam transaksi perdagangan internasional. Pada gilirannya, resiko yang tinggi ini akan mengakibatkan penurunan penawaran ekspor. Dalam jangka panjang ketidakpastian terhadap nilai tukar juga menyebabkan tambahan biaya dalam perdagangan internasional, sehingga memukul investasi jangka panjang yang ditanamkan pada industri berorientasi ekspor.

Pernyataan-pernyataan Bautista tersebut di atas kemudian diterjemahkan dalam bentuk model ekonometrika, dengan spesifikasi model mengikuti Krueger, yaitu menggunakan penerimaan ekspor sebagai variabel terikat.

Model Bautista menyatakan ekspor sebagai fungsi dari nilai tukar efektif, nominal, nilai tukar efektif riil, variabilitas kedua nilai tukar tersebut, serta variabel *trend*. Variabel NEER mempengaruhi ekspor secara signifikan pada tingkat $\alpha = 5\%$. Hal ini terjadi baik untuk NEER yang diturunkan dari data nilai tukar aktual (LN-ER-A) maupun NEER yang diturunkan dari data nilai tukar harapan (LNEER-B). REER maupun variabilitasnya ternyata tidak signifikan mempengaruhi ekspor. Tetapi jika REER diturunkan dari data nilai tukar yang

diharapkan menjadi signifikan mempengaruhi penerimaan ekspor pada $\alpha = 5\%$. Atau dengan kata lain, REER yang diturunkan dari data nilai tukar harapan lebih baik dalam menjelaskan perilaku penerimaan ekspor Indonesia dibandingkan dengan REER yang diturunkan dari data nilai tukar aktual.

Hasil analisis selanjutnya ditemukan masalah otokorelasi derajat satu pada regresi yang menyebabkan digunakan metode Cochrane Orcutt untuk menghasilkan parameter yang efisien. Ditemukan pula adanya *multicollinearity* dalam persamaan seperti dinyatakan dalam t-statistik yang rendah (tidak signifikan), dan F-statistik yang signifikan. Untuk masalah ini dikeluarkan beberapa variabel bebas yang memiliki korelasi erat dengan variabel bebas lainnya. Dengan demikian hanya variabel NEER yang signifikan mempengaruhi ekspor.

Relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama terfokus pada perdagangan internasional dalam kaitannya untuk menentukan daya saing dan daya beli komoditas ekspor. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada perubahan nilai tukar riil. Dalam penelitian ini menggunakan struktur uang beredar mempengaruhi struktur ekspor.

2.13.10. Suardhini Dan Miranda (1997)

Analisis Dampak Intervensi Bank Sentral Dalam Penetapan Nilai Tukar Terhadap Ekspor-Impor Indonesia. Studi ini ditujukan untuk mengetahui besarnya intervensi bank sentral dalam penetapan nilai tukar dan dampaknya terhadap ekspor-impor Indonesia yang dianalisis dengan mengembangkan model Bautista.

Hasil regresi dengan menggunakan model Bautista menunjukkan adanya pengaruh yang lebih baik pada nilai tukar efektif harapan, baik nominal ataupun riil terhadap penerimaan ekspor non-migas Indonesia. Hal ini memberi indikasi lebih baiknya nilai tukar harapan dalam menggambarkan daya saing perekonomian domestik, sehingga pada gilirannya membawa implikasi yang baik pada penerimaan ekspor nonmigas Indonesia.

Dilihat dari sudut ini, maka dapat disimpulkan bahwa membiarkan nilai tukar bergerak mengikuti mekanisme pasar (tanpa diintervensi oleh Bank Sentral) memiliki pengaruh yang baik, karena menyebabkan pengaruh perubahan nilai tukar efektif lebih responsif terhadap penerimaan ekspor. Tetapi ini tidak berarti bahwa *pure floating* menjadi alternatif yang baik, karena besarnya *misalignment* nilai tukar dan adanya gejolak-gejolak spekulatif jika sistem mengambang murni diberlakukan. Dengan demikian alternatif kebijakan yang bisa dilakukan jika Indonesia hendak mendorong pertumbuhan ekspornya ialah dengan memperhatikan variabel-variabel utama yang mempengaruhi nilai tukar, seperti dinyatakan dalam model *Portfolio Balance* sebelum Bank Sentral melakukan intervensi dalam penentuan besarnya nilai tukar di Indonesia.

Fokus penelitian terdahulu seperti diuraikan di atas adalah terletak pada penetapan nilai tukar yang dilakukan melalui intervensi Bank Sentral untuk mendorong pertumbuhan ekspor secara umum. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada kebijaksanaan moneter dalam mendorong nilai ekspor dan jumlah devisa serta pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

2.13.11. Jung Dan Peyton (1985)

Export, Growth and Causality in Developing Countries. Studi ini ditujukan untuk melakukan pengujian mengenai hubungan antara pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara sedang berkembang dengan menggunakan metode kausalitas Granger.

Dari hasil studi tersebut menunjukkan bahwa hanya 4 negara dari 37 negara yang diteliti, mempunyai data yang mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa ekspor telah mendorong pertumbuhan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada struktur ekspor mempengaruhi pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dengan menggunakan metode analisis jalur (*Path Analysis Method*).

2.13.12. Emery (1967)

The Relationship of Export and Economic Growth. Studi ini ditujukan untuk menganalisis peranan ekspor dalam pembangunan ekonomi sekaligus untuk memberi sokongan kepada argumentasi teori *export base* dan *resource base*.

Data yang digunakan dalam studi Emery adalah data pendapatan per kapita menurut harga tetap dan ekspor menurut harga tetap tahun 1953-1963 di 50 negara. Dari data ini kemudian ditentukan tingkat pertumbuhan rata-rata pendapatan per kapita dan ekspor antara ke dua tahun tersebut dan dengan menggunakan data tersebut selanjutnya dibuat analisis regresi mengenai hubungan ekspor dan pembangunan ekonomi.

Berdasarkan hasil analisis regresi tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang tinggi antara perkembangan ekspor dan perkembangan ekonomi,

dan secara umum dapat dikatakan bahwa kenaikan ekspor sebanyak 2,5 persen akan menciptakan kenaikan tingkat pendapatan per kapita sebesar 1 persen.

Secara *a priori*, Emery dalam studinya juga menunjukkan tentang peranan sektor ekspor dalam pembangunan ekonomi dengan menggunakan data empiris. Sumbangan yang diberikan oleh sektor ekspor dalam pembangunan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu sumbangan langsung dan sumbangan tidak langsung. Termasuk dalam sumbangan langsung adalah: **Pertama**, kenaikan dalam jumlah ekspor memungkinkan suatu negara untuk menaikkan jumlah impor, termasuk jumlah impor barang modal yang penting peranannya dalam pembangunan ekonomi; **Kedua**, dengan mengembangkan sektor ekspor maka dana pembangunan yang tersedia akan dialirkan ke dalam sektor yang paling efisien, yaitu sektor penghasil barang ekspor yang sanggup bersaing dengan industri-industri di luar negeri; **Ketiga**, kegiatan ekspor akan memperluas pasar untuk produksi dalam negeri dan memungkinkan perluasan skala produksi industri-industri, selanjutnya menciptakan *economies of scale*; dan **Keempat**, karena perusahaan-perusahaan harus tetap mempertahankan kedudukan yang *competitive* dalam pasar dunia maka perusahaan berusaha untuk menekan ongkos produksi dan mempertinggi efisiensi kegiatannya.

Sumbangan yang tidak langsung dari sektor ekspor dalam pembangunan ekonomi dapat dibedakan dalam tiga golongan. **Pertama**, ekspor akan mendorong dan meningkatkan perkembangan penanaman modal dari dalam maupun luar negeri karena banyak industri mengalami perluasan pasar sebagai akibat dari perkembangan sektor ekspor. **Kedua**, perkembangan sektor ekspor akan

memudahkan masuknya inovasi dalam teknologi, pasar dan keahlian usahawan. Industri-industri akan terdorong untuk mengimpor teknologi baru dari luar untuk mempertahankan kedudukan persaingannya di luar negeri; dan **Ketiga**, dengan adanya barang-barang yang dapat diimpor dari luar negeri variasi barang yang ada dapat menjadi semakin banyak dan akan mendorong pertambahan dalam konsumsi.

Hasil analisis selanjutnya menemukan bahwa terdapat korelasi yang tinggi antara perkembangan ekspor dan perkembangan ekonomi, dan secara umum dapat dikatakan bahwa kenaikan ekspor sebanyak 2,5 persen akan menciptakan kenaikan tingkat pendapatan per kapita sebesar 1 persen.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama terfokus pada variabel ekspor dan menganggap bahwa sektor ekspor sangat berperan strategis dalam pembangunan ekonomi. Perbedaannya terletak pada struktur ekspor dalam mempengaruhi struktur devisa dan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan di Indonesia dengan metode analisis jalur (*Path Analysis Method*).

Hasil studi tersebut mengindikasikan bahwa teori Emery ini dapat dijadikan landasan untuk pengembangan lebih lanjut ke arah pengembangan teori struktur perdagangan internasional dalam hubungannya dengan struktur ekonomi sektoral.

BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL

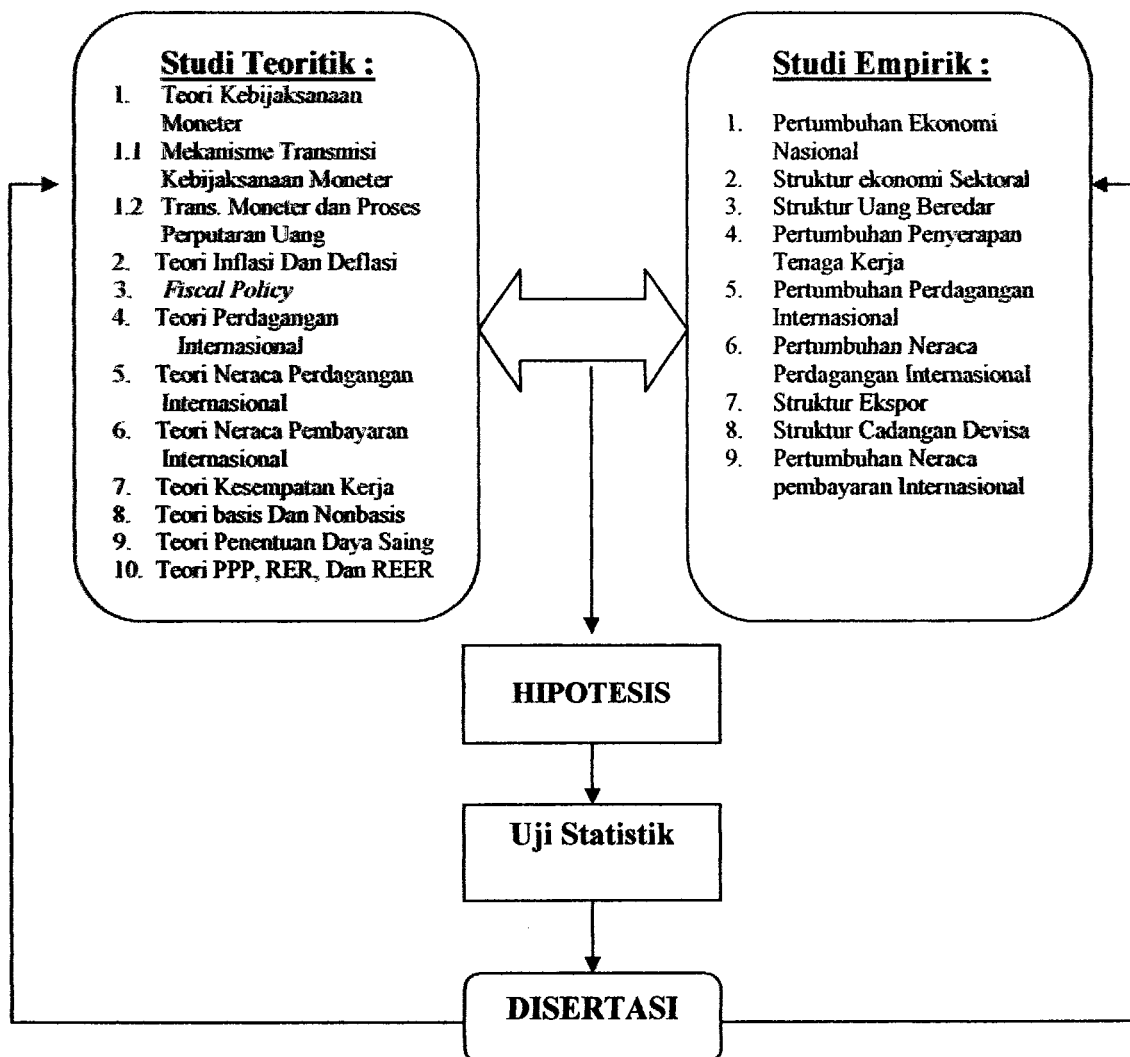
DAN HIPOTESIS

BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan studi dan tinjauan pustaka serta penelitian terdahulu, maka terlebih dahulu disusun kerangka proses berpikir seperti pada Gambar 3.1. berikut:



Gambar 3.1 KERANGKA PROSES BERPIKIR

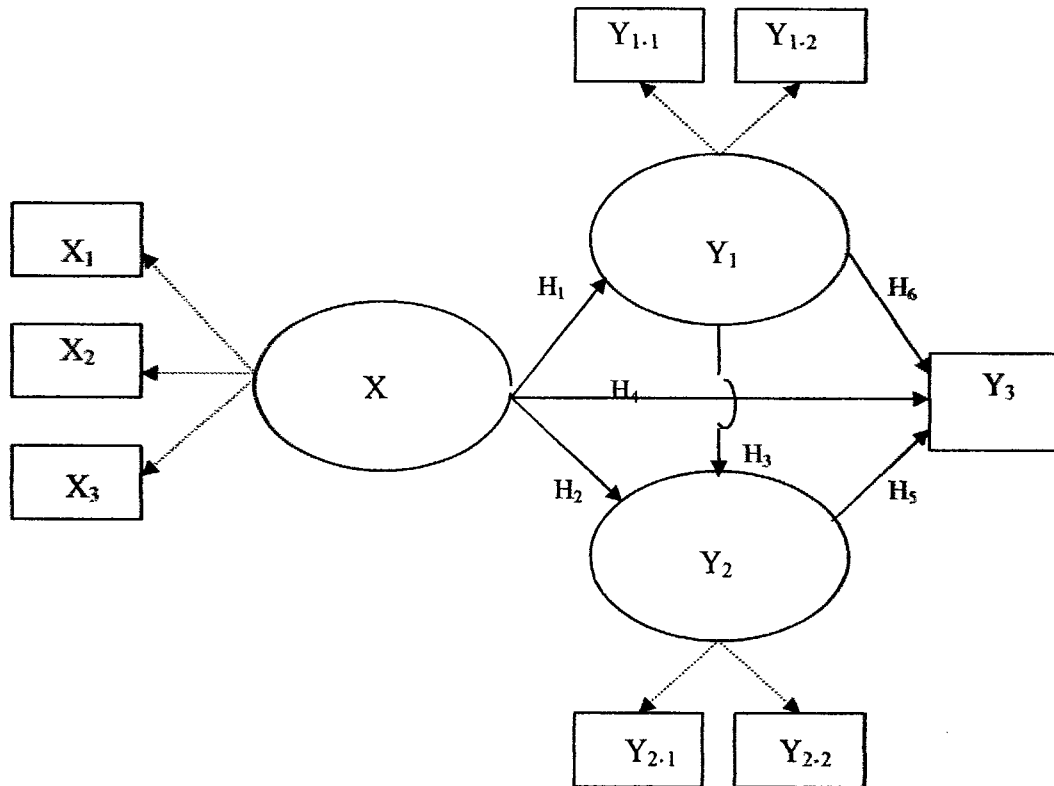
Berdasarkan studi teoritik dan studi empirik serta sintesis dari kedua studi tersebut, maka dapat disusun beberapa konsep yang akan digunakan dalam analisis hasil studi. Teori adalah konsep yang dapat menuntun peneliti agar dapat berpikir deduktif. Artinya dalam teori dipastikan ditemukan keadaan yang bersifat umum atau universal dan dapat diaplikasikan pada keadaan yang bersifat khusus atau spesifik. Sebaliknya studi empirik dapat menuntun peneliti agar dapat berpikir sesuai dengan pola pikir induktif. Artinya berdasarkan studi empirik akan ditemukan hal-hal yang bersifat khusus atau spesifik dan dapat diterapkan kepada keadaan yang bersifat universal.

Seterusnya berdasarkan kedua studi dan sintesis tersebut, maka dapat pula disusun beberapa rumusan hipotesis yang sangat mungkin dapat diuji kebenarannya. Dalam studi ini pengujian hipotesis akan dilakukan berdasarkan uji kualitatif dan kuantitatif yang dianggap relevan dengan studi ini, sehingga hipotesis yang telah diuji kebenarannya itu akan memunculkan temuan baru dan menjadi ilmu pengetahuan yang dalam studi ini akan menjadi konsep disertasi. Selain itu, diharapkan dari logika teoritis yang dikembangkan dengan hasil studi empirik ini dapat memberikan masukan yang lebih luas dalam pembahasan lebih lanjut.

Temuan-temuan yang berupa teori baru itu akan menyokong sekaligus mengembangkan teori yang telah digunakan, sehingga hasil studi ini diharapkan pula akan menyokong pengembangan penelitian sebelumnya.





Konsisten dengan hipotesis yang akan dirumuskan serta variabel terpilih yang akan digunakan dan yang akan diukur serta pengaruh antara variabel tersebut

disajikan pada kerangka konseptual Gambar 3.2.



Gambar 3.2. KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN

Keterangan Gambar :

-  adalah variabel laten
-  adalah indikator
-  adalah tanda arah pengaruh langsung
-  adalah dimensi arah pengukuran

- X adalah struktur uang beredar
- X₁ adalah uang kartal
- X₂ adalah uang giral
- X₃ adalah uang kuasi
- Y₁ adalah struktur ekspor
- Y_{1.1} adalah ekspor migas

- $Y_{1,2}$ adalah ekspor nonmigas
- Y_2 adalah struktur devisa
- $Y_{2,1}$ adalah valuta asing
- $Y_{2,2}$ adalah nonvaluta asing
- Y_3 adalah pertumbuhan penyerapan tenaga kerja
- H_1 adalah hipotesis 1
- H_2 adalah hipotesis 2
- H_3 adalah hipotesis 3
- H_4 adalah hipotesis 4
- H_5 adalah hipotesis 5
- H_6 adalah hipotesis 6

Gambar 3.2 kerangka konseptual tersebut memperlihatkan konstruk pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel. Variabel independen pengaruh langsung dalam konstruk tersebut terdiri dari satu variabel independen, dan tiga variabel dependen. Variabel independen tersebut adalah struktur uang beredar dengan tiga indikator masing-masing uang kartal, uang giral dan uang kuasi, sedangkan variabel dependen terdiri dari struktur ekspor dengan dua indikator (ekspor migas dan nonmigas), struktur devisa dengan dua indikator (valuta asing dan nonvaluta asing) serta pertumbuhan penyerapan tenaga kerja.

3.2. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan studi, landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka proses berpikir serta kerangka konseptual, maka disusun hipotesis sebagai berikut:

1. Struktur uang beredar berpengaruh terhadap struktur ekspor Indonesia.
2. Struktur uang beredar berpengaruh terhadap struktur devisa Indonesia.
3. Struktur uang beredar berpengaruh terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan di Indonesia.

4. Struktur ekspor berpengaruh terhadap struktur devisa Indonesia.
5. Struktur devisa berpengaruh terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan di Indonesia.
6. Struktur ekspor berpengaruh terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan di Indonesia.

BAB 4

METODE PENELITIAN

BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian merupakan pedoman yang berisi langkah-langkah yang diikuti oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Dalam studi ini rancangan penelitian disusun secara sistematis dan logis dengan mempertimbangkan pendekatan yang digunakan, metode yang dipakai serta strategi penelitian yang dianggap paling efektif.

Pada umumnya penelitian sosial dilakukan untuk beberapa tujuan, di antaranya adalah: (1) penelitian penjajagan (*explorative research*), (2) penelitian deskriptif (*descriptive research*), (3) penelitian penjelasan (*explanatory* atau *confirmatory*), (4) evaluasi (*evaluation*), (5) peramalan (*prediction*), dan (6) penelitian pengembangan (*development reseacrh*) indikator-indikator sosial (Singarimbun dan Sofian, 1995: 4).

Keputusan mengenai rancangan penelitian yang terpilih untuk kepentingan studi ini, yaitu berdasarkan pada tujuan studi dan sifat masalah yang akan diteliti. Dengan demikian rancangan penelitian yang terpilih adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*). Terpilihnya rancangan penelitian ini karena dapat menggambarkan/memecahkan masalah secara sistematis. Dengan demikian diharapkan dapat mengkonfirmasi hubungan langsung antara indikator dari masing-masing variabel terpilih. Di samping itu, rancangan penelitian ini juga dapat mengkombinasi pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif,

sehingga dapat memperkaya data, fakta-fakta dan informasi aktual serta dapat menampilkan secara jelas fenomena ekonomi yang diteliti.

Dalam penelitian ini data yang akan dianalisis adalah data sekunder berupa data *time series* periode waktu 35 tahun, yaitu data dari tahun 1969 sampai dengan tahun 2003. Adapun data sekunder yang dianalisis berupa data *time series* perkembangan uang beredar, perkembangan ekspor, perkembangan devisa dan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja. Setelah data dianalisis, tahap berikutnya adalah dilanjutkan dengan pengujian hipotesis.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan merujuk pada Teori Trimming (*Triming Theory*), yaitu dengan melihat jalur pengaruh langsung yang signifikan antara struktur uang beredar terhadap struktur ekspor dan struktur devisa serta pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dan pengaruh struktur ekspor terhadap struktur devisa serta struktur devisa terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dan struktur ekspor terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan di Indonesia.

4.2. Variabel Penelitian

4.2.1. Klasifikasi Variabel Penelitian

4.2.1.1. Variabel Eksogen (*Exogenous Variable*)

1. Struktur Uang Beredar, dengan indikator:

- a. Uang kartal
- b. Uang giral
- c. Uang kuasi

4.2.1.2. Variabel Endogen (*Endogenous Variable*)

1. Struktur Ekspor, dengan indikator:

- a. Ekspor migas
- b. Ekspor nonmigas

2. Struktur Devisa, dengan indikator:

- a. Valuta asing (surat-surat berharga, uang kartal dan uang giral)
- b. Nonvaluta asing (*Reserve Position in the Fund [RPF], Special Drawing Rights [SDR], dan Monetary Gold [MG]*)

3. Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja

4.2.2 Operasionalisasi Variabel Dan Pengukuran

4.2.2.1. Kebijakan Moneter

Operasionalisasi kebijakan moneter dalam penelitian ini terbatas pada uang beredar (uang kartal, uang giral dan uang kuasi) dalam mempengaruhi struktur ekspor dan struktur devisa serta pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan di Indonesia..

Pengaruh struktur uang beredar terhadap struktur ekspor dan struktur devisa serta pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dan struktur ekspor terhadap struktur devisa serta struktur devisa terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dianalisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan cara menderivasi model mekanisme transmisi teori kebijakan moneter dan variabel sasaran kebijakan moneter ke dalam model analisis jalur (*Path Analysis Model*).

4.2.2.2. Struktur Uang Beredar

Struktur uang beredar yang dimaksud di sini adalah komposisi uang beredar dalam arti luas (M2) di dalam negeri yang dihitung pada periode akhir tahun yang diindikasikan dari tiga indikator, yaitu: uang kartal (*currency*) yang dipegang masyarakat sebagai alat transaksi tunai dan uang giral (*demand deposits*) yang mencakup saldo rekening koran/giro milik masyarakat umum yang tersimpan di bank (M1) ditambah dengan deposito berjangka (*time deposits*) dan saldo tabungan (*savings deposits*) milik masyarakat pada bank-bank (M2) termasuk pula uang tunai di luar bank-bank komersial dan mata uang asing, yang secara keseluruhan disebut uang kuasi atau *quasi money*, Qm.

Dalam penelitian ini indikator uang beredar di Indonesia dinyatakan dalam satuan milyar rupiah (M Rp).

4.2.2.3. Struktur Ekspor

Yang dimaksud struktur ekspor di sini adalah komposisi ekspor neto (*free on board*) komoditas migas dan nonmigas yang telah dikurangi dengan komposisi impor. Ekspor neto nilainya tercatat dalam neraca perdagangan luar negeri Indonesia dari tahun 1969 sampai dengan tahun 2003 yang diindikasikan dari dua indikator, yaitu: ekspor minyak dan gas, dan ekspor nonminyak gas.

Dalam penelitian ini indikator ekspor minyak dan gas, dan ekspor nonminyak gas dinyatakan dalam satuan dolar Amerika (US \$).

4.2.2.4. Struktur Devisa

Yang dimaksud struktur devisa di sini adalah komposisi penerimaan dari luar negeri atas transaksi internasional Indonesia dari tahun 1969 sampai dengan tahun 2003 yang diindikasikan dari dua indikator, yaitu: valuta asing (dalam bentuk surat-surat berharga, uang kartal dan giral) dan nonvaluta asing (dalam bentuk RPF, SDRs dan *Gold Money*). Perhitungan devisa ini didasarkan pada perkembangan kurs tengah tertimbang pada masing-masing tahun bersangkutan.

Terhitung sejak akhir Mei tahun 2000 jumlah devisa dalam penelitian ini dihitung atas dasar *letter of intent* (LoI), yaitu dengan menggunakan konsep *intent reserves and foreign currency liquidity* (IRFCL) menggantikan konsep aktiva luar negeri bruto (*gross foreign assets*, GFA) yang berlaku sejak tahun 1998. Konsep IRFCL sama dengan konsep GFA, yaitu berdasarkan pada *Balance of Payment Manual ke-5* (BPM5) dan program *Special Data Dissemination Standard* (SDDS) *International Monetary Fund* (IMF). Sebelum tahun 1998 perhitungan jumlah devisa Indonesia menggunakan konsep cadangan devisa resmi (CDR).

Dalam penelitian ini indikator devisa Indonesia, baik dalam bentuk valuta asing maupun nonvaluta asing dinyatakan dalam satuan dolar Amerika (US \$).

4.2.2.5. Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja

Yang dimaksud dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di sini adalah persentase jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor

perdagangan di Indonesia dalam arti luas (perdagangan besar, eceran, hotel dan rumah makan/restoran) dari tahun 1969 sampai dengan tahun 2003.

Dalam penelitian ini pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan di Indonesia dinyatakan dalam satuan persentase (%).

4.3. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini secara keseluruhan menggunakan jenis data sekunder yang bersifat kuantitatif, yaitu berupa data statistik dari sumber utama laporan tahunan *International Trade Statistics Yearbook* yang dipublikasi oleh *United Nations*, *International Financial Statistic* dan *Direction of Trade Statistic Yearbook* serta *Balance of Payment Statistics Part 1: Country Tables Yearbook 2003* yang dipublikasi oleh *International Monetary Fund*, *ASEAN Statistical Yearbook*, Indikator Ekonomi yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Jakarta, Laporan Tahunan Bank Indonesia, *Report for the Financial Year*, Statistik Ketenagakerjaan yang dipublikasi oleh Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia, dan Statistik Ekonomi Moneter Indonesia yang dipublikasi oleh Bank Indonesia serta data yang bersumber dari studi perbandingan pada hasil penelitian terdahulu.

4.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik

pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara (Sugiyono, 2005: 156).

Dari beberapa teknik tersebut, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pencatatan (*recording*) data sekunder dari dokumen atau catatan statistik laporan tahunan yang sudah berlalu yang dipublikasi oleh beberapa lembaga terkait seperti yang telah disebutkan pada Sub-bab 4.4.

4. 5. Metode Analisis

Konsisten dengan tujuan studi ini, maka metode analisis data yang digunakan adalah analisis jalur (*Path Analysis*). Analisis ini pada dasarnya memungkinkan peneliti menguji hubungan kausalitas berupa hubungan langsung maupun tidak langsung beberapa variabel dependen (variabel endogen) sekaligus dengan beberapa variabel independen (variabel eksogen).

Penggunaan pendekatan analisis jalur (*Path Analysis*) dalam studi ini memungkinkan pula peneliti melakukan pengujian menggunakan variabel perantara/*mediating/intervening*. Dengan demikian, maka dapat diketahui pola-pola sebab akibat dari unit model yang telah dikonstruksi.

Permodelan penelitian dengan menggunakan analisis jalur (*Path Analysis*) dalam studi ini di arahkan untuk menguji hipotesis 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang telah dikonstruksi pada sub-bab 3.2.

Sebuah permodelan *Path Analysis* yang lengkap pada dasarnya terdiri dari *Measurement Model* dan *Structural Model*.” *Measurement Model* atau Model Pengukuran yang ditujukan untuk mengkonfirmasi sebuah dimensi atau faktor berdasarkan indikator empirisnya. Dengan demikian *Path Analysis* adalah model

mengenai struktur hubungan yang membentuk atau menjelaskan kausalitas antara faktor yang terpilih.

Langkah-langkah yang digunakan untuk membuat permodelan *Path Analysis* yang lengkap adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Model Berbasis Teoritis

Pada langkah pertama ini, peneliti melakukan pencarian atau pengembangan sebuah model yang mempunyai justifikasi teoritis yang kuat. Setelah itu, model tersebut divalidasi secara empirik melalui komputerisasi.

Dalam pengembangan model teoritis, peneliti melakukan serangkaian eksplorasi ilmiah melalui telaah pustaka guna mendapatkan justifikasi sekaligus mengkonfirmasi model teoritis yang akan dikembangkan melalui data empirik yang telah dikumpulkan.

Konfirmasi model teoritis tersebut dilakukan berdasarkan analisis faktor. Analisis faktor konfirmasi digunakan untuk menganalisis data dari indikator masing-masing variabel laten. Tujuannya adalah agar data dari variabel laten dapat dilakukan analisis jalur (*path analysis*) guna pengujian hipotesis.

1.1. Konsep Dasar Analisis Faktor

Model analisis faktor dapat dibuat berdasarkan variabel X_1, X_2, \dots, X_p yang menyebar normal dengan vektor nilai tengah μ dan var-cov matriks Σ , sehingga diperoleh $X \approx N_p(\mu, \Sigma)$. Dengan demikian maka dapat dibuat model analisis faktor sebagai berikut:

$$X_1 = c_{11} F_1 + c_{12} F_2 + \dots + c_{1p} F_p + \epsilon_1$$

$$\begin{array}{r}
 X_2 = c_{21} F_1 + c_{22} F_2 + \dots + c_{2p} F_p + \varepsilon_2 \\
 \cdot \quad \quad \cdot \quad \quad \cdot \quad \quad \quad \cdot \quad \quad \cdot \\
 \cdot \quad \quad \cdot \quad \quad \cdot \quad \quad \quad \cdot \quad \quad \cdot \\
 \cdot \quad \quad \cdot \quad \quad \cdot \quad \quad \quad \cdot \quad \quad \cdot \\
 X_p = c_{p1} F_1 + c_{p2} F_2 + \dots + c_{pp} F_p + \varepsilon_p
 \end{array}$$

Secara matriks persamaan tersebut dapat ditulis kembali sebagai berikut:

$$\mathbf{X} = \mathbf{cF} + \boldsymbol{\varepsilon}$$

Faktor yang *eigen value*-nya lebih besar dari satu ($\lambda > 1$) misalkan hanya dua, yaitu F_1 dan F_2 , sehingga diputuskan hanya ada 2 faktor yang bermakna (hal ini akan dibahas pada uraian berikutnya). Untuk dapat melakukan interpretasi terhadap F_1 dan F_2 , yang diperhatikan adalah besar *loading* dari faktor-faktor tersebut pada masing-masing variabel. Pada F_1 , *loading* untuk X_1 dan X_2 kecil, sedangkan *loading* X_3 , X_4 dan X_5 besar. Karena *loading factor* untuk X_1 dan X_2 besar, sedangkan *loading* X_3 , X_4 dan X_5 kecil, maka F_3 dan F_4 dapat diabaikan dengan mengasumsikan *eigen value*-nya lebih kecil dari satu ($\lambda < 1$).

Metode pendugaan pembobot (*loading*) dalam analisis faktor sebenarnya adalah metode kemungkinan maksimum dan solusi *principle component analysis* (PCA). Data PCA dapat berupa matriks kovarians (S) atau matriks korelasi (R). Matriks kovarians digunakan jika unit satuan dari seluruh variabel yang akan dianalisis adalah sama, dan bila tidak menggunakan R. Dari R atau S diperoleh λ_j (*eigen value*) dan a_j (*eigen vector*) yang berpadanan. Dalam PCA a_j merupakan pembobot atau *loading* komponen pokok. Pembobot atau *loading factor* adalah sebagai berikut:

$$C_j = \sqrt{\lambda_j} a_j$$

a. Faktor Bermakna

Jika pendugaan *loading factor* (C_{ij}) menggunakan solusi PCA, maka indikator dan kriteria yang berlaku pada PCA juga berlaku untuk analisis faktor. Faktor yang dipertimbangkan bermakna adalah jika *eigen value*-nya lebih besar sama dengan satu ($\lambda \geq 1$) dan atau keragaman kumulatifnya kira-kira 75 persen.

b. Skor Faktor

Seringkali analisis faktor merupakan analisis awal dari suatu permasalahan dalam penelitian, yaitu upaya mendapatkan variabel baru atau variabel laten. Oleh sebab itu untuk dapat melakukan analisis lebih lanjut dengan berbagai metode (model struktural, *path analysis*, analisis *cluster*, analisis konjoin, MDS atau MANOVA). Dengan demikian, variabel laten tersebut harus ada datanya, yaitu merupakan skor faktor.

Jika *input matrix* data adalah S , maka skor faktor dihitung dengan rumus:

$$S - Fa = c'S' (x_j - x)$$

Jika *input matrix* data adalah R , maka skor faktor dihitung dengan rumus:

$$S - Fa = c'R^{-1}Z_j$$

2. Pengembangan Diagram Jalur (*Path Diagram*) Untuk Menunjukkan Hubungan Kausalitas

Pada langkah yang kedua ini, model teoritis yang telah dibangun pada langkah pertama akan digambarkan dalam sebuah *path diagram* berdasarkan hasil *path analysis*. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti menentukan

hubungan-hubungan kausalitas yang diuji. Setelah itu, hubungan kausalitas yang telah didapat dinyatakan dalam bentuk persamaan.

Di samping mempermudah menentukan hubungan-hubungan tersebut, *path analysis* digunakan juga untuk menguji hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 6. Adapun langkah-langkah *path analysis* dapat dilihat pada uraian-uraian berikut.

a). Pertama

Pada langkah ini dalam *path analysis* adalah merancang model berdasarkan konsep dan teori. Berdasarkan hubungan-hubungan antar variabel secara teoritis tersebut akan dibuat model dalam bentuk *path diagram* dari hasil pengujian hipotesis.

Model tersebut juga dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan, sehingga membentuk sistem persamaan. Sistem persamaan ini dinamakan sistem persamaan simultan, atau juga disebut model struktural.

Adapun bentuk persamaan yang dimaksud secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 (1) \quad Z_{y1} &= p_1 Z_x + \epsilon_1 \\
 (2) \quad Z_{y2} &= p_2 Z_x + p_3 Z_{y1} + \epsilon_2 \\
 &\quad \cdot \quad \quad \cdot \quad \quad \cdot \quad \quad \cdot \\
 &\quad \cdot \quad \quad \cdot \quad \quad \cdot \quad \quad \cdot \\
 &\quad \cdot \quad \quad \cdot \quad \quad \cdot \quad \quad \cdot \\
 (3) \quad Z_{yi} &= p_i Z_x + p_i Z_{yi} + \dots + \epsilon_i
 \end{aligned}$$

Mengingat model tersebut dikembangkan untuk menjawab permasalahan penelitian dan berbasis teori dan konsep, maka dinamakan model hipotetik. Model

hipotetik yang dibangun bisa lebih dari satu, terutama bila landasan konsepnya belum mapan.

b). Kedua

Pada langkah kedua ini adalah pemeriksaan terhadap asumsi yang melandasi *path analysis*. Asumsi yang melandasi *path analysis* adalah:

- 1). Dalam model *path analysis*, hubungan antar variabel adalah linier dan aditif;
- 2). Hanya model rekursif dapat dipertimbangkan, yaitu hanya sistem aliran kausal ke satu arah. Sedangkan pada model yang mengandung kausal resiprokal tidak dapat dilakukan *path analysis*;
- 3). Variabel endogen minimal dalam skala ukur interval; 4). *Observed variables* diukur tanpa kesalahan (instrumen pengukuran valid dan reliabel); dan 5). Model yang dianalisis dispesifikasikan (diidentifikasi) dengan benar berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan;

c). Ketiga

Pada langkah ketiga ini adalah pendugaan parameter atau perhitungan *path coefficients*. Perhitungan koefisien pada *path diagram* pada uraian sebelumnya dijelaskan sebagai berikut:

- 1). Untuk anak panah bolak balik \leftrightarrow , koefisiennya merupakan koefisien korelasi, r ;
- 2). Untuk anak panah satu arah \rightarrow digunakan perhitungan regresi variabel dibakukan, secara parsial pada masing-masing persamaan. Metode yang digunakan adalah OLS, yaitu metode kuadrat terkecil biasa. Hal ini dapat

dilakukan mengingat modelnya rekursif. Dari perhitungan ini diperoleh *path coefficients* langsung.

Dalam model regresi dengan variabel dibakukan, dapat dilihat bahwa konstanta (*intercept*) tidak ada ($p_0 = 0$), secara teoritis memang demikian. Besarnya sokongan pengaruh setiap variabel X terhadap Y adalah kuadrat dari koefisien regresi variabel *standardize*.

Dalam *path analysis*, di samping ada pengaruh langsung juga terdapat pengaruh tidak langsung dan pengaruh total. Koefisien pi dinamakan *path coefficients* pengaruh langsung. Sedangkan pengaruh tidak langsung dan pengaruh total dihitung dengan cara: pengaruh tidak langsung = perkalian pengaruh langsung, pengaruh total = penjumlahan dari pengaruh langsung dan seluruh pengaruh tidak langsung. Pendugaan parameter dengan metode OLS dalam *software* SPSS dihitung melalui analisis regresi, yaitu dilakukan pada masing-masing persamaan secara parsial.

d). Keempat

Langkah keempat dalam *path analysis* adalah pemeriksaan validitas model. Sahih tidaknya suatu hasil analisis tergantung dari terpenuhi atau tidaknya asumsi yang melandasinya. Telah disebutkan bahwa dianggap semua asumsi terpenuhi.

Dalam *path analysis* terdapat dua indikator validitas model, yaitu koefisien determinasi total dan *Triming Theory*:

(a). Koefisien Determinasi Total

Total keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model diukur dengan:

$$R^2_m = 1 - P^2_{e1}P^2_{e2} \dots P^2_{ep}$$

dalam hal ini, interpretasi terhadap R^2_m , sama dengan interpretasi koefisien determinasi (R^2) pada analisis regresi.

(b). *Triming Theory*

Uji validasi *path coefficients* pada setiap jalur untuk pengaruh langsung adalah sama dengan pada regresi, menggunakan p dari uji t, yaitu pengujian koefisien regresi variabel dibakukan secara parsial. Berdasarkan *Triming Theory*, maka jalur-jalur yang nonsignifikan dibuang, sehingga diperoleh model yang didukung oleh data empirik.

d). Kelima

Langkah terakhir dalam *path analysis* adalah melakukan interpretasi hasil analisis. **Pertama**, dengan memperhatikan hasil validitas model. Perhatian ditujukan pada besarnya koefisien determinasi total dan *Triming Theory*. **Kedua**, menghitung pengaruh total dari setiap variabel yang mempunyai pengaruh kausal ke variabel endogen. Variabel dengan pengaruh total terbesar adalah yang memiliki pengaruh terkuat (dominan).

Dalam permodelan analisis jalur (*Path Analysis*), peneliti berpijak pada “*construct*” atau “*factor*” berdasarkan konsep-konsep yang memiliki pijakan teoritis. Dalam permodelan ini konstruk-konstruk yang dibangun pada diagram jalur dibedakan menjadi dua yaitu: (1) Konstruk eksogen (*exogenous constructs*) yang dikenal sebagai “*source variables*” atau “*independent variables*” yang tidak diprediksi oleh variabel yang lain dalam model. Secara diagramatis konstruk eksogen berbentuk konstruk yang dituju oleh garis dengan satu ujung panah, dan

(2) Kontruk endogen (*endogenous constructs*). Kontruk endogen adalah faktor-faktor yang diprediksi oleh satu atau beberapa kontruk. Kontruk ini dapat memprediksi satu atau beberapa kontruk endogen lainnya, tetapi kontruk eksogen hanya dapat berhubungan kausal dengan kontruk endogen. Berdasarkan pijakan teoritis yang cukup, peneliti akan memilah variabel yang dapat dimasukkan sebagai kontruk variabel endogen dan variabel eksogen.

3. Konversi Diagram Jalur Kedalam Serangkaian Persamaan Struktural Dan Spesifikasi Model Pengukuran

Setelah teori/model teoritis dikembangkan dan digambarkan dalam sebuah diagram jalur, peneliti selanjutnya mengkonversi spesifikasi model tersebut kedalam rangkaian persamaan. Persamaan yang dibangun akan terdiri: (1) persamaan-persamaan struktural (*structural equations*). Persamaan ini dirumuskan untuk menyatakan hubungan kausalitas antar berbagai kontruk, dan persamaan spesifikasi model pengukuran (*measurement model*). Khusus untuk koefisien jalur (P_{0i}) dapat dideterminasi dengan formula: $P_{0i} = \beta_i r_{i/r_0}$ (Li, 1975: 123).

4. Pemilihan Matriks *Input* Dan Teknik Estimasi Atas Model Yang Dibangun

Dalam permodelan analisis jalur (*Path Analysis*) peneliti hanya menggunakan matriks varians/kovarians atau matriks korelasi sebagai data *input* untuk keseluruhan estimasi yang akan dilakukan. Matriks korelasi mempunyai rentang yang sudah umum dan besaran koefisiennya tertentu (yaitu 0 s/d ± 1), sehingga memungkinkan untuk melakukan perbandingan langsung antara koefisien dalam model yang telah dikonstruksi.

Menurut Baumgartner dan Homburg:

“Matriks kovarians umumnya lebih banyak digunakan dalam penelitian mengenai hubungan karena *standard error* yang didapat dari penelitian yang menggunakan matriks korelasi sebagai *input* menunjukkan angka yang kurang akurat” (Ferdinand, 2002: 47).

Berdasarkan kenyataan tersebut, Hair *et al.*, menyarankan agar peneliti sebaiknya menggunakan matriks varians/kovarians pada saat pengujian teori. Hal ini disebabkan karena matriks varians/kovarians lebih memenuhi asumsi-asumsi metodologi dan merupakan bentuk data yang lebih sesuai untuk memvalidasi hubungan-hubungan kausalitas (Ferdinand, 2002: 47).

Setelah *Path Analysis Model* dipilih, tahap berikutnya peneliti mengestimasi model tersebut dengan program versi AMOS 4.01, *Statistic Product and Service Solution (SPSS) Rel.11.05 for Windows* untuk *input data*. Terpilihnya program ini karena dianggap sebagai program yang andal untuk analisis kausalitas.

5. Menilai Problema Identifikasi

Terkait dengan penggunaan program komputer dalam mengestimasi model kausalitas, satu dari beberapa masalah yang pasti akan dihadapi peneliti adalah masalah identifikasi (*identification problem*). Problema identifikasi pada prinsipnya adalah problema mengenai ketidakmampuan dari model yang dikembangkan untuk menghasilkan estimasi yang unik.

Problema identifikasi muncul melalui gejala-gejala sebagai berikut:

- a. *Standard error* untuk satu atau beberapa koefisien adalah sangat besar.

- b. Program tidak mampu menghasilkan matrik informasi yang seharusnya disajikan.
- c. Munculnya angka-angka yang *invalid* seperti adanya varians *error* yang negatif.
- d. Munculnya korelasi yang sangat tinggi antar koefisien estimasi yang didapat (lebih dari 0.9).

6. Evaluasi Model

Pada langkah ini kesesuaian model dievaluasi melalui telaah kritis terhadap berbagai kriteria *goodness-of-fit*. Hal ini penting dilakukan untuk memenuhi asumsi-asumsi. Adapun beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data dengan model analisis jalur (*Path Analysis Model*), di antaranya adalah:

- a. Ukuran sampel, minimum berjumlah 100 dan selanjutnya menggunakan perbandingan 5 observasi untuk setiap *estimated parameter*;

- b. Data berdistribusi normal dan linear;

Normalitas dan linearitas data dapat diuji dengan melihat gambar histogram data atau dapat diuji dengan metode-metode statistik. Uji linearitas dapat dilakukan dengan mengamati *scatterplots* dari data dan pola penyebaran untuk mengetahui linear tidaknya data;

- c. *Data Outliers*

Outliers adalah observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim baik secara univariat maupun multivariat. Munculnya data tersebut karena

kondisi unik yang dimiliki oleh data itu sendiri terlihat sangat jauh berbeda dari observasi-observasi lainnya.

7. Interpretasi dan Modifikasi Model

Langkah ini merupakan langkah terakhir, yaitu menginterpretasikan model dan memodifikasi model bagi model-model yang tidak memenuhi syarat pengujian, baik pengujian secara kuantitatif maupun secara kualitatif

BAB 5

ANALISIS HASIL STUDI

BAB 5

ANALISIS HASIL STUDI

5.1. Data Penelitian

5.1.1. Struktur Dan Perkembangan Jumlah Uang Beredar Di Indonesia

Total uang beredar yang meliputi uang beredar dalam arti luas (M2) dan uang beredar dalam arti sempit (M1) serta uang kuasi (Qm) mengalami kenaikan yang cenderung berfluktuatif dengan pertumbuhan yang relatif stabil sejak periode akhir tahun 1969 sampai dengan periode akhir tahun 2003.

M3 yang meliputi M1 dan M2 serta uang kuasi mengalami kenaikan yang sangat tajam sebesar Rp 721.692 milyar (75,52 persen) dari posisi Rp 234 milyar pada periode akhir tahun 1969 menjadi Rp 955.692 milyar pada periode akhir tahun 2003. Jumlah M1 yang meliputi uang kartal dan uang giral naik menjadi 121,53 persen dari Rp 184 milyar pada periode akhir tahun 1969 menjadi Rp 223.799 milyar pada periode akhir tahun 2003 dengan komposisi masing-masing 42,24 persen dan 57,77 persen.

Pada tahun 1969 total M2 hanya mencapai Rp 234 milyar yang terdiri dari M1 sebesar Rp 184 milyar dengan komposisi 63,04 persen terdiri dari uang kartal (Rp 116 milyar) dan 36,96 persen uang giral (Rp 68 milyar) dengan pertumbuhan di bawah 1 persen hingga tahun 1989. Satu tahun berikutnya (1990), pertumbuhan M2 mengalami peningkatan di atas 1 persen dan mencapai pertumbuhan 14,91 persen pada akhir tahun 2003. Besarnya total M2 tersebut seiring pula dengan besarnya komposisi uang kuasi yang mencapai 21,37 persen dari total M2 atau

mencapai Rp 50 milyar pada tahun 1969 dan mencapai 76,58 persen dari total M2 atau mencapai Rp 731.893 milyar pada akhir tahun 2003.

Uang kuasi yang merupakan salah satu komponen uang beredar dalam arti luas (M2) dengan komposisi yang relatif besar, cenderung mengalami pertumbuhan yang relatif stabil meskipun mengalami *trend* komposisi yang berfluktuatif, namun secara riil meningkat sepanjang tahun hingga periode akhir tahun 2003 yaitu mencapai Rp 731.893 milyar atau mengalami kenaikan yang sangat tajam sebesar Rp 731.843 (1.463,79 persen) dari jumlah Rp 50 milyar pada periode akhir tahun 1969. Kenaikan tertinggi komposisi uang kuasi terhadap M2 terjadi pada tahun 1998 yaitu mencapai 82,47 persen dari 77,97 persen satu tahun sebelumnya dan turun menjadi 80,71 persen pada tahun berikutnya (1999).

Meskipun komposisi uang kuasi pada tahun 1998 lebih besar dari komposisi uang kuasi pada tahun 1999, namun jumlah uang kuasi pada tahun 1999 lebih besar dari posisi uang kuasi pada tahun 1998, yaitu masing-masing mencapai Rp 476.184 milyar dan Rp 584.842 milyar. Kondisi serupa juga terjadi pada tahun-tahun berikutnya hingga periode tahun 2003 dan ini terjadi karena adanya kecenderungan penurunan komposisi uang kartal dan uang giral terhadap jumlah M1 pada tahun tersebut.

Jika dirinci per triwulan, maka terlihat juga bahwa sejak periode akhir triwulan IV-2003 posisi jumlah uang beredar meningkat sebesar 12,19 persen dari Rp 827,321 milyar pada periode akhir triwulan IV-2002 menjadi Rp 942,221 milyar pada periode akhir triwulan yang sama (IV-2003) yang didominasi oleh uang kuasi (*quasi money*) sebesar Rp 730,934 (berupa rupiah dan valas, *foreign*

currency). Demikian pula jika dilihat pada komponen-komponen pembentuk M2, maka terlihat bahwa kenaikan atau penurunan M2 ini lebih disebabkan oleh naik turunnya simpanan valas masyarakat (M2 valas) dan naik turunnya simpanan rupiah terutama simpanan masyarakat dalam deposito. Simpanan valas masyarakat meningkat sebesar \$ 0,18 miliar atau ekuivalen dengan Rp 20,6 triliun dari Rp. 151 triliun menjadi Rp 171,7 triliun (naik sebesar 13,6 persen). Sehingga dapat diketahui bahwa 80,87 persen dari kenaikan M2 adalah berasal dari kenaikan simpanan valas, sedangkan sisanya bersumber dari kenaikan M2 rupiah. Dari perkembangan ini dapat diketahui bahwa masyarakat melakukan *shifting portfolio* simpanan dari simpanan berdenominasi valas yang terjadi seiring dengan melemahnya rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp 1.275 atau 12,2 persen (Laporan Triwulan BI, Vol. 1 No.2, April-Juni, 2001: 56-57).

Penerapan kebijaksanaan moneter yang cenderung ketat tercermin dari meningkatnya suku bunga SBI, baik 1 bulan dan 3 bulan secara bertahap. Peningkatan suku bunga SBI tersebut ternyata tidak diikuti oleh peningkatan yang seimbang pada suku bunga deposito perbankan, meskipun telah didukung oleh kebijaksanaan Bank Indonesia untuk meningkatkan margin suku bunga pinjaman terhadap suku bunga rata-rata deposito rupiah peserta JIBOR-dari 100 basis *point* menjadi 200 basis *point*. Dengan tingginya laju inflasi, suku bunga deposito riil mengalami penurunan, sehingga mengurangi minat masyarakat untuk menyimpan kembali uang kartal yang dimiliki ke perbankan.

Dalam perkembangannya, sebagai akibat faktor-faktor tersebut di atas, tingginya posisi uang kartal telah menyebabkan uang primer meningkat tajam

sebesar 23,4 persen pada akhir tahun 2000. Dengan menggunakan angka *test date* rata-rata uang primer selama 10 hari kerja (5 hari kerja terakhir di bulan tersebut dan 5 hari kerja bulan pertama berikutnya) sesuai dengan yang tercantum dalam *letter of intent* (LoI) dengan IMF, pertumbuhan uang primer dalam tahun 2000 tercatat sedikit lebih rendah, yakni sebesar 21,4 persen (Laporan Tahunan BI, 2000: 65-66). Dalam hubungan ini pula, peningkatan uang kartal telah mendorong kenaikan pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (M1). Sementara itu, rendahnya suku bunga deposito riil selama tahun 2000 berdampak pada melambatnya pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2).

Hingga akhir bulan Juli 2001, *base money* berada pada posisi Rp 112,1 triliun atau meningkat sebesar Rp 1,5 triliun dibandingkan posisi akhir bulan sebelumnya sebesar Rp 110,6 triliun. Namun posisi *test date* bulan Juli sebesar 109,7 triliun atau di atas target indikatif sebesar Rp 108,0 triliun. Peningkatan *base money* tersebut terutama didorong oleh peningkatan *currency outside bank* sebesar Rp 1,4 triliun dan *cash in vault* sebesar Rp 172 miliar.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi, peningkatan *base money* juga disebabkan oleh ekspansi rekening rupiah pemerintah (*Net Claims on Government, NCG*) sebesar Rp 5,6 triliun, lebih besar dibandingkan dengan pengaruh kontraksi dari Operasi Pasar Terbuka (OPT) sebesar Rp 4,8 triliun. Di sisi lain NIR memberikan dampak ekspansi sebesar Rp 1,1 triliun. Untuk lebih jelasnya, struktur dan perkembangan jumlah uang beredar di Indonesia sejak periode tahun 1969-2003 dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN JUMLAH UANG BEREDAR
DI INDONESIA DARI TAHUN 1969 – 2003

(Milyar Rp)

Tahun	Total	Pertumbuhan (%)	M2				Jumlah Uang Keras	Komposisi (%)	
			Jumlah	Uang Kartal	Komposisi (%)	Uang Giral			Komposisi (%)
1969	234	-					184	116	
1970	410	75,21	330	204	61,82	126	38,18	80	19,50
1971	469	14,39	321	199	61,99	122	38,01	148	31,56
1972	695	48,19	474	272	57,38	202	42,62	221	31,80
1973	987	42,01	669	375	56,05	294	43,95	318	32,22
1974	1.451	47,01	937	494	52,72	443	47,28	514	35,42
1975	1.978	36,32	1.250	625	50,00	625	50,00	728	36,80
1976	2.631	33,01	1.603	781	48,72	822	51,28	1.028	39,07
1977	3.130	18,97	2.006	979	48,80	1.027	51,20	1.124	35,91
1978	3.808	21,66	2.488	1.740	69,94	1.748	30,06	1.320	34,66
1979	5.222	37,13	3.385	1.552	45,84	1.833	54,16	1.837	35,18
1980	7.691	47,28	4.995	2.153	43,10	2.842	56,90	2.696	35,05
1981	9.716	26,33	6.486	2.557	39,42	3.929	60,58	3.230	33,24
1982	11.075	13,99	7.121	2.934	41,20	4.187	58,80	3.954	35,70
1983	14.663	32,40	7.569	3.333	44,03	4.236	55,97	7.094	48,38
1984	17.937	22,33	8.581	3.712	43,25	4.868	56,75	9.356	52,16
1985	23.153	29,08	10.104	4.440	43,94	5.664	56,06	13.049	56,36
1986	27.661	19,47	11.677	5.338	45,71	6.339	54,29	15.984	57,79
1987	33.885	22,50	12.685	5.782	45,58	6.903	54,42	21.200	62,56
1988	41.998	23,94	14.392	6.246	43,40	8.146	56,60	27.606	65,73
1989	58.705	39,78	20.114	7.426	39,92	12.688	60,08	38.591	65,74
1990	83.264	41,83	23.612	9.156	38,78	14.456	61,22	59.652	71,64
1991	99.058	18,97	26.341	9.345	35,48	16.995	64,52	72.717	73,41
1992	119.053	20,19	28.779	11.478	39,88	17.301	60,12	90.274	75,83
1993	145.202	21,97	36.805	14.431	39,21	22.374	60,79	108.397	74,65
1994	174.512	20,19	45.374	18.634	41,07	26.740	58,96	129.138	74,00
1995	222.637	27,58	52.677	20.807	39,50	31.870	60,50	169.960	76,34
1996	288.631	29,64	64.089	22.487	35,09	41.602	64,91	224.342	77,80
1997	355.643	23,22	78.343	28.424	36,28	49.919	63,72	277.300	77,97
1998	577.381	62,35	101.197	41.394	40,90	59.803	59,10	476.184	82,47
1999	646.205	11,92	124.633	58.353	46,82	66.280	53,18	521.572	80,71
2000	747.028	15,60	162.186	72.371	44,62	89.815	55,37	584.842	78,29
2001	844.053	12,99	177.731	76.342	42,95	101.389	57,05	666.322	78,94
2002	883.906	4,72	191.939	80.686	42,04	111.253	57,06	691.969	78,28
2003	955.692	8,12	223.799	94.542	42,24	129.257	57,77	731.893	76,58

Sumber : *Report for the Financial Year 1969/1970*, Bank Indonesia (data diolah)
 Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Bank Indonesia (data diolah)
 Laporan Tahunan, Bank Indonesia (data diolah)

5.1.2. Perkembangan Tingkat Bunga Pasar Uang Antar Bank Di Indonesia

Perkembangan tingkat suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) di Indonesia secara keseluruhan sejak periode akhir tahun 1969 sampai dengan periode akhir tahun 2003 menunjukkan besaran yang cenderung fluktuatif, namun tidak melebihi angka persentase tiga digit. Tingkat bunga tertinggi terjadi pada

periode akhir tahun 1998, yaitu sebesar 54,68 persen dan meningkat tajam dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 39,54 persen yang kemudian mengalami penurunan secara drastis pada akhir tahun 1999, yaitu sebesar 12,39 persen hingga mencapai 8,27 persen pada periode akhir tahun 2003.

Tingkat suku bunga PUAB dan deposito 1 bulan pada periode akhir tahun 2000 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, seiring peningkatan suku bunga SBI sejak Mei 2000, kedua jenis suku bunga tersebut meningkat secara bertahap meski dengan besaran berbeda. Suku bunga PUAB dan deposito 1 bulan meningkat masing-masing sebesar 1,84 persen dan 1,63 persen hingga mencapai posisi 11,43 persen dan 12,0 persen pada periode akhir Desember 2000. Relatif rendahnya peningkatan kedua jenis suku bunga tersebut dibandingkan dengan peningkatan suku bunga SBI terkait dengan tingginya kondisi likuiditas perbankan, yang terutama bersumber dari ekspansi keuangan pemerintah di tengah-tengah belum normalnya fungsi intermediasi perbankan. Kondisi likuiditas tersebut juga didorong oleh upaya perbankan untuk memaksimalkan keuntungan bunga sehubungan dengan masih tingginya *spread* antara suku bunga simpanan dan suku bunga SBI.

Walaupun tingkat suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) pada akhir tahun 2000 lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, seiring dengan peningkatan suku bunga SBI sejak Mei 2000, jenis suku bunga tersebut meningkat secara bertahap pada tahun-tahun berikut meski dengan besaran yang berbeda, namun turun secara drastis menjadi 8,27 persen pada tahun 2003. Penurunan ini terkait dengan tingginya kondisi likuiditas perbankan, yang terutama bersumber dari

ekspansi moneter pemerintah ditengah-tengah belum normalnya fungsi intermediasi perbankan. Kondisi likuiditas tersebut juga didorong oleh upaya perbankan untuk memaksimalkan keuntungan bunga sehubungan dengan masih tingginya *spread* anatar suku bunga simpanan dan SBI.

Rendahnya peningkatan suku bunga di tengah-tengah peningkatan laju inflasi, mengakibatkan turunnya suku bunga riil hingga posisinya mencapai 2,56 persen pada akhir Desember 2000. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tidak tertarik untuk menyimpan kembali uang kartal di perbankan, khususnya suku bunga kredit baik untuk modal kerja maupun investasi, cenderung relatif stabil. Relatif stabilnya suku bunga kredit ini terkait erat dengan masih belum pulihnya fungsi intermediasi perbankan.

Berfluktuatifnya perkembangan tingkat suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) seperti yang disebutkan di atas akan meningkat seiring dengan meningkatnya tekana-tekanan inflasi. Hal ini merupakan respon dari *stance* kebijaksanaan moneter Bank Indonesia yang selalu tetap mempertahankan kebijaksanaan moneter yang cenderung ketat (*tight bias*) sampai dengan akhir triwulan III-2001. Tingkat suku bunga riil Pasar Uang Antar Bank (PUAB) pada periode akhir triwulan I-2001 mencapai 16,22 persen atau mengalami kenaikan sebesar 29,53 persen bila dibandingkan triwulan IV-2000 sebesar 11,43 persen, 12,47 persen pada periode akhir tahun 2003.

Seiring dengan meningkatnya suku bunga lelang SBI, suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) juga mengalami peningkatan, yang tercermin dari peningkatan suku bunga deposito 1 bulan. Suku bunga deposito 1 bulan pada

akhir Juni 2001 adalah 12,60 persen atau meningkat sebesar 47 bps dibandingkan posisi akhir triwulan I-2001 sebesar 12,13 persen. Faktor penting yang mendorong kenaikan suku bunga deposito adalah peningkatan suku bunga SBI dan suku bunga intervensi rupiah. Pada akhir Mei 2001, suku bunga intervensi rupiah untuk masing-masing *tenor* dinaikkan sebesar 50 bps. Sebagai informasi, penetapan suku bunga penjaminan deposito, maupun suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB), mulai April 2001 ditetapkan secara bulanan dari sebelumnya secara mingguan.

Rata-rata tingkat suku bunga riil Pasar Uang Antar Bank (PUAB) pada triwulan III-1999 adalah 13,21 persen dan turun menjadi 12,39 persen pada triwulan IV-1999. Dalam perkembangan selanjutnya, rata-rata tingkat suku bunga riil Pasar Uang Antar Bank (PUAB) mengalami penurunan drastis menjadi 9,59 persen pada triwulan I-2000 yang kemudian berkembang relatif stabil hingga triwulan I-2003 dan menurun kembali hingga 8,27 persen pada akhir triwulan IV-2003. Rendahnya tingkat suku bunga riil Pasar Uang Antar Bank (PUAB), mencerminkan masih relatif likuidnya dana perbankan, sehingga dalam kondisi besarnya penarikan dana oleh masyarakat; bank masih dapat memenuhi permintaan besarnya penarikan dana oleh masyarakat; bank masih dapat memenuhi permintaan tersebut tanpa harus meningkatkan tingkat suku bunga lebih tinggi. Keadaan ini berimplikasi terhadap rendahnya minat masyarakat untuk menyimpan kembali uang kartal ke bank. Dalam kondisi rendahnya sensitifitas suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) terhadap simpanan, usaha penyerapan kembali uang kartal di masyarakat akan memerlukan peningkatan

tingkat bunga dan juga peningkatan tingkat suku bunga intervensi rupiah yang lebih tinggi, namun demikian peningkatan tingkat suku bunga yang secara berlebihan dikuatirkan justru akan berdampak negatif terhadap proses pemulihan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 5.2
PERKEMBANGAN TINGKAT BUNGA PASAR UANG
ANTAR BANK DI INDONESIA DARI TAHUN 1969-2003

TAHUN	TINGKAT BUNGA (%)
1969	11,60
1970	8,90
1971	7,12
1972	6,04
1973	9,43
1974	10,82
1975	7,84
1976	6,14
1977	12,02
1978	9,03
1979	13,96
1980	12,55
1981	14,49
1982	16,35
1983	13,72
1984	11,36
1985	10,42
1986	13,48
1987	11,86
1988	16,69
1989	12,23
1990	21,53
1991	15,32
1992	12,09
1993	8,72
1994	9,87
1995	14,14
1996	13,05
1997	39,54
1998	54,68
1999	12,39
2000	11,43
2001	16,22
2002	12,47
2003	8,27

Sumber : Laporan Tahunan, Bank Indonesia (data diolah)
Laporan Hasil Seminar (24-27 Februari 1986:162), Bank Indonesia

Perkembangan tingkat suku bunga riil Pasar Uang Antar Bank (PUAB) pada triwulan I-2003 hingga triwulan IV-2003 secara rata-rata cenderung menunjukkan penurunan yang relatif stabil. Pada triwulan I-2003 tingkat suku bunga riil Pasar Uang Antar Bank (PUAB) rata-rata sebesar 11,58 persen, masing-masing turun menjadi 9,96 persen dan 6,53 persen pada triwulan II dan III-2003. Hingga akhir triwulan IV-2003 mengalami penurunan sedikit lebih rendah dari tingkat suku bunga rata-rata triwulan II-2003, yaitu sebesar 8,27 persen. Perkembangan tingkat bunga tertinggi terjadi pada periode akhir tahun 1998, yaitu sebesar 54,68 persen yang pada periode akhir tahun sebelumnya hanya 39,54 persen dan turun drastis menjadi 12,39 persen pada periode akhir tahun 1999. Untuk lebih jelasnya, perkembangan tingkat suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) di Indoensia secara keseluruhan sejak periode akhir tahun 1969 sampai dengan periode akhir 2003 dapat dilihat pada Tabel 5.2.

5.1.3. Struktur Dan Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia Dan Negara-Negara Inter-ASEAN

Total nilai ekspor Indonesia cenderung mengalami perkembangan yang berfluktuatif dengan tingkat pertumbuhan yang relatif stabil, yaitu kurang dari 1 persen sejak tahun 1969 dan menjadi 6,62 persen pada akhir tahun 2003 yang hingga tahun 1992 didominasi oleh nilai ekspor migas. Dominasi nilai ekspor nonmigas terhadap total nilai ekspor Indonesia terjadi sejak tahun 1993 hingga sepuluh tahun terakhir, yaitu pada akhir tahun 2003.

a. Nilai Ekspor NonMigas Indonesia

Berdasarkan Tabel 5.3 terlihat bahwa perkembangan jumlah nilai ekspor nonmigas Indonesia cenderung mengalami peningkatan yang berfluktuatif sejak periode akhir tahun 1969 sampai dengan periode akhir tahun 2003.

Tabel 5.3
STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN NILAI EKSPOR INDONESIA
DARI TAHUN 1969 – 2003
US \$) (Juta)

Tahun	Total	Pertumbuhan (%)	Ekspor			
			Minyak Dan Gas	Komposisi (%)	NonMinyak Dan Gas	Komposisi (%)
1969	0,995.00	-	0,524.20	52,68	0,470.80	47,32
1970	1,173.00	17,89	0,695.10	59,26	0,706.00	40,74
1971	1,247.00	6,31	0,547.00	43,87	0,700.00	56,13
1972	1,777.70	42,56	0,913.10	51,36	0,864.60	48,64
1973	3,210.80	80,62	1,608.70	50,10	1,602.10	49,90
1974	7,426.30	131,29	5,211.40	70,17	2,214.90	29,83
1975	7,102.50	- 4,36	5,310.80	74,77	1,791.70	25,23
1976	8,546.50	20,33	6,004.10	70,25	2,542.40	29,75
1977	10,852.60	26,98	7,297.80	67,24	3,554.80	32,76
1978	11,643.20	7,28	7,438.50	63,89	4,204.70	36,11
1979	15,590.10	33,90	8,870.90	56,90	6,719.20	43,10
1980	23,950.40	53,63	17,781.60	74,24	6,168.80	25,76
1981	25,164.50	5,07	20,663.20	85,11	4,501.30	14,89
1982	22,268.30	11,51	18,339.30	82,36	3,929.00	17,64
1983	21,145.90	- 5,04	16,140.70	76,33	5,005.20	23,67
1984	21,886.80	3,50	16,018.10	73,19	5,868.70	26,81
1985	18,586.70	- 15,08	12,717.80	68,42	5,868.90	31,58
1986	14,805.00	- 20,35	8,276.00	55,90	6,528.40	44,10
1987	17,135.60	15,74	8,556.00	49,93	8,579.60	50,07
1988	19,218.50	12,16	7,681.60	39,97	11,536.90	60,03
1989	22,158.90	15,30	8,678.80	39,21	13,480.10	60,79
1990	25,675.30	15,87	11,071.10	43,12	14,604.20	56,88
1991	29,142.40	13,50	10,894.90	37,39	18,247.50	62,61
1992	33,967.00	16,56	10,670.90	31,42	23,296.10	68,58
1993	36,822.60	8,41	9,745.40	26,47	27,077.20	73,53
1994	40,053.30	8,77	9,693.60	24,20	30,359.70	75,80
1995	45,418.00	11,24	10,464.60	23,04	34,953.40	76,96
1996	49,814.90	9,68	11,722.00	23,53	38,092.90	76,47
1997	53,443.60	7,28	11,622.60	21,75	41,821.00	78,25
1998	48,847.60	- 8,60	7,872.30	16,12	40,975.30	83,88
1999	48,665.40	- 0,37	9,792.20	20,12	38,873.20	79,88
2000	62,124.00	27,66	14,366.60	23,13	47,757.40	76,87
2001	56,314.50	- 9,35	12,629.90	22,43	43,684.60	77,57
2002	57,158.80	1,50	12,112.70	21,19	45,046.10	78,81
2003	61,058.30	6,82	13,651.70	22,36	47,406.60	77,64

Sumber: Report for the Financial Year 1969/1970, Bank Indonesian (data diolah)
Indikator Ekonomi, Badan Pusat Statistik (data diolah)
Direction of Trade Statistic Year Book, International Monetary Fund (data diolah)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kenaikan yang tajam nilai ekspor nonmigas Indonesia terjadi pada periode akhir tahun 1992, yaitu dengan nilai

23,296.10 juta US \$ dibanding periode akhir tahun sebelumnya sebesar 18,247.50 juta US \$ dengan komposisi 68,58 persen.

Nilai ekspor nonmigas Indonesia sejak periode akhir tahun 1969 mencapai 0,470.80 juta US \$ dengan komposisi 47,32 persen terhadap total nilai ekspor dan 47,406.60 juta US \$ dengan komposisi 77,64 persen terhadap total nilai ekspor pada periode akhir tahun 2003 atau mengalami kenaikan sebesar 9,97 persen selama kurun waktu periode tersebut. Komposisi tertinggi ekspor nonmigas terhadap total ekspor terjadi pada periode akhir tahun 1998, yaitu sebesar 83,88 persen dan jauh lebih tinggi dibanding tahun 2003, yaitu sebesar 77,64 persen dan jauh lebih tinggi dibanding komposisi ekspor nonmigas pada periode akhir tahun 1981 (14,89 persen). Jika dirinci secara triwulan, maka terlihat bahwa ekspor produk nonmigas Indonesia sejak akhir triwulan III-1999 hingga akhir triwulan IV-1999 mengalami perlambatan dan cenderung menurun.

Dari Tabel 5.3 terlihat pula bahwa perkembangan nilai ekspor nonmigas Indonesia pada periode tahun 2001 hingga 2003 mengalami perlambatan. Laporan penelitian Lembaga Penelitian Ekonomi IBII (Makro Ekonomi Indonesia, 2002b: 12) menyatakan bahwa hal tersebut terjadi karena ada penurunan pada sebagian besar produk-produk manufaktur seperti tekstil, pakaian jadi, kayu lapis dan karet alam, bahkan memperlihatkan pertumbuhan negatif. Dengan demikian, kehandalan produk-produk tersebut untuk terus menjadi penghasil devisa utama semakin lama semakin diragukan. Penurunan kinerja ekspor kayu lapis diakibatkan semakin langkanya bahan baku untuk industri kayu lapis tersebut.

Kontraksi volume ekspor produk nonmigas Indonesia secara langsung menurunkan permintaan terhadap produk nonmigas Indonesia, sehingga dapat mempengaruhi neraca perdagangan internasional Indonesia. Padahal peranan ekspor saat ini menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran secara keseluruhan karena kecenderungan beberapa tahun terakhir ini adalah sisi *current account* menutupi defisit neraca pembayaran (Makro Ekonomi Indonesia, LPE-IBII, 2001: 12).

Laporan UNCTAD mengisyaratkan sudah saatnya pemerintah Indonesia lebih memfokuskan pada program diversifikasi produk ekspor unggulan. Dalam laporan tersebut terlihat bahwa lebih dari 15 tahun (1985-2000) ekspor Indonesiaa masih mengandalkan pada produk-produk kategori *low technology*. Hal ini yang membedakan Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya yang telah beralih ke persaingan ekspor produk-produk kategori *medium* dan *high technology*. Persaingan di kategori *low technology* sangat ketat karena berkompetisi dengan banyak negara dan hambatan masuk yang rendah serta mudahnya proses relokasi (Makro Ekonomi Indonesia, LPE-IBII, 2002b: 15).

Meskipun demikian, secara total ekspor nonmigas Indonesia masih tumbuh positif dan mencapai nilai \$ 13,4 miliar pada triwulan II-2001. Masih positifnya pertumbuhan ekspor nonmigas di antaranya didorong oleh terdepresiasi nilai tukar rupiah terhadap US\$ pada triwulan tersebut dan kemungkinan didorong pula oleh permintaan importir luar negeri agar pesanan ekspornya dapat direalisasikan pada triwulan itu sehubungan dengan tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi pada triwulan berikutnya. Terdepresiasi nilai

tukar rupiah menyebabkan ekspor Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar internasional yang dapat tercermin dari perkembangan indeks *Real Effective Exchange Rates* (REER) yang *under value*.

Sebenarnya pertumbuhan ekspor nonmigas tersebut tidak terlalu tinggi, terutama yang berkaitan dengan melambatnya pertumbuhan tahunan ekspor sektor industri dan sektor pertanian. Pertumbuhan ekspor nonmigas di sektor industri hanya dialami oleh produk kerajinan tangan, semen, dan produk plastik. Penurunan ekspor produk di sektor pertanian lebih disebabkan oleh menurunnya rata-rata harga ekspor produk pertanian seperti *Crude Palm Oil* (CPO).

b. Nilai Ekspor Migas Indonesia

Dalam Tabel 5.3 terlihat pula bahwa posisi nilai ekspor migas Indonesia relatif lebih kecil terhadap total ekspor sejak periode akhir tahun 1987 sampai dengan periode akhir tahun 2003. Komposisi terbesar nilai ekspor migas Indonesia hanya terjadi sejak tahun 1969 sampai dengan periode akhir tahun 1986. Komposisi nilai ekspor migas pada periode akhir tahun 1969 sebesar 52,68 persen dan pada periode akhir tahun 1986 sebesar 55,90 persen dengan nilai masing-masing 52,68 persen dan 55,90 persen. Pada periode akhir tahun 2003 hanya mencapai 23,36 persen, dan sisanya 77,64 persen didominasi komposisi ekspor nonmigas.

Seterusnya, jika rata-rata nilai tambah ekspor nonmigas Indonesia dirinci menurut 10 komoditas utama yang handal, maka *pulp* dan kertas menduduki peringkat nilai tertinggi dengan rata-rata nilai tambah ekspor sebesar 12.243,8 ribu US\$, disusul tekstil, pakaian jadi serta barang-barang listrik dengan rata-rata

nilai tambah ekspor masing-masing 8.650,5 ribu US\$, 6.661,3 ribu US\$ serta 5.253,8 ribu US\$. Komoditas tembaga dan karet alam menduduki peringkat nilai tambah terendah masing-masing 433,7 ribu US\$ dan 2.040,7 ribu US\$.

Kenaikan atau penurunan ekspor Indonesia ke kawasan ASEAN sebenarnya sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan permintaan pasar kawasan tersebut. Permintaan ASEAN memiliki andil dalam meningkatkan ekspor komoditas Indonesia. Hal ini terjadi karena peningkatan perekonomian ASEAN pada akhirnya akan meningkatkan permintaan agregat ASEAN terhadap suatu komoditas meningkat.

Untuk lebih jelasnya perkembangan rata-rata nilai tambah ekspor nonmigas Indonesia menurut 10 jenis komoditas utama yang handal tahun 1999-2003 dapat dilihat pada Tabel 5.4 berikut:

Tabel 5.4
PERKEMBANGAN RATA-RATA NILAI TAMBAH
EKSPOR NONMIGAS INDONESIA
MENURUT 10 JENIS KOMODITAS UTAMA YANG HANDAL
TAHUN 1999-2003

(000 US\$)

No.	Jenis Komoditas	Nilai Tambah Ekspor NonMigas
1.	Kayu Lapis	3,771.7
2.	Karet Alam	2,040.7
3.	Pakaian Jadi	6,661.3
4.	Tekstil	8,650.5
5.	Udang/Ikan	1,857.3
6.	Minyak Dan Biji Sawit	2,092.4
7.	Tembaga	433.7
8.	Pulp Dan Kertas	12,243.8
9.	Bahan Makanan	3,604.5
10.	Barang-Barang Listrik	5,253.8

Sumber: *International Trade Statistics Yearbook*, Vol. I-2004 (data diolah)

c. Nilai Ekspor Negara-Negara Inter-ASEAN

Perkembangan rata-rata nilai tambah ekspor nonmigas negara-negara inter-ASEAN menurut 10 jenis komoditas berturut-turut dapat dilihat pada Tabel 5.5, Tabel 5.6, Tabel 5.7 dan Tabel 5.8 sebagai berikut:

Tabel 5.5
PERKEMBANGAN RATA-RATA NILAI TAMBAH
EKSPOR NONMIGAS MALAYSIA MENURUT 10 JENIS KOMODITAS
TAHUN 1999-2003

(000 US\$)

No.	Jenis Komoditas	Nilai Tambah Ekspor NonMigas
1.	Kayu Lapis	2,066.9
2.	Karet Alam	916.1
3.	Pakaian Jadi	-
4.	Tekstil	1,506.0
5.	Udang/Ikan	-
6.	Minyak Dan Biji Sawit	2,334.9
7.	Tembaga	774.7
8.	Pulp Dan Kertas	539.8
9.	Bahan Makanan	1,733.8
10.	Barang-Barang Listrik	27,387.4

Sumber: *International Trade Statistics Yearbook*, Vol. 1-2004 (data diolah)

Tabel 5.6
PERKEMBANGAN RATA-RATA NILAI TAMBAH
EKSPOR NONMIGAS PHILLIPINA MENURUT 10 JENIS MODITAS
TAHUN 1999-2003

(000 US\$)

No.	Jenis Komoditas	Nilai Tambah Ekspor NonMigas
1.	Kayu Lapis	-
2.	Karet Alam	-
3.	Pakaian Jadi	2,127.9
4.	Tekstil	254.4
5.	Udang/Ikan	414.0
6.	Minyak Dan Biji Sawit	-
7.	Tembaga	-
8.	Pulp Dan Kertas	-
9.	Bahan Makanan	1,380.1
10.	Barang-Barang Listrik	6,724.6

Sumber: *International Trade Statistics Yearbook*, Vol. 1-2004 (data diolah)

Tabel 5.7
PERKEMBANGAN RATA-RATA NILAI TAMBAH
EKSPOR NONMIGAS SINGAPURA MENURUT 10 JENIS KOMODITAS
TAHUN 1999-2003

(000 US\$)

No.	Jenis Komoditas	Nilai Tambah Ekspor NonMigas
1.	Kayu Lapis	-
2.	Karet Alam	-
3.	Pakaian Jadi	2,526.1
4.	Tekstil	737.4
5.	Udang/Ikan	-
6.	Minyak Dan Biji Sawit	-
7.	Tembaga	-
8.	Pulp Dan Kertas	-
9.	Bahan Makanan	1,621.2
10.	Barang-Barang Listrik	45,877.2

Sumber: *International Trade Statistics Yearbook*, Vol.1-2004 (data diolah)

Tabel 5.8
PERKEMBANGAN RATA-RATA NILAI TAMBAH
EKSPOR NONMIGAS THAILAND MENURUT 10 JENIS KOMODITAS
TAHUN 1999-2003

(000 US\$)

No.	Jenis Komoditas	Nilai Tambah Ekspor NonMigas
1.	Kayu Lapis	-
2.	Karet Alam	1,891.9
3.	Pakaian Jadi	4,766.6
4.	Tekstil	504.5
5.	Udang/Ikan	7,289.5
6.	Minyak Dan Biji Sawit	-
7.	Tembaga	653.2
8.	Pulp Dan Kertas	1,107.1
9.	Bahan Makanan	9,711.9
10.	Barang-Barang Listrik	16,863.1

Sumber: *International Trade Statistics Yearbook*, Vol.1-2004 (data diolah).

Pada umumnya nilai tambah ekspor nonmigas Malaysia didominasi oleh barang-barang listrik, disusul minyak dan biji sawit serta kayu lapis. Sedangkan nilai tambah ekspor non migas Phillipina hanya didominasi oleh barang-barang listrik dan pakaian jadi. Barang-barang listrik dan pakaian jadi mendominasi nilai tambah komoditas ekspor Singapura, sedangkan nilai tambah ekspor

Thailand didominasi oleh komoditas barang-barang listrik, bahan makanan, ikan/udang dan pakaian jadi.

Nilai ekspor nonmigas Indonesia sejak periode akhir tahun 1969 mencapai 0,470.80 juta US \$ dengan komposisi 47,32 persen terhadap total nilai ekspor dan 47,406.60 juta US \$ dengan komposisi 77,64 persen terhadap total nilai ekspor pada periode akhir tahun 2003 atau mengalami kenaikan sebesar 9,97 persen selama kurun waktu periode tersebut. Komposisi tertinggi ekspor nonmigas terhadap total ekspor terjadi pada periode akhir tahun 1998, yaitu sebesar 83,88 persen dan jauh lebih tinggi dibanding tahun 2003, yaitu sebesar 77,64 persen dan jauh lebih tinggi dibanding komposisi ekspor nonmigas pada periode akhir tahun 1981 (14,89 persen).

Jika dirinci secara triwulan, maka terlihat bahwa ekspor produk nonmigas Indonesia sejak akhir triwulan III-1999 hingga akhir triwulan IV-1999 mengalami perlambatan dan cenderung menurun.

Berdasarkan data dalam Tabel 5.5., Tabel 5.6, Tabel 5.7 dan Tabel 5.8, terlihat jelas bahwa tidak semua negara ASEAN mengekspor produk yang sama dengan jenis komoditas nonmigas unggulan utama seperti yang diekspor Indonesia.

Berbeda dengan Indonesia, negara Singapura tidak mengekspor jenis komoditas kayu lapis, karet alam, udang/ikan, minyak dan biji sawit, tembaga, *pulp* dan kertas. Demikian pula halnya negara Malaysia, negara ini tidak mengekspor jenis komoditas pakaian jadi dan udang/ikan. Seterusnya, negara Philippina tidak mengekspor jenis komoditas kayu lapis, karet alam, minyak dan

biji sawit, tembaga, *pulp* dan kertas. Sedangkan negara Thailand tidak mengekspor jenis komoditas kayu lapis, minyak dan biji sawit seperti yang dilakukan Indonesia dalam komponen ekspor nonmigasnya.

Secara keseluruhan rekapitulasi jenis komoditas dan nilai ekspor nonmigas negara-negara ASEAN terlihat jelas dalam Tabel 5.9 berikut ini.

Tabel 5.9
REKAPITULASI PERKEMBANGAN RATA-RATA
NILAI TAMBAH 10 JENIS KOMODITAS EKSPOR NONMIGAS
NEGARA-NEGARA ASEAN
TAHUN 1999-2003

(000 US\$)

No.	Jenis Komoditas	Nilai Tambah Ekspor NonMigas
1.	Kayu Lapis	5,838.6
2.	Karet Alam	4,848.7
3.	Pakaian Jadi	6,081.9
4.	Tekstil	11,652.8
5.	Udang/Ikan	9,560.8
6.	Minyak Dan Biji Sawit	4,427.3
7.	Tembaga	1,861.6
8.	<i>Pulp</i> Dan Kertas	3,890.7
9.	Bahan Makanan	18,051.5
10.	Barang-Barang Listrik	102,106.1

Sumber: diolah dari Tabel 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, dan 5.8.

Dari Tabel 5.9 terlihat jelas bahwa dari 10 jenis komoditas ekspor nonmigas negara-negara ASEAN ternyata perkembangan rata-rata nilai tambah ekspor nonmigas terbesar didominasi barang-barang listrik dengan nilai mencapai 102.106,1 ribu US\$, kemudian disusul bahan makanan, tekstil serta *pulp* dan kertas dengan rata-rata nilai tambah ekspor masing-masing 18.051,5 ribu US\$, 16.081,9 ribu US\$ serta 13.890,7 ribu US\$. Komoditas tembaga, minyak dan biji sawit serta karet alam menduduki peringkat rata-rata nilai tambah terendah dengan rata-rata nilai tambah ekspor masing-masing 1.861,6

ribu US\$, 4.427,3 ribu US\$ dan 4.848,7 ribu US\$. Penurunan tiga produk ekspor tersebut karena menurunnya harga di negara-negara tujuan ekspor dan melambatnya pertumbuhan permintaan pasar dunia untuk komoditas-komoditas tersebut, di samping dipengaruhi faktor internal di negara masing-masing inter-ASEAN.

5.1.4. Nilai Tambah Ekspor NonMigas Indonesia Dan Negara Inter-ASEAN

Dari beberapa volume sumber data Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia tahun 2000-2004 dan ASEAN *Statistical Yearbook* 2003 yang telah diolah, perkembangan nilai tambah total ekspor nonmigas Indonesia dari tahun 1999-2003 mencapai 1,05 milyar US\$, sementara keseluruhan perkembangan nilai tambah ekspor nonmigas negara-negara inter-ASEAN (Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia dan Phillipina) menunjukkan perkembangan negatif, yaitu sebesar 54,559 milyar US\$.

Jika dirinci secara parsial, maka dapat diketahui bahwa nilai tambah ekspor nonmigas negara Thailand lebih tinggi dibanding dengan negara-negara inter-ASEAN lainnya, yaitu sebesar 10,41 milyar US\$, kemudian disusul oleh negara Singapura dengan nilai tambah ekspor sebesar 10,5 milyar US\$. Seterusnya berturut-turut negara yang mengalami perkembangan negatif nilai tambah ekspor nonmigasnya adalah negara Malaysia dan Phillipina, masing-masing – 76,519 US\$ dan – 0,32 US\$ dari triwulan III-1999-triwulan IV-2003.

5.1.5. Perkembangan Tingkat Inflasi Di Indonesia

Menurut data yang bersumber dari *Report for the Financial Year* 1969/1970 dan Laporan Tahunan yang dipublikasikan Bank Indonesia,

perkembangan tingkat inflasi Indonesia menunjukkan *trend* fluktuatif dan relatif stabil sejak periode akhir tahun 1969 sampai dengan periode akhir tahun 2003. Tingkat inflasi terendah terjadi pada periode akhir tahun 1999, yaitu sebesar 2,0 dan inflasi tertinggi terjadi pada periode akhir tahun sebelumnya (1998), yaitu sebesar 77,6 persen.

Pada tahun 1969 tingkat inflasi mencapai 9,9 persen dan meningkat drastis menjadi 33,3 persen pada periode akhir tahun 1974. Kenaikan harga migas dan harga impor juga telah mendorong kenaikan tingkat harga domestik. Kenaikan tingkat harga yang drastis ini mendorong pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan anti inflasi 9 Juli 1974 yang menyangkut pengelolaan permintaan dan penawaran (*demand management policy and supply side*).

Dalam perkembangan berikutnya, yaitu sampai periode akhir tahun 2003 tingkat inflasi di Indonesia hanya mencapai 5,1 persen di bawah 10 persen pada tahun 2002, namun masih lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi periode akhir tahun 1971 dan periode akhir tahun 1983

Untuk lebih jelasnya, perkembangan tingkat inflasi di Indonesia dari periode akhir tahun 1969 sampai dengan periode akhir tahun 2003 dapat dilihat pada Tabel 5.10.

Tabel 5.10
PERKEMBANGAN TINGKAT INFLASI DI INDONESIA
DARI TAHUN 1969-2003

TAHUN	TINGKAT BUNGA (%)
1969	9,9
1970	8,9
1971	2,5
1972	25,8
1973	27,3
1974	33,3
1975	19,7
1976	14,2
1977	11,8
1978	6,7
1979	21,8
1980	16,0
1981	7,1
1982	9,7
1983	11,5
1984	8,8
1985	4,3
1986	5,9
1987	9,1
1988	8,2
1989	6,3
1990	7,9
1991	9,3
1992	7,6
1993	9,6
1994	8,6
1995	9,4
1996	8,0
1997	11,1
1998	77,6
1999	2,0
2000	9,4
2001	12,6
2002	10,0
2003	5,1

Sumber : *Report for Financial Year 1969/1970*, Bank Indonesia
Laporan Tahunan, Bank Indonesia (data diolah)
Laporan Hasil Seminar (24-27 Februari 1986: 68), Bank Indonesia

5.1.6. Struktur Dan Perkembangan Jumlah Devisa Indonesia

Tabel 5.11 memperlihatkan bahwa struktur devisa Indonesia berbentuk valuta asing terdiri dari surat-surat berharga dan uang kartal/giral serta berbentuk

nonvaluta asing terdiri dari *Reserve Position in the Fund* (RPF), *Special Drawing Rights* (SDRs) dan *Monetary Gold* (MG).

Total devisa Indonesia pada periode akhir tahun 1969 mencapai 1,923.00 juta US \$, yang terdiri dari 0,127.50 Juta US \$ dalam bentuk surat-surat berharga, dan 1,434.00 juta US \$ dalam bentuk uang kartal/giral dengan komposisi 81,20 persen terhadap total posisi devisa Indonesia dalam periode tersebut. Selanjutnya 0,048.00 juta US \$ dalam bentuk *reserve position in the fund*, 0,035.00 juta US \$ dalam bentuk *special drawing rights* dan 0,279.00 dalam bentuk *monetary gold* dengan komposisi 18,80 persen terhadap total posisi devisa Indonesia periode yang sama. Dari tabel tersebut terlihat pula bahwa posisi devisa Indonesia didominasi valuta asing dalam bentuk uang kartal dan giral dengan komposisi di atas 60 persen, yaitu sebesar 81,20 persen dari total devisa Indonesia. Posisi devisa Indonesia pada periode akhir tahun 1969 mencapai 1,923.00 juta US \$, yang terdiri dari 0,127.50 juta US \$ dalam bentuk surat-surat berharga, dan 1,434.00 juta US \$ dalam bentuk uang kartal/giral dengan komposisi 81,20 persen terhadap total posisi devisa Indonesia dalam periode tersebut. Selanjutnya 0,048.00 juta US \$ dalam bentuk *reserve position in the fund*, 0,035.00 juta US \$ dalam bentuk *special drawing rights* dan 0,279.00 dalam bentuk *monetary gold* dengan komposisi 18,80 persen terhadap total posisi devisa Indonesia pada periode yang sama.

Dalam Tabel 5.11 terlihat pula bahwa posisi devisa Indonesia didominasi valuta asing dalam bentuk uang kartal dan giral dengan komposisi di atas 60 persen, yaitu sebesar 81,20 persen terhadap total devisa.

Posisi devisa Indonesia dalam tabel tersebut memperlihatkan pula peningkatan yang sangat tajam sejak periode akhir tahun 1982 hingga periode akhir tahun 1989, dengan posisi rata-rata 12,199,25 juta US \$ per tahun. Kemudian menurun drastis selama dua tahun berikutnya, yaitu berturut-turut 8,664.00 juta US \$ pada periode akhir tahun 1990 dan 9,868.00 juta US \$ pada periode akhir tahun 1991.

Pada akhir Mei tahun 2000 sesuai dengan kesepakatan dalam *letter of intent* (LoI) tanggal 20 Januari tahun 2000, BI mulai mengumumkan angka devisa dengan menggunakan konsep *international reserves and foreign currency liquidity* (IRFCL) yang memiliki kesamaan standar laporan internasional. Konsep baru ini menggantikan konsep lama dengan istilah aktiva luar negeri bruto atau *gross foreign assets* (GFA) yang diperkenalkan pada Januari 1998. Konsep IRFCL seperti halnya GFA dibuat berdasarkan *Balance of Payment Manual ke-5* (BPM5) dan *program special data dissemination standar* (SDDS) *International Monetary Fund*. Sebelum tahun 1998 menggunakan konsep devisa resmi. Sehingga berdasarkan konsep IRFCL terlihat bahwa posisi devisa Indonesia menurut konsep ini mengalami penyesuaian dan memperlihatkan peningkatan yang relatif tajam hingga mencapai 39,672.10 juta US \$ pada periode tersebut (tahun 2000) dengan tingkat pertumbuhan 9,05 persen yang dalam perkembangannya mengalami sedikit penurunan pertumbuhan, yaitu sebesar 0,77 persen dengan total devisa sebesar 36,296.76 juta US \$ pada periode akhir tahun 2003. Dalam periode yang sama komposisi uang kartal mencapai rata-rata 92,12 persen per tahun, namun secara riil posisi uang kartal dan giral justru turun drastis

hingga mencapai rata-rata 6,525.91 juta US persen per tahun, sedangkan valuta asing dalam bentuk surat-surat berharga justru mengalami peningkatan dengan komposisi masing-masing 18,403.10 juta US persen pada periode akhir tahun

Tabel 5.11
STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN JUMLAH DEvisa INDONESIA
DARI TAHUN 1969 – 2003 (JutaUS\$)

Tahun	Valuta Asing		Komposisi (%)	NonValuta Asing			Komposisi (%)	Total	Pertumbuhan (%)
	Surat-Surat Berharga	Kartal/Giral		RPF ¹⁾	SDRS ²⁾	MG ³⁾			
1969	0,127.50	1,434.00	81,20	0,048.00	0,035.00	0,279.00	18,80	1,923.00	-
1970	0,167.50	1,424.00	94,73	0,026.00	0,028.00	0,021.00	5,27	1,666.00	- 13,36
1971	-	1,498.00	98,03	-	0,030.00	-	1,96	1,580.20	- 5,15
1972	-	1,680.20	100,00	-	0	-	0,00	1,680.20	6,33
1973	-	1,839.00	91,21	-	0	-	8,79	2,016.20	20,00
1974	1,221.00	1,472.00	94,39	0,035.00	0	0,125.00	5,69	2,853.00	41,50
1975	1,145.00	1,577.00	94,81	85,00	0	0,064.00	5,19	2,871.00	0,63
1976	0,340.00	3,423.00	83,72	670.00	0	0,062.00	16,28	4,495.00	56,57
1977	0,410.00	2,580.00	91,49	0,083.00	0	0,195.00	8,51	3,268.00	- 27,30
1978	0,449.00	2,461.00	98,44	0,090.00	0	0,299.00	1,56	2,956.00	- 9,55
1979	0,505.00	3,795.00	88,71	0,097.00	0	0,450.00	11,29	3,299.00	11,60
1980	1,075.90	5,012.00	68,70	0,205.00	0	2,569.00	31,30	8,861.90	168,62
1981	0,706.50	5,450.00	63,32	0,217.00	0	3,350.00	36,68	9,723.50	9,72
1982	3,119.00	6,984.00	73,48	0,239.00	0	3,407.00	26,52	13,749.00	41,40
1983	2,421.00	8,108.00	74,90	0,162.00	0	3,367.00	25,10	14,058.00	2,25
1984	2,173.00	9,431.00	74,37	0,385.00	0	3,614.00	25,63	15,603.00	10,99
1985	2,122.00	9,039.00	73,37	0,385.00	0	3,665.00	26,63	15,211.00	- 2,51
1986	2,138.00	7,838.00	71,21	0,385.00	0	3,649.00	28,79	14,010.00	- 7,90
1987	2,169.00	8,499.00	72,71	0,385.00	0	3,618.00	27,29	14,671.00	4,72
1988	4,434.50	6,028.00	98,47	-	0	0,163.00	1,53	10,625.00	- 27,58
1989	4,719.00	6,561.00	100,00	-	0	-	0,00	15,270.00	43,72
1990	4,816.00	8,564.00	100,00	-	0	-	0,00	8,664.00	- 43,26
1991	4,876.00	9,807.70	100,00	-	0	-	0,00	9,868.00	13,90
1992	-	11,610.90	100,00	-	0	-	0,00	11,610.90	17,66
1993	-	12,352.20	100,00	-	0	-	0,00	12,352.00	6,38
1994	-	11,820.00	89,83	0,214.00	0	858.27	10,17	13,158.00	6,53
1995	-	13,331.00	90,85	0,300.00	0	776.64	9,15	14,674.00	11,52
1996	-	17,842.00	93,29	0,341.00	0	800.27	6,71	19,125.00	30,33
1997	-	12,825.00	92,07	0,214.00	0	1,976.00	7,93	15,015.00	- 31,49
1998	-	15,123.00	87,12	0,214.00	0	2,021.00	12,88	17,359.00	15,61
1999	-	18,562.00	92,56	0,214.00	0	1,279.00	7,44	20,055.00	15,53
2000	18,403.10	23,426.00	80,23	0,168.00	0	7,675.00	19,77	39,672.10	97,82
2001	20,497.10	6,550.30	96,34	0,182.70	0	0,785.70	3,46	28,015.80	- 29,38
2002	24,455.17	6,299.17	95,99	0,197.69	0	1,087.34	4,01	32,039.20	14,36
2003	28,011.12	6,731.25	95,72	0,215.40	0	1,287.99	4,28	36,296.76	13,28

umber: *Report for the Financial Year 1969/1970*, Bank Indonesia (data diolah)

Report for the Financial Year 1970/1971, Bank Indonesia (data diolah)

Statistik Ekonomi Moneter Indonesia, Bank Indonesia (data diolah)

Laporan Tahunan, Bank Indonesia (data diolah)

Balance of Payments Statistics, Part I: Country Tables, Year Book 2003, International Monetary Fund (data diolah)

International Financial Statistic, International Monetary Fund (data diolah)

catatan: 1) *Reserve Position in the Fund*

2) *Special Drawing Rights*, yang sejak tahun 1972 tidak dialokasikan lagi oleh IMF

3) *Monetary Gold*

- Angka yang pasti tidak ditekan

2000, 20,497.10 juta US \$ pada periode akhir tahun 2001, 24,455.17 juta US pada periode akhir tahun 2002, dan 28,011.12 juta US \$ pada periode akhir 2003. Sebaliknya, dalam kurun waktu yang sama komposisi devisa Indonesia dalam bentuk nonvaluta asing justru sangat kecil yaitu hanya mencapai rata-rata 3,92 persen per tahun. Hal ini terjadi karena kecilnya posisi RPF, SDRs dan MG yang dicadangkan setiap tahunnya.

Khusus mengenai SDRs, sesungguhnya sudah ada sebelum tahun 1970, tetapi belum memainkan peranannya yang besar dalam menggantikan emas sebagai mata uang cadangan internasional. Meskipun SDRs kadang-kadang disebut “emas kertas” (*paper gold*), tetapi dalam kenyataannya tidak ada hubungannya dengan emas dan peranannya sebatas hanya digunakan untuk pembayaran transaksi-transaksi moneter resmi.

Seiring dengan terjadinya keresahan dalam sistem moneter internasional sejak tahun 1971 mengakibatkan tidak ada kelanjutan perkembangan SDRs dalam struktur devisa. Sejak 1972 tidak ada alokasi SDRs lagi, dan ini tampak dalam Tabel 5.11. Dalam struktur devisa Indonesia, SDRs berada dalam posisi 0 sejak periode tahun 1972 hingga periode akhir tahun 2003 (periode akhir data penelitian). Tercatat posisi SDRs dalam struktur devisa Indonesia hanya 0,035.00 juta \$ pada tahun 1969 (periode awal data penelitian) dan meskipun turun menjadi 0,028 juta US \$ pada tahun 1970, namun meningkat sedikit menjadi 0,030 juta US \$ pada periode tahun berikutnya (1971).

5.1.7. Jumlah Dan Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Perdagangan

Salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi dalam suatu perekonomian adalah jumlah dan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja. Perhitungan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dilakukan dengan metode sederhana, yaitu dengan cara mengurangkan jumlah penyerapan tenaga kerja pada tahun berjalan (periode t) dikurang dengan jumlah penyerapan tenaga kerja pada tahun sebelumnya ($t-1$) dibagi dengan jumlah penyerapan tenaga kerja tahun sebelumnya ($t-1$) dikali dengan seratus persen.

Jumlah penduduk menentukan jumlah tenaga kerja, terutama penduduk usia kerja yang berumur 16 tahun ke atas dan 60 tahun ke bawah. Khusus untuk sektor perdagangan, aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja yang diciptakan oleh sektor perdagangan menentukan tinggi rendahnya pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor tersebut.

Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia khususnya pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan (perdagangan besar, eceran dan rumah makan/restoran) dari tahun 1970 sampai tahun 2003 menunjukkan *trend* pertumbuhan yang berfluktuatif dengan tingkat pertumbuhan minus di atas 5 persen hingga di bawah 17 persen per tahun. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja tertinggi pada sektor-sektor tersebut terjadi pada tahun 1995, yaitu dengan tingkat pertumbuhan sebesar 16,96 persen atau naik sebesar 6,49 persen dari tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya jumlah dan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan di Indonesia sejak tahun 1969 – 2003 disajikan dalam Tabel 5.12.

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 1969 (memasuki Pembangunan Lima Tahun I [Pelita I]), jumlah penduduk yang terserap sebagai tenaga kerja dalam sektor perdagangan adalah sebesar 4.619.116 orang dan hingga sepuluh tahun berikutnya (tahun 1979) mengalami perkembangan yang pesat mencapai 7.014.214 orang. Selanjutnya pada periode akhir tahun 2003 jumlah penduduk yang terserap menjadi tenaga kerja di sektor perdagangan adalah sebesar 16.845.995 orang dan besaran ini bila dibandingkan dengan jumlah penyerapan tenaga kerja pada tahun 2000 sebenarnya mengalami penurunan sebesar 8,89 persen dari 18.489.005 orang atau sebesar 1.643.010 orang. Penurunan ini ditengarai ada hubungannya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru pemberlakuan Upah Minimum Regional (UMR), sehingga sektor ini lebih tertarik untuk melakukan *outsourcing* dengan menggunakan teknologi yang bersifat *labor saving*, di samping masalah ketidakpastian produksi menuntut sektor ini lebih fleksibel untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.

Dalam perkembangan selanjutnya, terlihat bahwa pertumbuhan penyerapan terendah terjadi pada tahun 2001 dengan tingkat pertumbuhan minus 5,52 persen dan secara perlahan turun menjadi minus 5,33 persen pada akhir tahun 2003. Khusus untuk tahun 2003, terjadi penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja dari 17.795.030 orang pada tahun 2002 menjadi 16.845.995 atau terjadi penurunan jumlah penyerapan sebanyak 949.035 orang pada tahun 2003.

Pertumbuhan minus terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan terjadi pula dalam periode tahun 1990, 1998, 2001 dan 2003 dengan

tingkat pertumbuhan antara minus 0,97 persen hingga minus 5,52 persen dengan jumlah penyerapan masing-masing 11.067.357 orang, 16.814.233 orang, 17.469.129 orang dan 16.845.995 orang.

Tabel 5.12
JUMLAH DAN PERTUMBUHAN PENYERAPAN TENAGA KERJA
PADA SEKTOR PERDAGANGAN DI INDONESIA
TAHUN 1969 – 2003

Tahun	Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)	Pertumbuhan (%)
1969	4.619.116	-
1970	4.773.087	3,33
1971	4.927.057	3,23
1972	5.081.028	3,13
1973	5.337.645	5,05
1974	5.491.616	2,88
1975	5.645.587	2,80
1976	6.073.282	7,58
1977	6.329.900	4,23
1978	6.757.596	6,76
1979	7.014.214	3,95
1980	7.270.831	3,66
1981	7.698.527	5,88
1982	8.126.223	5,56
1983	8.553.919	5,26
1984	8.724.362	1,99
1985	9.345.210	7,12
1986	9.521.065	1,88
1987	9.756.404	2,47
1988	10.777.639	10,47
1989	11.176.121	3,70
1990	11.067.357	- 0,97
1991	11.746.813	6,14
1992	12.032.521	2,43
1993	12.508.070	3,95
1994	13.768.080	10,47
1995	16.102.552	16,96
1996	16.743.658	3,99
1997	17.221.184	2,85
1998	16.814.233	- 2,36
1999	17.529.099	4,25
2000	18.489.005	5,48
2001	17.469.129	- 5,52
2002	17.795.030	1,87
2003	16.845.995	- 5,33

Sumber: Statistik Ketenagakerjaan: Depnakertrans RI, Jakarta (data diolah)
Statistik Indonesia: BPS, Jakarta-Indonesia (data diolah)

5.18. Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto adalah total *output* (produksi) yang dihasilkan oleh perekonomian Indonesia dari 9 (sembilan) lapangan usaha seperti: pertanian, pertambangan/penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa lainnya. Sektor industri pengolahan menduduki urutan pertama penyumbang nilai tambah terbesar terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto, hal ini mengindikasikan bahwa industri pengolahan di Indonesia khususnya industri manufaktur mengalami perkembangan yang pesat dan memiliki daya saing tinggi, baik dalam jumlah maupun kualitas sehingga dapat diterima oleh konsumen di dalam maupun di luar negeri dan ditunjang oleh kandungan teknologi yang cenderung *medium/high technology*.

Tabel 5.13
PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK BRUTO
MENURUT LAPANGAN USAHA DARI TAHUN 1999-2003 (Milyar Rp)
BERDASARKAN HARGA KONSTAN TAHUN 2000

No.	Lapangan Usaha	TAHUN				
		1999	2000	2001	2002	2003
1.	Pertanian	212.824,2	216.831,4	225.685,7	231.921,6	239.035,8
2.	Pertambangan/Penggalian	158.937,8	167.692,2	168.244,3	168.986,9	166.341,6
3.	Industri Pengolahan	363.824,0	363.824,0	398.323,8	421.783,5	442.949,1
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	7.804,0	8.393,7	9.058,3	9.738,1	10.310,1
5.	Bangunan	72.484,3	76.573,4	80.080,4	84.239,1	89.554,3
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	212.418,0	224.452,6	234.273,1	243.409,3	256.299,5
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	59.868,8	65.021,1	70.276,1	76.173,1	84.979,0
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	110.395,2	115.463,1	123.085,5	129.832,2	138.770,9
9.	Jasa-jasa lainnya	126.795,8	129.753,8	133.957,4	138.296,8	143.919,0
PRODUK DOMESTIK BRUTO		1.324.599,0	1.389.770,2	1.442.984,6	1.504.380,6	1.572.159,3

Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia 2004, Badan Pusat Statistik (data diolah)

Perkembangan terbesar penyumbang berikutnya terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto masing-masing adalah sektor pertanian dan sektor perdagangan dalam arti luas (lihat pada Tabel 5.13).

Berdasarkan harga konstan tahun 2000, total produk domestik bruto (PDB) pada tahun 1999 mencapai Rp1,324,599.0 milyar dan naik menjadi Rp 1.389.770,2 pada tahun 2000. Dalam kurun waktu lima tahun berikutnya (2003), total produk domestik bruto mencapai Rp 1,572,159.3 milyar atau ada kenaikan sebesar Rp 247,560.3 milyar dari tahun 1999.

5.2. Analisis Dan Hasil Studi

5.2.1. Deskripsi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini variabel yang dianalisis adalah Struktur Uang Beredar (X), Struktur Ekspor (Y1), Struktur Devisa (Y2) dan Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja pada sektor perdagangan di Indonesia (Y3). Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk *time series data* dengan periode waktu 35 tahun, yaitu data periode tahun 1969 sampai dengan periode tahun 2003. Hasil analisis deskriptif secara lengkap terhadap data tersebut disajikan pada Lampiran 1.

1. Variabel Struktur Uang Beredar

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada Lampiran 1, setiap indikator dari variable struktur uang beredar disajikan kembali ke dalam Tabel 5.14.

Tabel 5.14
RATA-RATA PER TAHUN DARI TAHUN 1969 – 2003
SETIAP INDIKATOR DARI VARIABEL STRUKTUR UANG BEREDAR
(Milyar Rp)

Periode	Jenis	Jumlah Uang Kartal	% Terhadap Total	Jumlah Uang Giral	% Terhadap Total	Jumlah Uang Kuasi	% Terhadap Total
1969 – 1979		667.00	0,72	664.36	0,52	669.82	0,56
1980 - 1989		4392.10	4,75	5980.20	4,70	14276.00	12,03
1990 - 1997		16845.25	18,21	27657.13	21,73	41497.50	35,01
1998 - 2003		70614.67	76,32	92966.17	73,05	62130.33	52,40
Total Rata-rata		17420.23	100	24176.11	100	141568.29	100
Distribusi (%)			9,51		13,20		77,29

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara umum posisi jumlah uang beredar (uang kartal, uang giral dan uang kuasi) mengalami peningkatan per periode waktu (dari periode tahun 1969-1979 ke periode tahun 1980-1989, 1990-1997 dan 1998-2003). Dibanding dengan posisi uang kartal dan uang giral, posisi uang kuasi memperlihatkan peningkatan jumlah yang sangat besar dalam setiap periode tersebut.

Dari tabel tersebut dapat pula diketahui bahwa jumlah uang kuasi mengalami perkembangan rata-rata yang pesat dibanding perkembangan rata-rata jumlah uang kartal dan uang giral dengan tingkat distribusi sebesar 77,29 persen terhadap total uang beredar, sedangkan distribusi jumlah uang kartal dan uang giral terhadap total uang beredar masing-masing 9,51 persen dan 13,20 persen. Keadaan ini mengindikasikan bahwa telah terjadi kenaikan simpanan valas dan deposito oleh masyarakat yang ditandai adanya *shifting portfolio* simpanan dari simpanan berdenominasi valas yang terjadi seiring dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

2. Variabel Struktur Ekspor

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada Lampiran 1, setiap indikator dari variabel struktur ekspor disajikan kembali ke dalam Tabel 5.15 berikut ini.

Tabel 5.15
RATA-RATA PER TAHUN DARI TAHUN 1969-2003
SETIAP INDIKATOR DARI VARIABEL STRUKTUR EKSPOR
(Juta US \$)

Jenis Periode	Nilai Ekspor Migas	% Terhadap Total	Nilai Ekspor Nonmigas	% Terhadap Total
1969 - 1979	4.0383273	10,10	2.3055636	2,81
1980 - 1989	13.4833100	33,71	7.1456900	8,72
1990 - 1997	10.7356375	26,84	28.5565000	34,84
1998 - 2003	11.7375667	29,35	43.9572000	53,63
Total Rata-rata	9.5875771	100	16.8289514	100
Distribusi (%)		36,29		63,71

Tabel 5.15 menunjukkan bahwa terjadi lonjakan peningkatan nilai ekspor nonmigas yang tajam per periode waktu dibandingkan dengan nilai ekspor migas dalam periode waktu yang sama dari periode tahun 1980-1989 ke periode tahun 1990-1997 dan periode tahun 1998-2003.

Dalam periode tahun 1969-1979 perkembangan rata-rata nilai ekspor migas mencapai 10,10 persen, jauh lebih tinggi dibanding perkembangan rata-rata nilai ekspor nonmigas yang hanya 2,81 persen dalam periode yang sama. Namun demikian, dalam periode tahun 1998-2003 tingkat perkembangan rata-rata nilai ekspor nonmigas Indonesia mengalami tingkat perkembangan rata-rata yang sangat drastis. Keadaan ini terjadi karena dalam perkembangannya pembesaran nilai ekspor akibat dari rupiah yang mengalami *under valued* terhadap dolar AS, sehingga pada gilirannya memberikan insentif ekonomi relatif besar bagi para eksportir dalam memperbesar volume ekspor. Di samping itu, sebagian besar

komoditas ekspor nonmigas Indonesia dapat diterima oleh pasar internasional karena memiliki daya saing tinggi dan keunggulan kompetitif seperti tekstil, *pulp* dan kertas serta kayu lapis yang bahan bakunya banyak tersedia di dalam negeri. Hal yang penting untuk diungkapkan di sini adalah kemampuan dalam penguasaan teknologi dalam proses pengolahan barang-barang tersebut, yaitu dari *low technology* ke arah *medium* dan atau *high technology*.

Distribusi nilai ekspor migas dan nonmigas Indonesia terhadap total nilai ekspor masing-masing 36,29 persen dan 63,71 persen dengan total nilai ekspor rata-rata masing-masing sebesar 9.5875771 juta US \$ dan 16.8289514 juta US \$.

3. Variabel Struktur Devisa

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada Lampiran 1, setiap indikator dari variabel struktur devisa disajikan kembali ke dalam Tabel 5.16 berikut ini.

Tabel 5.16
RATA-RATA PER TAHUN DARI TAHUN 1969-2003
SETIAP INDIKATOR DARI VARIABEL JUMLAH DEvisa

(Juta US \$)

	Valuta Asing				Non Valuta Asing					
	Sisa Berharga	% Tho Total	Kartal Giral	% Tho Total	RPF	% Tho Total	SDRs	% Tho Total	MG	% Tho Total
1979	.5456250	1,77	2.1075635	6,12	.23750	23,77	.0084545	100	.1781250	2,67
1989	2.5077900	8,16	7.2950000	21,18	.2953750	29,58	.0000000	0	3.0446667	45,58
1997	4.8460000	15,76	12.2691000	35,62	.2672500	26,76	.0000000	0	1.1027950	16,51
2003	22.8416225	74,31	12.7702867	37,08	.1986317	19,89	.0000000	0	2.3545050	35,24
Total	5.4375579	100	7.7402206	100	.2508765	100	.0026571	100	1.7542670	100
Subtotal		35,81		50,97		1,65		0,02		11,55

Berdasarkan Tabel 5.16 dapat diketahui bahwa secara umum jumlah devisa lebih banyak dalam bentuk valuta asing. Di samping itu, terjadi juga

peningkatan yang tajam dalam jumlah devisa dari periode tahun sebelum krisis (tahun 1990-1997) ke periode setelah krisis (tahun 1998- 2003).

Dalam periode tahun 1969-1979, 1980-1989 dan 1990-1997 jumlah devisa Indonesia didominasi oleh valuta asing dalam bentuk uang kartal/giral, namun sebaliknya pada periode tahun 1998-2003 valuta asing tersebut bergeser lebih banyak ke dalam bentuk surat-surat berharga. Distribusi valuta asing dalam bentuk uang kartal/giral dan surat-surat berharga masing-masing 50,97 persen dan 35,81 persen. Distribusi devisa nonvaluta asing, baik dalam bentuk RPF, SDRs dan MG memiliki porsi yang sangat kecil dalam struktur devisa Indonesia, yaitu masing-masing 1,65 persen, 0,02 persen dan 11,55 persen.

Demikian pula halnya, total rata-rata devisa Indonesia dalam bentuk valuta asing lebih banyak dalam bentuk uang kartal/giral dibanding surat-surat berharga, yaitu masing-masing 7.7402206 juta US \$ dan 5.4375579 juta US \$. Khusus untuk nonvaluta asing devisa didominasi dalam bentuk MG dengan total rata-rata 1.7542670 juta US \$.

4. Variabel Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Perdagangan

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada Lampiran 1, setiap indikator dari variabel pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan disajikan kembali ke dalam Tabel 5.17.

Dalam tabel tersebut terlihat bahwa pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan antar per periode waktu (dari periode tahun 1969-1979 ke periode tahun 1980-1989, 1990-1997 dan 1998-2003) bersifat tidak teratur, yaitu tidak terdapat *trend* kenaikan maupun penurunan yang berarti.. Total rata-

rata pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan di Indonesia adalah 3,9576 persen. *Trend* terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor ini seiring dengan perkembangan aktivitas perdagangan (perdagangan besar dan eceran) dan perkembangan perhotelan serta restoran yang berfluktuatif, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Tabel 5.17
RATA-RATA PER TAHUN DARI TAHUN 1969-2003
SETIAP INDIKATOR DARI VARIABEL
PERTUMBUHAN PENYERAPAN TENAGA KERJA
PADA SEKTOR PERDAGANGAN

(Orang)

Periode	Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja (%)
1969 - 1979	4,2778
1980 - 1989	4,7987
1990 - 1997	5,6766
1998 - 2003	-,2699
Total Rata-rata	3,9576

Dibanding dengan periode tahun 1969-1979 terjadi pertumbuhan minus dalam penyerapan tenaga kerja pada periode tahun 1998-2003 (periode pasca krisis multidimensi), yaitu rata-rata sebesar 2,2699 persen. Pertumbuhan relatif tinggi hanya terjadi pada periode tahun 1990-1997, yaitu rata-rata sebesar 5,6766 persen.

5.2.2. Analisis Faktor Konfirmatori

Hasil analisis faktor konfirmatori secara lengkap disajikan pada Lampiran 2. Nilai *loading factor* setiap indikator dari masing-masing variabel dapat dilihat pada uraian berikut.

1. Variabel Struktur Uang Beredar

Loading factor setiap indikator dari variabel struktur uang beredar dapat dilihat pada Tabel 5.18 berikut ini.

Tabel 5.18
LOADING FACTOR INDIKATOR
DARI VARIABEL STRUKTUR UANG BEREDAR

Variabel	Loading Factor
Jumlah Uang Kartal (X1)	.998
Jumlah Uang Giral (X2)	.997
Jumlah Uang Kuasi (X3)	.996

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa nilai *loading factor* setiap indikator dari variabel' struktur uang beredar adalah hampir sama besar, masing-masing dengan nilai 0,998 untuk uang kartal (X1) 0,997 untuk uang giral (X2) dan 0,996 untuk uang kuasi (X3). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepentingan peredaran tiga jenis uang tersebut relatif sama.

Uang kartal dalam struktur uang beredar di Indonesia masih dianggap penting karena dianggap lebih likuid, kemudian disusul masing-masing uang giral dan uang kuasi, yang dalam perkembangannya jumlah uang kuasi lebih besar dari uang kartal dan uang giral.

2. Variabel Struktur Ekspor

Loading factor setiap indikator dari variabel struktur ekspor dapat dilihat pada Tabel 5.19. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa nilai *loading factor* setiap indikator adalah sama, masing-masing dengan nilai 0,816 dan 0,86. Hal ini

mengindikasikan bahwa tingkat kepentingan terhadap ekspor migas dan ekspor nonmigas dalam struktur ekspor Indonesia adalah sama.

Tabel 5. 19
LOADING FACTOR INDIKATOR
DARI VARIABEL STRUKTUR EKSPOR

Variabel	Loading Factor
Nilai Ekspor Migas (Y1.1.)	.816
Nilai Ekspor Nonmigas (Y1.2.)	.816

Dalam struktur ekspor Indonesia, komoditas ekspor migas dan ekspor nonmigas merupakan dua jenis komoditas terpenting dalam pembentukan total ekspor Indonesia, yang dalam perkembangannya peranan ekspor nonmigas sebagai sumber penerimaan devisa negara semakin penting.

3. Variabel Struktur Devisa

Loading factor setiap indikator dari variabel struktur devisa dapat dilihat pada Tabel 5.20.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai *loading factor* dari indikator valuta asing (uang kartal dan uang giral [Y2.1.2]) adalah tertinggi, kemudian disusul nonvaluta asing (*Money Gold* [Y2.2.3.]). Nilai *loading factor* indikator valuta asing uang karta/giral adalah 0,948, nonvaluta asing MG adalah 0,892, valuta asing surat-surat berharga adalah 0,528, nonvaluta asing SDRs adalah 0,498, dan nonvaluta asing RPF 0,307.

Tabel 5.20
LOADING FACTOR INDIKATOR
DARI VARIABEL JUMLAH DEvisa

Variabel	Loading Factor
Valuta Asing Kartal/Giral (Y2.1.2.)	.948
Non Valuta Asing MG (Y2.2.3.)	.892
Valuta Asing Surat Berharga (Y2.1.1)	.528
Non Valuta Asing SDRs (Y2.2.2.)	-.498
Non Valuta Asing RPF (Y2.2.1.)	-.307

Dalam tabel tersebut terlihat bahwa nilai *loading factor* dari indikator valuta asing (uang kartal dan uang giral [Y2.1.2]) adalah tertinggi, kemudian disusul nonvaluta asing (*Money Gold* [Y2.2.3.]). Nilai *loading factor* indikator valuta asing uang karta/giral adalah 0,948, nonvaluta asing MG adalah 0,892, valuta asing surat-surat berharga adalah 0,528, nonvaluta asing SDRs adalah 0,498, dan nonvaluta asing RPF 0,307.

Dari nilai tersebut mengindikasikan bahwa jumlah devisa dalam bentuk valuta asing (uang kartal dan uang giral) bukan surat-surat berharga adalah dianggap memiliki tingkat kepentingan tertinggi karena transaksi internasional lebih banyak dilakukan dalam bentuk valuta asing dari pada nonvaluta asing.

5.2.3. Analisis Jalur

1. Pemeriksaan Asumsi Yang Melandasi Analisis Jalur

Asumsi yang melandasi analisis jalur adalah: 1) dalam model analisis jalur (*path analysis*) hubungan antar variabel adalah linier dan aditif; 2) hanya model rekrusif dapat dipertimbangkan, yaitu hanya sistem aliran kausal ke satu arah; 3) variabel endogen minimal dalam skala ukur interval; 4) *observed variable* diukur tanpa kesalahan (instrumen pengukuran valid dan reliabel); dan 5) model yang

dianalisis dispesifikasikan (diidentifikasi) dengan benar berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan.

2. Uji Linieritas

Hasil pemeriksaan asumsi linieritas selengkapnya disajikan pada Lampiran

3. Pendekatan yang digunakan merujuk pada konsep *parsimony*, yaitu bilamana seluruh model yang digunakan sebagai dasar pengujian adalah signifikan atau nonsignifikan berarti model dikatakan linier atau fungsi linier signifikan. Spesifikasi model yang digunakan sebagai dasar pengujian adalah *linear model*, *quadratic*, *cubic*, *inverse*, *logarithmic*, *power*, *S*, *compound*, *growth* dan *exponential*. Hasil pengujian asumsi linieritas untuk setiap hubungan antar variabel disajikan secara ringkas dalam Tabel 5.21 berikut ini.

Tabel 5.21
HASIL PENGUJIAN ASUMSI LINIERITAS

Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil Pengujian	Keputusan
Uang Beredar	Nilai Ekspor	Model linier signifikan	Linier
Uang Beredar	Jumlah Devisa	Model linier signifikan	Linier
Uang beredar	Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja	Model linier signifikan	Linier
Nilai Ekspor	Jumlah Devisa	Model linier signifikan	Linier
Nilai Ekspor	Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja	Model linier signifikan	Linier
Jumlah Devisa	Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja	Model linier signifikan	Linier

Berdasarkan Tabel 5.21 didapatkan bahwa semua bentuk hubungan antar variabel yang terdapat dalam model struktural adalah linier. Dengan demikian asumsi linieritas pada analisis jalur (*path analysis*) terpenuhi.

3. Uji Normalitas Dan *Data Outliers*

Asumsi model rekursif sudah terpenuhi (Gambar 3.2 Kerangka Konseptual), hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa asumsi model dispesifikasikan dengan benar sudah terpenuhi. Asumsi variabel endogen dalam skala ukur interval sudah terpenuhi. Hal ini didasarkan pada *input data* dalam analisis jalur adalah skor faktor, dimana data skor faktor berupa data interval sehingga tidak diperlukan adanya *data outliers*.

Bertitik tolak pada Dalil Limit Pusat (*Limit Central Theorm*): jika ukuran sampel semakin besar, maka asumsi instrumen penelitian valid dan reliabel tidak diperlukan, mengingat data penelitian dalam studi disertasi ini berupa data sekunder yaitu dengan jumlah *unit inquiry* lebih besar dari 100 (sehingga sangat memenuhi Dalil Limit Pusat [*Limit Central Theorm*]).

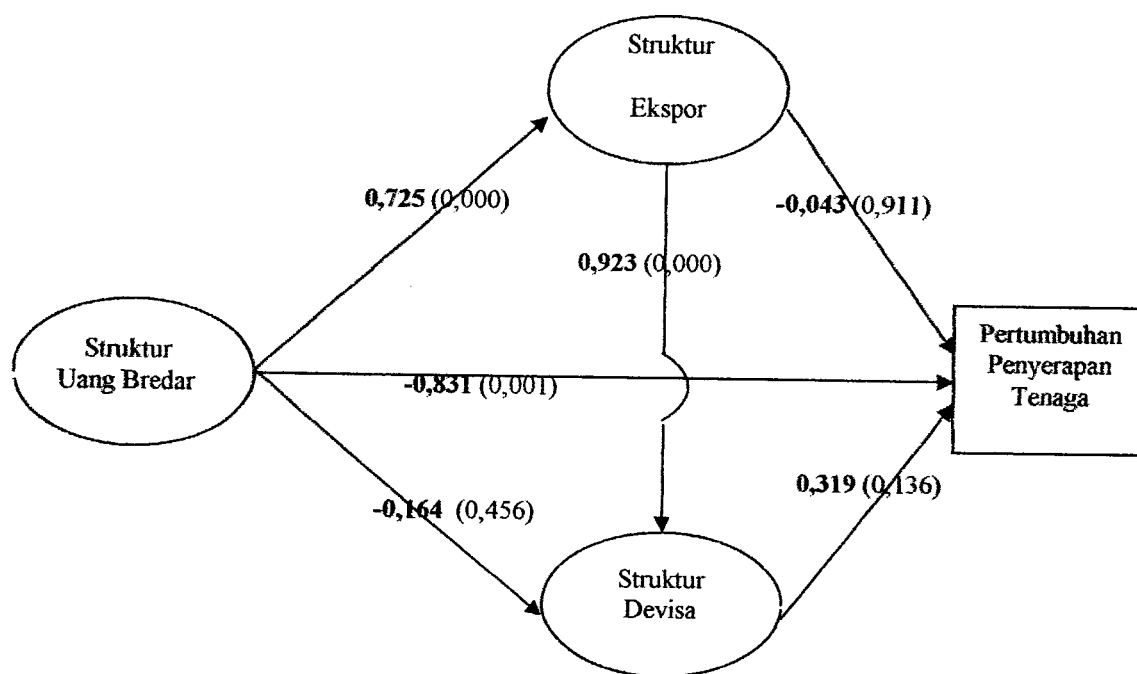
4. Hasil Pengujian Hipotesis

Analisis jalur (*path analysis*) didasarkan pada koefisien regresi *standardized* yang diperoleh dengan menggunakan *software: Statistic Package of Social Science (SPSS) Rel. 11.05 for window*. Secara lengkap hasil analisis jalur (*path analysis*) disajikan pada Lampiran 4.

Tabel 5.22
HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS

Variabel Independen	Variabel Dependen	Koefisien Jalur Pengaruh Langsung (β)	Keputusan
St. Uang Beredar	Struktur Ekspor	0,725 (0,000)	Signifikan
St. Uang Beredar	Struktur Devisa	-0,164 (0,456)	Nonsignifikan
St. Uang Beredar	Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja	-0,831 (0,001)	Signifikan
St. Ekspor	Struktur Devisa	0,923 (0,000)	Signifikan
St. Devisa	Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja	0,319 (0,136)	Nonsignifikan
St. Ekspor	Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja	-0,043 (0,911)	Nonsignifikan

Hasil pengujian hipotesis dalam bentuk diagram jalur (*path diagram*) disajikan dalam bentuk Gambar 5.1 berikut ini.



Gambar 5.1

DIAGRAM JALUR HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS

Keterangan: (1) Angka cetak tebal adalah koefisien *path* pengaruh langsung
 (2) Angka dalam kurung adalah *p value*, jika $p < 0.05$ signifikan dan sebaliknya
 (3) Garis cetak tebal menunjukkan jalur pengaruh signifikan dan garis putus-putus nonsignifikan

Berdasarkan Tabel 5.22 dan Gambar 5.1 diperoleh hasil pengujian hipotesis secara parsial masing-masing jalur langsung (*direct effect*) menggunakan *t test* pada analisis jalur dipresentasikan dengan *p value* sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis 1

Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa struktur uang beredar berpengaruh terhadap struktur ekspor adalah diterima.

Berdasarkan hasil analisis jalur, diperoleh koefisien jalur pengaruh langsung struktur uang beredar terhadap struktur ekspor sebesar 0,725 dengan p value = 0,000, memiliki tanda positif dan berpengaruh signifikan. Hal ini mengandung arti bahwa jika jumlah uang beredar meningkat sebesar Rp 1 milyar, maka akan diikuti oleh peningkatan nilai ekspor sebesar 0,725 juta US \$.

2. Pengujian Hipotesis 2

Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa struktur uang beredar berpengaruh terhadap struktur devisa adalah ditolak.

Berdasarkan hasil analisis jalur, diperoleh koefisien jalur pengaruh langsung struktur uang beredar terhadap struktur devisa sebesar -0,164 dengan p value = 0,456, memiliki tanda negatif dan berpengaruh nonsignifikan.

3. Pengujian Hipotesis 3

Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa struktur uang beredar berpengaruh terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja adalah diterima.

Berdasarkan hasil analisis jalur, diperoleh koefisien jalur pengaruh langsung struktur uang beredar terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sebesar -0,831 dengan p value = 0,001, memiliki tanda negatif dan berpengaruh signifikan. Hal ini mengandung arti bahwa jika jumlah uang beredar meningkat sebesar Rp 1 milyar, maka akan diikuti penurunan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan sebesar 0,831 persen.

4. Pengujian Hipotesis 4

Hipotesis 4 yang menyatakan bahwa struktur ekspor berpengaruh terhadap struktur devisa adalah diterima.

Berdasarkan analisis jalur, diperoleh koefisien jalur pengaruh langsung sebesar 0,923 dengan $p \text{ value} = 0,000$, memiliki tanda positif dan berpengaruh signifikan. Hal ini mengandung arti bahwa jika nilai ekspor meningkat sebesar 1 juta US \$, maka akan diikuti oleh peningkatan jumlah devisa sebesar 1 juta US \$.

5. Pengujian Hipotesis 5

Hipotesis 5 yang menyatakan bahwa struktur devisa berpengaruh terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja adalah ditolak.

Berdasarkan analisis jalur, diperoleh koefisien jalur pengaruh langsung struktur devisa terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja sebesar 0,319 dengan $p \text{ value} = 0,136$, memiliki tanda positif dan berpengaruh nonsignifikan.

6. Pengujian Hipotesis 6

Hipotesis 6 yang menyatakan bahwa struktur ekspor berpengaruh terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja adalah ditolak.

Berdasarkan analisis jalur, diperoleh koefisien jalur pengaruh langsung struktur ekspor terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sebesar -0,043 dengan $p \text{ value} = 0,911$, memiliki tanda negatif dan berpengaruh nonsignifikan.

BAB 6

PEMBAHASAN

BAB 6

PEMBAHASAN

Dalam bab ini dilakukan pemaparan yang mencakup penalaran hasil penelitian baik secara teoritis, empiris maupun nonempiris sehingga dapat menjawab sekaligus menjelaskan rumusan masalah yang diajukan pada Bab 1. Dalam bab ini juga dilakukan perpaduan temuan penelitian dengan hasil penelitian terdahulu dan konsekuensi serta pengembangannya di masa yang akan datang. Di samping itu, dalam bab ini juga dilakukan perumusan teori baru yang dihasilkan dari penelitian ini serta pemahaman terhadap keterbatasan penelitian yang dilakukan sehingga dapat memberikan saran bagi penelitian selanjutnya.

6.1. Pengaruh Struktur Uang Beredar Terhadap Struktur Ekspor

Pada dasarnya kebijaksanaan moneter (*monetary policy*) bekerja pada dua variabel ekonomi utama, yaitu jumlah (tingkat penawaran) uang beredar agregat, serta tingkat bunga. Jumlah uang beredar (*money supply*), yakni jumlah keseluruhan uang tunai yang beredar di masyarakat ditambah dengan total nilai rekening giro yang tersimpan di bank-bank komersial, diyakini memiliki keterkaitan langsung dengan tingkat kegiatan ekonomi.

Peningkatan penawaran uang (penambahan jumlah uang beredar) di masyarakat cenderung merangsang perluasan aneka kegiatan ekonomi karena memungkinkan segenap anggota masyarakat untuk membeli berbagai barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Inilah inti teori kaum monetaris (*monetarist theory*) mengenai kegiatan ekonomi seperti yang telah diuraikan pada Bab 2. Melalui pengendalian pertumbuhan jumlah uang beredar,

maka pemerintah akan dapat mengatur kegiatan perekonomian nasional dari pemerintahan tersebut secara keseluruhan dan sekaligus juga mengendalikan tingkat inflasi.

Pembahasan lain mengenai sektor moneter dikemukakan oleh para ekonom pendukung Keynes (*Keynesian Economist*). Para ekonomi ini pada dasarnya menyatakan bahwa meningkatnya penawaran uang atau jumlah uang beredar akan meningkatkan ketersediaan dana yang dapat dipinjamkan (*loanable funds*). Kelebihan tingkat penawaran dana yang dapat dipinjamkan terhadap tingkat permintaan akan menurunkan suku bunga yang berlaku. Hal ini terjadi karena besar kecilnya suku bunga yang berlaku, maka pengusaha akan memperluas investasinya ketika suku bunga turun dan dana-dana kredit menjadi lebih banyak tersedia. Dengan investasi yang lebih banyak, maka tingkat permintaan agregat akan mengalami kenaikan, dan hal inilah yang akan membawa kegiatan ekonomi secara keseluruhan berada pada tingkat yang lebih tinggi.

Dalam perekonomian makro Indonesia, kebijaksanaan moneter memainkan peranan yang sangat penting dalam upaya-upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi pada saat terjadi kelebihan tingkat permintaan dan lonjakan inflasi serta perluasan aktivitas ekonomi ke arah pertumbuhan ekonomi yang dinamis.

Pelaksanaan kebijaksanaan moneter suatu negara dipastikan berbeda-beda antara suatu negara dengan negara lain termasuk Indonesia karena adanya penyesuaian dengan tujuan yang ingin dicapai serta mekanisme transmisi yang diyakini berlaku pada perekonomian tersebut. Dengan demikian, mekanisme

transmisi kebijaksanaan moneter jalur moneter langsung maupun tidak langsung melalui jumlah uang beredar masih dipandang cukup relevan di Indonesia karena menurut kajian Warjiyo dan Juda yang dikutip Warjiyo dan Solikin (2003: 45): “Bekerjanya mekanisme transmisi kebijaksanaan moneter di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur dan kebijaksanaan ekonomi keuangan, baik di dalam maupun di luar negeri”.

Perkembangan ekonomi suatu negara terkadang mengalami fluktuasi yang pada periode tertentu perekonomian mengalami pertumbuhan pesat dan pada periode lain mengalami pertumbuhan melambat sehingga untuk mengelola dan mempengaruhi perkembangan perekonomian agar dapat berlangsung dengan baik dan stabil, otorita moneter melakukan langkah-langkah yang dikenal dengan kebijaksanaan moneter.

Hakikat kebijaksanaan moneter sebagai jenis tindakan yang mengarah pada tujuan dari kebijaksanaan tersebut dan diperkirakan sangat diperlukan untuk mempengaruhi perekonomian makro Indonesia di masa yang akan datang, dapat diperluas ke dalam beberapa katagori, yakni berupa tuntutan kebijaksanaan moneter (*monetary policy demands*), keputusan kebijaksanaan moneter (*monetary policy decisions*), pernyataan kebijaksanaan moneter (*monetary policy statement*), keluaran-keluaran kebijaksanaan moneter (*monetary policy outputs*) dan hasil akhir kebijaksanaan moneter (*monetary policy outcomes*).

Kebijaksanaan moneter dalam bentuknya yang positif seperti yang diimplementasikan selama ini berlandaskan hukum dan kewenangan yang jelas

untuk mempengaruhi sasaran-sasaran moneter dirumuskan badan otorita yang memiliki wewenang politik ekonomi di bidang moneter.

Sebagai otorita moneter Bank Indonesia memiliki kewenangan mengendalikan besaran moneter secara independen. Pengendalian besaran moneter dapat dilakukan dengan cara mempengaruhi sasaran antara kebijaksanaan moneter secara langsung maupun tidak langsung sehingga tujuan akhir yang diharapkan dari kebijaksanaan tersebut dapat tercapai. Sasaran antara dari kebijaksanaan tersebut adalah jumlah uang beredar dalam perekonomian, baik jumlah uang beredar dalam arti sempit (M1) maupun jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) serta suku bunga.

Akhli-akhli ekonomi klasik menganggap bahwa suku bunga riil tidak dapat dipengaruhi oleh kebijaksanaan moneter karena suku bunga dipengaruhi oleh investasi riil dan tabungan riil. Dengan demikian, dalam melihat mengenai keefektifan kebijaksanaan moneter yang perlu dilihat adalah implikasi dari kebijaksanaan Bank Indonesia mempengaruhi penawaran uang terhadap kegiatan ekonomi dan tingkat harga.

Implementasi kebijaksanaan moneter kontraktif (*contractive monetary policy*) atau proses pelaksanaan keputusan kebijaksanaan moneter kontraktif berlandaskan hukum, undang-undang, perintah-perintah dan atau eksekutif. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian *output* kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan otorita pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok sasaran, dampak nyata yang

dikehendaki, dampak keputusan yang dipersepsikan oleh badan otorita moneter yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian) terhadap tujuan-tujuan yang dicapai.

Dalam kaitannya dengan studi ini, masalah proses perumusan kebijaksanaan moneter kontraktif (*contractive monetary policy formulation*) lebih cenderung untuk memperhatikan implementasi kebijaksanaan dan hasil akhir kebijaksanaan (*monetary policy outcomes*) yang tertuju pada *the movement of choice*, yaitu pemilihan alternatif penurunan jumlah uang beredar sebagai sasaran antara kebijaksanaan moneter.

Jumlah uang beredar di Indonesiadapat tergambar dalam struktur uang beredar dalam arti sempit, luas dan lebih luasi. Struktur uang beredar dalam arti sempit (M1) terdiri dari total posisi jumlah uang beredar dalam bentuk uang kartal (*currency, C*) yang dipegang masyarakat sebagai alat transaksi tunai ditambah dengan uang giral (*demand deposits, DD*) yang mencakup saldo rekening koran/giro milik masyarakat umum yang tersimpan di bank. Sedangkan struktur uang beredar dalam arti luas (M2) terdiri dari total M1 ditambah total posisi jumlah uang beredar dalam bentuk deposito berjangka (*time deposits, TD*), yaitu alat-alat pembayaran yang berfungsi sebagai uang ditambah dengan total posisi uang beredar dalam bentuk simpanan tabungan (*savings deposits, SD*), yaitu berupa saldo tabungan milik masyarakat pada bank-bank, termasuk pula uang tunai di luar bank-bank komersial. Uang beredar dalam arti lebih luas (M3) terdiri dari total posisi M1 dan total posisi M2 serta total posisi uang kuasi, yaitu berupa deposito-deposito berjangka (*time deposits, TD*) ditambah dengan simpanan tabungan

(*savings deposits*), SD) tetapi tidak termasuk asset-asset moneter (*denominated*) dalam unit-unit uang asing.

Dalam studi ini ditemukan bahwa struktur uang beredar, baik jumlah uang beredar dalam arti sempit (M1) maupun jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) serta jumlah uang kuasi (Qm) mengalami kenaikan yang cenderung berfluktuatif dengan pertumbuhan yang relatif stabil sejak periode akhir tahun 1969 sampai dengan periode akhir tahun 2003.

Kenaikan atau penurunan jumlah uang beredar yang terlihat dari struktur perkembangan jumlah uang beredar tersebut lebih disebabkan oleh naik turunnya simpanan valas masyarakat dan naik turunnya simpanan rupiah, terutama simpanan masyarakat dalam bentuk deposito serta sisanya bersumber dari kenaikan uang dalam arti luas berbentuk rupiah. Dari perkembangan ini dengan jelas dapat diketahui bahwa masyarakat sudah dapat melakukan *shifting portfolio* simpanan dari simpanan berdenominasi valuta asing yang terjadi seiring dengan melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Berbagai studi empirik tentang kebijaksanaan moneter selalu dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Di Negara yang sedang berkembang (*underdeveloping country*) seperti Indonesia, kebijaksanaan moneter merupakan satu dari beberapa paket kebijaksanaan stabilisasi ekonomi yang efektif dalam mencapai tujuan mempengaruhi perekonomian agregatif.

Konsisten dengan internal kebijaksanaan stabilisasi ekonomi dalam rangka pencapaian pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional melalui kebijaksanaan moneter, kenaikan dalam jumlah uang beredar (struktur uang

beredar [M1], [M2] dan uang kuasi [Qm]) akan diikuti oleh peningkatan nilai ekspor (migas dan nonmigas) dalam perdagangan internasional Indonesia.

Data empirik dalam periode tahun 1969 – 2003 yang disajikan pada Tabel 5.1 dan 5.3 telah memperkuat konsep tersebut.. Peningkatan yang tajam dalam jumlah uang beredar per periode waktu tersebut diiringi pula dengan peningkatan nilai ekspor. Seiring dengan perkuatan terhadap konsep tersebut, hasil pengujian hipotesis penelitian secara parsial melalui jalur langsung (*direct effect*) yang menggunakan *t test* pada analisis jalur (*Path Analysis*) ditemukan pula bahwa jumlah uang beredar berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai ekspor yang ditandai dengan koefisien sebesar 0,725 dengan $p\ value = 0,000 < \alpha = 0.05$. Hal ini berarti bahwa jika jumlah uang beredar meningkat, maka akan diikuti oleh peningkatan nilai ekspor. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai ekspor dapat diterima karena teruji kebenarannya.

Temuan studi ini ikut memperkuat teori mekanisme moneter Hume dan Michael Mussa dalam Perdagangan Internasional (Lindert, 1994: 512) serta model penelitian yang telah dilakukan Bautista (1981). Dengan demikian temuan studi ini juga membawa implikasi terhadap kebijaksanaan moneter.: **Pertama**, kebijaksanaan moneter ternyata lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan yang dapat direncanakan. **Kedua**, kebijaksanaan moneter pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh otorita moneter, saling berkait serta berpola yang mengarah pada tujuan dan ternyata bukan keputusan yang berdiri sendiri. **Ketiga**, kebijaksanaan moneter berkaitan dengan yang senyatanya

dilakukan oleh otorita moneter dalam bidang tertentu di antaranya seperti perdagangan internasional, pengendalian inflasi, pengaturan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga di pasar uang antar bank. Keempat, kebijaksanaan moneter dapat berbentuk positif maupun negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijaksanaan moneter dapat mencakup bentuk tindakan otorita moneter yang ditujukan untuk mempengaruhi masalah-masalah di sektor moneter dan nonmoneter, sementara dalam bentuknya yang negatif dapat meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat otorita untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam sektor tersebut yang justru tindakannya diperlukan.

Dalam kaitannya dengan ekspor, mekanisme Hume menyatakan bahwa secara kausal kenaikan nilai ekspor selain menaikkan pendapatan nasional melalui proses pelipat uang (*money multiplier*), kenaikan nilai ekspor mempunyai konsekwensi terhadap stok uang beredar demikian sebaliknya. Surplus neraca pembayaran cenderung meningkatkan stok uang yang beredar di dalam negeri. Penambahan suplai uang ini selanjutnya mempunyai pengaruh di pasar uang berupa penurunan tingkat bunga. Menurunnya tingkat bunga selanjutnya akan merangsang pengeluaran investasi yang kemudian, melalui proses pelipat uang (*money multiplier*) meningkatkan permintaan dan pengeluaran agregat.

Seterusnya, pendekatan moneter yang dikembangkan Michael Mussa menekankan pada analisis pasar uang dengan menggabungkan teori neraca pembayaran dan neraca perdagangan yang menyatakan bahwa pengaruh kebijaksanaan moneter (jumlah uang beredar) atas neraca pembayaran internasional dapat memperluas sediaan uang akan memperburuk neraca

pembayaran itu, terutama pada tahap awalnya. Kalau Bank Sentral menawarkan pada bank-bank swasta dalam negeri cadangan tambahan yang dapat dipinjamkan (dengan membeli surat-surat berharga pemerintah di pasar terbuka), bank-bank itu secara khusus akan menanggapi dengan memberi lebih banyak pinjaman untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Dalam proses demikian itu, persaingan di antara bank untuk memberi pinjaman lebih banyak mungkin akan berakibat menurunnya tingkat suku bunga bank. Menurunnya tingkat suku bunga bank akan berpengaruh atas neraca pembayaran luar negeri dalam konteks perdagangan internasional. Sedangkan Model Bautista menyatakan bahwa ekspor merupakan fungsi dari nilai tukar nominal, nilai tukar riil, nilai tukar efektif, variabelitas kedua nilai tukar tersebut serta variabel *Nominal Effective Exchange Rate* (NEER).

Dalam teori kebijaksanaan moneter, jumlah uang beredar merupakan sasaran antara yang sangat penting dan dapat dipakai untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik sehingga sasaran atau target yang telah ditetapkan tercapai. Kondisi yang lebih baik yang dimaksud adalah meningkatnya *output* keseimbangan dan terpeliharanya stabilitas harga khususnya harga-harga komoditas ekspor.

Mengikuti teori perdagangan internasional G. Harberier (Hallet dan Peter, 1999: 180) bahwa dalam skala analisis makro ekonomi, peranan perdagangan internasional akan meningkatkan pendapatan nasional ke arah keseimbangan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Peranan ekspor terutama terlihat dari pengaruh ekspor pada pengeluaran agregat.

Pada hakekatnya sasaran antara kebijaksanaan moneter jumlah uang beredar sangat penting karena dapat dikontrol oleh otorita moneter (Bank Indonesia) sebagai Bank Sentral di Indonesia. Dengan demikian, dalam implementasinya menjadikan Bank Indonesia sebagai *respectable central bank* mempunyai wewenang yang jelas dan tegas untuk menetapkan sasaran moneter di pasar uang dan bank di dalam negeri. Hal ini diperkuat dengan telah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sejak tanggal 17 Mei 1999, yaitu undang-undang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral. Dalam landasan hukum yang baru ini Bank Indonesia mempunyai tujuan yang lebih fokus, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah merupakan sebagian prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Reorientasi sasaran Bank Indonesia tersebut merupakan bagian dari kebijaksanaan pemulihan dan reformasi perekonomian untuk keluar dari krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia.

Sebagai Bank Sentral yang independen, Bank Indonesia diharapkan mampu melaksanakan perannya secara optimal dan bebas tanpa campur tangan pemerintah dan pihak-pihak luar lainnya. Meskipun demikian, dalam melaksanakan tugasnya Bank Indonesia tetap mempunyai hubungan kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pengawas Keuangan (BPK), dan Pemerintah.

Sebelum adanya Undang-Undang Independensi Bank Indonesia tersebut, pemerintah sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah upaya perbaikan dan

pemulihan sektor moneter dan sektor nonmoneter dalam perekonomian makro Indonesia. Serangkaian deregulasi di sektor moneter dan perbankan telah dilakukan oleh pemerintah, terutama melalui paket-paket kebijaksanaan Juni tahun 1983, yang kemudian disusul dengan paket deregulasi Oktober tahun 1986 dan paket Oktober tahun 1988 serta pekat Januari 1990 dan intervensi Kurs Rupiah yang dilakukan sejak September tahun 1992 hingga Agustus tahun 1997. Kombinasi antara deregulasi Juni tahun 1983 dengan paket Oktober tahun 1988 yang telah dilakukan pemerintah pada saat itu ternyata telah berdampak positif bagi proses pendalaman finansial (*financial deepening*) di Indonesia. Indikasi adanya perbaikan kedalaman finansial (*financial depth*) ini dapat dideterminasi dari rasio M2 terhadap *gross domestic product* (GDP). Peningkatan rasio tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat di Indonesia sudah semakin banyak menggunakan jasa lembaga keuangan (perbankan) dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari. Dengan demikian semakin tinggi rasio M2 terhadap GDP, berarti semakin tinggi pula derajat monetisasi yang dicapai oleh sektor moneter di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, setiap transaksi ekonomi moneter yang dilakukan oleh masyarakat selalu berhadapan dengan dua pelaku utama perdagangan, yaitu importir dan eksportir. Secara implisit disyaratkan bahwa jumlah uang yang dibayarkan oleh importir dipastikan sama jumlahnya dengan jumlah uang yang diterima oleh eksportir pada periode transaksi tersebut. Hal ini berlaku juga untuk perekonomian Indonesia yang menganut struktur perekonomian terbuka, nilai dari komoditas yang diimpor oleh

negara pengimpor dipastikan akan sama juga dengan komoditas yang diekspor pada periode tertentu.

Dengan menderivasi formula moneter ekonom klasik Irving Fisher (1867-1947) secara kualitatif (tanpa operasi matematis) dapat dijelaskan kembali bahwa nilai komoditas yang diekspor ternyata sama dengan volume transaksi yang terjadi (T) dikalikan harga rata-rata dari komoditas tersebut (P). Di lain pihak nilai dari komoditas yang ditransaksikan itu dipastikan pula sama dengan volume uang yang ada dalam masyarakat (M) dikalikan beberapa kali rata-rata uang bertukar atau rata-rata “pertukaran” uang dalam periode tersebut (VT). Dalam struktur perekonomian makro, VT atau “*transaction velocity of circulation*” adalah variabel yang besarnya ditentukan oleh faktor-faktor kelembagaan yang ada dalam struktur perekonomian tersebut, dan dalam jangka pendek (*in the short run*) dianggap konstan. T atau volume transaksi komoditas ekspor dalam periode tertentu ditentukan oleh tingkat *output* riil dikali dengan tingkat harga (P). Dengan kata lain, dalam keseimbangan, jumlah uang beredar yang digunakan dalam seluruh kegiatan transaksi ekonomi (MV) sama dengan jumlah *output* riil yang dihitung dengan harga yang berlaku, yang ditransaksikan (PT).

Formula moneter ekonom klasik Irving Fisher ($MV = PT$) yang dalam teori ekonomi moneter disebut persamaan identitas (*identity equation*) mempunyai besaran nilai tertentu. Kebijakan moneter yang secara klasik dianut oleh setiap otorita moneter selalu menyesuaikan dengan formula tersebut karena formula ini dapat dipakai sebagai metode analisis yang efektif untuk mengestimasi kecepatan uang beredar dan juga dapat dipakai sebagai metode

untuk mengestimasi kecepatan kenaikan harga secara umum atau inflasi, sekaligus juga sebagai dasar bagi pengembangan teori-teori moneter baru.

Zadjuli (2002) telah mencoba melakukan perhitungan kecepatan peredaran uang di Indonesia dengan menggunakan formula Irving Fisher. Hasil perhitungannya menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan kecepatan peredaran uang sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1999, yaitu dari 10,26 menjadi 8,91 dan meningkat lagi menjadi 9,14 pada tahun 2000 atau rata-rata kecepatan sirkulasi 9,05 per tahun. Hal ini terjadi karena dampak dari krisis ekonomi pada dua tahun terakhir, yang oleh pemerintah telah diatasi dengan salah satu cara mencetak atau menambah jumlah uang beredar, sehingga inflasi menjadi 12 kali lipat dari rata-rata tahun sebelumnya.

Dalam perkembangannya, fungsi uang tidak hanya terbatas sebagai alat transaksi yang likuid dan untuk berjaga-jaga serta untuk berspekulasi saja, tetapi di beberapa negara uang dijadikan sebagai komoditas dan alat penjamin, sehingga upaya upaya untuk menjaga stabilitas moneter (melalui pengendalian jumlah uang beredar) dan nonmoneter (perdagangan internasional [ekspor]) merupakan tantangan berat yang dihadapi perekonomian makro Indonesia hingga saat ini terutama pada periode waktu pasca krisis ekonomi. Kebijakan likuiditas ketat atau “uang ketat” (*tight money*) secara efektif mampu menekan tingkat inflasi, namun membawa konsekuensi berupa dampak lain terhadap kenaikan tingkat bunga, padahal tingkat bunga yang rendah diharapkan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi domestik agar terhindar dari resesi ekonomi.

Dalam perekonomian makro Indonesia, kebijaksanaan “uang ketat” (*tight money policy*) yang ditempuh otorita moneter, pada awalnya termasuk hal yang hampir tidak pernah dilakukan sejak deregulasi perbankan pada bulan Juni 1983. Hal ini disebabkan karena arah kebijaksanaan moneter pada saat itu cenderung ekspansif daripada kontraktif mengingat kepentingan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada saat itu. Pada saat itu pula bank-bank umum diberi kebebasan untuk menentukan tingkat suku bunga sendiri, disesuaikan dengan kemampuan dan kepentingan masing-masing. Langkah ini ditempuh agar sektor perbankan beroperasi secara lebih efisien, dan sekaligus memberi dorongan pada pertumbuhan sektor riil.

Meskipun ada sedikit kebijaksanaan moneter yang cenderung kontraktif di pertengahan tahun 1987, namun ditujukan hanya terbatas untuk menghentikan spekulasi pembelian dolar. Kebijaksanaan “uang ketat” (*tight money policy*) dalam jangka panjang menyebabkan tingkat bunga menjadi tinggi, tingkat bunga yang tinggi tidak merespon investasi menjadi turun dan ini merupakan pembenaran terhadap dalil ekonomi yang valid.

Pada saat ini kerangka kerja (*framework*) kebijaksanaan moneter atau implementasi kebijaksanaan “uang ketat” (*tight money policy*) yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia lebih di arahkan pada sasaran antara atau target antara dengan mengurangi jumlah uang beredar dalam masyarakat. Konsekuensi logis yang dipastikan akan muncul dari kebijaksanaan tersebut, yaitu berkurangnya daya beli masyarakat secara agregat terhadap barang dan jasa sehingga pada

gilirannya daya saing beberapa komoditas ekspor terhadap harga secara umum menjadi tinggi.

6.2. Pengaruh Struktur Uang Beredar Terhadap Struktur Devisa

Kaum *Monetaris* memandang bahwa jumlah uang beredar merupakan faktor eksogen tidak terpengaruh kegiatan ekonomi. Sebagai faktor eksogen, jumlah uang beredar hanya berpengaruh langsung terhadap tingkat inflasi dan tidak pada pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian jumlah uang beredar tidak bisa digunakan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi riil.

Kaum Keynesian justru berpandangan sebaliknya dengan menganggap bahwa permasalahan dalam suatu perekonomian pada dasarnya sangat kompleks sehingga tidak hanya uang yang berperan penting dalam mendorong kegiatan ekonomi, tetapi juga variabel-variabel lain. Di sisi lain, kaum Keynesian berasumsi bahwa terjadi sejumlah kekakuan dalam bekerjanya mekanisme pasar dalam perekonomian. Implikasinya adalah bahwa kebijaksanaan moneter dapat dipergunakan secara aktif mempengaruhi naik turunnya kegiatan ekonomi riil secara tidak langsung.

Merujuk pada pandangan kaum moneteris dipastikan bahwa hipotesis nomor dua ditolak. Ditolaknya hipotesis ini dari temuan hasil studi ini didasarkan pada hasil analisis jalur (*Path Analysis*) yang tersaji pada tabel 5.9, dan menemukan bahwa pengaruh langsung jumlah uang beredar terhadap jumlah devisa adalah nonsignifikan yang ditunjukkan oleh $p\text{ value} = 0,456 > \alpha = 0,05$ dengan nilai koefisien jalur sebesar $-0,164$. Dengan demikian temuan ini sekaligus telah menjawab rumusan masalah ke dua pada Bab 1.

Dari hasil temuan studi ini dapat dijelaskan di sini bahwa kenaikan maupun penurunan jumlah uang beredar tidak berpengaruh terhadap kenaikan maupun penurunan jumlah devisa Indonesia, meskipun secara empirik terjadi peningkatan jumlah devisa yang tajam dari periode sebelum krisis (1990-1997) dan setelah periode krisis (1998-2003) khususnya dalam bentuk valuta asing (uang kartal dan uang giral serta surat-surat berharga). Dengan demikian, secara lebih khusus temuan studi ini mengkonfirmasi sekaligus ikut menyokong hasil temuan studi yang telah dilakukan Arief (1991). Dalam studinya dengan menggunakan model Miles ditemukan bahwa kebijaksanaan moneter dalam bentuk devaluasi yang dilaksanakan dalam periode 1970-1984 (devaluasi sebelum 1978 dan devaluasi tahun 1978 itu sendiri) serta menyeluruh tidak menimbulkan dampak positif terhadap posisi transaksi berjalan dalam neraca pembayaran Indonesia.

Temuan studi ini sebenarnya tidak berpretensi menolak pandangan teori moneter *monetarist* dan Keynesian. Jika temuan studi ini benar sekaligus juga membenaran terhadap kedua teori tersebut. Keynesian dalam teori moneter meletakkan pandangannya pada mekanisme transmisi kebijaksanaan moneter tidak langsung melalui angka pelipat uang, yang secara teoritis jika tingkat bunga tinggi, maka masyarakat cenderung menyukai deposito berjangka daripada giro, sehingga nilai proporsi berjangka terhadap giro cenderung makin besar. Perubahan proporsi berjangka terhadap giro akan mempengaruhi jumlah uang beredar dalam arti dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi. *Monetarist* lebih menekankan mekanisme transmisi kebijaksanaan moneter langsung, yaitu adanya

pengaruh langsung antara jumlah uang beredar dengan kegiatan ekonomi dengan anggapan adanya kestabilan dalam permintaan uang.

Bertitik tolak dari hasil temuan studi ini selanjutnya dapat dijelaskan kembali bahwa jumlah uang beredar ternyata bukanlah satu-satunya sasaran antara yang efektif dalam mempengaruhi peningkatan jumlah devisa bila jumlah devisa diperlakukan hanya sebagai “tujuan akhir” jangka pendek kebijaksanaan moneter.

Proses moneterisasi ekonomi Indonesia masih dapat dikatakan belum meluas secara optimal, sehingga kaitan antara sektor moneter dengan sektor riil secara keseluruhan belum seperti yang diharapkan terjadi dalam suatu perekonomian terpadu. Peran sektor moneter sebagai *supply-leading* untuk sektor riil masih belum terbukti secara berarti. Sektor riil masih terkesan lamban dalam merespon berbagai kebijaksanaan moneter yang bersifat ekspansif, sehingga mengesankan bahwa kebijaksanaan moneter belum mampu untuk mendorong ekspansi sektor ini. Dengan demikian pernyataan ini memperkuat dan sekaligus mengkonfirmasi temuan studi ini.

Implikasi dari temuan studi ini adalah masih diperlukan adanya pengujian lebih lanjut pengaruh jumlah uang beredar terhadap jumlah devisa melalui mekanisme transmisi kebijaksanaan moneter tidak langsung untuk menghasilkan beberapa temuan penting mengenai bekerjanya mekanisme transmisi kebijaksanaan moneter di Indonesia terkini.

Secara konseptual dapat ditegaskan kembali di sini bahwa salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh kebijaksanaan moneter adalah mengendalikan jumlah uang beredar untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi agregat yang salah

satu di antaranya peningkatan jumlah devisa Indonesia. Peningkatan jumlah devisa ini hanya akan tercapai melalui mekanisme transmisi kebijaksanaan moneter tidak langsung yang tentunya memerlukan *time lag*, dan dapat pula melalui mekanisme transmisi kebijaksanaan langsung jangka pendek tanpa *time lag* dengan tetap menjaga kestabilan permintaan uang di dalam negeri serta kemampuan menganalisis perilaku pasar luar negeri terhadap permintaan beberapa jenis komoditas ekspor dari Indonesia.

6.3. Pengaruh Struktur Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja

Struktur uang beredar dalam studi ini adalah uang beredar dalam arti luas (M2) yang meliputi perkembangan posisi jumlah uang kartal dan uang giral ditambah dengan uang kuasi yang beredar di dalam masyarakat dalam periode tahun 1969 – 2003.

Dalam studi ini jumlah uang beredar dikaitkan dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan dalam arti luas (pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sub sektor perdagangan besar, hotel dan restoran). Data empirik pada Tabel 5.1 dan Tabel 5.4 memperlihatkan *trend* kenaikan jumlah uang beredar diiringi dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan yang berfluktuatif. Seiring dengan data tersebut, hasil analisis jalur (*Path Analysis*) dalam studi ini memperlihatkan bahwa hasil analisis jalur pengaruh langsung sebesar -0,831 dengan $p \text{ value} = 0,001 < \alpha = 0.05$.

Konsisten dengan rancangan penelitian yang dibangun serta metode analisis yang digunakan untuk mendeterminasi pengaruh jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan tersebut

ternyata telah dapat menjawab masalah sekaligus menguji dan menerima hipotesis nomor tiga yang menyatakan: jumlah uang beredar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan. Hal ini berarti pula jika jumlah uang beredar bertambah Rp 1 milyar, tidak selalu menaikkan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja. Justru yang terjadi adalah sebaliknya, yang dalam studi ini diiringi oleh penurunan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan di Indonesia yang ditunjukkan dengan koefisien sebesar 0,831 persen.

Hasil studi menemukan adanya pengaruh negatif dan signifikan antara jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan di Indonesia meskipun dengan kontribusi yang sangat kecil seperti yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pengaruh langsung hasil analisis jalur (*Path Analysis*).

Berdasarkan hasil analisis tersebut, kondisi itu dapat saja terjadi karena di satu sisi sektor perdagangan merupakan sektor sekunder dan secara faktual pembangunan ekonomi Indonesia masih didominasi oleh sektor primer (sektor pertanian). Dengan demikian pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor ini relatif masih lebih besar dibanding pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan (dalam arti luas). Di sisi lain, tanda negatif pengaruh langsung jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan tenaga kerja adalah rasional bila dikaitkan dengan mekanisme transmisi kebijaksanaan moneter dalam teori kebijaksanaan moneter. Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya pengaruh jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja melalui

mekanisme transmisi kebijaksanaan moneter adalah tidak langsung. Secara teoritis mengikuti mekanisme tersebut pengaruh tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: penambahan atau pengurangan jumlah uang beredar secara langsung berpengaruh pada tingkat inflasi.

Pengujian adanya hubungan kausalitas antara kebijaksanaan moneter dengan stabilitas harga yang diwakili oleh tingkat inflasi sebenarnya sudah dilakukan oleh Arief (1991) dengan menggunakan model Kointegrasi Engle-Granger. Dalam pengujian itu ditemukan adanya hubungan kausalitas dua arah antara kebijaksanaan moneter dengan tingkat inflasi di Indonesia. Artinya jumlah uang beredar memang secara signifikan mempengaruhi tingkat inflasi, namun sebaliknya tingkat inflasi juga berpengaruh terhadap jumlah uang beredar secara positif. Oleh sebab itu, efektivitas kebijaksanaan moneter dalam bentuk pengetatan ekspansi moneter untuk pengendalian inflasi hendaknya tidak dipahami sebagai adanya kelebihan permintaan barang dan jasa, sehingga selanjutnya perlu mengikutsertakan instrumen kebijaksanaan lain yang bersifat nonmoneter dalam pengendalian inflasi.

Meningkatnya inflasi sebagai akibat kenaikan jumlah uang beredar akan menyebabkan jumlah pengangguran menjadi berkurang atau dengan kata lain terjadi peningkatan dalam jumlah penyerapan tenaga kerja meskipun secara persentase terlihat pertumbuhan yang cenderung menurun atau negatif.

Berdasarkan pada temuan studi ini, sepintas mengingkari pandangan kaum Keynesian. Menurut kaum Keynesian kebijaksanaan moneter kurang efektif dalam mengembangkan kegiatan ekonomi dan mengatasi resesi ekonomi serta

pengangguran. Hal ini disebabkan karena menurut kaum Keynesian perubahan suku bunga relatif kecil dan perubahan suku bunga tidak sensitif terhadap pertambahan investasi dan perbelanjaan agregat. Sedangkan kaum moneteris justru menganggap bahwa kebijaksanaan moneter akan menimbulkan efek yang relatif besar dalam mengembangkan kegiatan ekonomi. Hal ini disebabkan karena menurut kaum moneteris kebijaksanaan moneter akan menimbulkan pengaruh yang besar terhadap perubahan suku bunga sehingga akan mendorong investasi sebagai akibat dari perubahan ini. Investasi sensitif terhadap perubahan suku bunga. Dorongan yang besar atas perubahan investasi pada gilirannya akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

Menurut Blomstrom dan Hettne dalam Arief (1998: 28):

“Pemikiran Keynes tersebut kemudian dikenal dalam teori ekonomi makro sebagai Keynesian revolution yang berfokus pada permintaan agregat dan dianggap relevan untuk tujuan stabilisasi jangka pendek dan bukan untuk memecahkan persoalan jangka panjang dalam pembangunan ekonomi”.

Implikasi penting dari hasil temuan studi ini adalah kepada pandangan ahli-ahli ekonomi aliran Keynes yang mengabaikan perubahan harga dalam analisis penentuan keseimbangan perekonomian menguatkan sekaligus memperluas teori ketenagakerjaan yang telah mapan tentang hubungan antara tingkat pengangguran (*unemployment* [dalam pasar tenaga kerja]) dan tingkat inflasi (dari aspek ekonomi makro [pasar barang]) serta tingkat upah nominal (dari aspek makro [pasar tenaga kerja] yang tergambar dalam bentuk Phillips *Curve's*.

Kurve Phillips yang digambarkan pada Bab 2 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara inflasi dengan pengangguran. Kurve tersebut sebenarnya adalah bentuk lain dari penawaran agregat, merupakan pengembangan kurve Phillips sebelumnya (kurve Phillips yang asli). Dalam penawaran agregatif jangka pendek terdapat hubungan positif antara tingkat harga dengan tingkat *output*. Karena inflasi adalah perubahan tingkat harga dan karena tingkat pengangguran berbanding terbalik dengan tingkat *output*, maka terdapat hubungan negatif antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran. Dengan kata lain meningkatnya inflasi akan diiringi oleh meningkatnya pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dalam pasar tenaga kerja.

Dalam menentukan perkiraan inflasi, kurve Phillips sebenarnya dapat digunakan untuk menganalisis pilihan kebijaksanaan (Herlambang dkk., 2001: 205). Asumsi sederhana yang dapat digunakan bahwa inflasi terjadi dalam perekonomian negara karena perekonomian negara tersebut pernah mengalami inflasi. Tingkat inflasi yang terjadi diperkirakan berdasarkan tingkat inflasi sebelumnya. Dalam teori ekonomi konvensional asumsi ini disebut *adaptive expectations*. Dengan menggunakan asumsi ini inflasi tersebut akan bersifat inersial dan ini timbul karena inflasi yang lalu mempengaruhi inflasi tahun sesudah itu dan begitu juga seterusnya. Perkiraan ini mempengaruhi tingkat harga secara umum yang ditetapkan oleh mekanisme pasar. Mengikuti *adaptive expectations* “jika pengangguran berada pada tingkat alami dan tidak ada gegar penawaran, maka harga akan terus meningkat dengan laju yang sama dengan tahun sebelumnya”. Tingkat pengangguran yang rendah menarik inflasi naik. Ini

yang disebut *demand-full inflation* sebab permintaan yang tinggilah yang menyebabkan inflasi ini. Tingkat pengangguran yang tinggi menarik inflasi turun ke bawah karena gegar penawaran. Ini yang disebut *cost-push inflation*.

Perkembangan suatu perekonomian akan menimbulkan perubahan-perubahan yang tidak selalu membawa akibat baik kepada penggunaan tenaga kerja. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam struktur perekonomian Indonesia dewasa ini, usaha-usaha mengembangkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja tidak selalu dapat mewujudkan kesempatan kerja penuh (*fullemployment*) tanpa inflasi karena masih ditemukan adanya ketidak sempurnaan informasi mengenai tersedianya lapangan kerja, ketidak sempurnaan dalam pasar barang dan pasar tenaga kerja. Keadaan ini dikuatkan pula dengan masih ditemukan adanya pengangguran friksional (*frictional unemployment*), pengangguran struktural (*structural unemployment*) dan pengangguran konjungtur (*konjungtur unemployment*) di dalam negeri.

Pengangguran friksional (*frictional unemployment*) atau disebut pula pengangguran normal terjadi karena keinginan para pekerja untuk mencari kerja yang lebih baik. Dalam fenomena ekonomi pengangguran ini terjadi karena permintaan tenaga kerja sama atau melebihi penawaran tenaga kerja dalam pasar tenaga kerja. Kesempatan kerja yang relatif banyak ini mendorong segolongan pekerja untuk keluar dari pekerjaannya yang sekarang untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dari segi pendapatan dan syarat-syarat kerja atau yang lebih sesuai dengan pendidikan dan keakhlian. Sedangkan pengangguran struktural (*structural unemployment*) umumnya terjadi karena akibat modernisasi dalam kegiatan

ekonomi. Perkembangan seperti ini dapat menghambat kegiatan-kegiatan yang sama yang dijalankan secara tradisional dan mengurangi penggunaan tenaga kerja yang banyak. Dengan demikian penggunaan teknologi moderen dalam pembangunan ekonomi, di samping akan meningkatkan produksi dan pendapatan serta menyediakan kesempatan kerja baru, akan mengakibatkan pula pengangguran. Dalam analisis ekonomi, ahli-ahli ekonomi berpendapat kedua jenis pengangguran tersebut tidaklah dianggap sebagai suatu masalah yang serius. Pengangguran konjungtur terjadi karena kemerosotan kegiatan ekonomi yang ditunjukkan oleh pendapatan nasional sebenarnya pada umumnya berada di bawah pendapatan nasional potensial. Apabila pendapatan nasional yang sebenarnya adalah sama dengan pendapatan nasional potensial, perekonomian masih menghadapi masalah pengangguran. Semakin besar perbedaan itu, semakin besar pula pengangguran berlaku. Dengan perkataan lain, “semakin jauh kegiatan ekonomi berada di bawah potensialnya, semakin besar pengangguran yang berlaku” (Sukirno, 2000: 9).

Terkait dengan masalah besar yang dihadapi oleh kondisi pasar tenaga kerja Indonesia tersebut, kebijaksanaan moneter dan ketenagakerjaan merupakan kebijaksanaan yang sangat penting dalam upaya pencapaian peningkatan dan mendorong pertumbuhan penyerapan tenaga kerja ke arah keseimbangan di samping kebijaksanaan makro ekonomi lainnya.

Bertitik tolak dari konsep tersebut dan melalui mekanisme transmisi kebijaksanaan moneter dapat ditegaskan kembali di sini bahwa dampak kebijaksanaan moneter dengan menaikkan atau menurunkan jumlah uang beredar

akan mengakibatkan tingkat bunga mengalami kenaikan atau penurunan sehingga investasi menjadi lebih kecil atau lebih besar yang pada gilirannya turun atau naiknya investasi tersebut akan menurunkan atau menaikkan pertumbuhan kesempatan kerja di pasar tenaga kerja.

Meskipun terjadi silang pendapat antara golongan Keynesian dan monetaris mengenai efektivitas kebijaksanaan moneter dalam mengatasi pengangguran, namun keduanya memiliki argumen untuk membenarkan pendapat masing-masing. Menurut golongan Keynesian kebijaksanaan moneter kurang efektif dalam mengatasi pengangguran, hal ini disebabkan karena perubahan suku bunga relatif kecil sehingga perubahan ini tidak menggalakkan penambahan investasi dan pembelanjaan agregat. Sedangkan menurut golongan monetaris kebijaksanaan moneter akan menimbulkan pengaruh yang besar kepada perubahan suku bunga sehingga pada gilirannya investasi sangat tergalak sebagai akibat perubahan ini. Investasi yang besar memungkinkan menurunkan pengangguran atau menaikkan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja.

6.4. Pengaruh Struktur Ekspor Terhadap Struktur Devisa

Dalam struktur perekonomian terbuka ekspor dijadikan sumber penting sebagai penerimaan devisa suatu negara. Besar kecilnya penerimaan devisa yang bersumber dari ekspor akan berpengaruh terhadap neraca perdagangan dan neraca pembayaran serta pengeluaran agregat. Selanjutnya jumlah devisa yang melebihi pengeluaran agregat akan menunjukkan kondisi dan kemantapan perekonomian suatu negara.

Penelitian yang dilakukan Lembaga Penelitian Ekonomi IBII (2000:12)

menemukan bahwa:

Kontraksi volume perdagangan dunia secara langsung akan menurunkan permintaan barang-barang ekspor Indonesia, sehingga dapat mempengaruhi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Peranan ekspor saat ini menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran secara keseluruhan karena kecenderungan beberapa tahun terakhir ini adalah sisi *current account* menutup defisit neraca pembayaran. Aliran devisa dalam neraca pembayaran sejak krisis 1997 bersumber dari *capital account* dan pada pascakrisis bersumber dari *current account*. Kinerja *current account* pada tahun 2000 masih menunjukkan kecenderungan surplus, sementara *capital account* terus menerus mengalami defisit.

Merujuk pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh lembaga tersebut dan diperkuat dengan data empirik yang tersaji pada Tabel 5.11 mengindikasikan bahwa kontribusi ekspor terhadap penerimaan devisa negara semakin penting, terutama dalam membiayai pelaksanaan pembangunan ekonomi di dalam negeri.

Kontribusi ekspor terhadap penerimaan devisa ditunjukkan dengan kecenderungan meningkatnya nilai ekspor sejak tahun 1969 – 2003 cenderung diiringi dengan meningkatnya jumlah devisa Indonesia dalam kurun waktu yang sama. Hasil analisis jalur (*Path Analysis*) mengkonfirmasi temuan studi ini.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif melalui pendekatan model tersebut ditemukan bahwa variabel nilai ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah devisa dengan besaran koefisien jalur pengaruh langsung sebesar 0,923 dan $p \text{ value} = 0,000 < \alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa jika nilai ekspor meningkat sebesar 1 juta US \$, maka akan diikuti oleh peningkatan jumlah devisa sebesar 0,923 juta US \$. Temuan studi ini telah menjawab rumusan masalah

nomor empat yang menyatakan: apakah struktur ekspor berpengaruh signifikan terhadap struktur devisa Indonesia? Dengan demikian temuan studi ini juga menguatkan sekaligus menyokong teori Emery tentang peranan ekspor dalam pembangunan ekonomi dengan mengatakan bahwa terdapat korelasi yang tinggi antara perkembangan ekspor dan perkembangan ekonomi di 50 negara tempat penelitian, meskipun dalam kondisi ekonomi yang sangat berbeda dengan kondisi ekonomi Indonesia pada decade tahun 1953-1960.

Dalam studinya, Emery juga menemukan bahwa kenaikan ekspor sebesar 2,5 persen akan menciptakan kenaikan tingkat pendapatan per kapita sebesar 1 persen dan factor keberhasilan sektor perdagangan luar negeri (ekspor) dalam mendorong pembangunan ekonomi negara sedang berkembang (melalui penerimaan devisa) bersumber dari dua faktor berkaitan. Dua faktor berkaitan dimaksud, yaitu perkembangan struktur perekonomian dan strategi perdagangan internasional yang ditetapkan oleh masing-masing negara yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil studi tersebut mengindikasikan bahwa teori Emery ini dapat dijadikan landasan ilmiah untuk pengembangan lebih lanjut ke arah pengembangan teori struktur perdagangan internasional dalam hubungannya dengan struktur ekonomi sektoral.

Selanjutnya dari hasil studi empirikal ditemukan pula bahwa struktur ekonomi sektoral berperan terhadap perdagangan luar negeri Indonesia. Jika nilai tambah ekonomi sektoral atau Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat, maka akan diikuti pula oleh peningkatan impor yang lebih besar. Peningkatan impor yang lebih besar cenderung membawa konsekuensi penerimaan devisa neto

menjadi negatif atau defisit yang terlihat pada transaksi berjalan dalam komposisi neraca pembayaran luar negeri Indonesia. Surplus ekonomi yang mengalir ke luar negeri menjadi semakin besar, yang menurut Arief (1993:103): “Ada defisit transaksi berjalan dalam neraca pembayaran tersebut sebenarnya merupakan tabungan luar negeri (*foreign savings*) yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional di dalam negeri”.

Perkembangan pembangunan ekonomi suatu negara khususnya perkembangan perdagangan internasional suatu negara tergantung pada perubahan struktur ekonomi dan strategi perdagangan internasional negara yang bersangkutan. Perubahan struktur ekonomi dan strategi perdagangan internasional secara konseptual seperti yang ditunjukkan oleh Such dan Ignacy dalam “*International trade and stage of economics development*” yang kemudian dikembangkan oleh B.S. Muljana dan dikutip oleh Zadjuli (2004) menyatakan bahwa ada 5 tahap struktur ekonomi suatu negara dilihat dari komposisi ekspor dan impor.

Dalam tahap I, perekonomian berada dalam tahap stagnasi atau tahap statis. Dalam tahap ini industri belum berkembang, barang yang dihasilkan berupa barang konsumsi atau jasa pertanian serta bahan mentah atau mineral ekstraktif, sedangkan impornya berupa barang-barang konsumsi dari hasil industri dan barang-barang mewah dari negara industri.

Dalam tahap II, struktur perekonomian dan komposisi ekspor suatu negara masih tetap, tetapi komposisi impornya telah bertambah dengan barang-barang modal untuk industri ringan dan bahan antara/barang setengah jadi.

Tahap III, yaitu tahap di mana struktur ekonomi suatu negara komposisinya telah bertambah, konsumsi barang-barang mewah telah menjadi semakin meluas dan sebagian telah diproduksi sendiri. Di samping itu, telah terdapat pula industri yang menghasilkan bahan setengah jadi, tetapi dilain pihak dalam struktur ekonomi agraris berkurang intensitasnya. Ekspor telah bertambah dalam bentuk bahan setengah jadi dan barang konsumsi hasil industri serta komposisi impornya juga bertambah dengan impor barang-barang untuk keperluan industri berat.

Tahap IV, yaitu tahap dimana struktur perekonomian suatu negara telah berkembang dengan telah dapat diproduksinya barang-barang kapital ringan. Komposisi ekspornya yang semula berasal dari hasil pertanian dan ekstratif telah tidak ada lagi tetapi telah bertambah dengan ekspor barang-barang ringan dan industri. Meskipun komposisi impor tetap tidak berubah masih seperti tahap III, namun kuantitas dan kualitasnya telah berubah.

Tahap V, yaitu tahap di mana struktur ekonomi suatu negara telah berubah menjadi struktur ekonomi negara industri. Peralatan/mesin-mesin untuk industri berat telah dapat dihasilkan sendiri. Komposisi ekspor dan impornya menjadi sama. Dalam sektor ekspor telah dapat pula diekspor mesin-mesin/peralatan berat. Dalam tahap ini sulit dibedakan antara kepentingan/kebutuhan pokok, pelengkap dan mewah sebab masyarakat telah memiliki semua peralatan tersebut dan memang telah menjadi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan diperlukan dana yang cukup besar. Oleh sebab itu, penerimaan yang bersumber

dari sektor perdagangan luar negeri (ekspor) sangat strategis peranannya sebagai sumber pembiayaan pembangunan ekonomi atau investasi di dalam negeri, baik investasi pemerintah maupun investasi pihak swasta.

Terkait dengan kegiatan investasi di Indonesia, sumber dana untuk investasi di dalam negeri masih terbatas jumlahnya, sehingga masih diperlukan dana yang berasal dari luar negeri sebagai pelengkap, antara lain dalam bentuk penanaman langsung modal asing (*foreign direct investment*). Salah satu faktor yang paling penting untuk menarik investor asing menanam modalnya di Indonesia adalah melalui sistem devisa bebas, karena sistem ini dapat menjamin kemudahan usaha menyangkut pemilikan dan penggunaan devisa. Sistem ini juga akan menimbulkan kesan positif dari para investor, baik investor asing maupun domestic terhadap keadaan umum perekonomian suatu negara, karena biasanya suatu negara akan melakukan pengawasan devisa bila keadaan perekonomiannya mulai memburuk. Disamping itu, sistem ini juga dapat mendorong kegiatan ekspor, karena eksportir yang bersangkutan dapat menggunakan devisa hasil ekspor sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, hal penting untuk dicermati bahwa sistem devisa bebas dapat membuka peluang bagi pemilik modal domestic untuk menanamkan modalnya di luar negeri sehingga dapat mengurangi dana yang tersedia di dalam negeri. Meskipun demikian, pemasukan dana luar negeri dapat pula dilakukan dalam bentuk pinjaman luar negeri oleh pemerintah ataupun pihak swasta, yang dalam pelaksanaannya dapat dikontrol secara ketat agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaannya.

Dana pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipakai untuk membiayai proyek-proyek pembangunan prasarana serta proyek-proyek lainnya yang dapat mendorong kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Dengan peningkatan kegiatan investasi yang dilakukan pemerintah, maka kegiatan dan usaha pihak swasta juga akan dapat ditingkatkan.

Penurunan penerimaan pemerintah dalam negeri sebagai akibat dari berkurangnya penerimaan minyak bumi dan gas alam akan berakibat terhadap berkurangnya tabungan pemerintah. Dengan demikian, investasi yang dilakukan pemerintah dari sumber dana dalam negeri juga akan berkurang. Jika tingkat investasi yang telah dilakukan ingin tetap dipertahankan, maka penurunan dana dalam negeri tersebut biasanya diupayakan diimbangi dengan peningkatan pinjaman luar negeri. Hal yang perlu dicermati di sini adalah bahwa masalahnya tidaklah semudah itu. Peningkatan pinjaman luar negeri pemerintah dapat membawa konsekuensi-konsekuensi serius untuk masa-masa yang akan datang, khususnya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan neraca pembayaran Indonesia.

Dalam kaitannya dengan masih beratnya tantangan untuk meningkatkan ekspor, maka *debt service ratio* yang merupakan perbandingan dari jumlah devisa untuk pembayaran bunga dan cicilan pinjaman luar negeri dalam satu tahun dengan jumlah penerimaan devisa hasil ekspor dalam periode yang sama akan semakin meningkat. Dengan demikian terjadi devisa gap versus pinjaman luar negeri, penurunan penerimaan pemerintah dalam negeri tidak begitu saja dapat ditutupi dengan peningkatan pinjaman luar negeri.

Arus sumber-sumber keuangan internasional suatu negara umumnya diwujudkan dalam dua bentuk, yakni (1) penanaman modal asing yang dilakukan pihak swasta (*private foreign investment*) dan investasi *portfolio*, terutama berupa penanaman modal asing (PMA) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, dan 2 (2) bantuan pembangunan resmi pemerintah dan swasta (*public development assistance* atau bantuan/pinjaman luar negeri [*foreign aid*]) yang berasal dari pemerintah negara secara individual atau beberapa pihak negara secara multilateral, melalui perantara lembaga keuangan atau bias dari lembaga-lembaga independent maupun swasta (Todaro, 2000: 156-157).

Menurut Purwanto dalam Yustika (2005): “Arus modal ke Indonesia yang menganut sistem ekonomi terbuka berujud investasi langsung (*foreign direct investment*, FDI), deposito asing pada bank-bank komersial nasional (*foreign deposits*, FD), dalam bentuk pinjaman (utang), baik swasta maupun pemerintah, dan investasi dalam pasar uang dan pasar modal dalam negeri”.

Dalam perkembangannya pinjaman luar negeri pemerintah sangat terbatas. Dibanding dengan tahun 2000, pinjaman pemerintah dari IGGI US \$ 2.420 juta dan dari non-IGGI US \$ 3.070 juta, sedang pada tahun 2001 pinjaman tersebut masing-masing hanya mencapai US \$ 1.963 juta dan US \$ 3.774 (Lembaga Penelitian Ekonomi IBIL, 2002b: 151). Oleh sebab itu, perlu pula dicermati kemungkinan peningkatan pinjaman luar negeri swasta untuk membiayai kegiatan investasi maupun mendorong ekspor Indonesia karena selama ini pemerintah telah memberikan peluang yang cukup besar kepada pihak swasta untuk memperoleh pinjaman luar negeri.

Berdasarkan Laporan Tahunan Bank Indonesia tahun 2002, pemasukan modal swasta (bersaih) sampai dengan tahun 2001 mengalami penurunan US \$ - 8.252 juta dan ini lebih tinggi dari satu tahun sebelumnya (2000), yaitu US \$ - 9.990 juta (Lembaga Penelitian Ekonomi IBII, 2002b:151).

Dari pihak swasta keinginan untuk memperoleh pinjaman luar negeri diduga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti: perbedaan suku bunga dalam dan luar negeri, tingkat inflasi dalam dan luar negeri serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Seterusnya, pada akhir Orde Baru posisi hutang luar negeri Indonesia sekitar US \$ 120 milyar. Kemudian pada tahun 2002 masih sekitar US \$ 145 milyar dan turun menjadi US \$ 143 milyar pada tahun 2004. Hutang ini belum termasuk hutang dalam negeri yang sekitar Rp 450 trilyun, sehingga jumlah seluruh hutang Indonesia berjumlah Rp 1.650 trilyun dari hutang luar negeri sekitar Rp 1.200 trilyun (Zadjuli, 2004).

Dalam konteks perdagangan internasional Indonesia, pada dasarnya kebijaksanaan ekspor dan impor bertujuan untuk mencapai keseimbangan neraca pembayaran yang dapat menunjang pembangunan ekonomi dalam negeri. Terkait dengan pembangunan ekonomi dalam negeri tentunya memerlukan banyak dana dan barang-barang modal serta bahan baku yang berasal dari luar negeri, maka secara khusus peranan impor barang-barang modal dan bahan baku menjadi penting. Untuk membiayai impor tersebut tentunya diperlukan devisa. Dengan demikian, semakin besar kegiatan pembangunan yang dilakukan, semakin besar pula kebutuhan akan devisa tersebut.

Peranan ekspor sebagai penghasil devisa yang berasal dari luar negeri akan sangat menentukan. Selain sebagai penghasil devisa, kegiatan ekspor mempunyai pengaruh yang cukup besar pula terhadap perekonomian lainnya di dalam negeri. Kebijakan yang di arahkan dalam rangka peningkatan ekspor yang berasal dari dalam negeri sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai cara dan kebijaksanaan seperti penurunan/penghapusan pajak ekspor, pemberian subsidi baik dalam bentuk pemberian sertifikat ekspor maupun pemberian kredit ekspor dengan bunga yang rendah, imbal beli (*counter purchase*), peningkatan dan pengawasan mutu, penyederhanaan prosedur ekspor, serta melalui kebijakan lalu lintas devisa dan nilai tukar.

Perkembangan terakhir ini menunjukkan bahwa selain komoditas migas, peranan komoditas nonmigas sangat besar terhadap pembentukan nilai total ekspor Indonesia. Sektor ini telah mampu menunjukkan peran gandanya sebagai sektor penyeimbang karena dalam jangka panjang ketergantungan terhadap ekspor komoditas migas sebagai andalan tunggal dalam perdagangan luar negeri Indonesia akan semakin berkurang. Di samping itu komoditas migas merupakan sumberdaya ekonomi yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*). Sehingga tahun 1980-an merupakan tahun awal dari upaya Indonesia ke arah pengembangan ekspor nonmigas sebagai sumber penting penerimaan devisa negara.

Dalam perekonomian yang menganut struktur perekonomian terbuka, kinerja ekspor nonmigas Indonesia dan peranannya sangat besar ditingkat ASEAN. Hal ini mengisyaratkan bahwa Indonesia termasuk katagori kelompok

negara berbasis ekspor nonmigas terbesar di antara negara-negara ASEAN. Sehingga tahun 1980-an merupakan tahun awal dari upaya Indonesia kearah pengembangan ekspor nonmigas sebagai sumber penting penerimaan devisa negara.

Perkembangan ekspor nonmigas Indonesia yang pesat tersebut ternyata tidak terlepas pula dari besarnya industri manufaktur di dalam negeri. Data empirik menunjukkan lima produk yang nilainya menyumbang hamper separuh dari ekspor manufaktur Indonesia adalah barang-barang listrik, pakaian jadi, kayu lapis, *pulp* dan kertas. Kelima produk ini mewakili ciri khas pembangunan industri manufaktur Indonesia yang mengandalkan keunggulan komparatif dan daya saing tinggi yang diukur dari *Real Effective Exchange Rate* (REER). Di antara kelima produk andalan sektor manufaktur Indonesia tersebut, hanya kayu lapis-lah yang memiliki kandungan impor paling rendah. Keempat produk lainnya membutuhkan *intermediate input* yang harus diimpor dari luar negeri.

Model perdagangan Heckscher-Ohlin (H-0) mengatakan bahwa suatu negara akan melakukan spesialisasi dalam perdagangan internasional berdasarkan dukungan faktor (*factor endowment*) yang ada pada masing-masing negara tersebut. Dukungan faktor ini berupa tenaga kerja, modal listrik, sumberdaya alam dan *human capital*. Oleh karena itu, daya saing dari suatu negara akan ditentukan oleh besar kecilnya dukungan faktor-faktor tersebut. Semakin besar dukungan faktor di suatu negara relatif terhadap negara yang lain, semakin tinggi daya saing suatu negara dalam bidang yang mempunyai dukungan faktor yang besar.

Teori-teori klasik dan neoklasik serta teori moderen Heckscher-Ohlin (H-0) mengenai perdagangan internasional yang telah dibahas tersebut sebelumnya memiliki sejumlah kelemahan, terutama yang berkaitan dengan asumsi-asumsinya, antara lain mengenai tenaga kerja yang dianggap sebagai faktor produksi yang dominan dan homogen sifatnya. Namun, kenyatannya menunjukkan bahwa tenaga kerja tidak homogen, melainkan berbeda menurut jenis dan derajat pendidikan atau keterampilan. Selain sumberdaya manusia, teori-teori tersebut juga tidak menganggap pentingnya teknologi. Padahal, faktor yang terakhir ini sangat berpengaruh terhadap pola dan pertumbuhan perdagangan internasional. Karena asumsi-asumsi itu, teori-teori klasik dan neoklasik serta teori moderen Heckscher-Ohlin (H-0) tidak mampu menerangkan perkembangan ekspor nonmigas, khususnya produk manufaktur.

Meskipun teori kelimpahan faktor Heckscher-Ohlin (H-0) memiliki banyak kelemahan, namun teori ini memainkan peranan yang penting dalam khazanah kepustakaan awal di bidang perdagangan internasional dan pembangunan, sehingga secara langsung telah mendorong banyak negara untuk memfokuskan pengembangan aneka komoditas primer sebagai andalan ekspor. Saat ini diyakini secara luas bahwa melalui konsentrasi produksi dan pengembangan ekspor di sektor komoditas primer yang nantinya akan ditukar dengan produk manufaktur.

Jika postulat dari teori Heckscher-Ohlin (H-0) itu benar, maka tidak ada suatu negara yang melakukan pertukaran atas barang-barang yang sama dengan negara lain. Heckscher-Ohlin (H-0) sebenarnya juga tidak berkonklusi demikian

karena kenyataan menunjukkan bahwa negara-negara maju atau negara-negara yang sedang berkembang termasuk negara-negara inter-ASEAN seperti Indonesia saling melakukan pertukaran atas berbagai barang yang diproduksi yang ternyata adalah tidak berbeda atau masih dalam katagori yang sama. Kenyataan ini jelas merupakan kontradiksi terhadap postulat dari teori perdagangan Heckscher-Ohlin (H-0) tersebut, dan menerima *Leontif Paradox* serta pemikiran dari teori perdagangan baru: tesis Prebisch-Singer (*Prebisch-Singer thesis*) dan Porter serta model alternatif perdagangan internasional.

Leontif Paradox menyatakan bahwa struktur perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) Amerika Serikat bertentangan dengan teori Heckscher-Ohlin (H-0). Ekspor Amerika Serikat justru terdiri atas barang-barang yang padat karya/tenaga kerja (*labor intensive*). Sebaliknya impornya terdiri atas barang-barang yang padat modal/kapital (*capital intensive*).

Jika dikaji lebih lanjut, Leontif Paradox sebenarnya tidaklah sepenuhnya bertentangan dengan teori Heckscher-Ohlin (H-0) karena penyelidikan empiris yang dilakukan Leontif terhadap struktur perdagangan luar negeri Amerika Serikat pada tahun 1947 yang lalu justru terdiri dari barang-barang yang padat karya/tenaga kerja (*labor intensive*). Amerika Serikat memang lebih banyak tenaga kerja terdidik (*skill labor*) dibanding negara-negara lain sehingga ekspornya lebih banyak terdiri dari barang padat karja/tenaga kerja terdidik. Sebaliknya, impornya terdiri dari barang-barang yang padat modal/kapital (*capital intensive*). Jadi penemuan Leontif dalam batasan tertentu justru sesuai dan mendukung teori Heckscher-Ohlin (H-0) tersebut.

Prebisch-Singer thesis menyatakan bahwa nilai tukar perdagangan negara-negara Dunia Ketiga akan terus menurun akibat rendahnya elastisitas permintaan komoditas primer terhadap perubahan pendapatan (pihak importir) dan harga. Dalam jangka panjang, hal tersebut mengakibatkan berlangsungnya transfer perdagangan dari negara-negara miskin ke negara-negara kaya, di mana hal ini hanya bisa dicegah melalui usaha pengembangan dan perlindungan sektor manufaktur domestik di negara-negara berkembang agar memiliki industri manufaktur sendiri, melalui proses yang dikenal sebagai strategi industrialisasi substitusi impor.

Prebisch mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang secara sektoral, yaitu dalam hal ini antara daerah perkotaan dan pedesaan di negara-negara sedang berkembang telah menimbulkan urbanisasi premature (*premature urbanization*). Bersamaan dengan ini terjadi pula deformasi struktural (*structural deformation*) dalam proses ekonomi. Tenaga kerja yang berpindah ke daerah perkotaan yang mengalami proses pertumbuhan yang tinggi, tidak dapat ditampung secara berarti dalam sektor industri.

Seiring dengan pendapat Prebisch tersebut, Singer melontarkan kritik terhadap pemikiran bahwa perdagangan internasional yang bebas akan menimbulkan efek pembangunan kepada negara-negara sedang berkembang. Pembagian kerja internasional (*International division of labour*) mengakibatkan negara-negara yang belum berkembang memproduksi dan mengekspos bahan-bahan mentah dan negara-negara maju yang disebutnya sebagai negara-negara pusat (*centres*) memproduksi produk-produk manufaktur. Kenyataan

menunjukkan bahwa nilai tukar (*term of trade*) ke dua jenis produk ini senantiasa merosot atau kerugian negara-negara terbelakang.

Dalam upaya meningkatkan keunggulan kompetitif suatu negara dalam perdagangan internasional, menurut Porter hal yang harus dimiliki oleh suatu negara adalah terutama teknologi, tingkat kewirausahaan yang tinggi, tingkat efisiensi atau produktivitas yang tinggi, kualitas tinggi dari produk yang dibuat, promosi yang luas dan agresif, pelayanan purna jual (*service after sale*) yang baik, tenaga kerja dengan keterampilan/pendidikan, etos kerja, disiplin, komitmen, kreativitas dan motivasi yang tinggi, proses produksi mempunyai skala ekonomis, differensiasi produk. Modal dan prasarana serta sarana lainnya yang cukup, jaringan distribusi di dalam dan terutama di luar negeri yang luas dan diorganisasikan serta dikelola secara profesional. Proses produksi dilakukan dengan *system just-in-time* (JIT). Faktor-faktor keunggulan kompetitif ini saat ini semakin penting, terutama di pasar internasional dengan persaingan yang semakin tidak sempurna.

Pemikiran Porter ini dianggap sebagai suatu paradigma baru mengenai persaingan dalam perdagangan internasional dan globalisasi karena luas bahasannya pada daya saing bangsa/nasional dan keunggulan kompetitif bukan hanya pada daya saing produk dan keunggulan komparatif. Meskipun demikian pemikiran Porter ini tidak tanpa kelemahan karena tidak memasukkan peran pemerintah yang sangat penting dalam menentukan daya saing suatu negara.

Model alternatif yang menganggap peran pemerintah sangat penting menentukan keunggulan komparatif diperluas oleh Moon menjadi model berlian

ganda yang digenerasikan sehingga dapat diterapkan pada semua negara, baik negara sedang berkembang maupun negara yang sudah maju. Model yang digenerasikan ini secara formal mencakup kegiatan perusahaan multinasional.

Beritik tolak dari perluasan pemikiran dari teori perdagangan baru: Prebisch-Singer (Prebisch-Singer *thesis*), Porter dan Moon serta model alternatif perdagangan internasional dan Leontif *Paradox* seperti yang telah diuraikan sebelumnya adalah bahwa suatu negara yang akan melakukan spesialisasi dalam perdagangan internasional tidak hanya berdasarkan dukungan faktor (*factor endowment*) saja tetapi ditentukan pula oleh peranan pemerintah serta volume dan harga komoditas yang diperdagangkan, kandungan teknologi yang terdapat dalam masing-masing produk dan kemampuan produk tersebut menciptakan konveniensi terhadap penggunaannya. Konveniensi bersama harga, kemudian akan menentukan ke arah mana kecondongan preferensi konsumen bergerak, sehingga akibatnya adalah muncul permintaan atas barang-barang tersebut di berbagai pasar internasional yang memungkinkan terjadinya perdagangan.

Dalam model tersebut kemampuan bersaing suatu negara didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan-perusahaan di negara tersebut dalam menciptakan produk atau nilai tambah (NT) berkesinambungan dalam persaingan internasional (Tambunan, 2004: 97).

Di Indonesia nilai tambah (NT) berasal dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta

jasa lainnya. Aktivitas ekonomi yang baik adalah aktivitas ekonomi yang dapat menghasilkan nilai tambah, $NT > 0$. Persentase terbesar sumbangan ekonomi sektoral terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah berasal dari nilai tambah (NT) sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan.

Berdasarkan studi empirik diketahui bahwa persentase terbesar sumbangan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap ekspor adalah lebih kecil impor. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur ekonomi sektoral berperan terhadap perdagangan luar negeri. Jika nilai tambah ekonomi sektoral atau Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat, maka akan diikuti oleh peningkatan impor yang lebih besar. Oleh sebab itu nilai ekspor neto ($X - M$) semakin kecil jika pendapatan nasional meningkat. Seterusnya jika ($X - M$) positif berarti ($C + I + G$) lebih kecil dari pendapatan nasional, implikasinya bahwa suatu negara menghasilkan lebih banyak dari yang digunakan sehingga kelebihanannya dijual di luar negeri. Sebaliknya, jika ($X - M$) negatif berarti negara itu pengeluarannya lebih besar dari pada yang dihasilkan. Dengan demikian, jelaslah bahwa suatu negara akan bisa meningkatkan neraca perdagangannya dengan cara meningkatkan produksi nasionalnya lebih besar dari penggunaannya, berarti pula terjadi penghematan penggunaan cadangan devisa.

Peran penyeimbang pendapatan nasional dilihat dari sisi impor adalah *aggregate savings* dan *taxes*, sedang dari sisi ekspor adalah *investment* dan *government expenditure*. Oleh sebab itu, peranan kebijaksanaan fiskal sangat penting diperhitungkan di sini apabila strategi perdagangan internasional dipolakan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Peranan kebijaksanaan fiskal sebagai perbelanjaan otonom menentukan pengeluaran pemerintah pada tahun-tahun tertentu. Setiap perekonomian mengutip pajak dan pungutan-pungutan lainnya dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dalam rangka mendorong percepatan pembangunan ekonomi di masa depan.

Seperti halnya dengan investasi dan pengeluaran pemerintah, ekspor juga digolongkan sebagai pengeluaran otonom oleh karena pendapatan nasional bukanlah penentu penting dari tingkat ekspor yang dicapai suatu negara. Daya saing di pasaran luar negeri, keadaan ekonomi di negara-negara lain, kebijaksanaan proteksi di negara luar dan nilai tukar (kurs valuta asing) merupakan faktor utama yang akan menentukan kemampuan suatu negara mengekspor ke luar negeri.

Jika dilihat dari sisi moneter, kebijaksanaan nilai tukar (kurs valuta asing) tidak hanya mencakup masalah stabilitas ekonomi makro, tapi juga besar pengaruhnya terhadap insentif ekspor dan impor. Apresiasi nilai tukar akan mengurangi daya saing barang ekspor dan meningkatnya impor. Kondisi ini dapat memperburuk neraca perdagangan. Sebagai negara yang utangnya cukup banyak, Indonesia tidak dapat menanggung defisit neraca pembayaran yang terlalu besar.

Selain menjaga nilai tukar pemerintah juga mengupayakan agar tingkat inflasi berada pada tingkat hingga dapat menopang nilai tukar dan tingkat bunga. Tingkat bunga yang kompetitif diperlukan untuk menjaga stabilitas posisi devisa nasional melalui masuknya dana asing, baik melalui *foreign direct investment* (FDI) maupun investasi *portfolio*. Tingkat inflasi yang terkendali juga

memberikan dampak positif terhadap nilai tukar. “Upaya menjaga nilai tukar rupiah berarti menjaga agar barang ekspor bisa kompetitif di pasar internasional” (Haz, 2001: 80).

Ekspor akan memberikan efek yang positif untuk kegiatan ekonomi negara karena merupakan pengeluaran penduduk negara lain bagi barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri. Sedangkan impor akan menimbulkan efek yang sebaliknya, yaitu meningkatnya pengeluaran bagi barang-barang impor. Ini berarti pendapatan yang diterima telah dibelanjakan untuk membeli barang yang diproduksi di negara-negara lain dan mengurangi pengeluaran biaya bagi barang-barang dalam negeri.

Dalam menentukan pengeluaran agregat bagi barang-barang dalam negeri, impor perlu dipertimbangkan karena barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri harus dikurangkan dari keseluruhan pengeluaran agregat yang dilakukan dalam suatu negara. Keseluruhan pengeluaran agregat yang dilakukan dalam suatu negara dapat dihitung dengan menjumlahkan konsumsi agregat dengan investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan ekspor (X). Dalam keseluruhan pengeluaran agregat biasanya nilai impor (M) dimasukkan. Dengan demikian, pengeluaran agregat bagi barang-barang yang diproduksi di dalam negeri dihitung dengan menjumlahkan variabel-variabel tersebut dikurangi impor.

Impor suatu negara juga ditentukan oleh beberapa faktor yang menentukan ekspor, yaitu daya saing negara lain, proteksi perdagangan yang dilakukan serta kurs valuta asing. Walau bagaimanapun faktor-faktor ini bukanlah yang paling penting. Penentu impor yang utama adalah pendapatan nasional suatu negara.

“Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, semakin banyak impor yang akan dilakukan oleh negara tersebut” (Sukirno, 2000: 111).

Dalam upaya meningkatkan devisa dari ekspor, instrumen kebijaksanaan moneter yang berulang kali dipergunakan untuk mengembalikan *external balance* dalam perekonomian Indonesia adalah devaluasi. Pengujian atas efektivitas kebijaksanaan devaluasi terhadap posisi transaksi berjalan dalam neraca pembayaran Indonesia telah dilakukan oleh Arief (1993) dengan menggunakan model Miles. Hasil pengujian ini adalah bahwa sampai dengan tahun 1984, devaluasi sebelum tahun 1978 dan devaluasi tahun 1978 tidak berpengaruh positif terhadap posisi transaksi berjalan. Hal ini disebabkan karena kuatnya penetrasi impor dalam perekonomian Indonesia yang berorientasi ekspor yang ditetapkan oleh pemerintah sejak awal periode pembangunan ekonomi tahun 1970-an.

Dalam teori neraca pembayaran internasional disebutkan bahwa penghasilan devisa suatu negara diikhtisarkan dalam neraca pembayaran (*balance of payment*). *Balance of payment* berguna untuk menunjukkan struktur dan komposisi transaksi ekonomi dan posisi keuangan internasional Indonesia karena dianggap sebagai indikator ekonomi penting dan fundamental yang terdiri dari saldo berjalan (*current account*, CC), saldo neraca lalu lintas modal (*capital account*, CA) dan saldo neraca lalu lintas moneter (*monetary account*, MA).

Neraca pembayaran (*balance of payment*) internasional Indonesia yang menyangkut perdagangan barang (nilai atau volume barang yang keluar/ekspor dan masuk/impor dicatat dalam neraca jasa, khususnya transaksi ekonomi

internasional saja. Jika ekspor lebih besar dari impor, maka saldo neraca perdagangan Indonesia dipastikan positif. Sebaliknya jika impor lebih besar daripada ekspor, maka saldo neraca perdagangan atau jasa dipastikan negatif.

Untuk menutupi defisit neraca pembayaran (gabungan antara defisit neraca modal dan defisit neraca transaksi berjalan), jika memungkinkan dapat dilakukan dengan menguras cadangan internasional (*international reserves*) atau cadangan moneter resmi (nama lain dari cadangan internasional) yang dimiliki negara, seperti emas, beberapa macam mata uang asing terkuat, dan SDR (*Special Drawing Rights*) atau mata uang artifisial buatan IMF. Cadangan internasional (*international reserves*) bagi suatu negara sama fungsinya dengan rekening bank individu. Cadangan ini juga bisa (dan pada kenyataannya memang seringkali) dipakai sebagai suatu agunan atau jaminan untuk menarik pinjaman dari sumber-sumber keuangan di luar negeri. Dengan demikian, saldo pada neraca transaksi berjalan *plus* saldo pada neraca modal harus senantiasa diseimbangkan melalui saldo pada neraca tunai atau cadangan internasional.

Indonesia selalu berupaya memperbaiki neraca pembayarannya dengan memacu investasi (baik investasi asing swasta secara langsung maupun investasi *portfolio*) serta meningkatkan pinjaman dari bank-bank komersial internasional, atau mencari lebih banyak bantuan dari pemerintah asing. Hal yang penting yang harus dicermati adalah investasi dan pinjaman itu sama sekali bukan bantuan cuma-cuma karena pada saat jatuh tempo pinjaman yang harus dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar (adanya faktor bunga dan laba investasi). Pinjaman luar negeri memang bisa mengatasi masalah-masalah neraca pembayaran dalam

jangka pendek, tetapi jangka panjang hal tersebut akan memperbesar beban pembayaran negara.

Teori perdagangan internasional tradisional mengasumsikan bahwa setiap negara bisa menyesuaikan struktur ekonominya terhadap kondisi yang dipengaruhi oleh perubahan harga-harga dan pasar-pasar dunia. Pergerakan kemungkinan produksi mengisyaratkan berlangsungnya relokasi sumber-sumber daya dari satu sektor industri ke sektor-sektor industri lainnya.

Menurut para penganut pendekatan strukturalis, relokasi sumberdaya tersebut tidak jarang mengalami hambatan, terutama bagi negara yang kehidupan ekonominya sejak lama tergantung pada ekspor komoditas primer. “Semakin besar ketergantungan suatu negara terhadap beberapa komoditas primer sebagai sumber pendapatan ekspor, maka semakin tidak fleksibel struktur perekonomiannya dan semakin rapuh terhadap gejolak dan ketidak pastian yang terjadi di pasar-pasar dunia”(Todaro dan Stephen, 2003: 38)

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang pada umumnya komoditas ekspornya sebagian besar terdiri dari bahan mentah atau barang setengah jadi, terutama yang berasal dari sektor pertanian dan pertambangan. Kedua sektor ini masih tetap berperan sebagai *leading sector* dalam penerimaan devisa negara terbesar. Keadaan ini memungkinkan karena: **Pertama**, didukung oleh tersedianya sumberdaya alam yang melimpah serta keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh sektor pertanian dan pertambangan. **Kedua**, terbatasnya penggunaan teknologi tinggi (*high technology*) dalam proses produksi di dalam negeri. **Ketiga**, permintaan pasar luar negeri yang menghendaki impornya dalam

bentuk bahan mentah atau barang setengah jadi yang selanjutnya diproses sendiri menjadi barang jadi sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi negara bersangkutan (negara pengimpor).

Penelitian yang telah dilakukan Lamartine Yate dalam Sukirno (1982: 39) mengenai perkembangan perdagangan luar negeri dunia menunjukkan bahwa peranan negara sedang berkembang dalam perdagangan bahan mentah masih merupakan hal yang sangat penting.

Bentuk bahan mentah atau barang setengah jadi yang diperdagangkan negara sedang berkembang pada umumnya berasal dari barang hasil pertanian dan pertambangan. Permintaan terhadap bahan mentah atau barang setengah jadi tergantung pada keadaan ekonomi negara mitra dagang karena harga barang-barang hasil pertanian dan pertambangan mengalami perkembangan yang sangat lambat. Sebagai akibatnya *terms of trade* di antara barang pertanian dan pertambangan mengalami penurunan disatu pihak dan barang industri pengolahan dilain pihak justru terus menerus mengalami kenaikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa pada tahun 1938 *terms of trade* barang pertanian kalau dibandingkan dengan barang industri adalah kurang lebih $2/3$ dari *terms of trade* di antara kedua barang tersebut pada tahun 1976-1980. Pada periode tersebut, indeks perbandingan harga produksi industri primer dengan industri pengolahan (*manufacturing*) adalah 147, sedangkan pada tahun 1938 indeks itu hanya mencapai 100.

Terjadinya perbedaan indeks harga produksi dan *terms of trade* yang sangat tajam tersebut mengindikasikan keberhasilan dalam pencapaian strategi perdagangan internasional suatu negara. Faktor keberhasilan sektor perdagangan luar negeri (ekspor) dalam mendorong pembangunan ekonomi negara sedang berkembang bersumber dari dua faktor yang berkaitan, yaitu perkembangan struktur perekonomian dan strategi perdagangan internasional yang ditetapkan oleh masing-masing negara yang bersangkutan.

Merujuk pada hasil studi ini, kenyataan yang ditemui di Indonesia membenarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Arief, Lamartine Yate dan Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut. Dengan demikian hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa ketergantungan perkembangan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia kepada perkembangan ekonomi negara-negara lain menjadi semakin penting. Kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi berbagai negara di dunia termasuk di dalamnya negara inter-ASEAN.

Singapura adalah negara yang paling besar peranannya terhadap nilai total ekspor nonmigas inter-ASEAN dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Besarnya nilai total ekspor nonmigas Singapura tidak lepas dari peranan Singapura sebagai negara yang mengekspor kembali (*re-export*) produknya. Dibanding dengan negara pengekspor terbesar inter-ASEAN khususnya Singapura, ternyata Indonesia belum memfokuskan program diversifikasi pasar dan produk nonmigas unggulan secara optimal.

Belum optimalnya program diversifikasi tersebut disebabkan karena kebanyakan komoditas ekspor nonmigas Indonesia masih mengandalkan pada produk-produk *low technology*. Hal ini pula yang membedakan antara Indonesia dengan Singapura dan negara-negara ASEAN lainnya yang telah beralih ke persaingan ekspor produk-produk nonmigas kategori *medium* dan *high technology*.

Menghadapi keadaan demikia, Indonesia selalu tetap berusaha menjaga kestabilan atau keseimbangan neraca perdagangan dan neraca pembayarannya. Upaya yang telah dilakukan selama ini beberapa di antaranya adalah dengan mendorong perkembangan jumlah dan mutu ekspor barang dan jasa dari dalam negeri, meningkatkan aliran masuk modal jangka pendek dan jangka panjang ke dalam negeri sehingga pada gilirannya jumlah devisa yang masuk ke dalam negeri diharapkan meningkat..

Dalam upaya mengembangkan perdagangan luar negeri Indonesia, konsep *external economy* dapat diciptakan dan dirancang untuk merubah ketimpangan-ketimpangan struktural menjadi keunggulan komparatif karena konsep *external economy* dapat dikaitkan dengan strukturalisme.

Menurut Swasono (2005:27): “Secara teoritikal dan empirical *external economy* dapat diciptakan dan dirancang secara struktural melalui perencanaan nasional, suatu rencana restrukturisasi melalui sistem kerjasama (konsolidasi sinergi secara kooperatif), untuk merubah ketimpangan-ketimpangan struktural menjadi keunggulan komparatif.

Era perdagangan bebas AFTA (*Asean Free Trade Area*) sudah berjalan dua tahun ini. Konsekuensinya negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia harus menghilangkan hambatan-hambatan yang ada dalam perdagangan negara-negara inter-ASEAN, seperti hambatan tarif dan nontarif perlu dipertimbangkan dihapuskan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, produktivitas dan daya saing sektor manufaktur yang dinyatakan secara “mengikat” atau *politically binding* dan secara “tidak mengikat” atau *less legally binding*.

Negara-negara yang tergabung dalam AFTA (*Asean Free Trade Area*) ini adalah Indonesia, Brunei, Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Laos-PDR, dan Myanmar. Jika dicermati lebih lanjut, ternyata Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya memproduksi komoditas ekspor nonmigas relatif sama yang sifatnya substitutif karena kesamaan *faktor endowment* dan tingkat penguasaan teknologi, sehingga persaingan inter-ASEAN itu sendiri akan semakin ketat yang ditunjukkan oleh tingkat daya saing komoditas ekspor dari masing-masing negara tersebut.

Dalam konteks pengukuran tingkat daya saing produk ekspor nonmigas ke suatu negara, *Real Effective Exchange Rate* (REER) atau nilai tukar efektif riil merupakan salah satu indeks yang dapat digunakan untuk mengukur daya saing ekspor. Nilai tukar riil merupakan daya beli relatif dari *output* domestik yakni harga produk-produk yang sama di negara-negara ASEAN yang diukur dalam bentuk barang-barang yang diekspor.

Beberapa refensi menunjukkan bahwa indeks *Real Effective Exchange Rate* (REER) terhadap beberapa komoditas nonmigas di Indonesia menunjukkan nilai positif. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat harga umum komoditas ekspor nonmigas Indonesia ternyata relatif murah dibanding tingkat harga umum dari komoditas ekspor yang sama dari negara-negara inter-ASEAN. Berdasarkan pada perkembangan tersebut dapat dipastikan bahwa tingkat daya saing (*price competitiveness*) dari komoditas ekspor nonmigas Indonesia meningkat di pasar ASEAN dan ini berarti pula bahwa peluang Indonesia terhadap penerimaan devisa lebih besar akan menjadi lebih besar pula.

Bertitik tolak dari hasil studi yang telah dilakukan oleh Bautista (1981) menemukan bahwa peningkatan pada nilai tukar efektif riil (*Real Effective Exchange Rate*, REER) akan meningkatkan harga barang ekspor relatif terhadap barang konsumsi dalam negeri, sehingga menyebabkan penawaran ekspor meningkat. Dengan demikian studi ini di samping dapat memperkuat hasil penelitian yang telah dilakukan Bautista, sekaligus juga berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi domestic, pengembangan ilmu dan teori kebijaksanaan moneter serta perdagangan internasional, khususnya dalam upaya pengembangan ekspor nonmigas di Indonesia.

Selanjutnya studi ini juga memberikan peluang yang besar bagi peneliti berikutnya bila ingin melakukan studi yang lebih intensif untuk mengukur hubungan antara *Real Effective Exchange Rate*, REER terhadap daya saing komoditas ekspor Indonesia dengan modifikasi model yang telah terbentuk serta dapat menambah beberapa variabel makro ekonomi yang relevan.

Dalam teori makro ekonomi telah dijelaskan bahwa masalah ketidakstabilan dalam sektor perdagangan luar negeri timbul apabila suatu negara mengimpor secara berlebihan, yaitu impor selalu melebihi ekspor. Impor yang berlebihan cenderung menurunkan nilai mata uang domestik. Perubahan ini menyebabkan harga barang impor semakin mahal dan mempercepat laju inflasi di dalam negeri. Di samping itu, impor yang lebih besar dari ekspor mengurangi perbelanjaan ke barang-barang yang diproduksi di dalam negeri dan keadaan ini dapat mengurangi kegiatan dan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya sumbangan Produk Domestik Bruto (PDB) diduga sangat berarti terhadap naik turunnya nilai impor. Hal ini berarti bahwa struktur ekonomi sektoral berperan terhadap perdagangan luar negeri. Jika nilai tambah ekonomi sektoral atau Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat, maka akan diikuti oleh peningkatan impor yang lebih besar.

Temuan studi tersebut merupakan pembenaran terhadap teori perdagangan internasional yang telah mapan, bahwa variabel impor adalah variabel endogen dan besarnya ditentukan oleh besaran pendapatan nasional, sedangkan ekspor merupakan variabel eksogen atau pengeluaran otonom (*outonomous expenditure*) yang disebut juga variabel kebijaksanaan yang besarnya ditentukan oleh strategi perdagangan luar negeri, perilaku pasar luar negeri, sistem pembayaran luar negeri, hambatan tariff dan nontarif serta perkembangan nilai tukar antar negara mitra dagang.

Peran penyeimbang pendapatan nasional dilihat dari sisi impor adalah *aggregate savings and taxes*, sedang dari sisi ekspor adalah *investment and*

government expenditure. Oleh sebab itu, peranan kebijaksanaan fiskal sangat penting diperhitungkan di sini apabila strategi perdagangan internasional dipolakan untuk meningkatkan pendapatan nasional dan atau meningkatkan jumlah penerimaan devisa.

Dalam konteks perdagangan internasional, upaya peningkatan kinerja ekspor masa yang akan datang sebagai penyumbang terbesar devisa merupakan tantangan yang besar dihadapi oleh perekonomian Indonesia saat ini. Oleh sebab itu, dukungan terhadap implementasi kebijaksanaan dalam sektor perdagangan luar negeri Indonesia sebagai upaya peningkatan jumlah devisa melalui peningkatan peran ekspor sangat diperlukan. Kekurangan dari temuan studi ini memberikan peluang untuk dilengkapi oleh peneliti berikutnya sehingga dapat melakukan kajian lebih lanjut secara komprehensif.

Kajian yang akan dilakukan tersebut hanya akan bermakna bila melibatkan lebih banyak variabel ekonomi yang relevan dan atau mengkolaborasi berbagai metode pengukuran daya saing ekspor di pasar luar negeri berdasarkan kondisi terakhir, sehingga pada gilirannya kajian tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah untuk penentuan strategi perdagangan internasional pada masa yang akan datang.

6.5. Pengaruh Struktur Devisa Terhadap Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (yang terjadi beberapa tahun kemudian setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga

produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan permintaan agregatif dan meningkatkan ukuran pasar domestik. Di sisi lain, penduduk yang besar bisa menjadi beban pembangunan dan dapat menimbulkan problema dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian, penduduk sebagai modal dasar atau beban pembangunan terletak pada kualitas penduduk itu sendiri, bukan pada kuantitas penduduk.

Sebenarnya positif atau negatifnya penambahan penduduk bagi upaya pembangunan ekonomi sepenuhnya tergantung pada kemampuan sistem perekonomian suatu negara untuk menyerap dan secara produktif memanfaatkan tambahan tenaga kerja tersebut. Tenaga kerja bukan hanya penting sebagai subyek yang melakukan segala kegiatan pembangunan ekonomi, tetapi juga penting karena pendapatan atas balas jasa yang diterima dari pekerjaan akan memberikan daya beli (*purchasing power*) dan menimbulkan permintaan efektif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan dalam pembangunan ekonomi.

Terhadap besaran jumlah devisa (*foreign exchange*) yang diperoleh dari aktivitas sektor perdagangan internasional yang secara nyata memperlihatkan bahwa telah mampu dijadikan tumpuan sumber pembiayaan pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam perluasan kesempatan kerja di dalam negeri selama ini.

Perluasan kesempatan kerja dan penggunaan tenaga kerja penuh mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Untuk ini upaya memperbesar devisa dalam rangka perluasan kesempatan kerja, khususnya pada sektor perdagangan melalui berbagai

pendekatan dapat dilakukan secara integratif. Pendekatan yang hingga kini banyak dianut oleh banyak negara adalah pendekatan dari sudut produksi, yaitu melalui cara peningkatan produksi dengan bekerja efisien dan kompetitif sehingga dapat menjual hasilnya pada harga yang bersaing. Meskipun demikian, pendekatan ini harus dilengkapi dengan pendekatan pengembangan pasar domestik dan pasar luar negeri dengan memperlakukan ekspor sebagai sumber devisa negara yang sangat penting.

Studi empirik tentang devisa lebih banyak dikaitkan dengan peranan perdagangan internasional sebagai sumber pembiayaan pembangunan ekonomi. Semakin banyak jumlah devisa yang diperoleh sebagai hasil perdagangan internasional semakin besar pula kemampuan suatu negara dalam membiaya pembangunan ekonominya. Implikasinya terhadap pasar tenaga kerja adalah bahwa perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi akan menjadi semakin besar pula, khususnya pada sektor perdagangan di Indonesia.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel 5.9. diketahui bahwa pengaruh jumlah devisa terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan adalah positif dan nonsignifikan dengan nilai koefisien jalur langsung sebesar 0,319.

Hasil pengujian hipotesis tersebut telah menjawab rumusan masalah ke lima pada Bab 1. Temuan studi ini diperkuat pula dari hasil analisis jalur (*Path Analysis*) yang ditunjukkan oleh $p \text{ value} = 0,136$. Dari hasil temuan studi tersebut dapat disimpulkan bahwa kenaikan maupun penurunan jumlah devisa diikuti

kenaikan maupun penurunan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang nonsignifikan. Tidak signifikannya pengaruh struktur devisa terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja karena devisa itu sendiri diterima oleh investor atau eksportir disimpan dalam bentuk current account dalam pos neraca pembayaran internasional, sehingga tidak dapat langsung mempengaruhi pasar tenaga kerja di dalam negeri.

Meskipun data empirik yang disajikan dalam Tabel 5.11 dan Tabel 5.12 menunjukkan *trend* kenaikan jumlah devisa dalam periode tahun 1969 – 2003 diikuti pula oleh *trend* kenaikan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan yang berfluktuatif. Kenaikan jumlah devisa ini diduga karena peranan *remittances*. *Remittances* yang berasal dari pekerja nasional yang bekerja di luar negeri ikut membantu menutup *gap* defisit devisa Indonesia.

Sir John Maynard Keynes dengan “*The Economics*”-nya sebagai dasar perencanaan untuk mencapai *full employment* dalam sistem kapitalisme, telah menegaskan tidak terjadinya otomatisme pasar atau tidak adanya mekanisme built-in untuk menjaga aggregate effective demand dalam mempertahankan full-employment economy. Pemikiran tersebut memiliki alasan pembenaran, yang menurut Swasono (2005:16): “Karena Keynes tidak melihat kemerosotan *aggregate demand* itu sebagai masalah struktural dalam alokasi sumber-sumber ekonomi”.

Analisis makroekonomi yang dikembangkan oleh Keynes sangat menekankan peranan pemerintah dalam mengatur kegiatan perekonomian sehingga lebih stabil dan selalu menuju ke tingkat kesempatan kerja penuh.

Menurut Keynes tanpa campur tangan pemerintah, yaitu apabila kegiatan perekonomian sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar, bukan saja perekonomian tidak mencapai keadaan tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat dicapai. Justru kondisi ekonomi yang akan terlihat adalah terjadinya fluktuasi kegiatan ekonomi dari periode ke periode berikutnya. Implikasinya adalah kepada kesempatan kerja dan pengangguran serta tingkat harga.

Untuk mengatasi keadaan tersebut, Keynes secara komprehensif mengemukakan pandangannya bahwa kebijaksanaan fiskal sangat diperlukan sebagai salah satu piranti penting untuk mengatasi masalah tersebut, meskipun pandangan ahli ekonomi klasik J.B. Say menyatakan keadaan yang sebaliknya bahwa kesempatan kerja penuh (*full employment*) selalu tercapai karena dalam perekonomian tidak akan timbul masalah kekurangan permintaan agregat. Pengangguran tenaga kerja dapat terjadi dalam setiap perekonomian, namun masalah itu hanya bersifat sementara. Apabila pengangguran betul-betul terjadi, dalam pasar makro ekonomi akan berlaku penyesuaian-penyesuaian yang akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment*) akan tercapai kembali. Pandangan ini didasarkan pada hukum klasik: "*Supply creates its own demand*". "Penawaran menciptakan permintaan sendiri".

Menurut hukum tersebut, penyesuaian-penyesuaian di pasar uang, pasar barang dan jasa serta pasar tenaga kerja akan menyebabkan setiap perekonomian tidak akan menghadapi masalah kekurangan permintaan agregat. Fleksibilitas yang terjadi di pasar tersebut akan menyebabkan terjadinya kesempatan kerja

penuh (*full employment*). Penawaran tenaga kerja dengan sendirinya menciptakan sendiri permintaan tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Kesamaan ini menyebabkan permintaan agregat pada kesempatan kerja penuh akan selalu sama dengan penawaran agregat.

Merujuk pada pendapat aliran klasik tersebut, pemerintah tidak perlu secara aktif melakukan langkah-langkah untuk mengatur kegiatan ekonomi, menjamin kestabilan ekonomi dan menggalakkan pertumbuhan kesempatan kerja. Pemerintah hanya diharapkan menyediakan infrastruktur ekonomi untuk meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi produktif di berbagai sektor.

Berbeda dengan pendapat aliran klasik, Keynesian berpendapat bahwa peranan pemerintah sangat penting diperhitungkan untuk mencapai tujuan-tujuan makroekonomi dengan melaksanakan kebijaksanaan moneter (*monetary policy*), kebijaksanaan fiskal (*fiscal policy*) dan pengawasan langsung (*direct control*). Pendapat tersebut didasarkan pada sistem pasar bebas tidak akan dapat membuat penyesuaian-penyesuaian yang akan menciptakan tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment*).

Kebijaksanaan moneter (*monetary policy*) di Indonesia saat ini dijalankan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia). Dengan instrumen yang ada, Bank Indonesia selalu berupaya mempengaruhi penawaran uang dan tingkat bunga.

Kebijaksanaan fiskal (*fiscal policy*) di Indonesia secara khusus dijalankan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan alat yang dapat digunakan adalah melalui anggaran pengeluaran dan penerimaan pemerintah (melalui perpajakan). Kebijakan fiskal (*fiscal policy*) pemerintah sebenarnya meliputi

kegiatan penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini dibuat untuk mengimbangi gagalnya mekanisme pasar karena pihak swasta tidak dapat menyediakan *public goods* secara efisien. Oleh karena itu, *public goods* tersebut harus disediakan oleh pemerintah.

Dalam masa inflasi biasanya kebijakan fiskal (*fiscal policy*) akan berbentuk mengurangi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pajak. Sebaliknya apabila pengangguran terlalu serius, pemerintah perlu berusaha menambah pengeluaran dan mengurangi pajak. Sebagai tambahan untuk kedua kebijakan tersebut, pemerintah dapat pula melakukan pengawasan langsung (*direct control*) dengan membuat peraturan-peraturan, yang di antaranya terkait dengan upaya meningkatkan jumlah devisa dan dan mendorong pertumbuhan penyerapan tenaga kerja.

Segenap upaya meningkatkan jumlah devisa seperti yang telah dijelaskan tersebut merupakan bentuk-bentuk investasi yang menjurus ke akumulasi kapital. Akumulasi kapital dapat mendorong pertumbuhan penyerapan tenaga kerja atau meningkatkan kualitas tenaga kerja yang sudah ada.

Tingginya tingkat pengangguran suatu negara merupakan fenomena yang paling mencolok atas rendahnya kinerja pembangunan ekonomi negara tersebut. Fenomena aktual seperti ini juga masih dihadapi oleh pembangunan ekonomi Indonesia hingga saat ini. Masalah pengangguran ketenagakerjaan tersebut sangat perlu dicermati sehubungan dengan erat kaitannya dengan kemiskinan yang terjadi di dalam negeri.

Kemiskinan yang luas tetap merupakan tantangan besar terhadap upaya-upaya pembangunan ekonomi Indonesia. “Inti permasalahannya salah satunya adalah terletak pada masalah ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di dalam negeri tersebut” (Todaro dan Stephen, 2003: 220). Selanjutnya “antara tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan absolut yang merajalela, serta ketimpangan distribusi pendapatan, ternyata terdapat keterkaitan yang sangat erat” (Todaro, 2000: 260).

Penduduk negara yang miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan memiliki keterbatasan untuk berakses pada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari yang mempunyai potensi lebih tinggi. Kemiskinan umumnya diukur dengan tingkat pendapatan, dan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi kemiskinan absolut, yaitu kemiskinan yang terjadi akibat pendapatannya yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum dan kemiskinan relatif, yaitu keadaan perbandingan antar kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pada garis kemiskinan, dan kelompok masyarakat yang relatif lebih kaya.

Dari pola waktunya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi *persistent poverty*, *cyclical poverty*, *seasonal poverty*, serta *accidental poverty* (Kartasasmita, 1996: 243) *Persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun akibat terisolasi dan tidak memiliki sumberdaya alam yang memadai. *Cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. *Seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman akibat kegagalan berusaha. Pola terakhir adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan

karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan.

Dalam beberapa studi empirik justru ditemukan bahwa kemiskinan kebanyakan terjadi pada negara yang distribusi pendapatannya merata. Meskipun suatu negara mempunyai pendapatan per kapita yang tinggi, tetapi jika ketimpangan pendapatannya juga tinggi, ada kemungkinan negara tersebut juga akan menghadapi masalah kemiskinan. Ketimpangan distribusi pendapatan sebenarnya secara tidak langsung bisa membawa manfaat bagi kaum miskin. Dengan adanya ketimpangan berarti terjadi akumulasi kapital, akumulasi kapital ini pada akhirnya akan memacu investasi yang pada gilirannya berpengaruh terhadap perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, “mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan makro ekonomi yang stabil sering dipandang sebagai pendekatan yang paling memuaskan, baik untuk mengurangi kemiskinan maupun untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan” (Hakim, 2004: 221).

Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, peningkatan devisa (*foreign exchange earnings*) melalui kinerja ekspor juga sangat penting untuk memacu investasi di dalam negeri sebagai landasan untuk melaksanakan usaha-usaha pembangunan pada khususnya. Singkatnya, selama perdagangan itu membuka peluang bagi terlaksananya transaksi ekonomi yang menguntungkan, maka selama itu pula perdagangan bisa menjadi faktor positif yang mendorong pertumbuhan ekonomi agregat dan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak.

Meskipun demikian, satu hal yang masih perlu dicermati lebih lanjut adalah dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya hubungan transaksi internasional antar negara. Kemerosotan harga produk ekspor, meningkatnya defisit neraca perdagangan (pembayaran devisa untuk impor semakin melebihi penerimaan devisa dan ekspor), dan semakin besarnya beban pembayaran utang luar negeri dipastikan akan berpengaruh terhadap kebijaksanaan moneter ketat yang dijalankan otorita moneter. Hal ini pada gilirannya mengakibatkan penurunan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, yang juga disertai dengan peningkatan jumlah pengangguran, serta semakin luasnya kemiskinan.

Masalah ketenagakerjaan di negara-negara Dunia Ketiga termasuk di dalamnya adalah Indonesia ternyata mempunyai dampak dan implikasi yang jauh lebih kompleks bila dibandingkan dengan soal ketenagakerjaan di negara-negara maju. Implikasinya adalah “setiap upaya pemecahannya pun memerlukan bermacam-macam pendekatan yang lebih sulit daripada sekedar penerapan kebijaksanaan pemikiran aliran Keynes yang dahulu dipraktekkan oleh negara-negara maju untuk meningkatkan permintaan agregat dalam rangka menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya” (Todaro, 2000: 254).

Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestik yang sepenuhnya tergantung pada kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan secara produktif memanfaatkan tambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan itu sendiri lebih lanjut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya

input atau faktor-faktor penunjang yang dimiliki negara-negara yang bersangkutan.

Pengkajian terhadap peranan penduduk sebagai sumberdaya manusia dalam pembangunan ekonomi merupakan hal yang sangat penting, mengingat penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Masalah pertumbuhan penduduk bukanlah sekedar masalah jumlah, namun menyangkut kepentingan pembangunan karena penduduk dapat diandalkan peranannya sebagai modal dasar pembangunan serta mampu menyerap *output* yang dihasilkan oleh perekonomian ke arah peningkatan pendapatan nasional.

Pembenaran terhadap konsep tersebut diperkuat oleh tiga pemikitan dan argumentasi tentang penambahan penduduk, yang salah satunya menyatakan bahwa penambahan penduduk bukanlah inti persoalan atau masalah yang sebenarnya bagi banyak negara-negara dan kawasan berkembang. Pertumbuhan penduduk justru merupakan suatu hal yang dibutuhkan atau diinginkan suatu negara.

Terkait dengan studi ini serta jumlah variabel yang digunakan dalam mempengaruhi pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, relatif masih terbatas karena hanya melibatkan tiga variabel prediktor (struktur uang beredar, struktur devisa, dan struktur ekspor). Dengan demikian temuan ini mengindikasikan bahwa apabila ingin dilakukan pembuatan model untuk pengembangan kajian lebih lanjut tentang pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan secara makro, dapat melibatkan lebih banyak variabel relevan yang mencerminkan

keterkaitan antara pasar tenaga kerja dan perdagangan internasional dalam konteks struktur perekonomian terbuka.

6.6. Pengaruh Struktur Ekspor Terhadap Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja

Dalam perekonomian makro suatu negara yang menganut struktur perekonomian terbuka, ekspor tidak saja dijadikan sumber terpenting sebagai penerimaan devisa negara, tetapi juga dapat diharapkan dapat mempengaruhi pasar kerja terutama variabel-variabel yang bergayut di dalamnya.

Terkait dengan teknik-teknik pengukuran basis, sumbangan teori basis ekspor terhadap perkembangan metode analisis regional adalah merintis penggunaan *multiplier* untuk mengukur pengaruh ekspor terhadap variabel regional, salah satunya kesempatan kerja (*employment*).

Teori pertumbuhan yang berbasis ekspor menerangkan bahwa aktivitas ekonomi suatu negara adalah *basic* dalam arti bahwa pertumbuhan cenderung menimbulkan dan menentukan pembangunan menyeluruh di negara yang bersangkutan. Dalam pengertian ini ekspor diharapkan dapat mempengaruhi pertumbuhan, yang dalam studi ini khususnya penyerapan tenaga kerja.

Tiebot (1962) menggambarkan pentingnya ekspor sebagai berikut:

Pasar ekspor dipandang sebagai penggerak utama perekonomian. Bila kesempatan kerja yang melayani pasar ini naik atau turun, kesempatan kerja yang melayani pasar juga naik atau turun. Bila pabrik (ekspor) tutup, pedagang merasakan dampaknya karena para pekerja pabrik yang diberhentikan tidak memiliki uang untuk dibelanjakan. Karena peranan ekspor sebagai penggerak utama, kesempatan kerja ekspor dianggap sebagai *basic*. Kesempatan kerja yang melayani pasar dipandang menyesuaikan atau adaptif dan disebut pula sebagai *nonbasic*.

Bertitik tolak dari hasil studi ini, ternyata menemukan kenyataan yang sebaliknya dengan hasil studi terdahulu. Dalam studi ini ekspor tidak lagi sebagai penggerak utama perekonomian. Pengaruh struktur ekspor terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan adalah negatif dan nonsignifikan dengan koefisien jalur langsung sebesar -0,043. Dengan demikian, hasil pengujian hipotesis tersebut telah menjawab rumusan masalah ke enam pada Bab 1. Temuan studi ini diperkuat pula dari hasil analisis jalur (path analysis) yang ditunjukkan oleh $p \text{ value} = 0,911$. Dari hasil temuan studi ini dapat disimpulkan bahwa, kenaikan maupun penurunan nilai ekspor tidak diikuti oleh kenaikan maupun penurunan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja.

Tidak signifikannya pengaruh struktur ekspor terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja tersebut karena struktur ekspor telah berkembang dari penciptaan barang-barang ekspor yang padat tenaga kerja (*labor intensive*) cenderung ke arah penciptaan barang-barang ekspor yang cenderung *medium/high technology*, yang tentunya pada modal (*capital intensive*) dengan penggunaan jumlah tenaga kerja yang relatif sedikit.

Fakta juga menemukan bahwa sektor ekspor secara keseluruhan dipandang dari sudut ekonomi nasional tidak efisien atau menurun tingkat efisiensinya diukur dengan konsep *domestic resource cost*. Ini disebabkan banyaknya produk-produk ekspor nontradisional yang sangat tergantung atas input yang diimpor dengan segala macam subsidi yang menopangnya sehingga mengakibatkan biaya ekonomi untuk devisa yang diperoleh dari ekspor produk-produk nontradisional

ini jauh lebih tinggi dari biaya ekonomi untuk devisa yang diperoleh dari ekspor produk-produk yang lain yang selama ini mendominasi sektor ekspor.

Berdasarkan fakta tersebut Arief (1998: 322-323) secara tegas menyatakan:

“Beban ekonomi yang bertambah tinggi yang ditimbulkan oleh ekspor yang secara ekonomi nasional tidak efisien ini, terpaksa ditanggung oleh ekonomi nasional secara keseluruhan dalam bentuk *misallocation of resources*. Dan *misallocation of resources* ini akan lebih parah dari *misallocation of resources* yang terjadi sebelum pelaksanaan strategi promosi ekspor”.

Meskipun Jung dan Peyton (1985) justru menemukan hasil studi yang sebaliknya (dengan menggunakan data makroekonomi India) bahwa ekspor telah mendorong pertumbuhan, namun banyak studi empirik yang terkait dengan ekspor terutama yang menggunakan metode penelitian yang lebih meyakinkan, telah menunjukkan bahwa strategi promosi ekspor yang bertujuan untuk membuat sektor ekspor menjadi penentu pertumbuhan telah tidak mendapat dukungan empiris di sebagian besar negara-negara berkembang yang telah diteliti. Dengan demikian studi ini mengkonfirmasi sekaligus menyokong pengembangan hasil temuan-temuan tersebut.

Analisis Rotemberg berbeda dari analisis sebelumnya dengan memberikan justifikasi erhadap promosi ekspor dalam pembangunan negara-negara sedang berkembang:

“Strategi ekspor hanya akan berhasil dalam jangka panjang dan menimbulkan dampak positif terhadap kemakmuran masyarakat apabila sektor ekspor merupakan sektor dominant dalam struktur ekonomi, baik dalam pengertian nilai tambah maupun dalam pengertian kesempatan kerja. Jikalau tidak, maka strategi promosi ekspor yang sangat banyak

menggunakan sumber-sumber ekonomi akan menimbulkan implikasi negatif serius terhadap kemakmuran masyarakat luas” (Arief, 1998: 320).

Jika ditinjau dari aspek produksi untuk barang-barang ekspor, maka kegiatan ekonomi suatu negara (tak terkecuali Indonesia) dapat dibagi dalam dua sektor yaitu sektor yang memproduksi barang-barang modal (*capital goods sector*) dan sektor yang memproduksi barang-barang konsumsi (*consumption goods sector*). Dengan demikian alokasi investasi untuk masing-masing sektor ini dalam kebijaksanaan pembangunan ekonomi dianggap penting.

Mengikuti model pemikiran pembangunan ekonomi Roy Harrod dan Evsey Domar, masing-masing sektor tersebut menentukan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). dengan menyatakan :

“ICOR yang tinggi mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan lebih banyak investasi untuk mencapai tingkat pertumbuhan *output* yang ditargetkan. Rendahnya ICOR menunjukkan penggunaan faktor modal secara efisien” (Arief, 1998:320).

Efektivitas faktor modal direfleksikan oleh parameter ICOR. Akumulasi modal tergantung kepada pendapatan atau *output*. Faktor modal diakumulasi melalui tabungan domestik yang merupakan porsi tertentu dari *output* dalam bentuk akumulasi tabungan domestik. Dalam kaitan ini faktor tenaga kerja samasekali tidak dianggap sebagai faktor yang krusial atau kendala.

Berdasarkan ketegaran (*rigidity*), adanya potensi tabungan dalam negeri yang tinggi tidak akan bermakna adanya kondisi yang cukup bagi pertumbuhan penyerapan tenaga kerja karena proses penggunaan yang optimal tabungan dalam negeri ini tak terjadi oleh adanya kelangkaan devisa yang dibutuhkan untuk

mengimpor barang-barang modal. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja tidak akan terjadi bila kapasitas impor yang tinggi tidak diiringi dengan jumlah tabungan domestik yang tinggi yang bersumber dari devisa, terutama yang bersumber dari kegiatan ekspor.

Dalam rangka pengembangan kajian lebih lanjut, peranan ekspor yang dikaitkan dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja merupakan hal yang sangat mendesak untuk dilakukan kembali dan dapat diperluas dengan melibatkan berbagai variabel prediktor yang relevan. Kajian tersebut dapat berupa analisis jangka panjang dengan memasukkan *time-lag* dalam model analisis.

BAB 7

PENUTUP

BAB 7

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis, baik secara kuantitatif maupun kualitatif serta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disusun beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Struktur uang beredar berpengaruh terhadap struktur ekspor. Peningkatan maupun penurunan dalam jumlah uang beredar direspon langsung oleh peningkatan maupun penurunan nilai ekspor. Keadaan ini terlihat dari kecenderungan kenaikan maupun penurunan setiap indikator uang beredar (dalam bentuk uang kartal, uang giral dan uang kuasi) diiringi oleh kenaikan maupun penurunan setiap indikator ekspor migas dan nonmigas Indonesia.
2. Struktur uang beredar tidak berpengaruh terhadap struktur devisa. Peningkatan maupun penurunan dalam jumlah uang beredar tidak direspon langsung oleh peningkatan jumlah devisa Indonesia. Penemuan baru dalam studi ini sepintas mengingkari teori moneter *monetarist* yang meletakkan pandangan pada mekanisme transmisi kebijaksanaan moneter langsung, dan sekaligus mengindikasikan menerima teori moneter Keynesian yang meletakkan pandangan pada mekanisme transmisi kebijaksanaan moneter tidak langsung.
3. Struktur uang beredar berpengaruh terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan di Indonesia. Peningkatan maupun penurunan dalam jumlah uang beredar direspon langsung oleh penurunan maupun

peningkatan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor tersebut. Keadaan ini terlihat dari kecenderungan kenaikan maupun penurunan setiap indikator uang beredar (dalam bentuk uang kartal, uang giral dan uang kuasi) diiringi oleh penurunan maupun kenaikan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, namun secara empirik yang terlihat justru sebaliknya. Jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor perdagangan di Indonesia cenderung menunjukkan peningkatan setiap tahunnya meskipun dengan *trend* kenaikan yang berfluktuatif.

4. Struktur ekspor berpengaruh terhadap struktur devisa Indonesia. Peningkatan maupun penurunan nilai ekspor direspon langsung oleh peningkatan maupun penurunan jumlah devisa. Keadaan ini terlihat dari kontribusi kenaikan maupun penurunan setiap indikator ekspor (baik migas maupun nonmigas) diiringi oleh kenaikan maupun penurunan setiap indikator devisa Indonesia (dalam bentuk valuta asing [surat-surat berharga, uang kartal/giral] dan nonvaluta asing [RPF, SDRs dan MG]).
5. Struktur devisa tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan maupun penurunan jumlah devisa tidak direspon langsung oleh peningkatan maupun penurunan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja. Keadaan ini terlihat dari kontribusi kenaikan maupun penurunan setiap indikator devisa tidak diiringi oleh kenaikan maupun penurunan terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan di Indonesia. Temuan baru dalam studi ini mengindikasikan bahwa keadaan tersebut disebabkan karena keseluruhan jumlah devisa yang diterima oleh investor atau

eksportir Indonesia tersimpan dalam pos *current account* pada neraca perdagangan maupun neraca pembayaran, sehingga tidak dapat langsung mempengaruhi pasar tenaga kerja di dalam negeri.

6. Struktur ekspor tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan maupun penurunan dalam nilai ekspor tidak direspon langsung oleh peningkatan maupun penurunan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan Indonesia. Tidak responsifnya struktur ekspor terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di sektor ini mengindikasikan bahwa komposisi komoditas ekspor Indonesia telah bergeser kepada penciptaan barang-barang yang cenderung banyak memiliki kandungan *medium* atau *high technology* yang bersifat *capital intensive* dari pada yang bersifat *labor intensive*.
7. Implementasi kebijaksanaan moneter dan strategi perdagangan internasional Indonesia saat ini, terutama dalam rangka pencapaian tujuan mendorong perkembangan ekspor sebagai sumber utama penerimaan devisa negara serta peningkatan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sangat mengandalkan ekspor komoditas nonmigas. Sepuluh jenis komoditas nonmigas andalan utama ekspor Indonesia, yaitu tekstil, pakaian jadi, kayu lapis, *pulp* dan kertas, karet alam, minyak dan biji sawit, udang dan ikan, bahan makanan serta barang-barang listrik. Pada masa-masa yang akan datang, ekspor minyak dan gas bumi dipastikan tidak dapat dipertahankan lagi sebagai sumber devisa penting karena minyak dan gas termasuk komoditas yang tidak dapat diperbaharui (*nonrenewable*).

8. Struktur uang beredar dan piranti moneter Indonesia masih sangat terbatas, hanya terdiri dari uang kartal yang biasa dipegang masyarakat sebagai alat transaksi tunai, uang giral yang mencakup saldo rekening giro yang tersimpan di bank, deposito berjangka yang berupa alat pembayaran berfungsi sebagai uang, simpanan tabungan yang berupa tabungan milik masyarakat pada bank-bank komersial dan mata uang asing.
9. Dari delapan kesimpulan tersebut dapat diintegrasikan dalam kesimpulan umum bahwa struktur uang beredar ternyata kurang responsif dalam hal mempengaruhi perkembangan sektor perdagangan di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan penerimaan devisa dan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja.

7.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan beberapa kesimpulan tersebut, dapat disusun beberapa saran sebagai berikut:

1. Struktur uang beredar (uang kartal, uang giral maupun uang kuasi) dapat dikendalikan dengan dua alternatif kebijaksanaan, yaitu kebijaksanaan moneter yang bersifat aktif dan akomodatif. Implikasi masing-masing antara kedua kebijaksanaan tersebut berbeda. Kebijakan moneter yang bersifat aktif mengharuskan adanya ekspansi moneter yang cenderung inflasioner dengan konsekuensi dapat memperburuk neraca pembayaran dan melemahkan daya saing barang-barang ekspor dari dalam negeri. Oleh sebab itu, dalam upaya mendorong perluasan dan peningkatan ekspor seiring dengan perkembangan kondisi perekonomian Indonesia saat ini, maka diharapkan kebijaksanaan

moneter yang bersifat akomodatif dapat dipertimbangkan untuk diimplementasikan melalui pemberian fasilitas kredit ekspor dengan bunga yang ringan.

2. Implementasi kebijaksanaan moneter melalui pengendalian jumlah uang beredar untuk mempengaruhi perkembangan devisa dipastikan berhadapan dengan struktur perekonomian yang tidak pasti (*uncertainty*), berupa hambatan-hambatan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Dalam situasi yang demikian, pencapaian tujuan kebijaksanaan yang optimal dipastikan pula tidak dapat tercapai. Oleh sebab itu, implementasi kebijaksanaan moneter yang selalu bertumpu pada *outward looking policy* (kegiatan ekonomi yang terlalu memperhatikan kegiatan ekonomi luar negeri) hendaknya diimbangi dengan pemanfaatan kegiatan ekonomi pasar dalam negeri yang diharapkan dapat menutupi bila terjadi defisit cadangan devisa negara.
3. Kebijakan penciptaan lapangan kerja baru yang lebih berorientasi pada laju pertumbuhan *output* industri hendaknya diiringi dengan upaya peningkatan permintaan agregat melalui perbaikan neraca pembayaran, mengurangi utang luar negeri yang semakin banyak serta pemberlakuan program-program pengetatan ketergantungan secara terus-menerus pada *International Monetary Fund* (IMF).
4. Upaya peningkatan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor serta mengurangi impor hendaknya diintegrasikan dalam kebijaksanaan ekonomi internasional Indonesia yang berorientasi pada pelunasan utang luar negeri

sehingga beban negara atas pinjaman tersebut berangsur-angsur akan berkurang, yang pada gilirannya cadangan devisa negara yang ada tidak terkuras secara terus menerus. Dalam kaitannya dengan itu, peningkatan devisa negara hendaknya dilakukan dengan cara memanfaatkan kegiatan ekonomi dan pasar dalam negeri serta mempersiapkan produk-produk yang akan dikembangkan berupa barang-barang substitusi impor. Hal ini penting dilakukan bila satu atau beberapa jenis barang pasarannya sedang lesu atau mengalami saingan baru dapat diganti dengan jenis barang lain dengan daya saing tinggi. Di samping itu, diharapkan pula untuk mempertimbangkan merubah struktur ekspor dari bahan-bahan mentah dan hasil pertanian yang suplai-nya *in-elastic* yang posisinya makin lemah di pasar internasional dengan mengganti barang-barang industri yang memiliki kandungan *medium technology* atau bahkan barang industri yang memiliki kandungan *high technology*.

5. Strategi penyetoran ke bawah (*trickle down strategy*) hendaknya dipertimbangkan diganti dengan strategi penyetoran ke atas (*trickle up strategy*) melalui program *Social Safety Net* yang dananya bersumber dari devisa dan dapat di arahkan pada proyek-proyek padat karya untuk sedapat mungkin menciptakan lapangan kerja baru yang langsung berhubungan dengan pengangguran, kemiskinan dan distribusi pendapatan. Prioritas utama sebaiknya diberikan kepada sektor informal karena mempunyai daya serap tenaga kerja yang banyak.

6. Investasi asing di dalam negeri, terutama yang terkait dengan penciptaan dan perluasan komoditas ekspor hendaknya dikontrol dan di arahkan pada perluasan kesempatan kerja dengan prioritas tenaga kerja dari dalam negeri.
7. Upaya-upaya untuk meningkatkan ekspor, devisa dan perluasan kesempatan kerja hendaknya ditempuh melalui kebijaksanaan makro (kebijaksanaan moneter dan fiskal, devisa, pinjaman luar negeri dan perdagangan internasional) serta kebijaksanaan sektoral. Untuk mendapat hasil yang tepat guna dan tepat arah, implementasi beberapa kebijaksanaan tersebut diharapkan diupayakan serasi serta dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi ke arah tercapainya keseimbangan struktural yang lebih baik, di antaranya melalui restrukturisasi pemilikan dan penguasaan aset ekonomi, restrukturisasi alokatif dana-dana pembangunan yang berasal dari luar negeri (devisa, bantuan dan pinjaman luar negeri), restrukturisasi *spatial* dan sektoral dalam pengembangan perdagangan luar negeri dan restrukturisasi strategi memperkuat kemandirian ekonomi serta restrukturisasi perpajakan sebagai sumber penerimaan negara dan redistribusi pendapatan.
8. Studi lanjutan dalam rangka pengembangan teori kebijaksanaan moneter, teori perdagangan internasional dan teori kesempatan kerja hendaknya di arahkan pada pendalaman mengenai bekerjanya mekanisme transmisi dan efektivitas kebijaksanaan moneter pada pasar uang (*money market*), pasar barang (*commodity market*), pasar tenaga kerja (*labor market*) dan pasar surat-surat berharga (*bond market*) dalam konteks struktur perekonomian terbuka.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aghevli, Bijan B., 1977. Money, Prices and the Balance of Payment : Indonesia 1968 – 1973. *The Journal of Development Studies*, January, Vol. 13, No. 2. Pp. 37-52.
- Arief, Sritua, 1991. *Dampak Pelaksanaan Kebijakan Moneter Terhadap Ekonomi Indonesia*. Disampaikan pada Simposium Nasional Sewindu Deregulasi Keuangan dan Perbankan di Jakarta, 1 Juni 1991.
- _____, 1993. *Pemikiran Pembangunan Dan Kebijaksanaan Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Riset Pembangunan
- _____, 1998. *Teori Dan Kebijaksanaan Pembangunan*. Jakarta: PT. CIDESINDO.
- Badan Pusat Statistik, *Laporan Perekonomian Indonesia*, 1975, 1980, 1985, 1990 dan 1995. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____, 1999. *Statistik Perdagangan Luar Negeri*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____, 2001. *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____, 2002. *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____, 2003. *Laporan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____, 2004. *Laporan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____, 2004. *Pendapatan Nasional Indonesia 2000-2003*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____, *Indikator Ekonomi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bank Indonesia, *Report for Financial Year 1969/1970*. Jakarta: Bank Indonesia.
- _____, *Report for Financial Year 1970/1971*. Jakarta: Bank Indonesia.
- _____, *Laporan Tahunan (Berbagai Edisi)*. Jakarta: Bank Indonesia.

- _____, 1986. *Peranan Perbankan Dalam Mendorong Kegiatan Investasi Dan Ekspor Non Migas* (Hasil Seminar 24-27 Februari), Jakarta: Bank Indonesia.
- _____, 1986. *Laporan Tahunan*. Jakarta: Bank Indonesia.
- _____, 1999. *Laporan Keuangan Bank Indonesia Bank Sentral*. Jakarta: Bank Indonesia.
- _____, 2000. *Laporan Tahunan*. Jakarta: Bank Indonesia.
- _____, 2000. *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia*, Vol. II No. 01-12. Jakarta: Bank Indonesia.
- _____. 2001. *Laporan Triwulan Perkembangan Moneter, Sistem Pembayaran, dan Perbankan*, Vol. 1, No. 2, April-Juni. Jakarta: Bank Indonesia
- _____, 2001. *Annual Report*. Jakarta: Bank Indonesia.
- _____, 2001. *Laporan Bulanan*, Juli. Jakarta: Bank Indonesia
- _____, 2001. *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia*, Vol. III No. 01-12. Jakarta: Bank Indonesia.
- _____, 2002. *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia*, Vol. IV No. 01-12. Jakarta: Bank Indonesia.
- _____, 2003. *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia*, Vol V No. 01-12. Jakarta: Bank Indonesia.
- _____, 2003. *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia*. Vol. V No. 05, Mei. Jakarta: Bank Indonesia.
- _____, 2004. *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia*, Vol. VI No. 01-12. Jakarta: Bank Indonesia.
- _____, 2004. *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia*, Vol. VI No. 02, Februari. Jakarta-Indonesia: Bank Indonesia.
- Baumol, W. J., 1952. The Transactions Demand for Cash: An Inventory Theoretic Approach. *Quarterly Journal of Economics*, November, Vol. Pp 545-556.

- Bautista, R. M., 1981. "Exchange Rate Changes and LDC Export Performance Under Generalized Currency Floating," *Weltwirtschaftliches Archiv*, Vol. 117.
- Binhadi, 1995. *Financial Sector, Deregulation, Banking Development and Monetary Policy (The Indonesian Experience (1983-1993))*, First Published. Jakarta : Institute Bankir Indonesia.
- Boediono, 1992. Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Kestabilan Moneter Di Indonesia Dalam Jangka Panjang, dalam Faried Wijaya M dan Soetatwo Hadiwigeno (Penyunting). *Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Edisi II, Cetakan I. Yogyakarta: Badan Penerbit FE-UGM.
- _____, 1996. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.5: Ekonomi Moneter*, Edisi III, Cetakan IX. Yogyakarta: Badan Penerbit FE-UGM.
- _____, 2000. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.3: Ekonomi Internasional*, Edisi I, Cetakan II. Yogyakarta: Badan Penerbit FE-UGM.
- _____, 2001. *Ekonomi Makro*, Edisi IV, Cetakan XX. Yogyakarta: Badan Penerbit FE-UGM.
- Bradley, Michael, 1985. *Macroeconomics.*, Second Edition. London: Scott, Foresman and Company.
- Branson, William H., 1999. *Macroeconomics Theory and Policy*. New York: Harper & Row, Publisher, Inc.
- Cole, David C., 1976. Concepts, Cause, and Cures of Instability in Less Developed Countries, in Ronald I Mc. Kinnon. *Money and Finance in Economic Growth and Development*.
- Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI, 2005. *Statistik Ketenagakerjaan*, Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI.
- Emery, R.F., 1967. *The Relationship of Export and Economic Growth*. *Kyklos*, Vol. XX, Pp 470-486.
- Friedman, Milton and Anna Schwartz, 1963. A Monetary History of The United State: 1867-1960, in Robert J. Gordon (Ed). *Milton Friedman's Monetary Framework : A Debate With His Critic*. Chicago : The University of Chicago Press.

- _____, and Meiselman, 1963. "The Relative Stability of Monetary Velocity and the Investment Multiplier in the United States, 1897-1958". *Stabilization Policies*. The Commission on Money and Credit, No.1, Prentice-Hall.
- _____, 1974. A Theoretical Framework for Monetary Analysis, in Robert J. Gordon (Ed). *Milton Friedman's Monetary Framework: A Debate With His Critic*. Chicago : The University of Chicago Press.
- Ferdinand, Augusty, 2002. *Structural Equation Modeling Dalam Penelitian Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit-UNDIP.
- Gordon, Robert J. (Ed), 1974. *Milton Friedman's Monetary Framework: A Debate With His Critic*. Chicago : The University of Chicago Press.
- Grenville, Stephen., 2000. Monetary Policy and The Exchange Rate During The Crisis . *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, August, Vol 36 No. 2. Pp 43-60.
- Gupta, K. L. and Moazzami B., 1989. Demand for Money in Asia. *Economics Modeling*. Pp 463-467.
- _____, 1990. Nominal Vs Real Adjustment in Demand for Money Functions. *Applied Economics*, Januari 1990, Vol 22. Pp 5-12.
- Hady, Hamdy, 2000a. *Ekonomi Internasional, Teori Dan Kebijakan Perdagangan Internasional*, Buku I, Cetakan II. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____, 2000b. *Ekonomi Internasional, Teori Dan Kebijakan Keuangan Internasional*, Buku II, Edisi Revisi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hakim, Abdul, 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi I, Cetakan II. Yogyakarta: Ekonosia.
- Hallet, Andrew Hughes and Peter McAdam. 1999. *Analyses in Macroeconomic Modeling*. Boston: Kluwer Academic Publisher.
- Hamid, Edy Suandi dan M.B. Hendrie Anto, 1997. Telaah Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Ekonomi Pembangunan*, Volume 2 No. 1. Halaman 16-27.
- Halwani, Hendra dan Prijono Tjiptoherijanto, 1993. *Perdagangan Internasional Pendekatan Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Havrilesky, Thomas M and John T. Boorman, 1972. *Money Supply, Money Demand, and Macroeconomic Model*. Boston : Allyn and Bacon, Inc.
- Haz, H. Hamzah, 2001. *Mengkaji Ulang Politik Ekonomi Indonesia: Strategi Mewujudkan Keadilan Sosial*, Fahrudin Salim (Editor), Cetakan I. Jakarta: Pustaka Ciganjur.
- Herlambang, 2001. *Ekonomi Makro: Teori, Analisis dan Kebijakan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ikhsan, dkk., 1977. Tinjauan Triwulanan Perekonomian Indonesia. *Ekonomi Dan Keuangan Indonesia*, Vol. XLV No. 1. 46 halaman.
- International Monetary Fund, 2001. *ASEAN Economic Outlook*, July. International Monetary Fund.
- _____, 2003. *Balance of Payments Statistics*, Part I. Country Tables, Yearbook. International Monetary Fund.
- _____, 2004. *International Trade Statistics Yearbook*, Vol. I. International Monetary Fund.
- _____, *International Financial Statistics*. International Monetary Fund.
- _____, *Direction of Trade Statistic Yearbook*. International Monetary Fund.
- Iswardono, 1994. Kebijakan Moneter (Strategi, Target dan Independen). *Jurnal Ekonomi*, Th I Vol. 4. Yogyakarta: FE-UII. Halaman 15-24.
- Jhingan , M.L., 2004. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Cetakan X. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Johnson, Harry G., 1962. Monetary Theory and Policy. *American Economic Review*. June. Pp 350-351.
- Jung, Woo S and Peyton J. Marshall, 1985. Exports, Growth and Causality in Developing Countries. *Journal of Development Economics*. Pp 18.
- Kadarusaman, Y.B., 2002. *Makro Ekonomi Indonesia*, Catakan I, November. Jakarta: Lembaga Penelitian Ekonomi-IBII.
- Kartasasmita, Ginandjar, 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta: PT. Pustaka CIDESINDO.

- Keiser, Norman F., 1975. *Macroeconomics: Problems and a Survey of Theory*, Second Edition, New York : Random House, Inc.
- Koot, Ronald S and Walker, David A., 1979. A Statistical Analysis of The Impact of Monetary Policy on Credit Union Lending. *Journal of Banking and Finance* 4. North-Holland Publishing Company. Pp 301-311.
- Kohn, Meir, 1969. *The Demand for Money: Theories and Evidence*. Second Edition. Scranton, Pennsylvania: Harper & Row.
- _____, 1993. *Money, Banking, and Financial Markets*. Second Edition, Orlando-Florida: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
- Krueger, Anne O., 1978. *Foreign Trade Regimes and Economic Development: Liberalization Attempts and Consequences*. Cambridge, Massachusetts: Balinger.
- Laidler, D.E.W., 1977. *The demand for Money, Theories and Evidence*, New York: Harper & Row, Publishers.
- Lawrence, B. Krause and Walter S. Salant (Eds), 1977. *Worldwide Inflation: Theory and Recent Experience*. Washington, D.C.: Brookings Institution.
- Lembaga Penelitian IBII, 2000. *Makro Ekonomi Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lembaga Penelitian IBII, 2001. *Makro Ekonomi Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- _____, 2002a. *Makro Ekonomi Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- _____, 2002b. *Makro Ekonomi Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____, 2004. *Makro Ekonomi Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lindert, Peter H., 1994. *Ekonomi Internasional*, Agustinus Subekti (Penterjemah), Edisi IX, Cetakan I. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____ and Kindleberger C.P., 1995. *International Economics*. Homewood, Illinois: R.D. Irvin, Inc.

- Lipsey, Richardo G., 1995. *Pengantar Makro Ekonomi*, Jilid 1, Edisi X, Cetakan I, A. Jaka Wasana dan kawan-kawan (Penerjemah). Jakarta: Binarupa Aksara.
- Li, Ching Chun, 1975. *Path Analysis-a Primer*. Pittsburg: The Boxwood Press.
- Mansoer, Faried Wijaya dan Soetatwo Hadiwigeno, 1992. *Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Edisi II, Cetakan I. Yogyakarta: Badan Penerbit FE-UGM.
- Mangkoesebroto, Guritno dan Algifari, 1998. *Teori Ekonomi Makro*, Edisi III, Cetakan I Yogyakarta: Bagian Penerbit STIE YKPN.
- Mankiw, N. Gregory, 2000. *Teori Makro Ekonomi*, Imam Nurmawan (Alih Bahasa), Edisi IV. Jakarta: Erlangga.
- Mork, Knut Anton, 1992. *Macroeconomics for Managers*. Belmont California: Wadsworth Publishing Company, Inc.
- Nanga, Muana, 2001. *Makroekonomi: Teori, Masalah Dan Kebijakan*. Edisi Perdana, Cetakan I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Anwar, 1985. *Financial Institutions and Policies in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Nomura Research Institute, 2001. *Asean Economic Outlook*, July.
- Nopirin, 1999. *Ekonomi Internasional*, Edisi III, Cetakan IV. Yogyakarta: Badan Penerbit FE-UGM.
- _____, 2000. *Ekonomi Moneter*. Buku II, Edisi I, Cetakan X. Yogyakarta: Badan Penerbit FE-UGM.
- Patinkin, Don, 1974. Friedman on The Quantity Theory and Keynesian Economics In Robert J. Gordon (Ed). *Milton Friedman's Monetary Frame Work : A Debate With His Critic*. Chicago : The University of Chicago Press.
- Purwanto, Hery, 2005. Kontroversi PMA dan ULN Di Indonesia, Ahmad Erani Yustika (Ed.). *Perekonomian Indonesia: Deskripsi, Preskripsi dan Kebijakan*. Edisi I, Cetakan I. Malang: Bayumedia Publishing.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung, 2001. *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: LPFE-UI.

- Reksoprayitno, Soediyono, 2000. *Ekonomi Makro : Analisis IS - LM dan Permintaan-Penawaran Agregatif*, Edisi Millenium, Cetakan I. Yogyakarta: Badan Penerbit FE-UGM.
- Republik Indonesia, 1968. *Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral*.
- _____, 1999. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*.
- Richardson, Harry W., 1977. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*, Paul Sitohang (Penerjemah), Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Rosyadi, Imron, 2002. *Ekonomi Internasional*, Cetakan I. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Salvatore, Dominick, 1997. *International Economics*. New York: Mac Millan Publishing Company.
- Samuelson, Paul A dan William D. Nordhaus, 2005. *Economics*. International Edition, Eighteenth Edition. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Sicat Gerardo P. dan H. W. Arndt, 1991. *Ilmu Ekonomi Untuk Konteks Indonesia*, Nirwono (Penerjemah). Jakarta: LP3ES.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (Ed.), 1995. *Metode Penelitian Survey*. Edisi Revisi, Cetakan II. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.
- Suardhini, Made dan Miranda S Goeltom, 1997. Analisis Dampak Intervensi Bank Sentral Dalam Penetapan Nilai Tukar Terhadap Ekspor-Impor Indonesia. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. XLV. No. 1. Halaman 79-122.
- Sugiyanto, Catur, 1991. *Time Series Analysis of The Demand for Money in Indonesia from 1960 to 1990*. Directed Research Project. Canada : Department of Economics, University of Alberta (Unpublished).
- Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cetakan I. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukirno, Sadono, 1982. *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*, Cetakan I, Jakarta: LPFE-UI.
- _____, 2000. *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, Cetakan II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Swasono, Sri-Edi, 2005. *Indonesia Dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laissez-Faire* (Orasi Politik Disampaikan Pada Peluncuran Resmi Perkumpulan PraKarsa Jakarta, 7 Februari 2005). Cetakan Revisi. Jakarta: Yayasan Hatta.
- Tambunan Tulus T.H., 2001a. *Perdagangan Internasional: Teori dan Temuan Empiris*. Cetakan I. Jakarta: LP3ES.
- _____, 2001b. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Cetakan II. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____, 2001c. *Transformasi Ekonomi Di Indonesia: Teori dan Penemuan Empiris*, Edisi I. Jakarta: PT. Salemba Emban Patria.
- _____, 2004. *Globalisasi Dan perdagangan Internasional*, Risman F. Sikumbank (Editor), Cetakan I. Bogor: Ghalia Indonesia.
- The ASEAN Secretariat, 2003. *ASEAN Statistical Yearbook*. Jakarta.
- Tiebot, C., 1962. *The Community Economic Base Study*. Committee for Economic Development, Supplementary Paper No. 16 Chapters 5-7.
- Tjiptoherijanto, Prijono, 1997. *Prospek Perekonomian Indonesia Dalam Rangka Globalisasi*, Cetakan I. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tobin, James, 1958. Liquidity Preference as Behavior Toward Risk. *Review of Economic Studies*, Februari. Vol. 25. Pp 65-86
- _____, 1974. Friedman's Theoretical Framework, in Robert J. Gordon (Ed). *Milton Friedman's Monetary Framework : A Debate With His Critic*. Chicago: The University of Chicago Press.
- _____, 1958. Liquidity Preference as Behavior Toward Risk. *Review of Economic Studies*, Februari. Vol. 25. Pp 65-86
- Todaro, Michael P., 1983. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Aminuddin dan Mursid (Alih Bahasa), Jilid 2, Cetakan I. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- _____, 2000. *Pembangunan Ekonomi*. Haris Munandar (Penterjemah). Jilid I, Edisi V, Cetakan I. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- _____ dan Stephen C. Smith, 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jilid I, Edisi VIII. Jakarta: Erlangga.

- United Nations, 2004. *International Trade Statistics Yearbook*, Vol. I Trade by Country, Department of Economic and Social Affairs. New York: Statistics Division.
- Waluyo, Dwi Eko, 2004. *Teori Ekonomi Makro*. Edisi II (Revisi), Cetakan III. Malang: UMM Press.
- Warjiyo, Perry dan Solikin, 2003. Kebijakan Moneter Di Indonesia. *Seri Kebanksentralan*. Desember, No. 06. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK). Jakarta: Bank Indonesia.
- Warjiyo, Perry, 2004. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia. *Seri Kebanksentralan*. Mei, No. 11. Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK). Jakarta: Bank Indonesia.
- Widodo, Hg. Suseno Triyanto, 1990. *Indikator Ekonomi: Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wijaya, M. Faried, 1992. *Kopendium Ekonomika: Ekonomika Pertumbuhan Dan Internasional*. Volume IV, Edisi I, Cetakan I. Yogyakarta: BPFE.
- Yate, Lamayate, 1982. Forty Year of Foreign Trade, dalam Sadono Sukirno. *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*. Cetakan I. Jakarta: LPFE-UI.
- Yustika, Ahmad Erani (Ed.), 2005. *Kontroversi PMA dan ULN Di Indonesia. Perekonomian Indonesia: Deskripsi, Preskripsi dan Kebijakan*, Edisi I, Cetakan I. Malang: Batumedia Publishing.
- Zadjuli, H. Suroso Imam, 1985. *Pola Pembangunan Berimbang Dalam Struktur Ekonomi Daerah Jawa Timur*. Disertasi (Tidak Dipublikasi), Universitas Airlangga, Surabaya.
-
- _____, 2002. *Perspektif Ekonomi Islam*. Disampaikan Dalam Upacara Wisuda Sarjana Dan Diesnatalis XXXV Institut Keislaman Hasyim Asyari (IKAHA) Di Kampus IKAHA Tebuireng Jombang. Surabaya, 10 Maret 2002.
-
- _____, 2004. *Kebijakan Strategis Ekonomi Nasional Dalam Rangka Pemanfaatan Kerjasama Ekonomi ASEAN Untuk Menghadapi Globalisasi*. Disampaikan Dalam Rapat Kerja Terbatas Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Di Hotel Inna Garuda Yogyakarta. Surabaya, 11 Mei 2004.

Zetha, Erna, 2000. Cadangan Devisa: Penggunaan Dan Penambahannya. Dalam Tulus T.H. Tambunan (2001a). *Perdagangan Internasional Dan Neraca Pembayaran: Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: LP3ES.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1- 4

**HASIL ANALISIS STRUKTUR UANG BEREDAR,
STRUKTUR EKSPOR DAN STRUKTUR DEvisa
SERTA PERTUMBUHAN PENYERAPAN TENAGA KERJA
DAN INDIKATORNYA
PADA SEKTOR PERDAGANGAN
DI INDONESIA
DENGAN FORMULA PATH ANALYSIS MODEL (PAM)**

Lampiran 1 Hasil Analisis Deskriptif

Report
Mean

PERIODE	Jumlah Uang Kartal	Jumlah Uang Giral	Jumlah Uang Kuasi
1969 - 1979	667.00	664.36	669.82
1980 - 1989	4392.10	5980.20	14276.00
1990 - 1997	16845.25	27657.13	141497.50
1998 - 2003	70614.67	92966.17	612130.33
Total	17420.23	24176.11	141568.29

Report
Mean

PERIODE	Nilai Ekspor Migas	Nilai Ekspor Nonmigas
1969 - 1979	4.0383273	2.3055636
1980 - 1989	13.4833100	7.1456900
1990 - 1997	10.7356375	28.5565000
1998 - 2003	11.7375667	43.9572000
Total	9.5875771	16.8289514

Report
Mean

PERIODE	Jumlah Valuta Asing Surat Berharga	Jumlah Valuta Asing Kartal/Giral
1969 - 1979	.5456250	2.1075636
1980 - 1989	2.5077900	7.2950000
1990 - 1997	4.8460000	12.2691000
1998 - 2003	22.8416225	12.7702867
Total	5.4375579	7.7402206

Report
Mean

PERIODE	Non Valuta Asing RPF	Non Valuta Asing SDRS	Non Valuta Asing MG
1969 - 1979	.2373750	.0084545	.1781250
1980 - 1989	.2953750	.0000000	3.0446667
1990 - 1997	.2672500	.0000000	1.1027950
1998 - 2003	.1986317	.0000000	2.3545050
Total	.2508765	.0026571	1.7542670

**Report
Mean**

PERIODE	Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja (%)
1969 - 1979	4,2778
1980 - 1989	4,7987
1990 - 1997	5,6766
1998 - 2003	-,2699
Total	3,9576

Descriptives

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	35	116	94542	17420.23	26482.340
X2	35	68	129257	24176.11	35410.810
X3	35	50	731893	141568.29	230266.848
Valid N (listwise)	35				

Descriptives

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y11	35	.52420	20.63320	9.5875771	5.09363697
Y12	35	.47080	47.75740	16.8289514	16.80504831
Valid N (listwise)	35				

Descriptives

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y211	24	.12750	28.01112	5.4375579	8.23595122
Y212	35	1.42400	23.42600	7.7402206	5.47289427
Y221	26	.02600	670.00000	29.2308765	131.74380939
Y222	35	.00000	.03500	.0026571	.00884821
Y223	27	.02100	85827.00000	9020.8492604	26021.54968101
Valid N (listwise)	20				

Lampiran 2 Hasil Analisis Faktor Konfirmatori

Factor Analysis

Communalities		
	Initial	Extraction
X1	1.000	.996
X2	1.000	.994
X3	1.000	.993
Extraction Method: Principal Component Analysis.		

Total Variance Explained						
Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2.983	99.429	99.429	2.983	99.429	99.429
2	.011	.372	99.801			
3	.006	.199	100.000			
Extraction Method: Principal Component Analysis.						

Component Matrix(a)	
	Component
	1
X1	.998
X2	.997
X3	.996
Extraction Method: Principal Component Analysis.	
a 1 components extracted.	

Factor Analysis

Communalities		
	Initial	Extraction
Y11	1.000	.666
Y12	1.000	.666
Extraction Method: Principal Component Analysis.		

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	1.332	66.612	66.612	1.332	66.612	66.612
2	.668	33.388	100.000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix(a)

	Component
	1
Y12	.816
Y11	.816

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a 1 components extracted.

Factor Analysis

Communalities

	Initial	Extraction
Y211	1.000	.279
Y212	1.000	.898
Y221	1.000	.094
Y222	1.000	.248
Y223	1.000	.796

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2.316	46.319	46.319	2.316	46.319	46.319
2	1.085	21.693	68.012			
3	.884	17.677	85.688			
4	.678	13.566	99.254			
5	.037	.746	100.000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix(a)

	Component
	1
Y212	.948
Y223	.892
Y211	.528
Y222	-.498
Y221	-.307
Extraction Method: Principal Component Analysis.	
a 1 components extracted.	

Lampiran 3 Hasil Pengujian Asumsi Linieritas

Curve Fit

MODEL: MOD_1.

Independent Variable: UANG Minimum value: -.65
 The independent variable contains non-positive values. Models LOGARITHMIC and POWER cannot be calculated.

Variable: EKSPOR Minimum value: -1.68640
 This variable contains non-positive values. Log transform cannot be applied. Models COMPOUND, POWER, S, GROWTH, EXPONENTIAL and LGSTIC cannot be calculated.

Variable: DEvisa Minimum value: -1.51329
 This variable contains non-positive values. Log transform cannot be applied. Models COMPOUND, POWER, S, GROWTH, EXPONENTIAL and LGSTIC cannot be calculated.

Variable: TNGKERJA Minimum value: -1.27920
 This variable contains non-positive values. Log transform cannot be applied. Models COMPOUND, POWER, S, GROWTH, EXPONENTIAL and LGSTIC cannot be calculated.

Independent: UANG

	Dependent	Mth	Rsq	d.f.	F	Sigf	Upper bound	b0	b1	b2	b3
12	EKSPOR	LIN	.557	18	22.64	.000					
	EKSPOR	LOG					-.0276	.6478			
	EKSPOR	INV	.454	18	14.94	.001		.9967	.8001		
	EKSPOR	QUA	.595	17	12.51	.000		.6157	1.4842	-.4550	
	EKSPOR	CUB	.702	16	12.54	.000		3.1238	3.4541	-3.7579	.8317
1	EKSPOR	COM									
1	EKSPOR	POW									
1	EKSPOR	S									
1	EKSPOR	GRO									
1	EKSPOR	EXP									
1	EKSPOR	LGS									
12	DEvisa	LIN	.276	18	6.87	.017		.0002	.4310		
	DEvisa	LOG									
	DEvisa	INV	.206	18	4.66	.045		.6518	.5090		
	DEvisa	QUA	.557	17	10.68	.001		1.6463	2.5715	-1.1643	
	DEvisa	CUB	.843	16	28.62	.000		5.5343	5.6251	-6.2844	1.2892
1	DEvisa	COM									
1	DEvisa	POW									
1	DEvisa	S									
1	DEvisa	GRO									
1	DEvisa	EXP									
1	DEvisa	LGS									
12	TNGKERJA	LIN	.886	18	140.56	.000		-.2655	.7555		
	TNGKERJA	LOG									
	TNGKERJA	INV	.774	18	61.65	.000		.9717	.9664		
	TNGKERJA	QUA	.946	17	150.16	.000		.4793	1.7238	-.5267	
	TNGKERJA	CUB	.992	16	690.32	.000		2.0031	2.9207	-2.5335	.5053
1	TNGKERJA	COM									
1	TNGKERJA	POW									
1	TNGKERJA	S									
1	TNGKERJA	GRO									
1	TNGKERJA	EXP									
1	TNGKERJA	LGS									

Notes:

- 1 Dependent variable has non-positive values; no equation estimated.
 12 Independent variable has non-positive values.

Curve Fit

MODEL: MOD_2.

Independent Variable: EKSPOR Minimum value: -1.69
 The independent variable contains non-positive values. Models LOGARITHMIC and POWER cannot be calculated.

Variable: DEVISA Minimum value: -1.51329
 This variable contains non-positive values. Log transform cannot be applied. Models COMPOUND, POWER, S, GROWTH, EXPONENTIAL and LGSTIC cannot be calculated.

Independent: EKSPOR

Dependent	Mth	Rsq	d.f.	F	Sigf	Upper bound	b0	b1	b2	b3
DEVISA	LIN	.642	18	32.28	.000		.0211	.7570		
12 DEVISA	LOG									
DEVISA	INV	.005	18	.10	.760		-.0163	-.0074		
DEVISA	QUA	.646	17	15.54	.000		.0921	.7630	-.0665	
DEVISA	CUB	.696	16	12.19	.000		.0500	.3078	-.0531	.2296
1 DEVISA	COM									
1 DEVISA	POW									
1 DEVISA	S									
1 DEVISA	GRO									
1 DEVISA	EXP									
1 DEVISA	LGS									

Notes:

- 1 Dependent variable has non-positive values; no equation estimated.
 12 Independent variable has non-positive values.

Curve Fit

MODEL: MOD_3.

Independent Variable: DEVISA Minimum value: -1.51
 The independent variable contains non-positive values. Models LOGARITHMIC and POWER cannot be calculated.

Variable: TNGKERJA Minimum value: -1.27920
 This variable contains non-positive values. Log transform cannot be applied. Models COMPOUND, POWER, S, GROWTH, EXPONENTIAL and LGSTIC cannot be calculated.

Independent: DEVISA

Dependent	Mth	Rsq	d.f.	F	Sigf	bound	Upper			
							b0	b1	b2	b3
	TNGKERJA LIN	.559	18	22.79	.000		-.2658	.7314		
12	TNGKERJA LOG									
	TNGKERJA INV	.002	18	.04	.841		-.2530	-.0029		
	TNGKERJA QUA	.560	17	10.83	.001		-.2437	.7525	-.0232	
	TNGKERJA CUB	.571	16	7.09	.003		-.3226	.9707	.1285	-.0760
1	TNGKERJA COM									
1	TNGKERJA POW									
1	TNGKERJA S									
1	TNGKERJA GRO									
1	TNGKERJA EXP									
1	TNGKERJA LGS									

Notes:

- 1 Dependent variable has non-positive values; no equation estimated.
- 12 Independent variable has non-positive values.

Lampiran 4 Hasil Analisis Jalur

Regression

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Jumlah Uang Beredar(a)	.	Enter
a All requested variables entered.			
b Dependent Variable: Nilai Ekspor			

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.725(a)	.525	.511	.69959008
a Predictors: (Constant), Jumlah Uang Beredar				

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17.849	1	17.849	36.469	.000(a)
	Residual	16.151	33	.489		
	Total	34.000	34			
a Predictors: (Constant), Jumlah Uang Beredar						
b Dependent Variable: Nilai Ekspor						

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4.376E-17	.118		.000	1.000
	Uang Beredar	.725	.120	.725	6.039	.000
a Dependent Variable: Nilai Ekspor						

Regression

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Nilai Ekspor, Jumlah Uang Beredar(a)	.	Enter
a All requested variables entered.			
b Dependent Variable: Jumlah Devisa			

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.809(a)	.654	.613	.62197683

a Predictors: (Constant), Nilai Ekspor, Jumlah Uang Beredar

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12.423	2	6.212	16.057	.000(a)
	Residual	6.577	17	.387		
	Total	19.000	19			

a Predictors: (Constant), Nilai Ekspor, Jumlah Uang Beredar

b Dependent Variable: Jumlah Devisa

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.024	.139		.174	.864
	Jumah Uang Beredar	-.134	.176	-.164	-.763	.456
	Nilai Ekspor	.872	.203	.923	4.306	.000

a Dependent Variable: Jumlah Devisa

Regression

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Jumlah Devisa, Jumlah Uang Beredar(a)		Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.719(a)	.517	.457	.63386219

a Predictors: (Constant), Jumlah Devisa, Jumlah Uang Beredar

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6,883	2	3,441	8,565	,003(a)
	Residual	6,429	16	,402		
	Total	13,311	18			

a Predictors: (Constant), Jumlah Devisa, Jumlah Uang Beredar
b Dependent Variable: Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,176	,146		-1,206	,245
	Jumlah Uang Beredar	-,575	,141	-,831	-4,089	,001
	Jumlah Devisa	,286	,182	,319	1,571	,136

a Dependent Variable: Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja

Regression

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Nilai Ekspor, Jumlah Uang Beredar, Jumlah Devisa(a)		Enter

a All requested variables entered.
b Dependent Variable: Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,719(a)	,517	,421	,65436558

a Predictors: (Constant), Nilai Ekspor, Jumlah Uang Beredar, Jumlah Devisa

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6,888	3	2,296	5,362	,010(a)
	Residual	6,423	15	,428		
	Total	13,311	18			

a Predictors: (Constant), Nilai Ekspor, Jumlah Uang Beredar, Jumlah Devisa
b Dependent Variable: Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,176	,151		-1,168	,261
	Jumlah Uang Beredar	-,560	,193	-,810	-2,900	,011
	Jumlah Devisa	,306	,256	,341	1,196	,250
	Nilai Ekspor	-,036	,319	-,043	-,114	,911

a Dependent Variable: Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja

